SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

RANCANGAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022

BISMMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2027, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2027 selama lima Tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur bahwa Perencanaan Pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota disusun secara konprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperharikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kail, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

Mengingat .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan .....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);

11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkan Kabupaten.

3. Bupati/Wakil .....

3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Kepala Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Nagan Raya yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagan Raya.

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.

8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan.

10. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJMK Nagan Raya adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) Tahun kedepan terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 yang selanjunya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) Tahun.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Nagan Raya adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

15. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nagan Raya.

BAB II .....

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 2

(1) RPJMK Nagan Raya merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2017.

(2) RPJMK Nagan Raya merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan program pembangunan yang meliputi strategi, arah kebijakan pembangunan serta kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) Tahun kedepan.

Pasal 3

(1) RPJMK Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Nagan Raya;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Kabupaten Nagan Raya;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu Strategis;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
BAB IX	:	Penutup.

(2) Perincian RPJMK Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

RPJMK Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi Pedoman bagi:

a. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam menyusun Renstra-SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022;
b. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten setiap Tahunnya; dan
c. Pemerintah Gampong dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong/Desa.

Pasal 5

RPJMK Nagan Raya dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya.

BAB III .....

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMK NAGAN RAYA

Pasal 6

(1) Bupati/Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya lingkup kabupaten dan gampong di wilayah Kabupaten Nagan Raya;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya; dan
b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB IV
PERUBAHAN RPJMK NAGAN RAYA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMK Nagan Raya dapat dilakukan apabila :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektifitas, Perubahan RPJMK Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Kabupaten Nagan Raya kurang dari 3 (tiga) Tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran wilayah atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMK Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya.

(5) Perubahan RPJMK Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan Perubahan Renstra SKPK.

(6) Dalam hal terjadi perubahan RPJMK Nagan Raya yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMK Nagan Raya, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMK Nagan Raya tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V .....

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Kabupaten Nagan Raya ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Pada saat Qanun Kabupaten Nagan Raya ini mulai berlaku, maka RPJMK Nagan Raya menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Nagan Raya sampai Tahun 2022 dan dapat dijadikan RPJMK Nagan Raya Transisi untuk dipedomani dalam Penyusunan RKPK Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJMK Nagan Raya Tahun 2023-2028.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 September 2018 M
8 Muharram 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 20 September 2018 M
10 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd

T. R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 1

NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 1/79/2018

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN I-1
I.1 Latar Belakang I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
I.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
I.4 Maksud dan Tujuan I-6
I.5 Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
II.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 11
II.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II -21
II.4 Aspek Daya Saing Daerah II-100

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ..... III- 1
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III- 1
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-36
III.3 Kerangka Pendanaan III-50

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ..... IV- 1
IV.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya ..... IV -1
IV.2 Isu-isu Strategis ..... IV -5

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..... V- 1
V.1 Visi dan Misi ..... V- 1
V.2 Tujuan dan Sasaran ..... V- 5

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... VI- 1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN VIII-1

BAB IX PENUTUP ..... IX - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-6

Gambar 2.1 : Peta Adminstratif Kabupaten Nagan Raya II-1

Gambar 2.2 : Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya II-9

Gambar 2.3 : Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya II-11

Gambar 2.4 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah) 2012 2016 ..... II-12

Gambar 2.5 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah), 2012- 2016 ..... II-12

Gambar 2.6 : Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen), 2016 ..... II-14

Gambar 2.7 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen), 2012-2016 ..... II-15

Gambar 2.8 : PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), 2012-2016 ..... II-16

Gambar 2.9 : Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2011-2016 ..... II-17

Gambar 2.10 : Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (persen) II-18

Gambar 2.11 : Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dan Nasional, Tahun 2012-2016 (Tahun) II-19

Gambar 2.12 : Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (%) II-27

Gambar 2.13 : Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (orang) II-29

Gambar 2.14 : Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-29

Gambar 2.15 : Perkembangan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (orang) II-30

Gambar 2.16 : Perkembangan Rasio Guru-Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-31

Gambar 2.17 : Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (persen) II-55

Gambar 2.18 : Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-56

Gambar 2.19 : Grafik Indeks Pembangunan Gender Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2015 ..... II-57

Gambar 2.20 : Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016 ..... II-60

Gambar 2.21 : Perkembangan Populasi Ternak Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Ekor) II-80

Gambar 2.22 : Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 ..... II-81

Gambar 2.23 : Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 ..... II-82

Gambar 2.24 : Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 ..... II-83

Gambar 2.25 : Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 ..... II-84

Gambar 2.26 : Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2012-2016 ..... II-86

Gambar 2.27 : Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan (persen), 2012-2016 ..... II-87

Gambar 2.28 : Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016 ..... II-90

Gambar 2.29 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016 ..... II-93

Gambar 2.30 : Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2009-2014 (ton) II-94

Gambar 2.31 : Komposisi Konsumsi Makanan, Non Makanan dan Pengeluaran Per kapita per bulan Tahun 2012-2016..... II-101

Gambar 2.32 : Bongkar dan Muat barang di Bandara Cut Nyak Dhien, 2012-2016..... II-102

Gambar 2.33 : Jumlah Penumpang Melalui Bandara, Tahun 2012-2016 ..... II-103

Gambar 3.1 : Realisasi APBK Berdasarkan Komponen Tahun 2012-2016 ..... III-9

Gambar 3.2 : Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-10

Gambar 3.3 : Grafik Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2106 ..... III-12

Gambar 3.4 : Pertumbuhan Realisasi PAD Tahun 2012-2016 ..... III-14

Gambar 3.5 : Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2016 ..... III-17

Gambar 3.6 : Grafik Pertumbuhan Aset Tahun 2012-2016 ..... III-32

Gambar 3.7 : Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Periode Tahun 2012-2016..... III-41

Gambar 3.8 : Grafik Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 ..... III-58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya II-4

Tabel 2.2 : Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya II-4

Tabel 2.3 : Kondisi suhu udara, curah hujan dan kelembaban Tahun 2016 ..... II-5

Tabel 2.4 : Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya II-6

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016 ..... II-7

Tabel 2.6 : Perkembangan Penduduk Kab. Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-7

Tabel 2.7 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagan Raya PerKecamatan Tahun 2015-2016 ..... II-7

Tabel 2.8 : Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya II-8

Tabel 2.9 : Jumlah penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2012 - 2016 ..... II-21

Tabel 2.10: Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Dari Tahun 2012-2016 ..... II-22

Tabel 2.11: Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-23

Tabel 2.12: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016 ..... II-25

Tabel 2.13: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016 ..... II-26

Tabel 2.14: Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (unit) II-28

Tabel 2.15: Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-32

Tabel 2.16: Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 – 2016..... II-32

Tabel 2.17: Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tahun 2012 – 2016 ..... II-33

Tabel 2.18: Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 – 2016 ..... II-33

Tabel 2.19: Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2012 - 2016..... II-34

Tabel 2.20: Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2012 – 2016 ..... II-35

Tabel 2.21: Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2012 – 2016..... II-36

Tabel 2.22: Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2012 – 2016..... II-38

Tabel 2.23: Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya..... II-39

Tabel 2.24: Cakupan Pertolongan Persalinan..... II-40

Tabel 2.25: Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)..... II-41

Tabel 2.26: Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016..... II-41

Tabel 2.27: Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak Tahun 2012 – 2016..... II-42

Tabel 2.28: Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Tahun 2012 – 2016..... II-42

Tabel 2.29: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+) Tahun 2012 – 2016 ..... II-43

Tabel 2.30: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Tahun 2012 – 2016 ..... II-43

Tabel 2.31: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2012 – 2016 ..... II-44

Tabel 2.32: Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2012 – 2016 ..... II-45

Tabel 2.33 : Penderita Tuberkulosis Paru BTA Tahun 2012 – 2016 ..... II-45

Tabel 2.34 : Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2012 – 2016 ..... II-46

Tabel 2.35 : Angka Kejadian Malaria Tahun 2012 – 2016 ..... II-46

Tabel 2.36 : Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012 – 2016 ..... II-47

Tabel 2.37 : Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2012-2016 (Km) II-47

Tabel 2.38 : Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016 (m) II-48

Tabel 2.39 : Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Tahun 2016 ..... II-49

Tabel 2.40 : Rasio Jaringan Irigasi II-51

Tabel 2.41 : Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk II-51

Tabel 2.42 : Rasio Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016 di Kabupaten Nagan Raya II-52

Tabel 2.43 : Rasio Rumah Layak Huni..... II-52

Tabel 2.44 : Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2014 ..... II-53

Tabel 2.45 : Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2016..... II-54

Tabel 2.46 : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-54

Tabel 2.47 : Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2015- 2016..... II-58

Tabel 2.48 : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK Tahun 2012- 2016 ..... II-58

Tabel 2.49 : Rasio KDRT Tahun 2012- 2016..... II-59

Tabel 2.50 : Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2016 ..... II-61

Tabel 2.51 : Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-61

Tabel 2.52: Timbulan Sampah yang Ditangani 2016 ..... II-62

Tabel 2.53: Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas dan Pernah Kawin Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan, 2012-2016 (persen) II-63

Tabel 2.54: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-64

Tabel 2.55: Jumlah Penumpang dating dan berangkat tahun 2012-2015 ..... II-64

Tabel 2.56: Jumlah Pemasangan Baru Sambungan Telepon, Tahun 2012-2015 ..... II-65

Tabel 2.57: Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2016 (Unit) II-66

Tabel 2.58: Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-67

Tabel 2.59: Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016..... II-68

Tabel 2.60: Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016 ..... II-69

Tabel 2.61: Pertumbuhan Nilai Investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2013-2016 ..... II-69

Tabel 2.62: Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2013-2016 ..... II-70

Tabel 2.63: Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah) Kabupaten Nagan Raya 2013-2016 ..... II-71

Tabel 2.64: Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-71

Tabel 2.65: Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-72

Tabel 2.66: Jumlah Pustaka Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Unit) II-73

Tabel 2.67: Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2016 ..... II-74

Tabel 2.68 : Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-76

Tabel 2.69 : Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen) II-76

Tabel 2.70 : Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-77

Tabel 2.71 : Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-78

Tabel 2.72 : Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-79

Tabel 2.73 : Populasi Ternak Kecil dan Besar Menurut Kecamatan, Tahun 2016 ..... II-80

Tabel 2.74 : Jumlah Pustaka Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Unit) II-82

Tabel 2.75 : Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten nagan Raya, Tahun 2012-2016 ..... II-85

Tabel 2.76 : Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-87

Tabel 2.77 : Jumlah Transmigrasi Lokal Tahun 2012-2016 ..... II-89

Tabel 2.78 : Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Tansmigrasi Swakarsa Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2016 ..... II-89

Tabel 2.79 : Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-91

Tabel 2.80 : Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-91

Tabel 2.81 : Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-92

Tabel 2.82 : Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-95

Tabel 2.83 : Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2016 ..... II-96

Tabel 2.84: Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-96

Tabel 2.85: Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-97

Tabel 2.86: Data Tindak Pidana Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016..... II-103

Tabel 2.87: Rincian Data Tindak Pidana Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-104

Tabel 2.88: Jumlah Demonstrasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... II-109

Tabel 2.89: Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya II-110

Tabel 2.90: Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (%) II-113

Tabel 3.1 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah KabupatenNagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-5

Tabel 3.2 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016 ..... III-9

Tabel 3.3 : Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-11

Tabel 3.4 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012-2016 ..... III-12

Tabel 3.5 : Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah III-13

Tabel 3.6 : Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012-2016 ..... III-14

Tabel 3.7 : Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016 ..... III-15

Tabel 3.8 : Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan Tahun 2012-2016 ..... III-15

Tabel 3.9 : Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2012-2016 ..... III-16

Tabel 3.10: Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2016 ..... III-17

Tabel 3.11: Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2012-2016 ..... III-18

Tabel 3.12: Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2012-2016 ..... III-18

Tabel 3.13: Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012-2016 ..... III-19

Tabel 3.14: Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-19

Tabel 3.15: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016..... III-20

Tabel 3.16: Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-21

Tabel 3.17: Anggaran dan Realisasi Total Belanja Langsung Tahun 2012-2016 ..... III-23

Tabel 3.18: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-25

Tabel 3.19: Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-25

Tabel 3.20: Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-26

Tabel 3.21: Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-28

Tabel 3.22: Pertumbuhan Aset Tahun 2012-2016 ..... III-32

Tabel 3.23: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-34

Tabel 3.24: Analisis Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2012-2016..... III-39

Tabel 3.25: Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012-2016 ..... III-40

Tabel 3.26: Analisis Realisasi Proporsi Dana Pendidikan Tahun 2012-2016 ..... III-41

Tabel 3.27 : Analisis Realisasi Proporsi Dana Kesehatan Tahun 2012-2016 ..... III-42

Tabel 3.28 : Proporsi Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2012-2016 ..... III-42

Tabel 3.29 : Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-44

Tabel 3.30 : Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 ..... III-48

Tabel 3.31 : Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 ..... III-53

Tabel 3.32 : Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 ..... III-56

Tabel 3.33 : Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022..... III-60

Tabel 5.1 : Perumusan Penjelasan Visi V-2

Tabel 5.2 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ..... V-6

Tabel 6.1 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 ..... VI-2

Tabel 6.2 : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2018-2022 ..... VI-7

Tabel 7.1 : Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 ..... VII-2

Tabel 7.2 : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2018-2022 ..... VII-3

Tabel 8.1 : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ..... VIII-2

Tabel 8.2 : Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan VIII-5

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada jangka waktu tertentu yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya periode 2017 – 2022 dilantik pada tanggal 9 Oktober 2017 oleh Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11 – 3263 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.11 - 3264 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh. Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan berupa penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spasial dan ruang yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan dan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

RPJMD disusun melalui empat pendekatan utama yaitu, Pertama Pendekatan *Teknokratik, yaitu* dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik, Kedua pendekatan *partispatif* yaitu dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders), Ketiga* Pendekatan *Politis*, yaitu pendekatan melalui proses legislasi penetapan RPJMD dalam bentuk qanun dan Keempat pendekatan *bottom up top down* yaitu melalui proses perencanaan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 merupakan tahap ke-3 pelaksanaan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan penekanan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam. maka peran dan fungsi RPJM Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022 sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat pada umumnya karena memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program prioritas pembangunan yang terintegrasi dengan baik disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu proses penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, akurat, terpadu dan transparan dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan pembangunan sesuai kewenangannya untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Pelaksanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2022 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Nagan Raya yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan RKPK merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagan Raya yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan desa.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dalam Renja OPD harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMK. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan OPD juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMK.

RPJM Kabupaten Nagan Raya telah terintegrasi dengan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dijadikan dasar kebijakan , rencana dan program untuk merumuskan isu-isu strategis serta dalam penetapan program-program didalam RPJMD yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dokomen Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Nagan Raya periode 2015-2035 juga merupakan acuan dalam menyusun RPJMK.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional ,Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Lngsung dengan Pemerintahan Aceh;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 9: Tambahan Lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 12);

20. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 -2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1;
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 121);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Nagan Raya Tahun 200 9 Nomor 4);
26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;
27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 28).
28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 31).
29. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Aceh. Penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2022 berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 serta memperhatikan RPJM Aceh 2017-2022. Penyelarasan antar dokumen dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta sinergi antar waktu, antar ruang dan antar fungsi

pemerintahan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.

Alur hubungan RPJMK dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

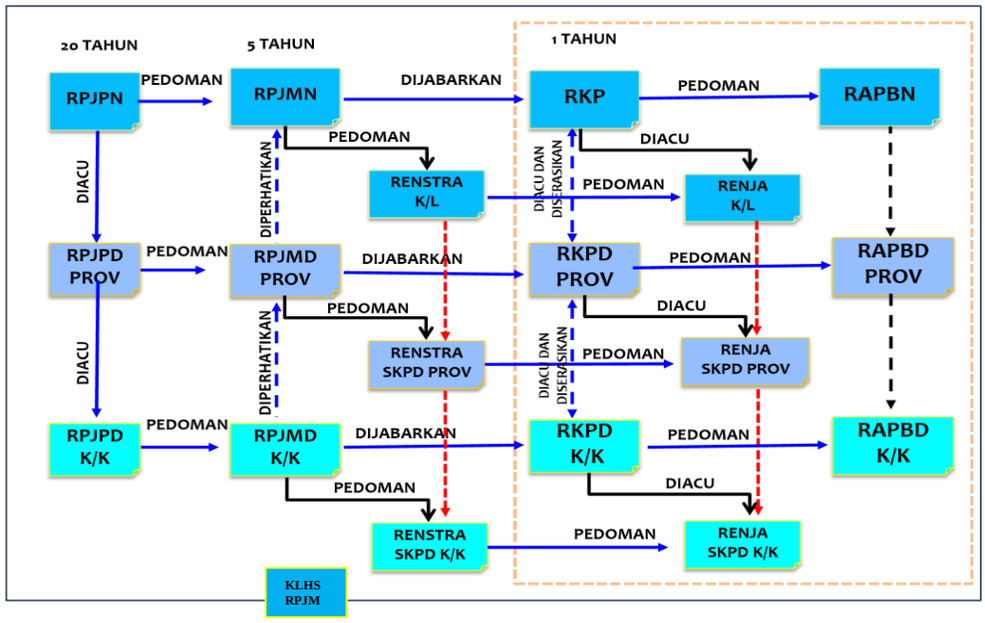

I.4 Maksud dan Tujuan

I.4.1 Maksud

Penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2022 bermaksud untuk menyediakan pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan masyarakat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan visi, misi dan program prioritas dari pasangan kepala daerah terpilih periode 2017-2022, sehingga seluruh upaya pembangunan dilakukan secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lain.

I.4.2 Tujuan

RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2022 ke dalam tujuan dan sasaraan pembangunan daerah disertai dengan program prioritas untuk masing- masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menetapkan indikator kineja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagai dasar penilaian Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017- 2022.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK), serta penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1. Aspek Geografi dan Demografi

II.1.1 Karakteristik Lokasi dan wilayah

II.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Nagan Raya yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sebesar 3.544,91 Km^2 (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ach Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 2.1.Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya

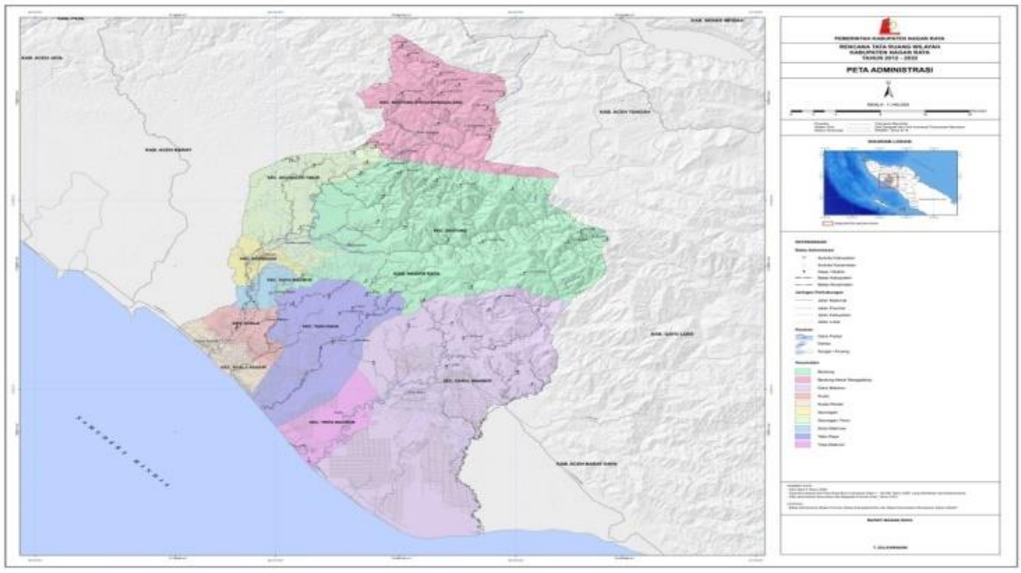

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035

Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 Kecamatan, 222 Desa/Gampong dan 30 Kemukiman meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur.

II.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43' 50" – 04° 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96° 11' 23" – 96° 47' 58" Bujur Timur (BT). Berdasarkan letak geografis dan potensinya, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang strategis dengan mencermati hal-hal sebagai berikut :

a) Wilayah Kabupaten Nagan Raya berada di pantai Barat yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar Provinsi.
b) Wilayah Kabupaten Nagan Raya dilalui juga oleh jalan arteri primer sebagai penghubung antara pantai Barat dengan pantai Timur Provinsi Aceh melalui lintas Tengah Aceh.
c) Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya Electric Power (NREP) di Kecamatan Kuala Pesisir yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera.

II.1.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0 – 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2) Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ±1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3) Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ±10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
4) Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5) Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas ± 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
6) Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas ± 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

II.1.1.4 Geologi

Jenis Tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tanah Alluvial, Podsolik coklat, Grumosol, Regosol, Podsolik merah kuning, Andosol, Litosol, Mediteran, Organosol, dan Podsolik. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, dan tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.

II.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Nagan Raya masuk ke dalam lintasan Wilayah Sungai (WS) Woyla – Batee yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Seunagan, Trang, Tripa dan Seumayam. Selain itu terdapat dua DAS yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu DAS Tadu dan Seuneuam.

Kabupaten Nagan Raya dialiri beberapa sungai yang tergolong besar seperti Krueng Beutong, Krueng Seunagan, Krueng Trang, Krueng Tripa, Krueng Tadu, dan Krueng Seumayam. Sebagai daerah hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan terutama di daerah hilir. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karakteristik wilayah di mana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya di daerah hulu (daerah atas) akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (bawah).

Danau yang tersebar didalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 210,01 Ha terdiri dari danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha. Sebaran luas dan lokasi danau, sebagai berikut:

- Kecamatan Seunagan Timur seluas 57,91 ha terdiri dari danau seluas 13,15 Ha dan sempadan danau seluas 44,76 ha;
- Kecamatan Beutong seluas 47,90 ha terdiri dari danau seluas 22,99 ha dan sempadan danau seluas 24,91 ha;
- Kecamatan Tadu Raya seluas 357,09 ha terdiri dari danau seluas 68,44 ha dan sempadan danau seluas 288,65 ha; dan
- Kecamatan Tripa Makmur seluas 35,46 ha terdiri dari danau seluas 10,98 ha dan sempadan danau seluas 24,48 ha.

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan air tanah di Kabupaten Nagan Raya seluas 205.343,46 ha. Rincian CAT terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya

NO	CAT		KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (ha)
1	Meulaboh		Nagan Raya	Darul Makmur	73.547,25
				Kuala	12.089,35
				Kuala Pesisir	6.109,97
				Tadu Raya	34.420,65
				Beutong	24.041,59
				Seunagan	5.673,31
				Suka Makmue	5.156,31
				Seunagan Timur	23.281,39
				Tripa Makmur	18.486,39
2	Telege		Nagan Raya	Beutong Ateuh Banggalang	2.537,25

Potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Titik Lokasi Sumber Air Baku					
		Sungai	Rawa	Danau	Air Terjun	Mata Air	Embung
1	Darul Makmur	10	-	-	1	2	-
2	Kuala	2	-	-	-	1	-
3	Kuala Pesisir	4	2	-	-	-	1
4	Tadu Raya	8	-	1	-	-	-
5	Beutong	9	-	-	1	-	-
6	Seunagan	3	-	-	-	1	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2	-	-	-	2	-
9	Tripa Makmur	4	-	-	-	-	-
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	-	-	1	1	-

Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016

II.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,0° C sampai 28,0° C. Suhu terendah terjadi di Bulan Oktober dan Desember yaitu 26,0° C dan suhu tertinggi terjadi di Bulan Maret yaitu 28,0° C. Kelembaban udara berkisar antara 85 – 92 %. Curah hujan yang terjadi selama Tahun 2016 sebesar 4.440 mm dengan rata-rata hujan sebesar 370 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 653 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 105 mm. Kondisi suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kondisi suhu udara, curah hujan dan kelembaban Tahun 2016

Penggunaan	Suhu Udara (°C)	Curah Hujan (mm^3)	Kelembaban (%)
Januari	27,5	495	90
Februari	27,1	261	91
Maret	28	271	88
April	27,8	354	87
Mei	27,2	653	89
Juni	26,9	303	85
Juli	26,5	105	85
Agustus	26,3	566	86
September	26,4	170	85
Oktober	26	477	89
November	26,1	523	91
Desember	26	262	92
Rata-rata	26,82	370,00	88,17

Sumber : BMKG Cut Nyak Dhien Tahun 2016

II.1.1.7. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah diklasifikasikan peruntukkannya sesuai perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung dan kawasan lindung gambut seluas 129.103,91 Ha, sedangkan selebihnya dari total luas daerah tersebut merupakan kawasan budidaya.

Secara umum pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya digunakan untuk keperluan areal permukiman, perkebunan, persawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan lindung yaitu mencapai luas 129.103,91 Ha atau 36,41 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 54.662,31 Ha atau 15,42 persen. Sedangkan seluas 170.723,78 Ha atau 48,16 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan kebutuhan penggunaaan lahan oleh masyarakat setempat. Berikut di bawah ini gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya yang ditampilkan dalam bentuk Peta Penggunalan Lahan Kabupaten Nagan Raya.

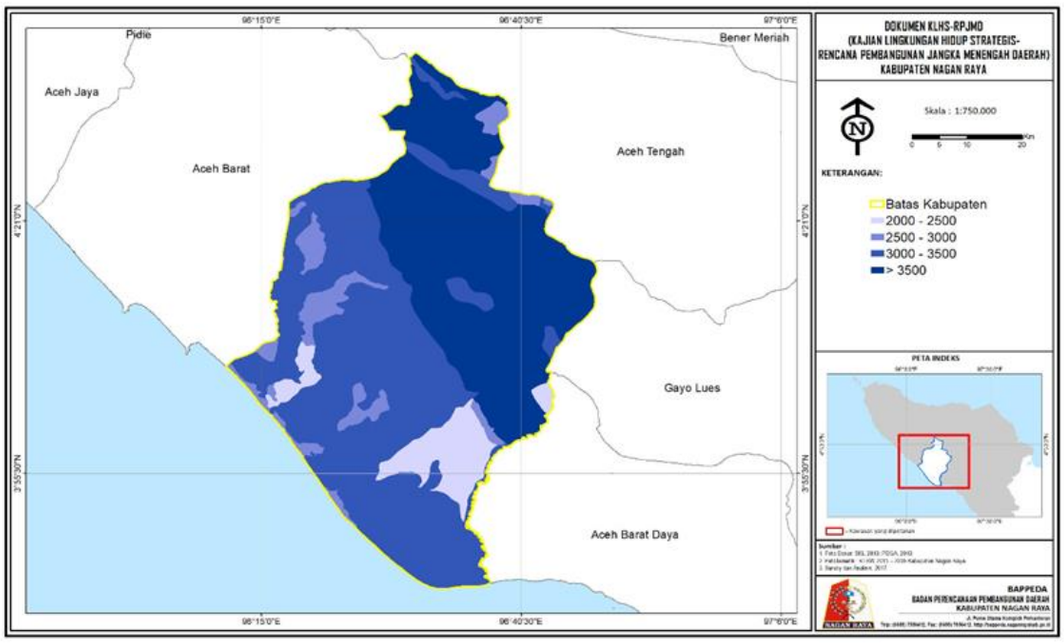

Berdasarkan sebarannya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Kabupaten Nagan Raya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di

dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2015, terdiri dari bandara seluas 103,25 Ha (0,03%), danau seluas 115,56 Ha (0,03%), hutan seluas 168.541,49 Ha (47,54%), industri seluas 82,35 Ha (0,02%), perkebunan seluas 43.859,81 Ha (12,37%), perkebunan masyarakat seluas 1.308,45 Ha (0,37%), permukiman seluas 6.894,40 Ha (1,94 %), pertanian lahan kering seluas 104.083,66 Ha (29,36%), rawa-rawa seluas 13.176,77 Ha (3,72%), sawah seluas 8.869,84 Ha (2,50%), sungai seluas 2.640,06 Ha (0,74%) dan tanah terbuka seluas 4.815,49 Ha (1,36%) sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

No	Tata Guna Lahan Nagan Raya	Kecamatan										Total Lahan	
		Kuala	Kuala Pesisir	Suka Makmue	Seunagan	Seunagan Timur	Beutong	Beutong Ateuh Benggalang	Tadu Raya	Tripa Makmur	Darul Makmur	Ha	%
1	Bandara	-	103,25	-	-	-	-	-	-	-	-	103,25	0.03
2	Danau	-	-	-	-	13,15	22,99	-	68,44	10,98	-	115,56	0.03
3	Hutan	50,14	208,45	-	-	14.121,64	84.506,04	36.353,04	1.084,54	550,19	31.667,45	168.541,49	47.54
4	Industri	-	82,35	-	-	-	-	-	-	-	-	82,35	0.02
5	Perkebunan	1.829,22	1.889,87	10,18	36,44	59,43	19,32	-	8.802,56	3.874,60	27.338,19	43.859,81	12.37
6	Perkebunan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1.308,45	-	-	-	1.308,45	0.37
7	Permukiman	860,08	750,53	381,45	499,23	450,01	525,93	164,01	1.007,16	228,17	2.027,83	6.894,40	1.94
8	Pertanian Lahan Kering	4.506,22	3.533,35	3.294,21	4.012,22	8.714,27	14.797,06	2.571,45	25.155,85	7.633,67	29.865,36	104.083,66	29.36
9	Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.176,77	13.176,77	3.72
10	Sawah	1.229,57	174,33	1.241,83	1.016,58	1.480,96	1.401,38	194,99	839,96	321,26	968,98	8.869,84	2.50
11	Sungai	121,95	223,47	80,67	107,05	186,55	458,72	-	226,40	495,00	740,25	2.640,06	0.74
12	Tanah Terbuka	208,57	668,69	147,97	1,77	135,02	-	-	818,10	922,80	1.912,57	4.815,49	1.36
Total		8.805,75	7.634,29	5.156,31	5.673,29	25.161,03	101.731,44	40.591,94	38.003,01	14.036,67	107.697,40	354.491,13	100

II.1.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2016 sebanyak 158.223 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 79.788 jiwa laki-laki (50,43%) dan 78.435 jiwa perempuan (49,57%). Sementara itu angka sex rasio sebesar 102%, ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 98 penduduk perempuan.

Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 44.237 Jiwa atau 28% dari total penduduk Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh

Banggalang yaitu sebesar 1.916 Jiwa atau 1,2% dari total penduduk Kabupaten Nagan Raya. Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,05%.

Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2016 mencapai 45 Jiwa/Km^2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 289 Jiwa/Km^2. Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

	Kecamatan *Subdistrict*	Jenis Kelamin *Sex*			Rasio Jenis Kelamin *Sex Ratio*
		Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Darul Makmur	22 593	21 568	44 161	105
2	Tripa Makmur	4 437	4 465	8 902	99
3	Kuala	10 614	10 356	20 970	102
4	Kuala Pesisir	8 084	7 874	15 958	103
5	Tadu Raya	6 525	6 144	12 669	106
6	Beutong	7 108	7 102	14 210	100
7	Beutong Ateuh Banggalang	973	926	1 899	105
8	Seunagan	8 146	8 335	16 481	98
9	Suka Makmue	4 556	4 552	9 108	100
10	Seunagan Timur	6 752	7 113	13 865	95
	Nagan Raya	**79 788**	**78 435**	**158 223**	**102**

Sumber: Database Pembangunan Kab. Nagan Raya,2016

Tabel 2.6
Perkembangan Penduduk Kab. Nagan Raya Tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk (jiwa)	152.130	158.956	162.448	155.070	158.223
LPP (%)	6,49	4	2,2	-4,54	2,05

Sumber: BPS Kab.Nagan Raya Tahun 2016

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
PerKecamatan Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan
		Tahun 2015	Tahun 2016	%
1	Darul Makmur	43.311	44.237	2,14
2	Tripa Makmur	8.763	8.955	2,19
3	Kuala	20.593	21.004	4,69
4	Kuala Pesisir	15.670	15.985	1,53
5	Tadu Raya	12.430	12.670	1,53
6	Beutong	13.916	14.203	2,31
7	Beutong Ateuh Banggalang	1.863	1.916	0,38
8	Seunagan	16.089	16.387	1,85
9	Suka Makmue	8.914	9.089	1,09
10	Seunagan Timur	13.521	13.777	2,87
Jumlah		**155.070**	**158.223**	**2,05**

Sumber:BPS Kabupaten Nagan Raya

II.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya ditetapkan berdasarkan nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi sebagai meliputi:

Tabel 2.8

Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya

Sumber : RTRW Kab. Nagan Raya Tahun 2015-2035

NO	SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN STRATEGIS	KECAMATAN	GAMPONG
1	Ekonomi	Kawasan Agropolitan	Kuala	Cot Kumbang
			Kuala Pesisir	Kuala Trang
			Suka Makmue	Cot Peuradi
			Tadu Raya	Sarah Mantok
			Tripa Makmur	Mon Dua
			Darul Makmur	Simpang Deli Kilang
2	Ekonomi	Kawasan Minapolitan	Kuala Pesisir	Padang Rubek
			Beutong	Blang Leumak
				Pante Ara
			Tadu raya	Sarah Mantok
			Tripa Makmur	Mon Dua
3	Ekonomi	Kawasan Cepat Tumbuh	Kuala Pesisir	
4	Ekonomi	Kawasan Koridor Perdagangan dan Jasa	Kuala	Ujung Fatihah
				Blang Teungoh
				Simpang Peut
5	Ekonomi	Kawasan Percepatan Daerah Tertinggal	Beutong Ateuh Banggalang	4 (Empat) Gampong
6	Ekonomi	Kawasan Pariwisata		
		Kawasan Danau Laut Tadu	Tadu Raya	6 (Enam) Gampong
		Kawasan Krueng Isep	Beutong	Pante Ara
		Kawasan Bantaran Irigasi Jeuram	Beutong	Keude Seumot
		Kawasan Air Terjun Krueng Itam	Tadu Raya	Krueng Itam
7	Sumber Daya Alam/ Teknologi Tinggi	Kawasan PLTU	Kuala Pesisir	Suak Puntong
		Kawasan Industri Skala Besar	Kuala Pesisir	
		Kawasan Industri Skala Menengah	Tadu Raya	Cot Rambong
				Kuala Tadu
8	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Kuala Pesisir	10 (sepuluh) Gampong
			Tadu Raya	3 (tiga) gampong
			Tripa Makmur	5 (lima) gampong

Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Nagan Raya memiliki satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan satu Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan beberapa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta beberapa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan dan PPL kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan dalam skala lingkungan.

Gambar 2.2
Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya

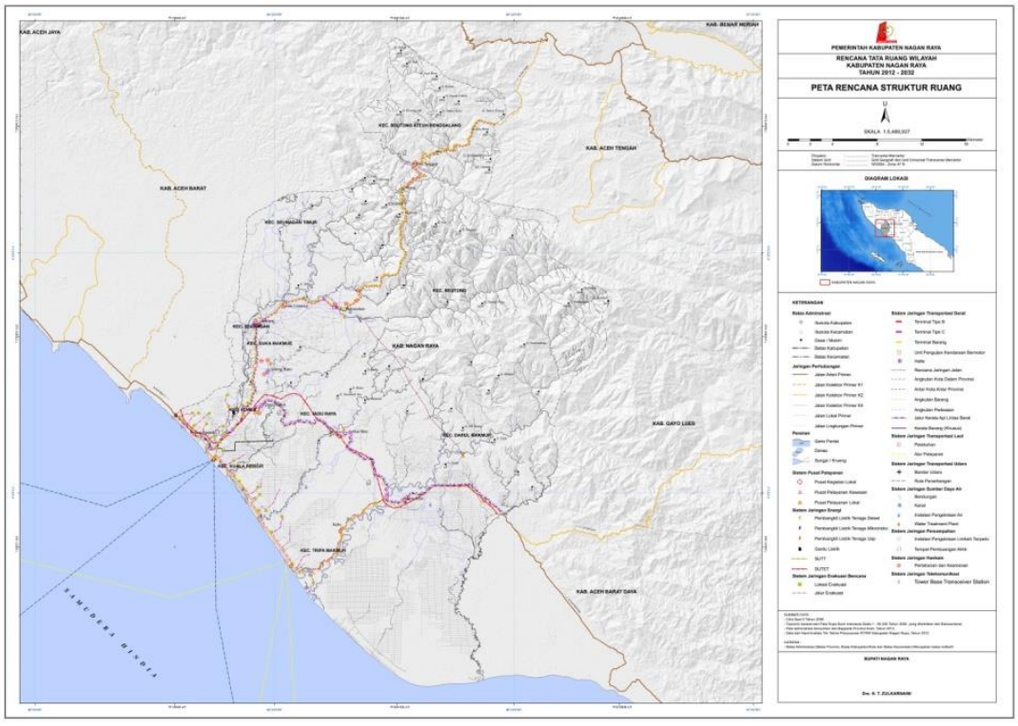

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 – 2035

II.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Pada umumnya kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis sangat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana di suatu daerah. Bencana alam yang terjadi meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak) serta

kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia, konflik dengan alam).

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu :

1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur;
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur;
4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kacamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala.
5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya.
6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah

manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup.

Gambar 2.3
Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya

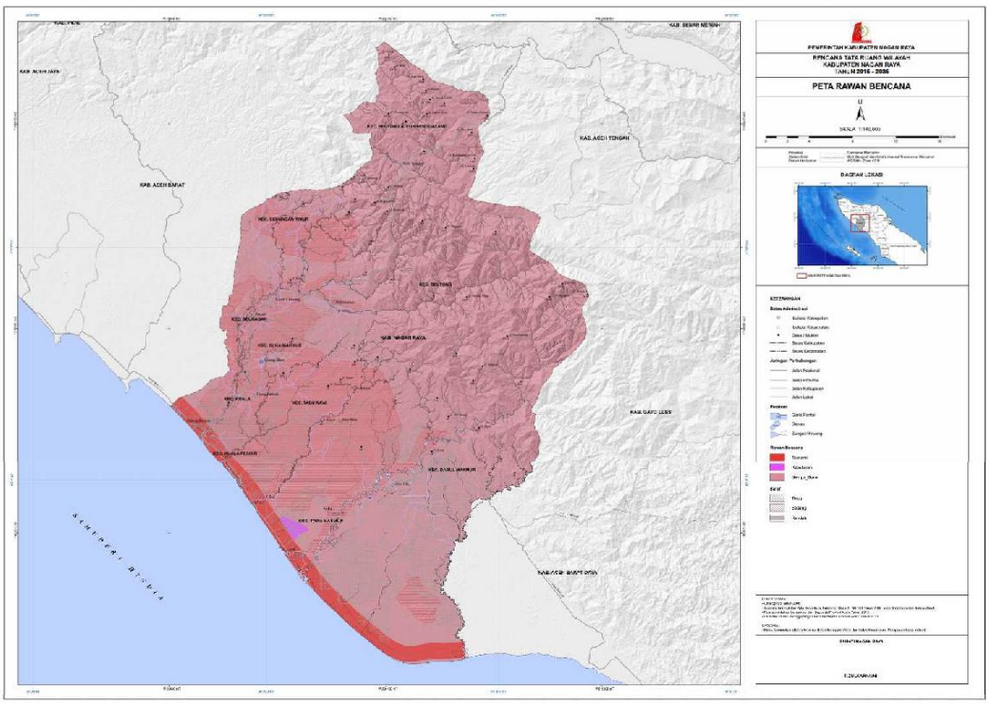

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 - 2035

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

II.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB dapat menunjukkan peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya.

Dilihat dari PDRB Kabupaten Nagan Raya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terjadi peningkatan nilai PDRB tahun 2012-2016. Ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Nagan Raya meningkat pada 2012 sampai 2016. Pada tahun 2012, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Nagan Raya sebanyak 4,96 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi RP 6,18 triliun tahun 2016. Rata-rata kenaikan tiap tahun sebanyak 0,244 triliun rupiah dalam lima tahun terakhir. Tahun 2016 nilai PDRB mengalami peningkatan sebanyak 0,4 triliun rupiah. Kenaikan ini merupakan kenaikan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Gambar 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah) 2012 2016

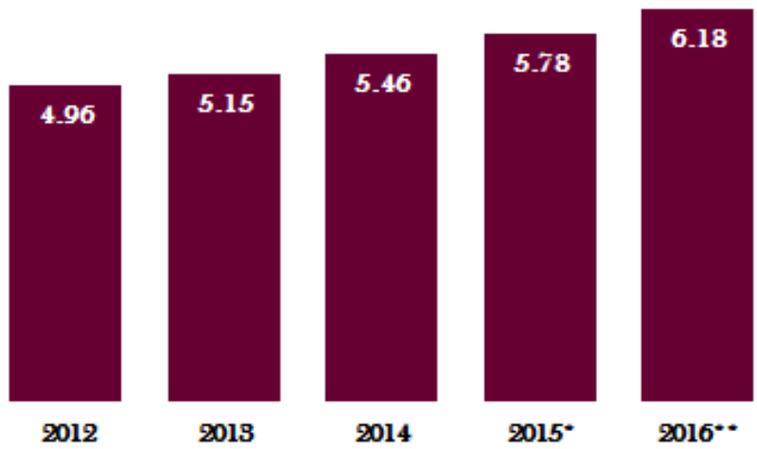

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

Sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk melihat nilai PDRB yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (perkembangan riil) maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2012-2016 seperti pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 2012, nilai PDRB atas dasar harga konstan adalah 4,87 triliun rupiah dan terus naik menjadi 5,66 triliun rupiah pada tahun 2016. Kenaikan ini menunjukkan selama tahun 2012-2016 terjadi peningkatan produktivitas (output) ekonomi secara agregat (menyeluruh) dari keseluruhan kategori lapangan usaha di kabupaten Nagan Raya.

Secara rata-rata, PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan sebanyak 0,158 triliun rupiah per tahun pada periode 2012-2016. Oleh karena itu, kenaiikan PDRB ADHB lebih dua kali lipat dibandingkan kenaikan PDRB ADHK selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga lebih dominan dibandingkan dengan kenaikan produksi di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.5.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah), 2012- 2016

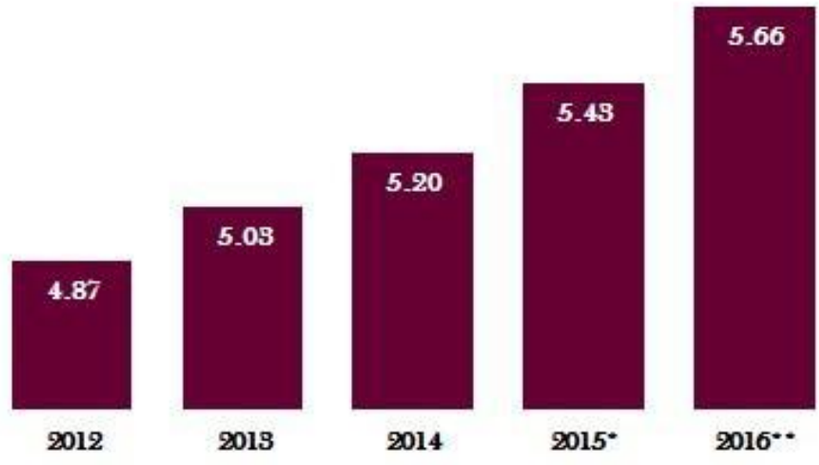

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing kategori atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB suatu daerah. Struktur ekonomi disebut berubah jika terjadi perubahan kategori atau lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB digantikan dengan kategori lainnya pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Sampai tahun 2016 struktur ekonomi masyarakat Nagan Raya masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari yang paling besarnya kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Kategori ini masih menjadi andalan bagi masyarakat Nagan raya yang ditunjukkan dengan kontribusinya yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kategori ini memiliki peranan sebesar 38,15 persen. Tahun 2016 kontribusi kategori ini sudah mencapai 46 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan kategori ini bersifat padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di kabupaten Nagan raya.

Selanjutnya, kategori yang juga patut diperhitungkan dalam pembentukan PDRB Nagan Raya yaitu Pertambangan dan Penggalian. Walaupun terjadi penurunan kontribusi kategori ini dalam lima tahun terakhir tetapi kategori ini memiliki peranan ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2016. Pada tahun 2015 kategori ini berkontribusi sebesar 14,85 persen dan merupakan kategori dengan kontribusi terbesar kedua setelah ketegori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan tahun 2016 kontribusinya menjadi 10,14 persen. Menurunnya produksi dan harga batubara pada tahun 2016 berperan besar dalam penurunan kontribusi kategori ini.

Gambar 2.6.
Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen), 2016

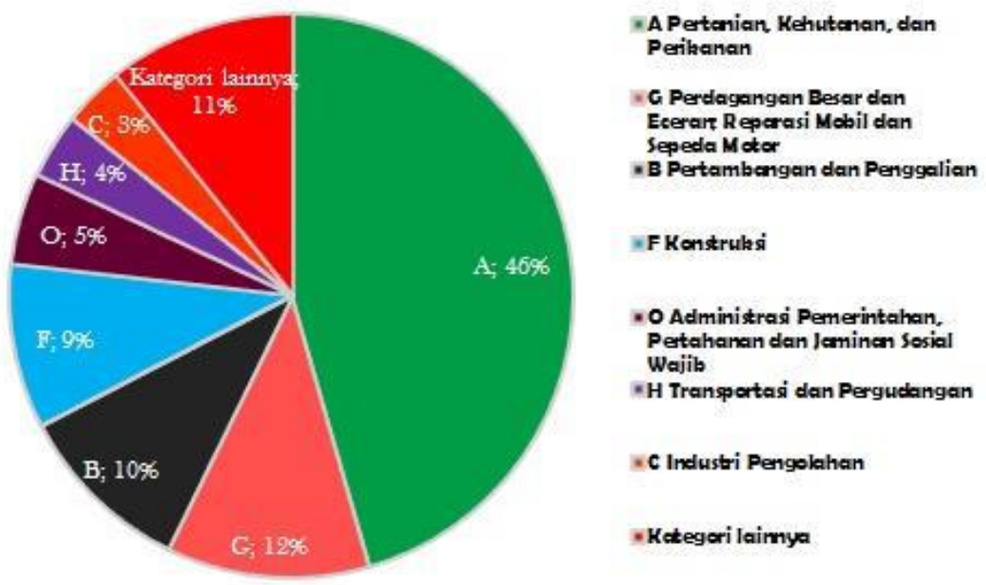

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

Struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012-2016 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini terlihat bahwa peranan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan paling besar dibandingkan dengan 16 kategori lainnya dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Kategori pertambangan dan penggalian berada di urutan kedua pada tahun 2012-2015 dan berada di peringkat ketiga dalam pembentukan PDRB tahun 2016. Kedua kategori ini termasuk pada kelompok kategori primer dalam perekonomian. Kategori primer memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2012-2016 dengan kontribusi antara 55-62 persen walaupun kategori primer ini menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir.

Kategori sekunder (kategori industri pengolahan, kategori listrik, gas, dan air, serta kategori konstruksi) memiliki kontribusi sekitar 9-13 persen pada periode 2012-2016. Berbeda dengan kategori primer, kategori sekunder menunjukkan tren kenaikan pada 2012-2016. Sedangkan peranan kelompok kategori tersier (jasa-jasa) sepanjang periode 2012-2016 berada pada kisaran antara 27-31 persen. Tahun 2016, kelompok kategori tersier berkontribusi sekitar 31 persen dan kelompok ini memiliki sumbangan terbesar kedua dalam beberapa tahun terakhir.

Semakin menurunnya kontribusi kelompok kategori primer dan semakin meningkatnya kontribusi kategori sekunder dan tersier menunjukkan semakin majunya perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Hal ini karena semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap kategori primer yang sebagian besar hanya memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun, kategori sekunder masih perlu ditingkatkan lagi karena kategori ini dapat meningkatkan kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren yang positif pada periode waktu 2012-2016. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir sebesar 3,83 persen. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sempat melambat sebesar 3,40 persen dan tumbuh menjadi 4,40 persen pada tahun 2016. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen), 2012-2016

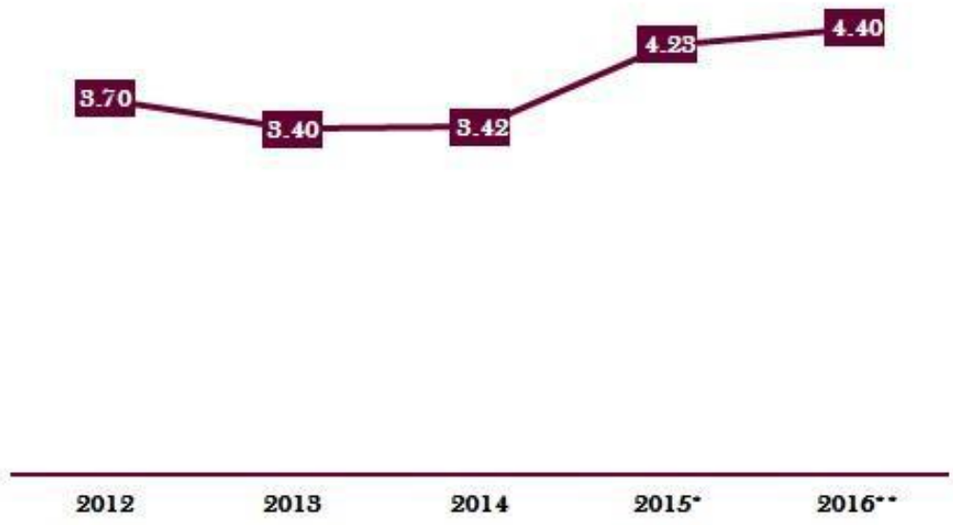

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

II.2.1.2 Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku pada 2012-2016 adalah sebesar 2,8 persen per tahun. Pada tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya mencapai 33,87 juta rupiah. Dalam lima tahun terakhir PDRB per kapita sudah mengalami peningkatan sebanyak 5,2 juta rupiah.

Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi tahun 2016. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku mencapai 39,07 juta rupiah atau
meningkat sekitar 4,8 persen dari tahun 2015. Artinya, setiap penduduk di Kabupaten Nagan Raya rata-rata dapat menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 39,07 juta rupiah selama tahun 2016.

Gambar 2.8
PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), 2012-2016

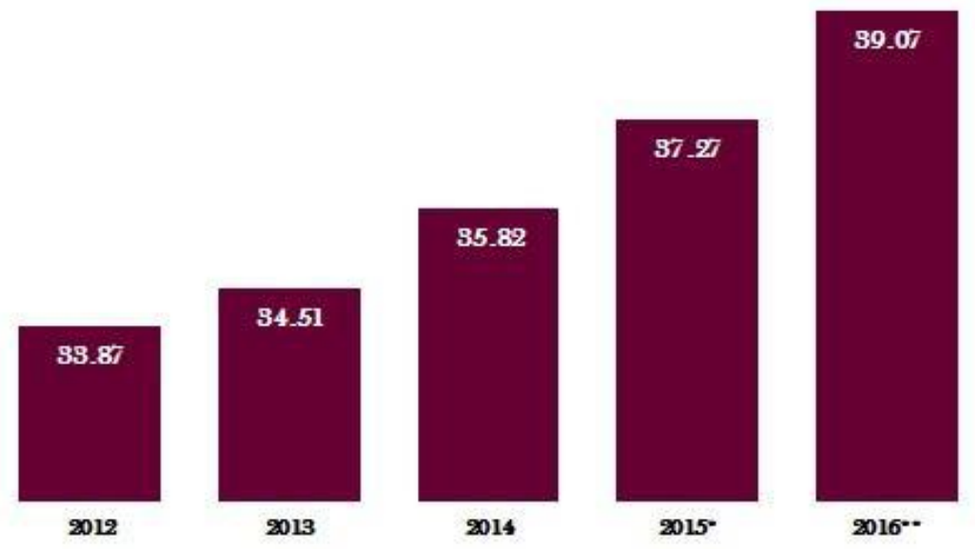

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

II.2.1.3 Laju Inflasi

Kecenderungan kenaikan harga-harga yang pada umumnya secara terus menerus akan mempengaruhi keadaan perekonomian dengan cara menyeluruh, keadaan ini biasanya dikenal dengan inflasi. Laju inflasi Kabupaten Nagan Raya dipengaruhi dan mengacu kepada nilai inflasi yang terjadi di Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat). Laju inflasi Meulaboh tahun 2015 sebesar 5,83 mengalami penurunan 2,94 pada tahun 2016 dengan laju inflasi sebesar 2,89.

II.2.1.4 Kemiskinan

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Tahun 2011, penduduk miskin berkisar sebesar 23,50 persen atau berjumlah 33.570 jiwa. Angka tersebut terus menurun menjadi 21,49 persen atau berjumlah 32.700 jiwa di tahun 2012, tahun 2013 jumlah penduduk miskin berjumlah 32.660 jiwa atau sebesar 20,55 persen, tahun 2014 jumlah penduduk miskin berjumlah 31.913 jiwa atau sebesar persen 20,85 persen, tahun 2015 jumlah penduduk miskin berjumlah 31.320 jiwa atau sebesar 20,13 persen, sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berjumlah 30.310 jiwa atau sebesar 19,17 persen.

Gambar 2.9
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2011-2016

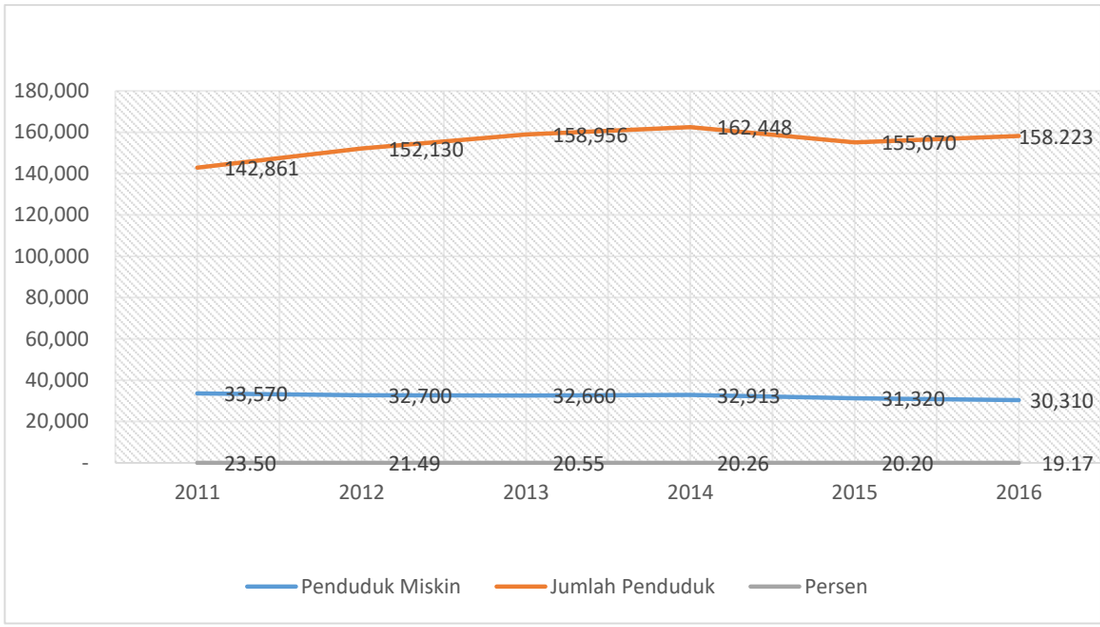

Sumber: BPS Nagan Raya

II.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

II.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun.

Angka Melek Huruf pada Tahun 2012 berkisar sebesar 93,57 persen, artinya terdapat 6,43 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis, dimana angka ini terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 93,93 persen, tahun 2014 sebesar 97,20 persen, tahun 2015 sebesar 96,35 persen dan pada tahun 2016 sebesar 93,41 persen.

Upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendorong akses pendidikan bagi semua penduduk, termasuk Paket A, B, dan C, disamping juga pendidikan gratis berimplikasi positif terhadap peningkatan angka melek huruf. Sampai tahun 2016 terdapat 6,59 persen penduduk yang belum melek huruf.

Gambar 2.10
Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa
di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (persen)

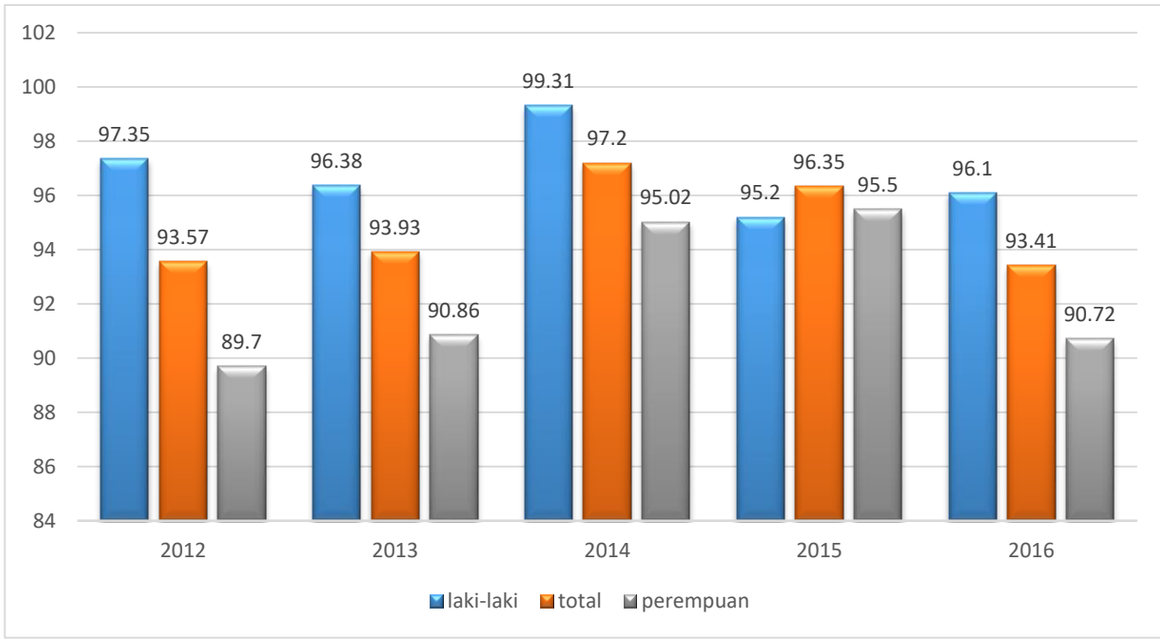

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Meskipun capaian angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya mengalami perbaikan dan peningkatan, namun masih terjadinya disparitas antara penduduk dewasa laki-laki dan perempuan. Angka melek huruf laki-laki cenderung lebih baik dari perempuan selama kurun waktu 2012-2016. Tahun 2012, angka melek huruf laki-laki sebesar 97,35 persen dan perempuan 89,70 persen. Adapun tahun 2016, angka melek huruf laki-laki mencapai 96,10 persen dan perempuan 90,72 persen. Karena itu, perbaikan angka melek huruf penduduk dewasa perempuan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan diharapkan dapat sejajar dengan pencapaian kemajuan angka melek huruf penduduk dewasa laki-laki.

II.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator lainnya dalam bidang pendidikan. Kedua indikator tersebut termasuk juga dalam komponen pembentuk IPM, sebagai variabel baru menggantikan variabel angka melek huruf dalam perhitungan IPM, untuk dimensi pengetahuan (pendidikan). Mengutip BPS, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS *(Expected Years of Schooling - EYS)* didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang

bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah, kendati belum mencapai angka ideal. Tahun 2012, angka harapan lama sekolah masyarakat Nagan Raya sebesar 13,27 tahun, jauh lebih tinggi dari Nasional yang sebesar 11,68 tahun (BPS, 2016). Kemudian, angka harapan lama sekolah tersebut meningkat menjadi 13,34 tahun (tahun 2013), sebesar 13.42 tahun (tahun 2014), dan sebesar 14.04 tahun (tahun 2015). Dan sebesar 14.09 (tahun 2016). Adapun angka harapan lama sekolah Nasional sebesar 12,10 tahun (2013), sebesar 12,39 tahun (tahun 2014), sebesar12.55 tahun (2015), dan sebesar12.72 tahun (2016). Kurun waktu 2012-2016, capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Nagan Raya cenderung lebih baik dari Nasional.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya keras meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa. Program penyetaraan pendidikan melalui Paket A, B, dan C dipandang juga bermanfaat dalam memperbaiki kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Sepanjang tahun 2012-2016, Pemerintah Nagan Raya dinilai cukup berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, meskipun belum mencapai target pemerintah. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah yang telah dijalani penduduk tidak lebih dari 7.78 Tahun, atau tamat SD, dan pernah mengecap dibangku kelas 1 (satu) SMP. Lalu, angka tersebut meningkat secara signifikan menjadi 7.93 tahun (tahun 2014) 8.22 tahun (tahun 2015), dan hingga 8.24 tahun (tahun 2016). Sementara rata-rata lama sekolah yang dijalani penduduk secara Nasional, yakni 7,95 tahun (tahun 2016).

Gambar 2.11
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya,
Aceh, dan Nasional, Tahun 2012-2016 (Tahun)

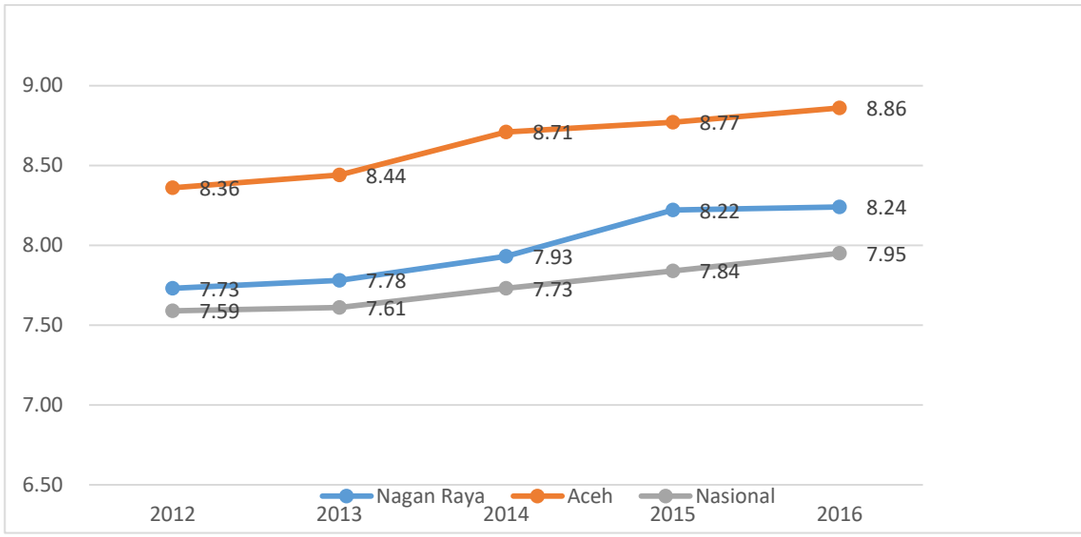

Sumber : BPS Aceh, 2017

Meskipun angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa bergerak naik secara signifikan, kebijakan lanjutan dan inovasi-inovasi pembangunan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan pendidikan gratis yang telah gulirkan selama ini, kebijakan pendidikan lainnya yang pro-masyarakat miskin terus diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti peningkatan bantuan beasiswa (diupayakan berlanjut ke perguruan tinggi), pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas, peningkatan pembangunan PAUD, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai di setiap jenjang pendidikan dan antar wilayah.

II.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Posisi geografis yang strategis dan ditunjang oleh beragamnya etnis masyarakat di Provinsi Aceh menggambarkan peninggalan keragaman budaya dan seni dengan nilai sejarah yang tinggi, begitu juga dengan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki keragaman budaya dan seni yang diwariskan oleh leluhur. Adapun beberapa keragaman budaya dan seni tersebut perlu dijaga dan dilestarikan keberdaannya sebagai bentuk identitas dari suatu daerah.

Adapun keragaman budaya dan seni yang ada di Kabupaten Nagan Raya dapat terlihat dari beberapa kebiasaan masyarakat terutama dalam perayaan pesta perkawinan, sunat rasul, keragaman makanan khas, dan tradisi lainnya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu terdapat juga beberapa situs sejarah budaya antara lain, 8 (delapan) makam, 1 (satu) rumah tradisional, 1 (satu) benteng dan 3 (tiga) tempat bersejarah.

II.3. Aspek Pelayanan Umum

II.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

II.3.1.1. Pendidikan Islami

Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelolah oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Jumlah penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penghafal penghafal Al-Qur`an	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	4 Orang
2	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia 6-21 tahun	65%	66%	69%	75%	80%
3	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia > 21 tahun	68%	70%	71%	75%	77%
4	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah	5%	6%	6%	8%	10%

Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal terdapat 14 (empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 (delapan) Madrasah Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah Swasta. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT).

II.3.1.2. Keagamaan

Syariat Islam

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia

dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari`at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Syari`at Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syari`at Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaanya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai syariat islam dikalangan masyarakat belum optimal direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan Syari`at Islam, ulama memiliki peranan yang sangat penting. Selain menjadi panutan umat, ulama juga menjadi motor penggerak pelaksanaan Syari`at Islam. Disamping itu ulama juga menjadi pembimbing bagi umat dalam rangka menerangkan maksud dan tujuan isi yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadist dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung perkembangan pelaksanaan dan pengawasan syariat islam di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam
Kabupaten Nagan Raya Dari Tahun 2012-2016

No	Uraian Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	315 Unit	325 Unit	370 Unit	410 Unit	445 Unit
2	Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	200 Orang
3	Rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat	20 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	31 Orang
4	Jumlah Mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin	25 Mesjid	32 Mesjid	36 Mesjid	40 Mesjid	47 Mesjid
5	Pembinaan Dinul Islam	210 Orang	240 Orang	250 Orang	258 Orang	262 Orang
6	Persentase Penyelesaian Kasus	30 %	35 %	40 %	42 %	50 %

	Pelanggaran Syariat Islam					
7	Jumlah Kader Ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	123 Orang	132 Orang	144 Orang	150 Orang	155 Orang

Komitmen pemerintah Aceh dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat, bedasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang mengatur tentang Baitul Mal dimana Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, perwalian (Ziwaf dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Berdasarkan data dari Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 realisasi dari penerimaan Zakat/infaq/sadaqah sebesar Rp. 3.450.000.000,- dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 7.091.141.673,50.

II.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

II.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

II.3.2.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke seluruh pelosok desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah lembaga TK/RA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah sebanyak 35 unit dengan jumlah murid 1.577 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 38 unit pada tahun 2016 dengan murid sejumlah 2.209 orang.

Berdasarkan data tahun 2012, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2016 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 23,48 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (9.407) orang. selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2016

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TK/RA	35	35	35	37	38
2	Siswa	1.577	1.344	1.671	1.857	2.209
3	Penduduk Usia 4-6 Tahun	8.430	8.560	9.347	9.552	9.407
4	Rasio (%)	2.22	2.60	2.09	1.99	1.72

5	Rasio Ketersedian sekolah per 10.000 penduduk	0,42	0,41	0,37	0,39	0,40

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Capaian APK pada tingkat pendidikan SD/MI terus mengalami penurunan. Tahun 2012, APK tingkat SD/MI sebesar 105,16 persen, tahun 2013 sebesar 109,92 persen. Selanjutnya, APK tingkat SD/MI tersebut turun menjadi 105,64 persen tahun 2014, 2015 sebesar 110,00 dan tahun 2016, APK tingkat SD hanya tercapai sebesar 109,91 persen.

Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, capaian APK pada tahun 2012, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 99,17 persen dan menurun menjadi 100,38 persen tahun 2013, 2014 sebesar 105,85 persen, tahun 2015 sebesar 103,00 dan kemudian APK tingkat SMP/MTS tersebut naik menjadi 107,35 persen tahun 2016.

Capaian APK yang paling rendah terjadi pada tingkat pendidikan SMA/MA. Kurun waktu 2012-2016, Pada tahun 2012, APK tingkat SMA/MA sebesar 85,59 persen, Tahun 2013 sebesar 83,35 persen, 2014 sebesar 93,55 persen, tahun 2015 sebesar 89,00 persen dan pada tahun 2016 sebesar 85,48 persen.

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015*	2016*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah siswa yang	19.7	21.5	20.3	21.1	21.3

	bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (segala usia)	12	30	95	33	36
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	18.745	19.587	19.306	19.212	19.412
1.3	**APK SD/MI (Persen)**	**105,16**	**109,92**	**105,64**	**110,00**	**109,91**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	8.857	9.368	10.008	9.516	10.079
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.931	9.333	9.455	9.239	9.389
2.3	**APK SMP/MTs (Persen)**	**99,17**	**100,38**	**105,85**	**103,00**	**107,35**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	6.893	7.014	7.932	7.401	7.194
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.054	8.415	8.479	8.316	8.416
3.3	**APK SMA/MA/SMK (Persen)**	**85,59**	**83,35**	**93,55**	**89,00**	**85,48**

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya 2017
Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2017

Indikator pendidikan lainnya yaitu angka pendidikan murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Tercatat APM pada tingkat SD/MI sebesar 98,68 persen tahun 2016, jauh lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 88,28 persen, APM SMP/MTs tahun 2016 sebesar 88,79 persen jauh lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 69,59 persen, sedangkan untuk APM SMA/MA pada tahun 2016 sebesar 72,04 persen lebih besar dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 61,27 persen. Untuk lebih jelas perkembangan angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015*	2016*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (Sesuai usia sekolah)	16.548	17.953	18.271	18.636	19.156
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	18.745	19.587	19.306	19.212	19.412
1.3	**APM SD/MI (Persen)**	**88,28**	**91,66**	**94,64**	**97,00**	**98,68**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (Sesuai usia sekolah)	6.215	7.675	8.179	7.761	8.336
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.931	9.333	9.455	9.239	9.389
2.3	**APM SMP/MTs (Persen)**	**69,59**	**82,24**	**86,50**	**84,00**	**88,79**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK (Sesuai usia sekolah)	4.935	5.384	6.377	6.653	6.063
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	8.054	8.415	8.479	8.316	8.416

	tahun					
3.3	**APM SMA/MA/SMK (Persen)**	**61,27**	**63,98**	**75,21**	**80,00**	**72,04**

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya 2017
Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2017

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan APS di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa APS anak usia 7-12 tahun sangat menggembirakan. Pada tahun 2012, APS anak usia 7-12 tahun mencapai 99,54 persen, menjadi 99,35 persen tahun 2016. Menurut jenis kelamin, terlihat juga bahwa capaian APS usia 7-12 tahun laki-laki 100 persen dan perempuan 98,61 persen tahun 2016. Sebelumnya (tahun 2012), APS laki-laki sebesar 99,90 persen, sedikit lebih tinggi dari APS perempuan sebesar 99,13 persen. Hal tersebut mencerminkan layanan pendidikan tingkat SD telah menjangkau peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan) di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.12
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (%)

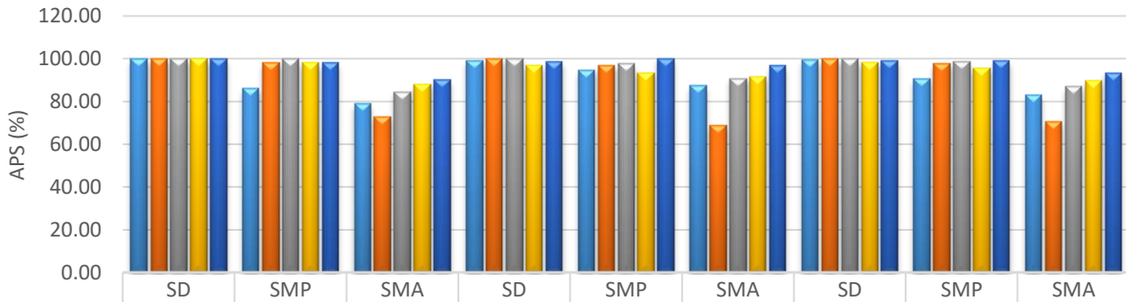

	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
2012	99.90	86.25	79.06	99.13	94.55	87.54	99.54	90.51	83.01
2013	100	98.17	72.65	100	97.0	68.58	100	97.64	70.61
2014	100	100	84.63	100	97.86	90.75	100	98.93	87.02
2015	99.96	98.25	88.00	96.69	93.49	91.59	98.46	95.54	89.55
2016	100	98.23	90.18	98.61	100	96.69	99.35	99.1	93.46

Sumber* : BPS, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Disisi lain, APS pada anak usia 13-15 tahun menuju kearah perbaikan, dari 90,51 persen meningkat menjadi 99,1 persen tahun 2016. Sebelumnya (tahun 2013) capaian APS anak usia tersebut turun sangat drastis dan terendah selama lima tahun terakhir. Demikian juga halnya APS anak usia 16-18 tahun, tercatat sebesar 83,01 persen tahun 2012 meningkat menjadi 93,46 persen tahun 2016. Selama tahun 2012-2016, capaian APS anak usia 16-18 tahun yang terendah (turun sangat drastis) terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 70,61 persen. Hal tersebut dipicu dari rendahnya capaian APS perempuan yang hanya berkisar 68,58 persen, jauh lebih rendah dari capaian APS laki-laki sebesar 72,65 persen.

Semakin tinggi usia peserta didik, capaian APS semakin rendah. Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Selain itu, terbatasnya prasarana pendidikan SMA/SMK/MA di setiap kecamatan serta penghasilan masyarakat yang masih rendah, turut juga mempengaruhi belum tercapainya target APS. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi (keluarga miskin) merasa kesulitan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan menengah. Kondisi tersebut mempengaruhi dalam pencapaian APS tingkat SMA, meskipun adanya kecenderungan kesadaran masyarakat untuk mengecap pendidikan SMA, terutama bagi kaum perempuan. APS penduduk perempuan lebih baik daripada laki-laki pada tingkat SMA (kondisi tahun 2016).

E. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap. Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (unit)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Pendidikan Umun						
1	TK	33	33	36	36	55
2	Sekolah Dasar (SD)	135	134	135	135	138
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	36	36	37	36	39
Pendidikan Agama						
1	RA	6	Na	Na		
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	19	19	19	19	18
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	9	10	10	10	11

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

Perkembangan peserta didik/murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif (periode 2012-2016). Gambaran lebih lanjut,

perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2.13
Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (orang)

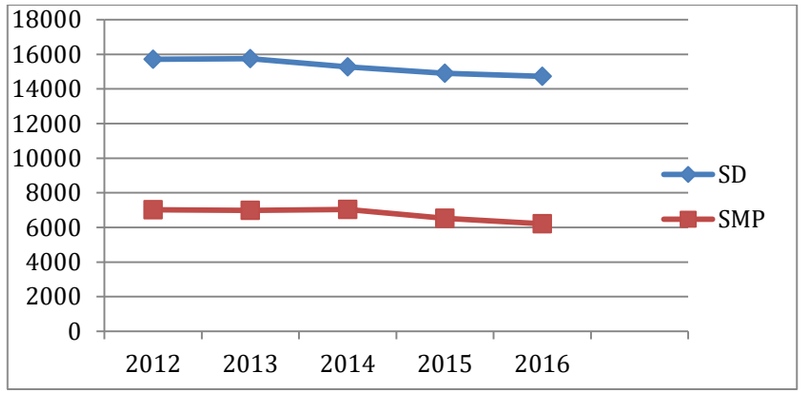

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

Jumlah peserta didik per ruang kelas umumnya jauh lebih rendah daripada standar nasional yang ditemui pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD, jumlah peserta didik per ruang kelas berkisar 11 orang per ruang kelas (kondisi tahun 2016). Angka ini lebih rendah dari batas atas sebanyak 30 sampai 40 murid per ruang kelas yang ditetapkan dalam standar nasional atau berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Angka tersebut juga jauh lebih rendah dari tahun 2012 yang sebanyak 17 orang per ruang kelas.

Daya tampung ruang kelas dibawah SPM pendidikan, disatu sisi berdampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Pembelajaran bagi seorang peserta didik lebih mudah terawasi oleh guru yang berdampak pada kenyamanan peserta didik mengikuti pelajaran di kelas. Kendati demikian, kondisi tersebut juga dianggap tidak efisien.

Gambar 2.14
Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

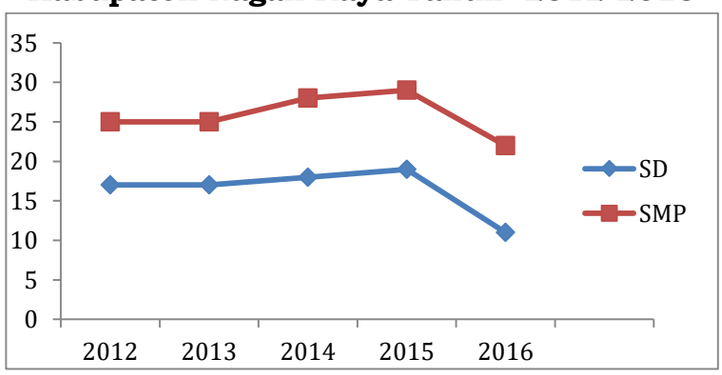

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Selama lima tahun terakhir (2012-2016),

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan penambahan guru guna memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdi bertambah rata-rata 3,63 persen setiap tahunnya. Tahun 2012, jumlah guru SD sebanyak 1.667 orang yang tersebar relatif merata di semua kecamatan. Jumlah guru tersebut berkurang menjadi 1.354 orang pada tahun 2016.

Kenaikan jumlah guru yang sangat drastis terjadi pada tingkat SMP. Pertumbuhan kenaikan jumlah guru rata-rata 11,59 persen setiap tahunnya. Tahun 2012, tercatat guru SMP berjumlah 557 orang, sementara tahun 2016 mencapai 694 orang. Hal tersebut seiring dengan peningkatan pembangunan SMP, dari 36 unit tahun 2012 menjadi 39 unit tahun 2016 sehingga memerlukan penambahan guru yang mengabdi di masing-masing sekolah di setiap kecamatan. Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.15
Perkembangan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (orang)

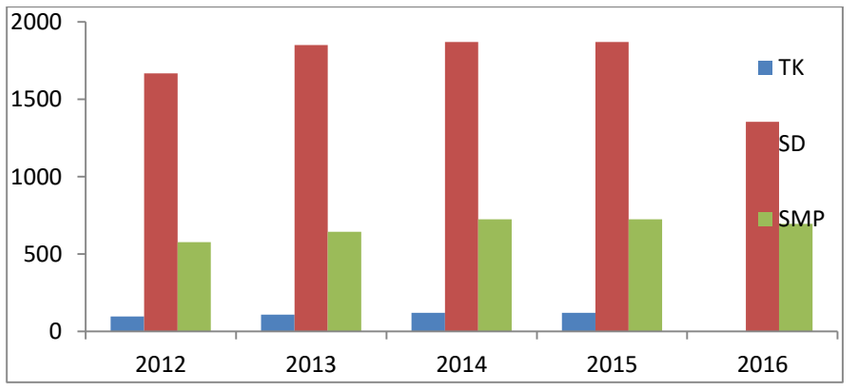

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Perkembangan rasio peserta didik/murid terhadap guru pada semua jenjang pendidikan cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Untuk tingkat SD, rasio peserta didik terhadap guru sebesar 8,9 (kondisi tahun 2016). Artinya, setiap guru membimbing dan mengawasi paling kurang 8,9 orang peserta didik. Angka rasio tersebut mengalami perubahan dibandingkan tahun 2012 (rasio 8). Kendati demikian, angka rasio tertinggi dicapai tahun 2014, dimana setiap guru membimbing peserta didik sebanyak 12 orang.

Pada tingkat pendidikan SMP kondisi rasio peserta didik terhadap guru pada tahun 2016 memperlihatkan kenaikan, dibandingkan tahun 2012. Tahun 2016, rasio peserta didik per guru meliputi SMP sebesar 10,54. Adapun tahun 2012, rasio peserta didik per guru meliputi SMP sebesar 10.

Secara keseluruhan, rasio peserta didik terhadap guru pada pendidikan umum dan pendidikan agama terlihat sangat rendah. Hal ini terjadi sebagai implikasi dari penambahan jumlah guru pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain, lebih banyak guru dari yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang pendidikan atau dipandang tidak efisien. Angka rasio tersebut dibawah dari SPM Pendidikan, khusus untuk sekolah dasar satu guru untuk setiap 32 peserta didik.

Kualifikasi guru di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 yang berpendidikan DIV/S1 masih sangat rendah yaitu sebanyak 37,50% dari total guru yang tersedia. Sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah guna meningkatkan dan memotivasi para guru untuk peningkatan kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kualitas peserta didik meningkat. Untuk lebih jelas mengenai pekembangan rasio Guru dengan peserta didik dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Nagan Raya dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.16
Perkembangan Rasio Guru-Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

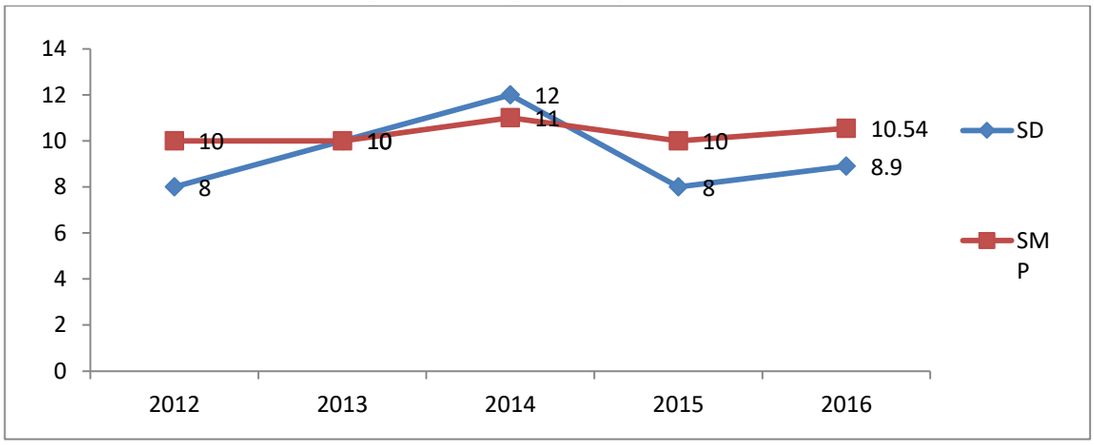

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Tabel 2.15
Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

Guru	Kualifikasi (Orang)		
	D1/D2/D3	DIV/S1	Jumlah
SD	711	258	969
SMP	147	257	404
Jumlah	858	515	1.373

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

II.3.2.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 sebesar 11,77 terjadi penurunan menjadi 5,65 per 1000

kelahiran hidup pada tahun 2016. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	33	31	33	27	17
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2,804	2,726	3,060	3,065	3,011
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11.77	11.37	10.78	8.81	5.65

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

B. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Satu target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. AKABA Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah mengalami peningkatan dari 0 menjadi 37,20 per 1000 kelahiran hidup. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu	0	61	140	94	112
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2,804	2,726	3,060	3,065	3,011
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0.00	22.38	45.75	30.67	37.20

C. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 sebesar 3,57 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 14,28 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	10	24	50	35	43
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2,804	2,726	3,060	3,065	3,011
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3.57	8.80	16.34	11.42	14.28

D. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Dalam lima tahun terakhir Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 jumlah kasus AKI adalah 3 kasus dan tahun 2016 jumlah kasus AKI adalah 3 kasus, jika dihitung AKI per-100.000 kelahiran, maka AKI Tahun 2016 adalah 3/3.011 x 100.000 kelahiran hidup, hal ini masih tinggi dibandingkan dengan target MDGs. Untuk itu perlu upaya besar untuk terus menekan AKI, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan dating. Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

E. Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyanndu, Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin, Rasio posyandu diatas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaat posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita, Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.19
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah posyandu	256	256	256	261	266
2	Jumlah balita	10,647	12,969	12,877	13,468	13,467
	Rasio posyandu per satuan balita	24.04	19.74	19.88	19.38	19.75

F. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Jumlah puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 sebanyak 14 unit yang tersebar diseluruh Kecamatan. Berdasarkan instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 1976, kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa. Artinya Puskesmas yang tersedia sudah melebihi kebutuhan sebanyak 9 unit untuk jumlah penduduk 158.223 jiwa , jadi rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 adalah 0,09. Namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30

Sumber : BPS, 2016

G. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 sebanyak 158.223 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 sebesar 0,01 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

H. Rasio Dokter per satuan penduduk

Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 yaitu 5 dokter spesialis yang bertugas di Rumah sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 158.223 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 5/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 26 dokter. Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya adalah 37 orang atau dengan rasio 37/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya, sedangkan kebutuhan dokter umum yang ideal adalah sebanyak 62 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter umum sebanyak 25 dokter. Total jumlah Dokter gigi adalah 3 orang atau 3/100.000 penduduk, Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak 17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter umum

sebanyak 14 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Dokter Spesialis	4	7	8	7	5
2	Jumlah Dokter Umum	44	53	47	62	37
3	Jumlah Dokter Spesialis Gigi	0	0	0	0	0
4	Jumlah Dokter Gigi	7	4	5	5	3
5	Jumlah Penduduk	142,861	149,596	149,596	155,070	155,070
	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03
	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0.31	0.35	0.31	0.40	0.24
	Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02

I. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

Pada tahun 2016, jumlah tenaga kesehatan sekitar 968 tenaga (sekitar 5 tenaga kesehatan melayani orang 1.000 orang penduduk). Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidang masing-masing 170 dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). Rasio tenaga medis tahun 2012 sebesar 4,13 persen menu menjadi 3,31 persen pada tahun 2016. Jumlah bidan di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 213 orang, dengan rasio bidan terhadap penduduk sebesar 1,37 bidan per 100.000 penduduk. Jika kita melihat rasio tenaga bidan tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 100 per 100.000 penduduk. Jumlah perawat pada tahun 2016 tercatat sebanyak 160 orang, dengan rasio sebesar 1,03 per 100.000 penduduk. Rasio tenaga keperawatan tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 117.5 per 100.000 penduduk.

Tenaga kefarmasian di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 adalah 25 orang dengan rasio sebesar 0,16 per 100.000 penduduk, jika kita melihat rasio tenaga kefarmasian tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 10 per 100.000 penduduk.

Tenaga nutrisionis atau gizi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 adalah 20 orang dengan rasio sebesar 0,13 per 100.000 penduduk mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 0,11 per 100.000 penduduk, meskipun demikian rasio tersebut masih di bawah target nasional dan standar WHO sebesar 22 per 100.000 penduduk.

Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat pada tahun 2016 adalah 38 orang atau dengan rasio 0,25 per 100.000 penduduk. Tenaga Kesehatan Masyarakat ini tersebar di seluruh Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Tenaga Sanitarian berjumlah 13 orang atau dengan rasio 0,08 per 100.000 penduduk. Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat belum mencapai target dan rasio Tenaga Sanitarian masih belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 40/100.000 penduduk.

Jumlah seluruh Tenaga keterapian fisik tahun 2016 adalah 4 orang, keterapian fisik tersebut seluruhnya adalah tenaga fisioterapi. Jika dilihat dari rasio 0,03 per 100.000 penduduk sedangkan tenaga teknis medis di fasilitas kesehatan 28 orang, terdiri dari radiografer 3, radioterapis 10, analisa kesehatan 4, dan rekam medik 2, jika dilihat dari rasio kebutuhan, maka diperoleh 18/100.000 penduduk. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 sampai tahun 2016 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perawat	215	307	310	328	160
2	Jumlah Bidan	288	404	404	435	213
3	Jumlah Perawat Gigi	0	26	12	12	23
4	Jumlah Teknis Kefarmasian	15	20	23	25	18
5	Jumlah Apoteker	6	6	6	6	7
6	Jumlah Kesehatan Masyarakat	37	53	49	76	38
7	Jumlah Kesehatan Lingkungan	13	13	9	16	13
8	Jumlah Nutrisionis	16	13	22	18	20
9	Jumlah Dietisien	0	6	3	0	0

10	Jumlah Fisioterapis	0	8	10	11	4
11	Jumlah Okupasi Terapis	0	0	0	0	0
12	Jumlah Terapis Wicara	0	0	0	0	0
13	Jumlah Akupuntur	0	0	0	0	0
14	Jumlah Radiografer	0	2	7	7	3
15	Jumlah Radioterapis	0	0	9	9	0
16	Jumlah Elektromedis	0	7	6	6	5
17	Jumlah Teknisi Gigi	0	7	8	8	0
18	Jumlah Analis Kesehatan	0	6	7	7	4
19	Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	4	4	4	5
20	Jumlah Penduduk	142,861	149,596	149,596	155,070	155,070
21	Rasio Perawat per satuan penduduk	1.50	2.05	2.07	2.12	1.03
22	Rasio Bidan per satuan penduduk	2.02	2.70	2.70	2.81	1.37
23	Rasio Perawat Gigi per satuan penduduk	-	0.17	0.08	0.08	0.15
24	Rasio Teknis Kefarmasian per satuan penduduk	0.10	0.13	0.15	0.16	0.12
25	Rasio Apoteker per satuan penduduk	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
26	Rasio Kesehatan Masyarakat per satuan penduduk	0.26	0.35	0.33	0.49	0.25
27	Rasio Kesehatan Lingkungan per satuan penduduk	0.09	0.09	0.06	0.10	0.08
28	Rasio Nutrisionis per satuan penduduk	0.11	0.09	0.15	0.12	0.13
29	Rasio Fisioterapis per satuan penduduk	-	0.05	0.07	0.07	0.03
30	Rasio Radiografer per satuan penduduk	-	0.01	0.05	0.05	0.02
31	Rasio Elektromedis per satuan penduduk	-	0.05	0.04	0.04	0.03
32	Rasio Analisis Kesehatan per satuan penduduk	-	0.04	0.05	0.05	0.03
33	Rasio Rekam Medis dan Informasi Kesehatan per satuan penduduk	-	0.03	0.03	0.03	0.03
34	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4.15	5.90	5.94	6.24	3.31

J. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun

2012 yang tertangani sebesar 15,17 persen, Tahun 2013 meningkat menjadi 45,08 persen, Tahun 2014 sampai tahun 2016 meningkat menjadi 52,23 persen, artinya komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya masih sangat rendah, perlu dilakukan kebijakan yang lebih ketat lagi agar cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mendekati 100 persen, upaya yang perlu dilakukan berupa sosialisasi kepada Ibu hamil agar mewaspadai kehamilannya baik dari makanan dan pemeriksaan kandungan yang rutin. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	105	330	469	293	352
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	692	732	725	674	674
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	15.17	45.08	64.69	43.47	52.23

K. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum berfluktuasi, tahun 2012 sebesar 84,67 persen turun menjadi 77,51 persen tahun 2013, tahun 2014 meningkat lagi menjadi 85,50 persen dan tahun 2015 menjadi 94,75 persen sedangkan tahun 2016 turun menjadi 93,07 persen. Cakupan persalinan yang tinggi terjadi di Puskesmas Ujong Fatihah dan Simpang Jaya, sementara itu yang terendah berada di Puskesmas Beutong Ateuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Cakupan Pertolongan Persalinan

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2794	2709	2955	3047	2993
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3300	3495	3456	3216	3216
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84.67	77.51	85.50	94.75	93.07

L. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).
Desa *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa yang memiliki jumlah bayi lebih dari 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2012-2016 menunjukkan angka peningkatan, tahun 2009 desa UCI di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 48,65 persen meningkat menjadi 77,29 persen pada tahun 2016. Pencapaian ini mendekati target yang ingin dicapai yaitu 85 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah meningkatkan sosialisasi imunisasi kepada masyarakat secara lebih intensif.
Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2016 terdapat 7 Puskesmas yang memiliki persentase desa UCI melebihi target 85 persen seperti yang nampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Desa / Kelurahan UCI	108	156	181	188	177
Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	222	222	222	222	229
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	48.65	70.27	81.53	84.68	77.29

M. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.
Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami penurunan tahun 2012 terdapat 32 kasus gizi buruk dan yang tertangani 100 persen, tahun 2013 terdapat 17 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2014 terdapat 11 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2015 terdapat 12 kasus dan tertangani 100 persen sedangkan pada tahun 2016 terdapat 9 kasus dan yang tertangani 100 persen. Upaya pemerintah ke depan untu meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga

kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 di sajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.26
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	32	17	11	12	9
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	32	17	11	12	9
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

N. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak.
Cakupan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 yaitu 77,29% atau terjadi penurunan jika dibanding tahun 2015 yaitu 84,64%, hal ini jauh dari target yang diharapkan yaitu 80% dan berdampak terhadap status desa untuk mendapatkan UCI serta anak usia 1 tahun masih banyak yang beresiko terjangkit penyakit campak.

Tabel 2.27
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	2346	2655	2371	2129	2804
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	3288	3226	3226	3060	3062
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak	71.35	82.30	73.50	69.58	91.57

O. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani.
Cakupan penanganan balita pneumonia dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sangat rendah dan fluktuatif, dimana pada tahun 2012 yaitu 30,30%, tahun 2013 yaitu 26,09%, tahun 2014 yaitu 27,27%, tahun 2015 yaitu 39,24%, dan pada tahun 2016 yaitu 18,75%. Dalam hal ini, petugas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada balita pneumonia, agar terhindar dari komplikasi dan kematian. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	30	24	24	31	18
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	99	92	88	79	96
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	30.30	26.09	27.27	39.24	18.75

P. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ adalah Angka yang menyatakan jumlah penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja kesehatan selama setahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA + dalam kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mulai meningkat, tahun 2012 sebesar 25,33 persen dan tahun 2016 sebesar 49,00 persen yang ditangani, artinya kesadaran masyarakat untuk mengobati dirinya sudah mulai tumbuh dan sudah mau berobat, namun perlu diwaspadai kebiasaan masyarakat hidup tidak sehat perlu dicegah ditingkatkan perilaku hidup sehat kepada masyarakat sejak dini. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.29
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+) Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	58	76	75	113	123
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	229	229	234	243	251
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	25.33	33.19	32.05	46.50	49.00

Q. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Kasus Tuberkulosis (TB) Paru pada tahun 2012 terdapat 70 kasus baru dan lama atau 49,00 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 159 kasus baru dan lama atau 102,53 per 100.000 penduduk hasil pemeriksaan BTA+. Dari data tersebut dapat dilihat terjadinya peningkatan kasus TBC baru dan lama, hal ini sangat baik karena dilakukannya deteksi dini penyakit TBC yang bertujuan untuk penemuan dini dan mencegah terjadinya TBC kronis serta kegiatan tersebut harus tetap ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama)	70	76	92	142	159
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	142,8	149,5	149,5	155,0	155,0
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	49.00	50.80	61.50	91.57	102.53

R. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk).

Jumlah kasus TB yang meninggal dunia dari tahun 2012 sampai dengan 2016 memiliki nilai fluktuatif, dimana pada tahun 2012 terdapat 2 kasus yang meninggal atau 1,40 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 4 kasus yang meninggal atau 2,57 per 100.000 penduduk. Walaupun masih rendah, namun terdapatnya kasus TB yang meninggal menjadi perhatian pemerintah dalam penatalaksanaan penemuan kasus dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Paisen TB yang meninggal	2	2	3	6	4
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	142,86	149,59	149,59	155,07	155,07

	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1.400	1.337	2.005	3.869	2.579

S. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Jumlah kasus TB yang mendapat pengobatan dalam program DOTS mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2012 terdapat 58 kasus dari 229 perkiraan kasus (25,33%) dan pada tahun 2016 terdapat 159 kasus dari 251 perkiraan kasus (63%). Dari data tersebut terdapat kesadaran penderita TB untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dengan menggunakan program DOTS sehingga tingkat kesembuhan penderita TB meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	58	76	75	113	159
Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	229	229	234	243	251
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	25.33	33.19	32.05	46.50	63.35

T. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS.

Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) Paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 terdapat 58 kasus dan yang sembuh sebanyak 45 kasus (77,59%), sedangkan pada tahun 2016 terdapat 123 kasus dan yang sembuh sebanyak 84 kasus (68,29%). Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan penderita TB dalam pelaksanaan pengobatan dalam program DOTS dan diharapkan peran serta pegutas kesehatan untuk menjemput bola serta peran dari lintas sector dalam mendukung program DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33
Penderita Tuberkulosis Paru BTA Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pasien Tuberkulosis Paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	45	51	28	60	84

Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	58	76	75	113	123
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	77.59	67.11	37.33	53.10	68.29

U. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.
DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aides Aegypti, yang ditandai dengan demam disertai perdarahan bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Jumlah kasus DBD mengalami fluktuatif, pada tahun 2012 terdapat 47 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, pada tahun 2014 terdapat 15 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 19 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP. Tindakan penanganan yang telah dilakukan diantaranya perawatan penderita oleh tenaga kesehatan serta tindakan pemberantasan nyamuk penyebab DBD melalui foging dan abatesasi, guna pemutusan mata rantai nyamuk penyebab DBD, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	47	16	15	10	19
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	47	16	15	10	19
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

V. Angka Kejadian malaria.
Malaria merupakan penyakit menular endemis dan merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, demikian juga di Indonesia. Penderita Malaria tahun 2012 adalah 60 kasus atau 41,99 per 100.000 penduduk dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan 4 kasus atau 2,57 per 100.000 penduduk. Dari seluruh kasus malaria yang ada, telah dilakukan tindakan penanganan sesuai SOP secara keseluruhan oleh tenaga kesehatan. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Angka Kejadian Malaria Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016

1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	60	0	6	17	4
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	142,86	149,59	149,59	155,07	155,07
	Angka Kejadian Malaria	41.999	0.000	4.011	10.963	2.579

W. Cakupan Kunjungan Bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah jumlah kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan disarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun kunjungan rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan mendapat pelayanan dari petugas kesehatan. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari sampai dengan 3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan penyuluhan perawatan kesehatan. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi: 1) konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan; 2) perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS); dan 3) pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6-11 bulan. Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2358	2655	2547	2546	2561
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	3142	3143	3226	3060	3024
Cakupan kunjungan bayi	75.05	84.47	78.95	83.20	84.69

II.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tahun 2016,

kondisi baik jalan kabupaten 243,54 Km mengalami peningkatan sepanjang 71,74 km dari kondisi awal tahun 2012. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37
Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2012-2016 (Km)

Kondisi jalan	Status Jalan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Baik	171,80	177,00	188,20	224,99	243,54
Sedang	92,34	108,80	113,50	173,01	171,65
Rusak Ringan	128,60	119,60	108,70	186,14	180,55
Rusak Berat	28,00	15,34	10,34	340,28	328,68
Jumlah	420,74	420,74	420,74	924,42	924,42

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2017

Selanjutnya Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dapat kita lihat pada Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016 (m)

Kondisi jalan	**Status Jalan**				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Jalan Baik (km)	171.800	176.970	188.200	224.990	243.540
Jumlah Penduduk (jiwa)	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223
Rasio Panjang Jalan	1,12	1,11	1,15	1,45	1,53

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2017

Tabel di atas menggambarkan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2012-2016, menunjukkan bahwa selama periode tersebut mengalami peningkatan. Rasio panjang jalan Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 1,12 tahun 2012 meningkat menjadi 1,53 pada tahun 2016. Hal ini berarti dalam 1,53 meter panjang jalan melayani 1 (satu) orang penduduk pada tahun 2015.
Untuk Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4 diantaranya meliputi kawasan Gampong Twi meulusong, Gampong Blang Teungku, Gampong Kila, Gampong Kandeh, Gampong Blang Lango, dan Gampong Gunong Kong. Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027.

b. Sanitasi

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak sampai dengan Tahun 2016 sebesar 47,12% yang terdiri dari akses sanitasi perkotaan 3,7% dan akses sanitasi perdesaan 43,42%.

Cakupan pelayanan air minum dengan sumber air minum non perpipaan yang terlayani kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2016 di perkotaan sebesar 44,38% dengan jumlah penduduknya 58.059 jiwa dan wilayah perdesaan sebesar 40,40% jumlah penduduknya 18.345 jiwa. Sedangkan untuk sumber air minum perpipaan di Kabupaten Nagan Raya secara umum masih belum beroperasi karena masih terbatasnya jaringan dan jumlah SR pada unit SPAM baik SPAM Lamie, SPAM Simpang Peut. dan WTP Beutong.

c. Irigasi

Pelayanan irigasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya pada daerah irigasi, tahun 2016 terdiri dari 29 daerah irigasi yang melayani hampir seluruh Kabupaten Nagan Raya menjadi kewenangan daerah. Daerah irigasi yang tersebar di sepuluh kecamatan dengan luas 4.847 Ha ditahun 2016 mengaliri areal persawahan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Adapun Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39
Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Tahun 2016

No	Nama Daerah Irigasi	Status Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi (%)		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	D.I Blang Puuk	Semi Tehnis	200	35	30	35
2	D.I Blang Meurandeh	Semi Tehnis	75	30	40	30
3	D.I Bungong Talo	Tehnis	485	10	20	70
4	D.I Rambong	Semi Tehnis	330	35	25	40
5	D.I Pulo Raga	Semi Tehnis	300	20	45	35
6	D.I Blang seunong	Semi Tehnis	148	35	35	30
7	D.I Blang Neuang	Semi Tehnis	85	50	30	20

8	D.I Pante Ara	Semi Tehnis	431	20	25	55
9	D.I Twi Pungoh	Semi Tehnis	120	15	30	15
10	D.I Karian	Sederhana	50	20	20	60
11	D.I Blang Aman Tadu	Sederhana	200	20	15	65
12	D.I Gunong Nagan	Sederhana	70	40	35	25
13	D.I Kila	Sederhana	100	35	40	25
14	D.I Blang Teungku	Sederhana	70	30	45	25
15	D.I Twi Meuleusong	Sederhana	200	10	35	55
16	D.I Gunong Lango	Sederhana	70	5	50	45
17	D.I Twi Kameng	Sederhana	65	-	48	52
18	D.I Alue Buloh	Sederhana	150	20	20	60
19	D.I Alue Paku	Sederhana	65	16	30	54
20	D.I Krueng Mangkom	Sederhana	120	20	45	35
21	D.I Seumambek	Sederhana	200	23	45	32
22	D.I Gunong Reubo	Sederhana	350	25	30	45
23	D.I Padang Rubek	Sederhana	68	39	33	28
24	D.I Alue Seupeng	Sederhana	350	23	35	42
25	D.I Gunong Kupok	Sederhana	175	8	40	52
26	D.I Cot Mee	Sederhana	150	-	32	68
27	D.I Krueng Alem	Sederhana	200	12	40	48
28	D.I Alue Rambot	Sederhana	170	23	35	42
29	D.I Tripa Makmur	Sederhana	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya

Jaringan Irigasi merupakann saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagiaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam dua kategori yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder.

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian.

Berdasarkan data dari tahun 2014–2016 total panjang jaringan irigasi mengalami penurunan. Panjang jaringan irigasi dari tahun 2014 sebesar 92.026 meter mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 91.878 meter, sedangkan luas lahan budidaya di tahun 2014 seluas 33.242,38 Ha mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi seluas 34. 527,1 Ha sehingga rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2014 adalah 2,76 turun menjadi 2,66 persen di tahun 2016. Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.40
Rasio Jaringan Irigasi

No	Jaringan Irigasi	Status Jalan		
		2014	2015	2016
1	Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	92.026	93.188	91.878
2	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	33.242,38	25.969,4	34.527,1
3	Rasio Jaringan Irigasi (1:2)	2,76	3,58	2,66

Sumber: Olahan data primer

d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan sarana bagi umat beragama untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kabupaten Nagan Raya secara resmi sebagian besar sarana tempat ibadah hanya dimiliki oleh umat Islam, berupa Mesjid, Mushalla. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2012 rasio tempat ibadah sebesar 3,3 persen dan pada tahuin 2016 sebesar 3,1 persen.

Tabel 2.41
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Tempat Ibadah	497	497	497	497	497
Jumlah Penduduk	152.13	158.95	162.68	155.07	158.22

	0	8	2	0	3
Total Rasio	3,3	3,1	3,1	3,2	3,1

Sumber: Nagan Raya dalam Angka

2. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Nagan Raya merupakan Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 261,40 Ha atau (7,80 % dari luas kawasan perkotaan). Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 743.97 Ha (30 % dari luas kawasan perkotaan), meliputi :

a. Kecamatan Suka Makmue,
b. Kecamatan Kuala,
c. Kecamatan Kuala Pesisir
d. Kecamatan Darul Makmur
e. Kecamatan Seunagan
f. Kecamatan Beutong
g. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
h. Kecamatan Tadu Raya

Tabel 2.42
Rasio Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016 di Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	2016
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	261.40
2	Luas Kawasan Budidaya	1407
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	18.57%

Sumber: Olahan data primer, 2017

II.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi pisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni mulai tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 2.43
Rasio Rumah Layak Huni

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah layak Huni	-	50	172	220	165
Jumlah Penduduk	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223
Rasio Rumah Layak Huni	-	0,031	0,106	0,142	0,104

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nagan Raya, 2017

2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Areal kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh pada Tahun 2014 terdiri atas empat kawasan permukiman yaitu Keude Seumot, Jeuram, Simpang Peut dan Alue Bilie. Adapun persentasenya bisa dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 2.44
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2014

Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan (Ha)	Luas Wilayah (Km)	Persentase
Keude Seumot	14,76	386,05	0,39
Jeuram	37,84	112,5	0,34
Simpang Peut	29,96	130,63	0,23
Alue Bilie	25,77	1863,12	0,019

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nagan Raya, 2014

II.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

Dilihat dari segi jumlah personil Linmas pada tahun 2012 berjumlah 852 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 924 orang. Rasio jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga belum bisa memenuhi target dan cenderung berkurang setiap tahunnya dikarenakan banyak anggota Linmas yang masuk

usia tua dan meninggal dunia serta tidak ada regenerasi sebab kurang diminati dari kaum muda gampong karena minimnya perhatian pemerintah. Begitu pula dengan jumlah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 2014 berjumlah 5 lembaga dan pada tahun 2016 jumlah LSM menurun 2 lembaga dengan berbagai bidang kegiatan.

Tabel 2.45
Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Jumlah Linmas (Orang)	Jumlah LSM
1	2012	852	-
2	2013	862	-
3	2014	862	5
4	2015	1.004	10
5	2016	924	2

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nagan Raya Tahun 2017

II.3.2.1.6. Sosial

A. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Jumlah panti asuhan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu 2004-2016 baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta berdasarkan kapasitas dan jumlah anak sebanyak lima unit panti.

B. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah bantuan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bedasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Jumlah (Jiwa)
1	Anak Dengan Kecatatan	149
2	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	2.095
3	Anak Terlantar	24
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	1
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.904

6	Korban Tindak Kekerasan	1
7	Lanjut Usia Terlantar	2.367
8	Penyandang Disabilitas	795
9	Tuna Susila	51
10	Pengemis	2
11	Gelandangan	1
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	23
13	Korban Penyalahgunaan Napza	17
14	Fakir Miskin	9.387
15	Rumah Tidak Layak Huni	1.415
16	Keluarga Rentan	1.693
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	25
18	Korban Bencana Alam	159
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	21
20	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	1

Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2017

II.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

II.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Kurun waktu 2012-2016, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Tahun 2012 angka TPAK mencapai 59.41 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 63,26 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya juga berfluktuatif selama 2012-2016. Kendati demikian, adanya kemajuan dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nagan Raya selama dua tahun terakhir (2015-2016). Tahun 2012, angka TPT mencapai 7,63 persen. Angka TPT tersebut menurun berkisar 50 persen pada periode 2013-2014. Sampai tahun 2016, tercatat TPT di Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,79 persen.

Gambar 2.17
Perkembangan TPAK dan TPT
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (persen)

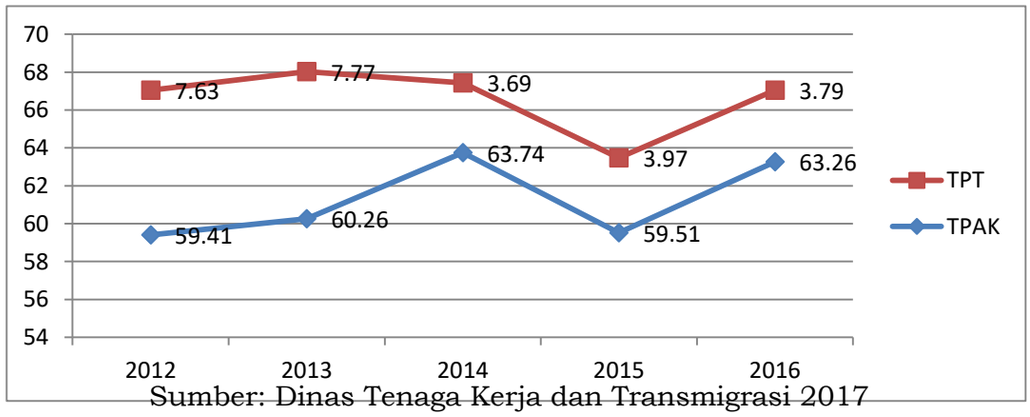

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2017

Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada

umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2015, angkatan kerja berpendidikan SMA sangat menonjol, yaitu mencapai 26,69 persen. Kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 22,40 persen dan SD sebanyak 22,34 persen. Adapun angkatan kerja berpendidikan tinggi (universitas) tidak lebih dari 7,75 persen tahun 2015.

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha potensial yang digeluti masyarakat Kabupaten Nagan Raya sebagai sumber penghasilan utama relatif mengalami pergeseran. Lapangan usaha pertanian (primer) merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2012, komposisi penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tersebut mencapai 88,15 persen. Komposisi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian bertambah menjadi 55,75 persen tahun 2016. Adapun proporsi penduduk yang bekerja di lapangan usaha jasa-jasa memperlihatkan penurunan dari 3.53 persen tahun 2012 menjadi 33,92 persen tahun 2016. Sebaliknya, lapangan usaha industri (sekunder) semakin tumbuh dengan menyerap tenaga kerja dari 8,32 persen tahun 2012 menjadi 18,94 persen tahun 2016.

Gambar 2.18
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

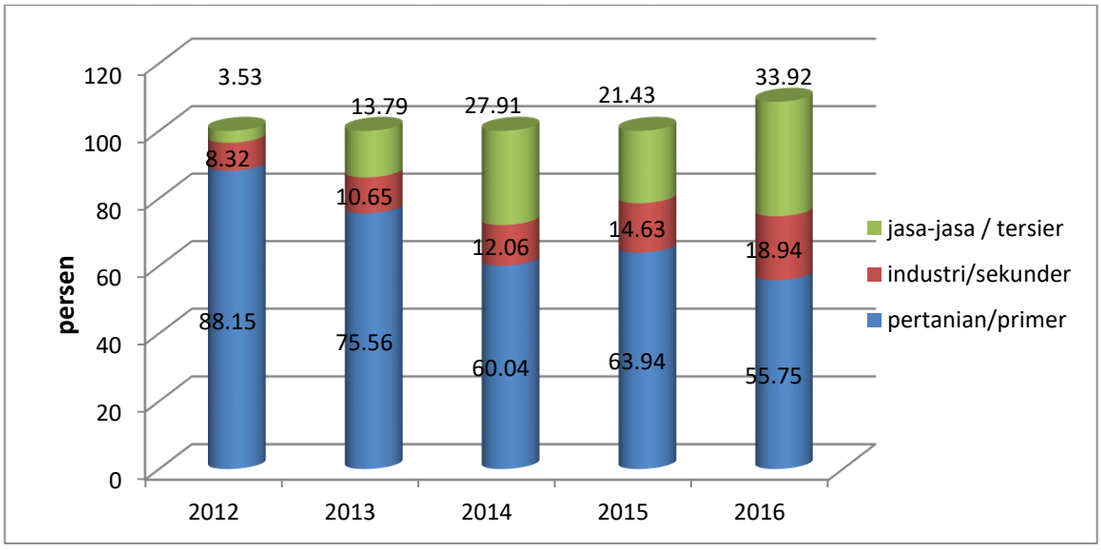

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

II.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks ini merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan

memperhatikan ketimpangan gender. Adapun IPG Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2012 berkisar sebesar 82,63 persen, Tahun 2013 sebesar 86,35 persen, Tahun 2014 sebesar 90,40 persen dan 89,62 persen pada Tahun 2015.

IPG Kabupaten Nagan Raya menunjukkan persentasi berfluktuatif dimana kondisi pada tahun 2012 lebih baik dari kurun waktu lima tahun terakhir, oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang pro gender serta mengintegrasikan program-program pembangunan di SKPK dengan Pengarusutamaan Gender.

Faktor-faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk laki-laki antara lain APS SD sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir, sedangkan faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk perempuan yaitu APS SMA sederajat, dan rasio jenis kelamin sejak lahir. Selanjutnya, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan APS SD penduduk laki-laki dan APS SMA bagi penduduk perempuan. Kesenjangan Indek Pembangunan Gender pada tahun 2012 sebesar 82,63 meningkat tajam hingga pada tahun 2014 sebesar 90,40 persen dan mengalami penurunan pada data terakhir tahun 2015 sebesar 89,62 persen.

Gambar 2.19
Grafik Indeks Pembangunan Gender Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2015

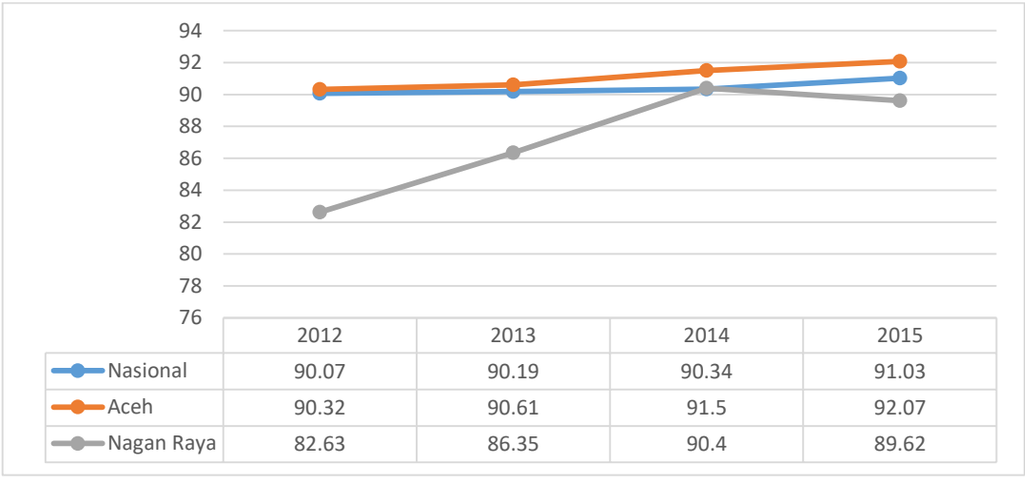

	2012	2013	2014	2015
Nasional	90.07	90.19	90.34	91.03
Aceh	90.32	90.61	91.5	92.07
Nagan Raya	82.63	86.35	90.4	89.62

Sumber : BPS Aceh, 2016

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan masih tergolong minim, dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Adapun keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terlihat sebagaimana Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2015- 2016

No	Uraian	2015	2016
1	Pekerja perempuan di pemerintah	2.083	2.188
2	Jumlah Pekerja Perempuan	18.253	18.253
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	44,70	52,27

Sumber: BPS Kab. Nagan Raya 2016-2017

3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam penyelenggaran pemilu. Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terlihat pada Tabel 2.48

Tabel 2.48
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK
Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	3	4	4	4	4
2	Jumlah total kursi di anggota DPRK	25	25	25	25	25
3	Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRK	12%	16%	16%	16%	16%

Sumber: DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, 2017

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.49
Rasio KDRT Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016

1	Jumlah KDRT	-	9	16	37	-
2	Jumlah rumah tangga	-	81944	81944	81944	-
3	Rasio KDRT		0,011 %	0,019 %	0,045%	

Sumber: DPMGP4 tahun 2012-2016

Kejadian KDRT di Kabupaten Nagan Raya yang dilaporkan dan tercatat pada tahun 2013 sebanyak 9 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,011%, di tahun 2014 tercatat 16 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,019 % dan di tahun 2015 tercatat 37 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,045 %. Seluruh kasus yang terjadi telah berhasil diselesaikan.

5. Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan terhadap laki-laki berdasarkan jenjang pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Tercatat APM pada tingkat SD/MI sebesar 98,82 persen tahun 2016, jauh lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 94,02 persen.

Kondisi APM yang memprihatinkan terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, meskipun adanya perbaikan selama lima tahun terakhir. Capaian APM SMP/MTs hanya sebesar 86,92 persen dan APM SMA/MA sebesar 64,86 persen tahun 2016. Angka APM tersebut belum mencapai angka ideal atau belum mencapai target pemerintah. Adapun tahun 2012, APM SMP/MTs sebesar 84,02 persen dan APM SMA/MA sebesar 66,69 persen.

Tidak adanya disparitas yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian APM. Data tahun 2016, memperlihatkan bahwa APM perempuan cenderung lebih baik dari APM laki-laki pada pendidikan SMA/MA, kendati belum mencapai APM ideal. Tercatat APM perempuan pada pendidikan SMA/MA sebesar 79,07 persen dan APM laki-laki sebesar 64.86 persen. Sementara pada tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APM laki-laki lebih rendah dengan pencapaian APM perempuan. Upaya perbaikan dan peningkatan APM pada tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA dilakukan melalui peningkatan pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin serta memastikan peserta didik di

setiap kecamatan (termasuk desa) mengecap pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA.

Gambar 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016

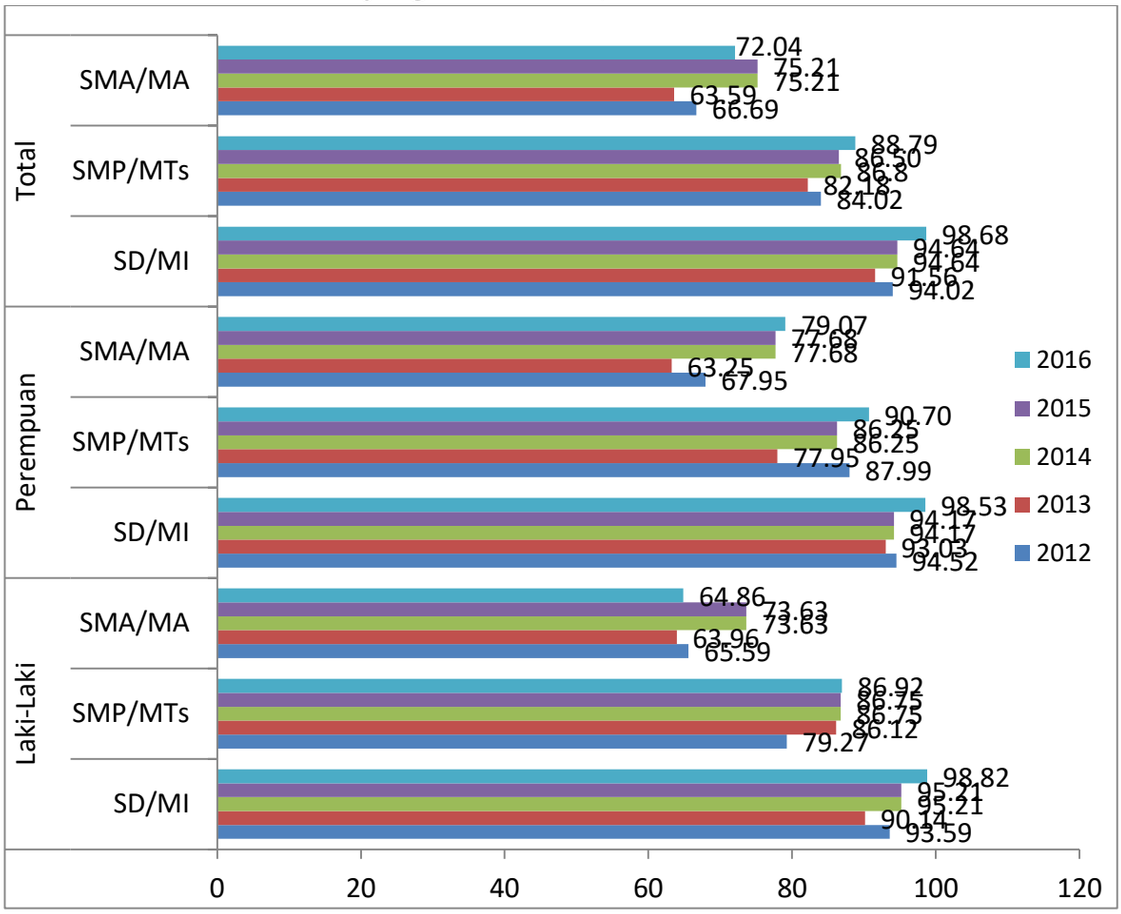

Sumber : BPS Aceh, 2017

Selanjutnya perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Nagan Raya dengan Provinsi Aceh dan Nasional di tahun 2016 adalah Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 tercatat 94,64 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan APM Provinsi Aceh yaitu 97,80 % dan APM Nasional sebesar 96,20 persen. Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya mengungguli Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs yaitu 86,50 persen. Di bandingkan dengan APM Provinsi Aceh yaitu 85,20 dan APM Nasional 77,45 Demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, Kabupaten Nagan Raya masih lebih unggul yaitu 75,21 di bandingkan dengan APM Provinsi Aceh yaitu 69,20 dan APM Nasional yaitu 59,46.

Table 2.50
Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya
Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2016

APM berdasarkan Jenjang Pendidikan	Kabupaten Nagan Raya	Aceh	Nasional

APM SD/MI	94,64	97,80	96,20
APM SMP/MTs	86,50	85,20	77,45
APM SMA/MA	75,21	69,20	59,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017

II.3.2.2.3. Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2012-2016 terjadi surplus beras dan pangan setara beras di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.51
Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Jenis/Macam	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Beras (kg)	63.380.200	128.256.700	99.748.285	109.586.100	110.598.150
2	Kebutuhan Beras (kg)	18.255.600	19.031.520	19.493.760	18.608.400	18.986.760
3	Surplus Beras (kg)	45.124.600	109.225.180	80.254.525	90.977.700	91.611.390

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

II.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah tahunan yang ada di Kabupaten Nagan Raya di tahun 2016 adalah 4,22 % Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 2.52
Timbulan sampah yang ditangani 2016

Volume Timbulan Sampah yang ditangani (m³)	**16,3**
Total Timbulan Sampah (m³)	386,56
Timbulan sampah yang ditangani	4,22 %

Sumber: DLH Nagan Raya

II.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 111.280 orang, sedangkan yang sudah tercetak KTP sebanyak 72.293 atau sebesar 64,96 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam perekaman data e-ktp masih sangat rendah dikarenakan faktor antara lainnya yang paling mendasar yaitu pusat perekaman data elektronik tersebut jauh dari pemukiman sebagian warga.

Setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran, kepemilikan akta kelahiran si anak adalah merupakan wujud pemenuhan orang tua terhadap anak, karenanya setiap kelahiran harus dilaporkan kepada pemerintah gampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kelahiran. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk adalah sebanyak 171 orang dari jumlah bayi yag lahir sebanyak 255 orang.

II.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di masyarakat. Kelembagaan PKK hingga tahun 2016 berjumlah 222 lembaga. Begitu juga dengan kelompok kepemudaan berjumlah 222 kelompok dan Desa Swadaya berjumlah 222 desa.

Program pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan saat ini belum terkoordinir secara optimal, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi-organisasi kepemudaan dalam peningkatan SDM dan produktivitas pemuda menyebabkan fokus pemberdyaan pemuda belum mengarah pada peningkatan keterampilan hidup (life skill) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup *(livelihood).* Pembinaan-pembinaan yang selama ini dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah masih bersifat parsial (satu aspek saja) dan belum menyeluruh *(holistic).* Pemerintah perlu mrancang program pemberdayaan secara berkelanjutan terutama untuk pemberdyaan pemuda, karena pemuda merupakan komponen bangsa yang sering dijadikan indikator keberhasilan ataupun kemunduran suatu daerah atau Bangsa karena pemuda merupakan pelopor perubahan *(tranformation agent)* dalam pembangunan suatu suatu daerah.

II.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan metode/alat KB yang digunakan, tampaknya metode suntik dan pil KB masih menjadi pilihan utama. Penggunaan alat KB suntik cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2012, metode suntik KB digunakan oleh 45,12 persen akseptor, dan turun menjadi 16,94 persen akseptor tahun 2016. Sedangkan untuk pil KB digunakan oleh 9,97 persen pengguna tahun 2016, turun dibanding tahun 2012 yang sebanyak 35,39 persen pengguna. Alat

ini digunakan karena kepraktisan dan kemudahannya dan kemungkinan masih dominan digunakan akseptor sampai beberapa waktu mendatang. Adapun alat KB lainnya yang digunakan seperti IUD, kondom, implan, dan MOW/MOP.

Tabel 2.53
Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas dan Pernah Kawin Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan, 2012-2016 (persen)

No	Metode Kontrasepsi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Suntik KB	45,15	45,15	58,12	45,53	16,944
2	Pil KB	35,39	35,39	23,85	31,28	9,975
3	Lainnya	19,46	19,46	18,03	23,19	8.133
4	Persentase perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB	78,48	78,48	69,91	81,91	

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

II.3.2.2.9. Perhubungan

Sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jalur angkutan perairan/laut perlu menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan jalur pengangkutan yang tersedia terutama untuk pengangkutan barang hanya lewat darat sehingga untuk mendukung pengembagan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kawasan Agro Industri maka pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga fasilitas lainnya yang dapat mendukung hadirnya tranportasi laut terutama untuk pengangkutan barang.

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah tercermin dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Selama tahun 2012-2015, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang.

Tabel 2.54
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun

	2012	**2013**	**2014**	**2015**
Jalan Kabupaten	420,74	420,83	420,84	924,43
Jumlah Kendaraan Penumpang	100	82	82	102
Rasio	4,2	5,13	5,13	9,06

Sumber: Olahan data primer

Dari table tersebut terlihat bahwa Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan di kabupaten nagan raya tercatat di tahun 2012 adalah 4,2, ditahun 2013 adalah 5,13, ditahun 2014 adalah 5,13 dan di tahun 2015 adalah 9,06.

- **Perhubungan Udara**

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Adapun jumlah penumpang datang dan berangkat melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.55
Jumlah Penumpang dating dan berangkat tahun 2012-2015

Uraian	**Tahun**				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Penumpang Datang	16.972	16.972	21.550	23.681	24.005
Penumpang Berangkat	14.592	14.592	22.437	25.599	25.249

Dari tabel tersebut telihat bahwa ditahun 2012, masyarakat bepergian ke luar daerah melalui bandara cutnyak dhien sebanyak 14.592 orang, naik hingga 25.249 orang di tahun 2016. Demikian pula masyarakat yang datang melalui bandara cutnyak dhien di tahun 2012 adalah 16.972 orang, naik hingga 24.005 orang di tahun 2016. Bandar Udara Cut Nyak Dhien menjadi bandara utama, setelah bandar udara T. Cut Ali di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi primadona masyarakat/pengusaha dalam bepergian untuk wilayah barat, Aceh.

- **Perhubungan Laut**

Di samping transportasi darat, jalur transportasi laut juga sangat berperan dalam mendukung kelancaran perputaran orang, barang,

dan jasa. Perannya juga begitu besar dalam percepatan ekonomi daerah di wilayah pesisir. Namun, aktivitas jasa transportasi laut di Nagan Raya belum ada. Kondisi ini berkait erat minimnya sarana dan prasarana pendukung.

II.3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi semakin menunjukkan kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat telah berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dari berbagai investasi dunia usaha/swasta dan BUMN, merupakan pendorong semakin teraksesnya layanan internet dan informasi bagi masyarakat Layanan komunikasi berupa telepon seluler/handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.

Penggunaan handphone merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari saat ini. Kendati demikian, telepon rumah juga masih diminati masyarakat sebagai sarana komunikasi. Sesuai data PT. Telkom Indonesia Divre I Sumatera area pelayanan Meulaboh, tercatat pemasangan baru sambungan telepon di Kabupaten Nagan Raya tahun mencapai 74 sambungan tahun 2015.

Tabel 2.56
Jumlah Pemasangan Baru Sambungan Telepon, Tahun 2012-2015

Bulan	2012	2013	2014	2015
Januari	9	10	17	10
Februari	11	11	16	4
Maret	13	13	9	3
April	9	8	10	3
Mei	12	11	10	2
Juni	12	12	2	1
Juli	14	14	9	1
Agustus	7	7	9	8
September	10	10	11	7
Oktober	12	12	12	10
Nopember	8	8	9	12
Desember	9	9	4	11
Jumlah	126	125	118	74

II.3.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nagan Raya (2016), mencatat bahwa jumlah industri tradisional di Nagan Raya adalah sebanyak 374 unit. Penyumbang terbanyak pada industri ini adalah industri bahan galian, yaitu sebanyak 496 unit. Jumlah industri makanan dan

tembakau berada pada posisi berikutnya, yaitu sebanyak unit 228. Industri barang lainnya, dan industri jasa juga cukup memadai. Tahun 2016, tercatat industri bahan lainnya sebanyak 150 unit dan industri jasa sebanyak 420 unit.

Tabel 2.57
Kondisi Industri Tradisional
di Kabupaten Nagan Raya, 2016 (Unit)

Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau	Industri Kain dan Kulit	Industri Kayu	Industri dari Besi	Industri dari Bahan Galian	Industri dari kertas	Industri Barang Lainnya	Industri Jasa	Jumlah
Darul Makmur	96	102	53	14	1	7	24	32	329
Tripa Makmur	2	22	9	3	-	1	2	17	56
Kuala	107	57	18	22	496	16	11	25	752
Kuala Pesisir	88	58	19	13	1	1	24	70	292
Tadu Raya	32	15	11	2	1	2	19	47	129
Beutong	73	32	20	1	-	6	74	53	259
Beutong Ateuh Banggalang	3	2	4	-	-	-	5	29	43
Seunagan	228	102	28	11	-	13	199	68	650
Suka Makmue	107	53	10	1	4	5	34	25	239
Seunagan Timur	140	79	29	9	1	6	150	54	468
Jumlah	876	522	201	76	505	75	542	420	3.217

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian Kab. Nagan Raya, 2017

Industri yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya masih skala kecil dan menengah. Distribusi aktivitas industri tersebut relatif merata di setiap kecamatan serta memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Sentra pengembangan industri makanan dan tembakau terdapat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, dan Kuala Pesisir. Mayoritas industri kayu berada di Seunagan, Beutong Ateuh Banggalang, Seunagan Timur, dan Beutong.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.58
Jumlah dan Status Koperasi
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Koperasi	Unit	202	201	201	201	190
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	62	83	83	83	83
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	140	113	113	113	113
Jumlah Koperasi yang dibina	Unit	22	20	20	20	20
Jumlah Anggota Koperasi	Orang	6,282	6.330	6.330	6.370	6.400

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Pada tahun 2012, jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 202 unit koperasi. Angka tersebut meningkat menjadi 196 unit pada tahun 2016. Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong. Sejalan dengan lahirnya undang-undang desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuhkembangkan percepatan pembangunan desa/gampong. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota.

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan *(deposits)*, kredit *(loan)*, pembayaran sebagai transaksi jasa *(payment service)* serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Jumlah BPR sampai dengan tahun 2016 sebanyak 2 unit.

Tabel 2.59

Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah BPR/LKM aktif	2	2	2	2
2.	Jumlah seluruh BPR/LKM	2	2	2	2
3.	Persentase usaha mikro dan kecil	100%	100%	100%	100%

II.3.2.2.12. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2013 dan 2014 jumlah investor (PMDN) adalah 38 dan (PMA) 12 perusahaan, pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 13 perusahaan untuk PMDN dan dan 6 perusahaan untuk PMA. Dan pada tahun 2016 jumlah investor adalah 6 perusahaan untuk PMDN dan 5 Perusahaan untuk PMA, penurunan jumlah investor ini terjadi karena ada perusahaan yang tidak melapor pada tahun 2015 dan 2016 sementara perusahaan tersebut masih aktif beroperasi.

Tabel 2.60
Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	PMA	12	12	6	5
2	PMDN	38	38	13	6
3	Jumlah	50	50	19	11

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi di sektor Perkebunan merupakan investasi yang paling dominan di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diikuti investasi sektor kelistrikan seperti pembangunan PLTU di suak Puntong, PLTA di Kecamatan Beutong, Beutong Ateuh Banggalang dan Kecamatan Darul Makmur. Dengan nilai investasi mencapai Rp. 16.602.475.500,- atau 16,60 Milyar Rupiah pada tahun 2013 dan Rp. 21.550.941.000, atau 21,55 Milyar Rupiah pada Tahun 2014,

mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi Rp. 177.149.935.170,- atau 177,15 Milyar rupiah, dan pada tahun 2016 menurun sebesar Rp. 89.792.941.770,- atau 89,80 Milyar rupiah.

Pada Tahun 2013 terdapat 38 perusahaan dalam negeri yang melakukan investasi di Kabupaten Nagan Raya dengan nilai investasi sebesar Rp.1.807.920.251.822,- atau 1,8 Milyar rupiah. Pada Tahun 2014 terdapat 38 perusahaan dalam negeri yang berinvestasi dengan nilai investasi sebasar Rp. 2.251.350.778.455,- atau 2,25 Milyar rupiah. Dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 penanaman modal dalam negeri terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 nilai investasi perusahaan dalam negeri di Kabupaten Nagan Raya mencapai Rp. 83.170.758.724,- atau 83,2 Milyar rupiah. Dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi Rp. 406.269.228.604 atau 406,3 Milyar rupiah.

Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional, yaitu investasi penanaman modal dalam negeri (PNDM) dan penanaman modal asing (PMA) dari tahun 2013 sampai dengan 2016 di kabupaten Nagan Raya fluktuatif, dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Pertumbuhan Nilai Investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Nilai Investasi bersekala Nasional(PMA+PMDN)	1.824.522.727.322	2.272.901.719.455	260.320.693.894	496.062.170.374
2	PMA	16.602.475.500	21.550.941.000	177.149.935.170	89.792.941.770
3	PMDN	1.807.920.251.822	2.251.350.778.455	83.170.758.724	406.269.228.604

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja PMA ditambah dengan jumlah tenaga kerja PMDN, jumlah penyerapan tenaga kerja di kabupaten Nagan Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 jumlah serapan tenaga kerja sebesar 2.262 orang, tahun 2014 sebesar 2.351 orang, tahun 2015 sebesar 2.721 orang dan pada tahun 2016 sebesar 3.252 orang.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh

perusahaan (PMA/PMDN). Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 45, 24 dan pada tahun 2016 menjadi 286,54. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2013-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Tenaga Kerja PMA	1957	1958	24	65
2.	Tenaga Kerja PMDN	305	393	2697	3087
3.	Jumlah Penyerapan tenaga kerja	2.262	2.351	2.721	3.152
4.	Jumlah PMA/PMDN	50	50	19	11
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	45,24	47,02	143,21	286.54

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Realisasi nilai investasi PMDN dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan fluktuatif, pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 19.69 %., pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2606.9 % dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 79.528%. Tahun tahun 2016 terjadi kenaikan investasi yang sangat signifikan salah satu penyebabnya adalah ada beberapa perusahaan yang memberikan laporan tahunan nya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya, sementara perusahaan tersebut masih beroprasi. Jadi data untuk tahun 2016 masih bersifat sementara.

Tabel 2.63
Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN
Kabupaten Nagan Raya 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi	Na	443.430.526.633	(2.168.180.019.731)	323.098.469.880
2	Realisasi PMDN tahun sebelum	1.807.920.251.822	2.251.350.778.455	83.170.758.724	406.269.228.604

	evaluasi				
3	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Na	19.696.2	(2606.9)	79.528

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

II.3.2.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah lapangan /sarana olahraga	Unit	40	40	40	40	40
2	Jumlah Klub Olah raga	Klub	197	197	197	197	197
3	Jumlah cabang Olah raga	Buah	10	10	10	10	10
4	Jumlah Organisasi kepemudaan	Buah	7	7	7	7	7
5	Jumlah Pemuda	Orang	39,860	39,860	39,860	39,860	39,960

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah lapangan/sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2016 berjumlah 40 unit . Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2017 adalah sebanyak 197 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 10 cabang.

Tabel 2.65
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Indikator	Tahun

		2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0.05	0.00	0.07	0.04	0.08
3	Cakupan pembinaan atlet muda	0.51	0.62	0.48	0.51	0.29
4	Jumlah atlet berprestasi	0	0	0	6	3
5	Jumlah prestasi olahraga	3	0	5	3	5

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Nagan Raya sangat minim memperoleh prestasi di bidang olahraga, hal ini ditunjukkan dengan perolehan 5 prestasi di tahun 2016, yaitu cabang olahraga silat, karate, taekwondo, bulu tangkis dan tenis meja . Minimnya jumlah prestasi olahraga ini juga sangat dipengaruhi dengan jumlah atlet yang berprestasi yang juga mengalami penurunan, pada tahun 2016 hanya ada 3 orang atlet yang berprestasi, yaitu atlet canagn olahraga silat, taekwondo dan bulutangkis. Hal ini juga disebabkan karena sedikit sekali pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap para atlet muda, hal ini ditunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pembinaan tersebut mengalami penurunan yaitu 0,29% pada tahun 2016.

II.3.2.2.16. Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang yang dikelola secara terpadu juga tidak mengalami peningkatan. Berdasarkankan data dari tahun 2012 – 2016 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh, Mesjid Peuleukung dan Museum Alquran.

Sedangkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tidak ada sama sekali. Padahal Kabupaten Nagan Raya memiliki 17 tempat bersejarah, 18 mesjid dan 45 makam.

Pengembangan sektor kebudayan di Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal. Gedung kesenian yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya tersedia 1 unit. Begitu juga dengan organisasi yang berkiprah di bidang seni di Kabupaten Nagan Raya hanya 1 organisasi, sementara Group Kesenian di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat pada Tahun 2016 sebanyak 89 sanggar.

Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan karena sektor kebudayaan akan dapat menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini

disebabkan karena pilar pariwisata bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya akan terjaga kelestariannya bila adanya lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian.

II.3.2.2.17. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan Kabupaten di Nagan Raya dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 hanya satu, sedangkan perpustakaan gampong mengalami peningkatan. Tahun 2011 jumlah perpustakaan gampong hanya 34, sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 44 unit.

Tabel 2.66
Jumlah Pustaka Daerah Menurut Kecamatan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Unit)

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
Seunagan	5	5	5	5	7
Beutong	3	3	3	3	3
Seunagan Timur	4	4	4	4	4
Suka Makmue	3	5	5	5	5
Kuala	5	6	6	6	6
Kuala Pesisir	4	5	5	5	6
Tadu Raya	3	4	4	4	4
Darul Makmur	4	4	4	4	4
Tripa Makmur	2	3	3	3	3
Beutong Ateuh Banggalang	1	2	2	2	2
Jumlah	34	41	41	41	44

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Perpustakaan Daerah Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat sebanyak 1.763 orang tahun 2016 bila dibandingkan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2012 sebanyak 525 orang. Hal ini didukung dengan jumlah koleksi buku yang dimiliki sejumlah 2.870 buah pada tahun 2016.

II.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

II.3.3.1. Pariwisata

Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.67
Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis objek wisata	Jumlah Objek

			Wisata
1	Beutong	Wisata Alam Krueng Isep	5
		Panorama Gunung Singgah Mata	
		Bendungan Irigasi Jeuram	
		Masjid Dayah	
		Makam Teungku Di Seumot	
2	Kuala Pesisir	Wisata Pantai Indah Naga Permai	2
		Wisata Pantai Seunagan	
3	Tripa Makmur	Wisata Pantai Suak Dama	3
		Arung Jeuram Krueng Tripa	
		Situs Kerajaan Islam Ujong Raja	
4	Tadu Raya	Danau Laut Tadu	2
		Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani	
5	Seunagan Timur	Makam Habib Muda Seunangan	1
6	Kuala	Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh	1
7	Suka Makmue	Taman Makam Pahlawan	1
8	Darul Makmur	Air Terjun Alue Waki	1
9	Beutong Ateuh Banggalang	Batee Meucureh Cut Nyak Dhien	1
10	Seunagan	Makam Indatu Kuta Aceh	1
Jumlah			17

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2017

Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari

beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta. Jumlah ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel / wisma / losmen sebagai salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim. Terdapat 1 unit hotel dan 4 unit wisma yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dengan fasilitas memadai. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan bukan hanya fasilitas akomodasi yang sangat diperlukan tapi juga sangat didukung dengan sarana pendukung di kawasan wisata memadai. Jumlah sarana dan fasilitas pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Jenis Sarana	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Hotel/Wisma/Losmen	Unit	4	4	5	5	5
2	Rumah Makan / Restoran	Unit	25	25	25	26	27
3	Warung Kopi/Cafe	Unit	15	26	27	28	30

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2017

II.3.3.2. Pertanian.

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.69

Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,68	40,37	40,75	42,59	45,55
	1. Pertanian,Peternakan dan Jasa Pertanian	32,68	34.78	35,13	37,05	40,05
	2. Kehutanan dan Penebangan kayu	3,48	3,53	3,56	3,48	3,44
	3. Perikanan	1,99	2,05	2,05	2,05	2,07

Komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nagan Raya, meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedele, dan ubi kayu. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar. Tahun 2012, areal lahan yang ditanami padi sebanyak 17.348 ha. Luas lahan tanam padi tersebut meningkat drastis menjadi 25.969,4 .ha tahun 2015. Akhir tahun 2016, lahan sawah yang ditanami padi bertambah menjadi 34.527,1 ha. Tahun 2016, produksi padi di Kabupaten Nagan Raya mencapai 170.15 ton, tertinggi selama lima tahun terakhir. Adapun berkisar diatas rata-rata produktivitas lahan sawah berkisar diatas 65.0 Kw selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.70
Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi					
	Produksi (ton)	97,508	197,318	153,458	168,594	170,151
	Luas areal tanam(ha)	17,348	33,94	33,242	25,969	34,527
	Luas areal panen (ha)	17,348	33,504	31,403,26	25,969,4	26,177
	Produktivitas padi (ton/ha)	56,2	58,9	48,9	64,9	65,0
2	Jagung					
	Produksi(ton)	1,023.12	1.152	240,0	222.60	309,10
	Luas areal tanam (ha)	1,205	1,28	245	284	730

	Luas areal panen (ha)	1,176	1,280	240	212	281
	Produktivitas jagung(ton/ha)	20,6	20,9	33,5	35	64,5
3	Kedelai					
	Produksi (ton)	173.40	105.40	170.00	136.00	154.00
	Luas areal tanam (ha)	860	577	85	57	637
	Luas areal panen (ha)	867	527	85	68	407
	Produktivitas kedelai(ton/ha)	13,1	13,2	12,3	17,6	23,1
4	Kacang Tanah					
	Produksi (ton)	4.950	4,860	684.0	460,0	567,2
	Luas areal tanam (ha)	1,22	1,128	171	94	94
	Luas areal panen (ha)	1,239	1,215	171	115	162
	Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha)	118,6	18,4	19,3	20,0	34,0
5	Kacang Hijau					
	Produksi (ton)	219.0	37.5	15.0	63.00	49.5
	Luas areal tanam (ha)	150	26	21	41	42
	Luas areal panen (ha)	146	25	10	31	31
	Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha)	0,95	0,71	0,71	12,00	15
6	Ubi Kayu					
	Produksi (ton)	1.071	879.0	870.0	222	1,241
	Luas areal tanam (ha)	385	332	305	69	152
	Luas areal panen (ha)	357	293	290	74	104
	Produktivitas ubi kayu (ton/ha)	20,6	20,9	33,5	35	64,5
7	Ubi Jalar					
	Produksi (ton)	680	126	250	170	1,088
	Luas areal tanam (ha)	301	72	113	52	84

	Luas areal panen (ha)	272	65	100	68	83
	Produktivitas ubi jalar (ton/ha)	101,0	98,3	98,4	101,0	250

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh kelompok tani tahun 2012-2016 sebagai berikut.

Tabel 2.71
Pembinaan Kelompok Tani
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (APBA, OTSUS dan APBN)	180	497	503	786	959
2	Jumlah kelompok tani	705	740	1.292	1.107	1.107
3	Cakupan bina kelompok tani (%)	25,53 %	67,16 %	38,93%	71,00%	86,63%

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi kelompok tani sebanyak 1.107 kelompok, UPJA 51 unit, kios pertanian 24 unit, KTNA 28 kelompok, koperasi tani 10 unit, BPP 10 unit, dan BBU 2 unit, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Jenis Kelembagaan Pertanian
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Jenis Kelembagaan	Satuan	Jumlah
1	BBU	Unit	2
2	Koperasi Tani	Unit	10
3	UPJA	Unit	51
4	Badan Penyuluh Pertanian (BPP)	Unit	10
5	Kios Pertanian	Unit	34
6	Kelompok Tani	Unit	1.107
7	Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Unit	78
Jumlah			1.292

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang besar dalam peternakan, terutama ternak besar sapi dan kerbau. Potensinya juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan mengingat masih tersedianya bahan baku sebagai sumber pakan ternak. Selama lima tahun terakhir, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Nagan Raya cenderung berluktuatif. Tahun 2012, populasi sapi di Kabupaten Nagan Raya mencapai 9,032 ekor. Populasi sapi tersebut meningkat drastis menjadi 10,159 ekor tahun 2015. Tahun berikutnya populasi sapi terus mengalami kenaikan hingga menjadi 10.463 ekor tahun 2016. Adapun kerbau sebanyak 9.027 ekor tahun 2012, juga terus meningkat hingga menjadi 9.808 ekor tahun 2016.

Gambar 2.21
Perkembangan Populasi Ternak
Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Ekor)

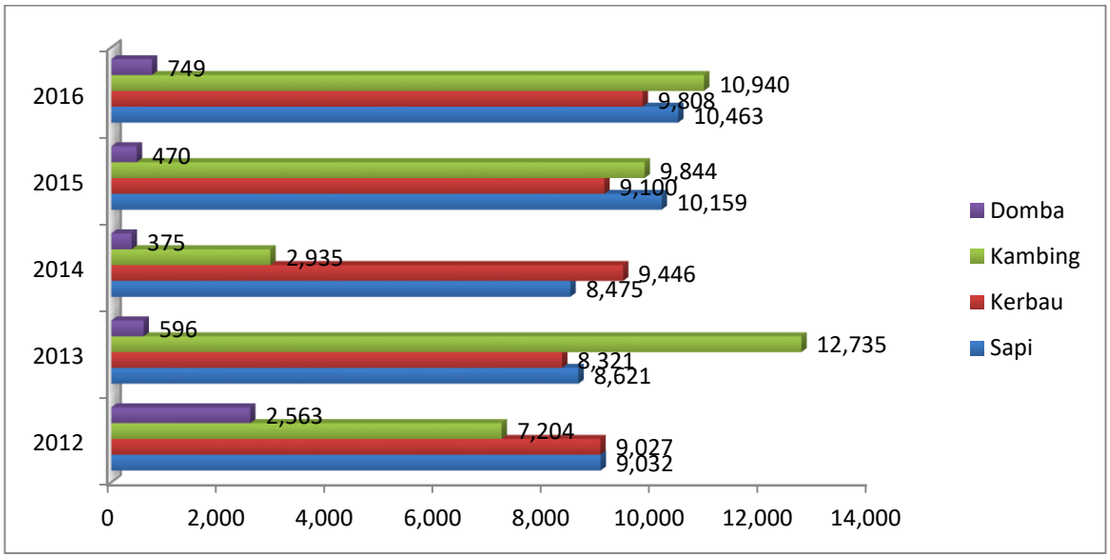

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Sentra pemeliharaan sapi terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Kecamatan Darul Makmur. Beberapa kecamatan lainnya yang merupakan juga sentra pemeliharaan sapi meliputi Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala. Untuk peternakan kerbau, sentra pemeliharaannya terdapat di Kecamatan Seunagan, disamping itu juga Kecamatan Seunagan Timur dan Beutong. Populasi ternak besar dan kecil menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Populasi Ternak Kecil dan Besar Menurut Kecamatan, Tahun 2016

Kecamatan	Jenis Ternak (ekor)			
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Darul Makmur	2.265	160	1924	85
Tripa Makmur	771	373	105	64

Kuala	1.466	1.054	1.464	72
Kuala Pesisir	1.393	827	1.023	75
Tadu Raya	1.769	770	1.277	60
Beutong	848	1.132	2.542	53
Beutong Ateuh Banggalang	250	616	693	62
Seunagan	627	1.997	895	86
Suka Makmue	464	1.283	892	97
Seunagan Timur	610	1.596	125	94
T o t a l	10.463	9.808	10.940	748

Selain ternak besar, ternak ukuran sedang seperti kambing dan domba pun cukup banyak. Terdapat 1,094 ekor kambing dan 749 ekor domba dipelihara oleh peternak di Kabupaten Nagan Raya (kondisi tahun 2016). Sentra pemeliharaan kambing terbesar di Kabupaten Nagan Raya adalah Kecamatan Seunagan, Kuala, Darul Makmur, Tadu Raya,Seunagan Timur dan termasuk juga BeutongS. Untuk ternak domba, adanya kecenderungan semakin menurun selama lima tahun terakhir. Tahun 2012, populasi domba di Kabupaten Nagan Raya mencapai 2,563 ekor. Untuk ternak domba, sentra pemeliharaannya relatif merata di setiap kecamatan.

II.3.3.3. Perkebunan

Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, termasuk sumber pendapatan masyarakat. Dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dimana secara langsung ikut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi areal yang luas untuk pengembangan perkebunan mencapai 77.164 Ha.

Komoditas kelapa sawit merupakan andalan perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016), perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit terus meningkat signifikan. Rata-rata luas areal pengembangan kelapa sawit meningkat hampir 19,32 persen setiap tahunnya (periode 2012-2016). Tahun 2012, tercatat luas areal perkebunan kelapa sawit 39,322 ha, sementara tahun 2016 telah mencapai 49,400 ha.

Gambar 2.22
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

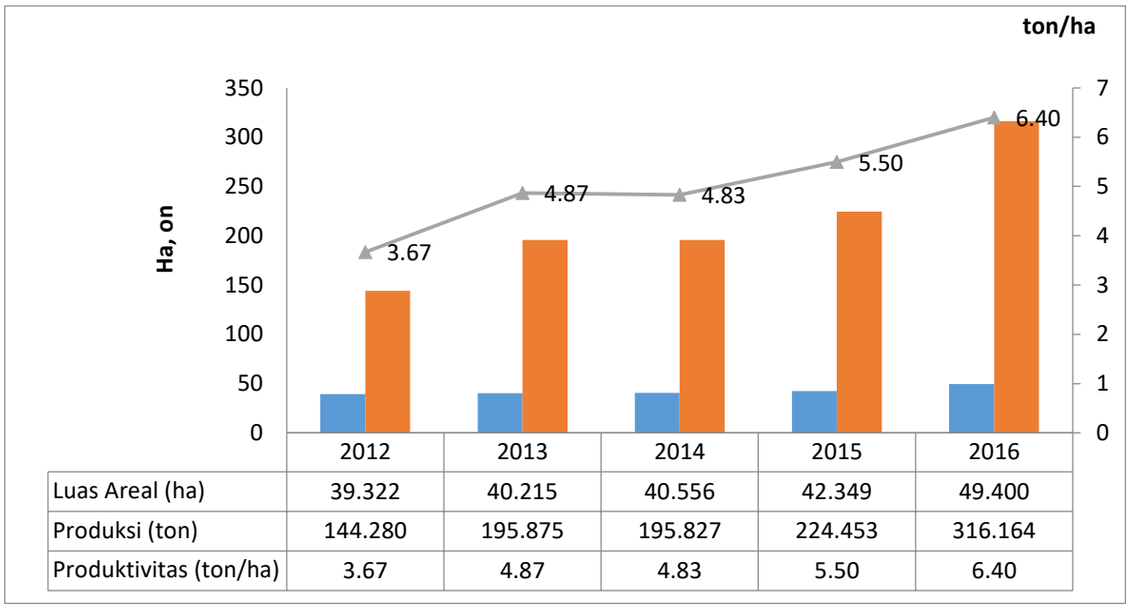

	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Areal (ha)	39.322	40.215	40.556	42.349	49.400
Produksi (ton)	144.280	195.875	195.827	224.453	316.164
Produktivitas (ton/ha)	3.67	4.87	4.83	5.50	6.40

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2017

Luas tanam yang cenderung bertambah berimplikasi positif terhadap peningkatan produksi kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2016, tercatat produksi kelapa sawit di Nagan Raya sebanyak 316,164 ton, meningkat dari produksi tahun 2012 (sebanyak 144,280 ton). Selama periode 2012-2016, produksi kelapa sawit meningkat rata-rata hampir 31,61 persen/tahun.

Karet merupakan komoditas andalan ekspor dan terus dikembangkan petani di Nagan Raya. Luas areal yang ditanami petani memperlihatkan peningkatan. Tahun 2012, tercatat areal karet yang ditanami petani berjumlah 11,549 ha. Akhir tahun 2016, areal penanaman komoditas karet telah meningkat menjadi 14.052,86 ha, atau naik rata-rata hampir 21,67 persen setiap tahunnya. Meskipun areal penanaman karet meningkat, namun produksi karet masih terbatas. Tahun 2012, produksi karet di Nagan Raya telah mencapai 3.386 ton. Sementara tahun 2016 produksi karet meningkat menjadi 18.387,3 ton.

Gambar 2.23
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

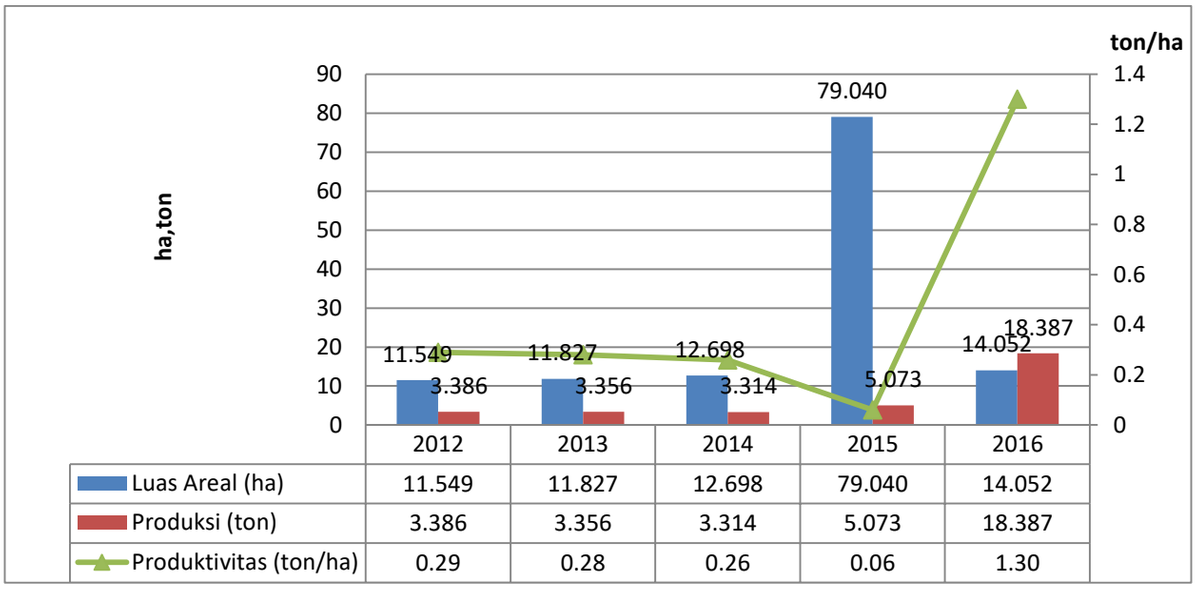

	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Areal (ha)	11.549	11.827	12.698	79.040	14.052
Produksi (ton)	3.386	3.356	3.314	5.073	18.387
Produktivitas (ton/ha)	0.29	0.28	0.26	0.06	1.30

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya 2017

Kakao sebagai komoditas ekspor juga ditanami petani Nagan Raya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016), areal perkebunan kakao atau bahan baku coklat di Kabupaten Nagan Raya tidak meningkat. Komoditas andalan ekspor tersebut ditanami petani seluas 5.311,56 ha tahun 2016. Angka tersebut jauh lebih rendah dari tahun 2012 yang seluas 5.372 ha. Kondisi ini menandakan bahwa minat petani untuk membudidayakan coklat sebagai komoditas andalan daerah semakin menurun.

Sampai akhir tahun 2016, produksi kakao di Kabupaten Nagan Raya tercatat 2.821,44 ton. lima tahun sebelumnya produksi kakao masih sebanyak 1.330 ton. Itu artinya produksi kakao meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun luas areal penanaman kakao perkebunan rakyat menurun, namun tingkat produktivitasnya masih relatif stabil selama lima tahun terakhir. Dibanding luas areal, produktivitas yang dicapai masih relatif rendah, yaitu rata-rata 1.500,00 ton/ha (kondisi tahun 2016).

Gambar 2.24
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

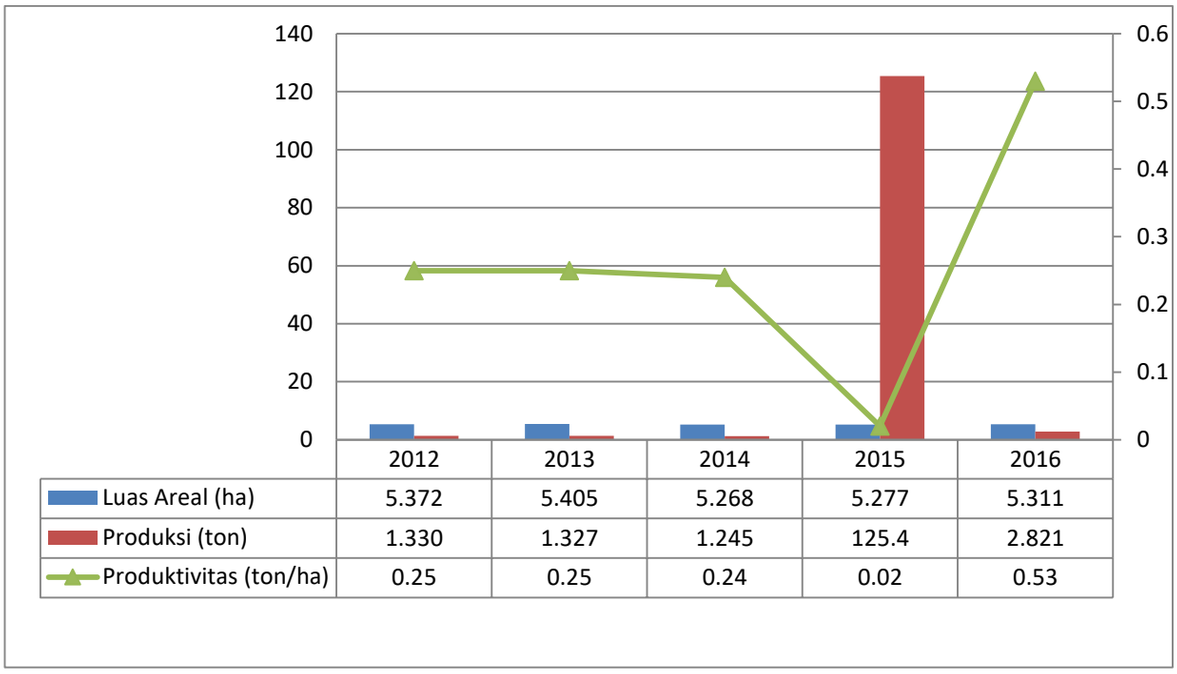

	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Areal (ha)	5.372	5.405	5.268	5.277	5.311
Produksi (ton)	1.330	1.327	1.245	125.4	2.821
Produktivitas (ton/ha)	0.25	0.25	0.24	0.02	0.53

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2017

Komoditas kelapa dalam memperlihatkan penurunan luas tanam di Kabupaten Nagan Raya. Adanya kecenderungan petani untuk beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan peningkatan pendapatan, disamping juga didukung kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk pengembangan komoditas lain, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Penurunan luas tanam kelapa dalam juga berkait erat dengan kurangnya pemeliharaan tanaman. Pada tahun 2012, luas areal komoditas kelapa dalam mencapai 1.350 ha, jauh lebih rendah dari luas areal budidaya kakao. Tahun berikutnya, luas lahan budidaya kelapa dalam semakin meningkat menjadi 1.351 ha (tahun 2013), 1.405,5 ha (tahun 2014), 1.450,8 ha (tahun 2015). Akhir tahun 2016, tercatat luas tanam kelapa dalam 1.486,60 ha.

Luas tanam yang semakin bertambah menyebabkan produksi kelapa dalam meningkat drastis. Akhir tahun 2016, tercatat produksi kelapa dalam 1.375,13 ton, jauh lebih tinggi dari produksi tahun 2012 yang mencapai 658 ton. Tingkat produktivitas lahan juga meningkat, yaitu rata-rata produksi 1.500,00 ton/ha. Gambaran perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas komoditas kelapa dalam sebagaimana tertera pada gambar berikut.

Gambar 2.25
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

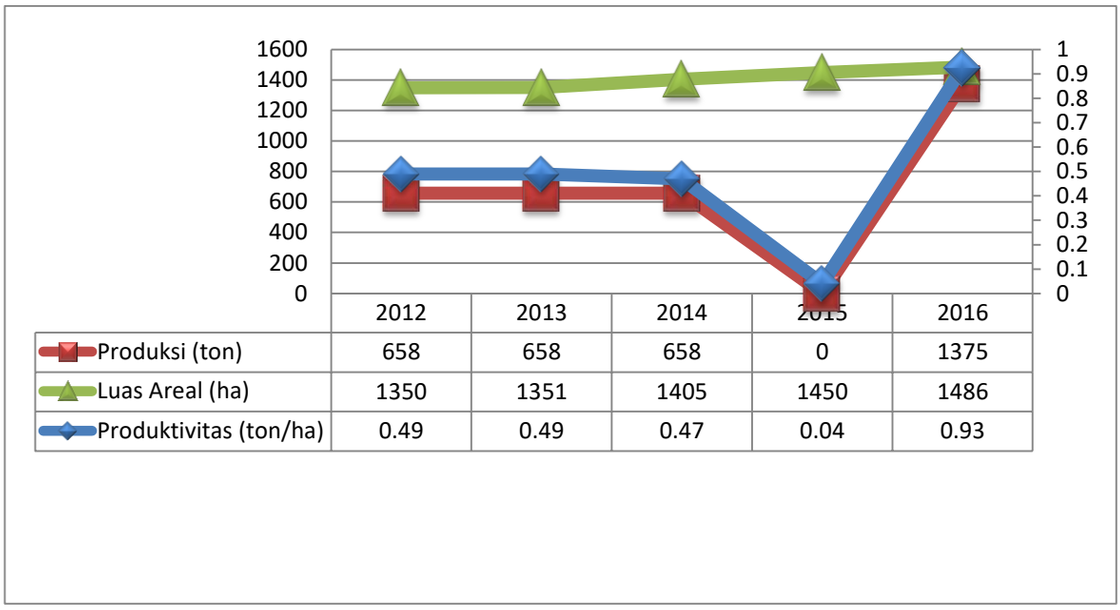

	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi (ton)	658	658	658	0	1375
Luas Areal (ha)	1350	1351	1405	1450	1486
Produktivitas (ton/ha)	0.49	0.49	0.47	0.04	0.93

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2017

Pengembangan komoditi perkebunan di Nagan Raya terutama untuk perkebunan rakyat selama ini masih dihadapkan beberapa permasalahan substansial yang hampir sama dengan permasalahan di sektor pertanian pangan dan hortikultura, yaitu permasalahan ketersediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen. Sebagian besar bibit unggul masih harus didatangkan dari daerah lain dan sulit diakses oleh petani, serta harga yang relatif mahal. Akibatnya petani cenderung menggunakan bibit yang bukan klon/varietas anjuran sehingga berimbas pada rendahnya produktivitas perkebunan rakyat terutama jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Permasalahan pasca panen terutama berkaitan dengan masih rendahnya harga komoditi di tingkat petani sehingga hasil kebun tidak dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya harga komoditi perkebunan ditingkat petani disebabkan terutama akibat rendahnya kualitas pengolahan hasil panen, lemahnya sistem kelembagaan petani, dan minimnya ketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan.

II.3.3.4. Energi dan Sumberdaya Mineral

Fasilitas Listrik

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero). Selama tahun 2012-2016, produksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terus meningkat. Produksi listrik tahun 2012 sebesar 400.627 Kwh. Produksi listrik tersebut meningkat menjadi 560.160 Kwh tahun 2016. Adapun produksi listrik pada tahun 2015 sedikit berkurang dibanding tahun 2016, yaitu sebesar 440.423 Kwh. Daya terpasang listrik sebesar 150 Kw tahun 2016, sementara tahun 2012 daya terpasang sebesar 1.150 kwh. Tahun 2013, daya

terpasang listrik mencapai 1.287 Kw, tertinggi sepanjang lima tahun terakhir (2012-2016).

Tabel 2.75
Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten nagan Raya, Tahun 2012-2016

Tahun	Daya Terpasang (Kw)	Produksi Listrik (Kwh)	Listrik Terjual (Kwh)
2012	1.150,00	400.627,00	64.535.156,00
2013	1.287,00	576.216,00	68.960.058,00
2014	1.020,00	664.703,00	66.670.101,00
2015	368,00	440.423,00	58.471.798,00
2016	150,00	560.160,00	67.198.972,00

Sumber : PT. PLN Kab. Nagan Raya 2017

Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. PLTU tersebut merupakan bagian integral dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia. PLTU tersebut memiliki kapasitas listrik 2x110 Megawatt (MW). Luas area PLTU Nagan Raya mencapai 70 hektar, dengan total investasi senilai Rp.2,36 triliun. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

II.3.3.5. Perdagangan

Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini, pusat perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Suka Makmue.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya yaitu selalu di atas 10 persen pada 2012-2016. Tahun 2016 kategori ini memiliki peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya setelah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi yang semakin besar dari tahun ke tahun ini didukung oleh tingkat daya beli masyarakat yang meningkat. Kontribusi atau peranan kategori

ini pada tahun 2016 mencapai 11,69 persen yang meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 10,50 persen.

Gambar 2.26
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2012-2016



BPS Nagan Raya, 2017

II.3.3.6. Perindustrian

Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Dilihat dari segi kontribusi atau peranannya terhadap PDRB Kabupaten Nagan Raya, sektor ini memiliki kontribusi di atas dua persen dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Kontribusi ini relatif masih kecil dalam membentuk perekonomian yang kuat di kabupaten Nagan Raya. Walaupun begitu, kontribusinya memiliki tren naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kategori ini memiliki kontribusi sebesar 2,36 persen dan naik menjadi 3,53 persen pada tahun 2016. Kenaikan kontribusi tersebut seiring dengan naiknya kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini karena sektor ini didominasi peranannya oleh jenis industri makanan dan minuman yang mengolah hasil-hasil dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seperti industri pengolahan padi, industri CPO (Crude Palm Oil) dan industri lainnya yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA).

Gambar 2.27
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan (persen), 2012-2016



BPS Nagan Raya, 2017

II.3.3.7.Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 16 lokasi transmigrasi dari tahun 2012-2016. Tahun 2012, penempatan jumlah KK pada 16 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 2.596 KK. Pada tahun 2016, jumlah KK bertambah menjadi sebanyak 3.045 KK, atau bertambah sebanyak 17,30 persen dari tahun 2012. Jumlah KK terbanyak pada tahun 2016 di lokasi transmigrasi UPT.V. Lamie Gampong Krueng Itam, yaitu sebanyak 425 KK. UPT.Despot Alue Siron Gampong Alue Siron terdapat sebanyak 173 KK pada tahun 2016. Jumlah KK tersebut tidak terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang juga berjumlah 173 KK. Adapun penempatan KK yang relatif sedikit terdapat di lokasi transmigrasi UPTIII Seneuam Gampong Sumber Makmur. Di lokasi tersebut hanya terdapat 87 KK tahun 2012-2016. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2016

No	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016
1	UPT.I. Krueng Tadu Gampong Simpang Jaya	150	150	150	133	133
2	UPT.II. Krueng Tadu Gampong Batu Raya	171	171	171	159	159
3	UPT.III. Krueng Tadu Gampong Sember Daya	211	211	211	210	210
4	UPT.IV. Krueng	126	126	126	147	147

	Tadu Gampong Bumi Sari					
5	UPT.V. Lamie Gampong Krueng Itam	340	340	340	425	425
6	UPT.VI. Lamie Gampong Rantau Selamat	310	310	310	315	315
7	UPT.VII. Lamie Gampong Lamie Gagak	96	96	96	96	96
8	UPT.I. Seneuam Gampong Blang Luah	361	361	361	361	405
9	UPT.II. Seneuam Gampong Makarti Jaya	158	158	158	158	158
10	UPT.III. Seneuam Gampong Sumber Makmur	87	87	87	87	87
11	UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti	313	313	313	313	364
12	UPT.Despot Alue Siron Gampong Alue Siron	173	173	173	173	173
13	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	100	100	100	100	100
14	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	0	0	80	100	100
15	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	0	0	30	33	53
16	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	0	0	30	80	120
Jumlah		**2,596**	**2,596**	**2,736**	**2,890**	**3,045**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Adapun jumlah Transmigrasi lokal kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2012-2016 ada empat lokasi yang telah menempatkan sebanyak 100 kk pada tahun 2012 kemudian bertambah 373 kk pada tahun 2016.

Tabel 2.77
Jumlah Transmigrasi Lokal Tahun 2012-2016

NO	NAMA TRANSMIGRASI LOKAL	2012	2013	2014	2015	2016
1	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	100	100	100	100	100
2	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	0	0	80	100	100
3	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	0	0	30	33	53
4	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	0	0	30	80	120
Jumlah		100	100	240	313	373

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Sedangkan untuk Transmigrasi Swakarsa yang terhitung sejak tahun 2012-2016 Kabupaten Nagan Raya telah menempatkan sebanyak 1037 jiwa transmigran, yang tersebar disembilan kecamatan. Dengan penempatan terbanyak berada di Seunagan Timur, Seunagan dan Tadu Raya, yakni masing-masing sebesar 310 jiwa di kecamatan Seunagan Timur dan 301 jiwa di kecamatan Seunagan kemudian 204 jiwa di kecamatan Tadu Raya.

Untuk lebih jelas lokasi dan jumlah Transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.78
Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Tansmigrasi Swakarsa
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2016

No	Kecamatan	Transmigrasi Swakarsa (Jiwa)
1	Seunagan	301
2	Seunagan Timur	310
3	Beutong	44
4	Beutong Banggala	0
5	Suka Makmue	71
6	Kuala	63
7	Kuala Pesisir	8
8	Tadu Raya	204
9	Darul Makmur	28
10	Tripa Makmur	8
Jumlah		**1037**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2017

II.3.3.8. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya yang tergarap saat ini masih relatif menggembirakan. Implikasinya, produksi perikanan laut berfluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2012, produksi perikanan laut mencapai 1.017 ton. Jumlah produksi perikanan laut tersebut terus menurun signifikan menjadi 107 ton tahun 2014, atau turun rata-rata -36,26 persen/tahun. Memasuki akhir tahun 2015, tercatat produksi perikanan laut Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1.039 ton, atau senilai Rp.19,91 milyar. Produksi perikanan laut tersebut tertinggi selama tujuh tahun terakhir.

Gambar 2.28
Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016

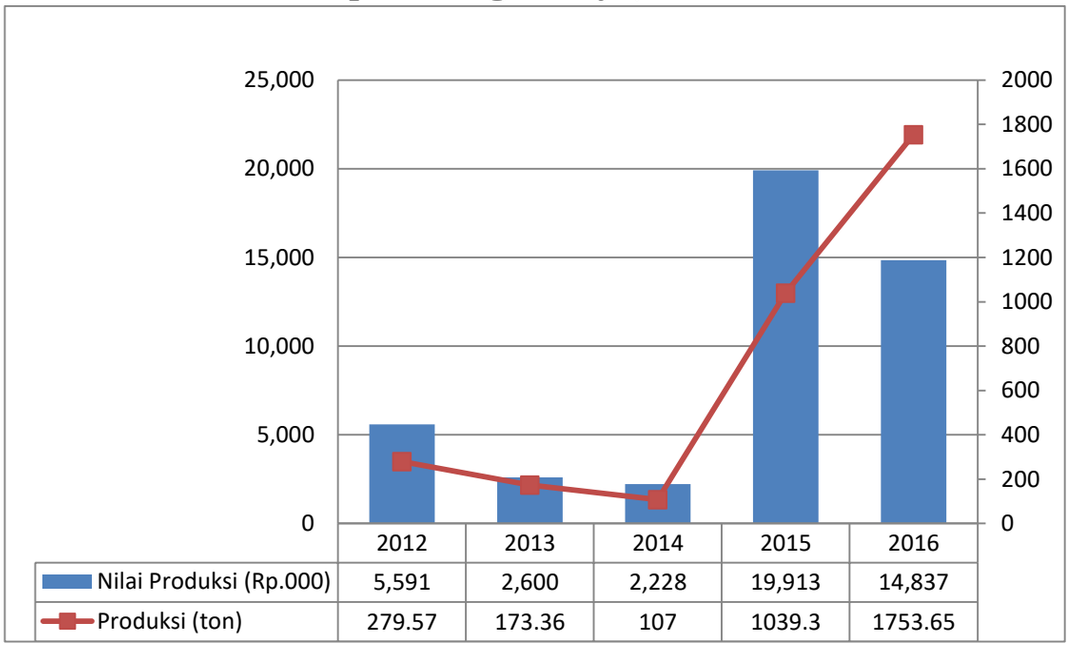

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya
BPS Aceh, 2017

Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap tahun 2012-2016 selalu meningkat pada tahun 2012 sebesar 854 ton menjadi 1.863,05 ton pada tahun 2016.

Untuk produksi perikanan budidaya tahun 2012-2016 mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 1.199 ton menjadi 669,72 ton pada tahun 2016. Hal ini menimbulkan tercapainya target daerah produksi ikan pada tahun 2012 sebesar 93,3% menjadi 97,4% pada tahun 2016.

Tabel 2.79
Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

N	Urai	2012	2013	2014	2015	2016

o	an					
1	Jumlah Produksi ikan (ton)	2.053,5	2.176,72	2.310,38	2.424,15	2.532,77
2	Budidaya	1.199,5	1.233,32	1.240,13	1.328,65	669,72
3	Perikanan tangkap	854	953,4	1.070,25	1.095,5	1.863,05
4	Target Daerah (ton)	2.200	2.300	2.600	2.600	2.600
5	Capaian Produksi Ikan (%)	93,3	94,64	88,86	93,23	97,4

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan dan belum berorientasi bisnis, keterbatasan kemampuan sumberdaya nelayan dan aparatur dinas. Upaya meningkatkan produksi tangkap laut terkendala sarana prasarana, iklim/ cuaca yang cenderung tidak bersahabat, sehingga frekuensi (*trip*) nelayan melaut berkurang, keterbatasan permodalan usaha, dan belum berkembangnya pasca panen dan pengolahan produk.

Tabel 2.80
Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Jenis	Jumlah
1	Panjang garis pantai	74,4 Km
2	Luas laut	446,4 km^2
3	Luas perairan umum	814 km^2
4	Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI)	1 unit
5	Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI)	3 unit
6	Jumlah kapal motor	113 unit
7	Jumlah perahu motor	115 unit
8	Jumlah nelayan tetap	594 orang
9	Jumlah nelayan tidak tetap	458 orang
10	Jumlah pemasar ikan	200 orang
11	Jumlah kelompok pengolahan ikan	13 orang
12	Jumlah kelompok masyarakat pengawas	5 kelompok
13	Jumlah unit pengolahan	10 unit

14	Jumlah produksi ikan olahan	311` ton
15	Jumlah pabrik es	tidak ada
16	Jumlah pasar ikan / depo	7 unit

Pembudidayaan perikanan darat dilakukan di kolam, mina padi, keramba/ karamba jaring apung (KJA) dan tambak (air payau). Pada tahun 2012 tercatat lahan perikanan darat seluas 1.198,87m^2 kemudian pada tahun 2016 menurun seluas 609,82 m^2 dengan rincian luas budidaya di kolam pada tahun 2012 luasnya 1.112,07 m2, semetara pada tahun 2016 luas kolam berkurang menjadi 492,92 m2 pada tahun 2012 luas budidaya tambak 79,50 m2 kemudian pada tahun 2016 meningkat 169,4 m^2 kemudian Sedangkan mina padi pada tahun 2016 luasnya 7,5 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2012.

Jumlah rumah tangga perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2016, mencapai 851 rumah tangga. Peningkatan masyarakat dalam berusaha di bidang budidaya perikanan cukup tinggi. Tercatat dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah rumah tangga perikanan budidaya meningkat 15,46% per tahun. Wilayah-wilayah dengan jumlah rumah tangga perikanan besar di Kecamatan seunagan Timur, Beutong dan Darul Makmur.

Tabel 2.81
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Darul Makmur	107	110	115	119	121
2	Tripa Makmur	31	31	31	35	35
3	Kuala	35	57	58	65	65
4	Kuala Pesisir	37	39	41	46	46
5	Tadu Raya	44	46	49	57	58
6	Beutong	135	138	141	150	152
7	Beutong Ateuh Banggalang	32	34	37	39	39
8	Seunagan	70	71	75	80	81
9	Suka Makmue	81	81	83	89	91
10	Seunagan Timur	145	147	151	159	163
	Jumlah	**737**	**754**	**781**	**839**	**851**

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang sangat drastis nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. Nilai produksi tersebut terjadi di semua jenis budidaya perikanan, meliputi perairan umum, air tawar, dan air payau. Pola budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern turut menjadi pemicu belum berkembangnya aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, peran dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, ditujukan juga untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.29
Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016

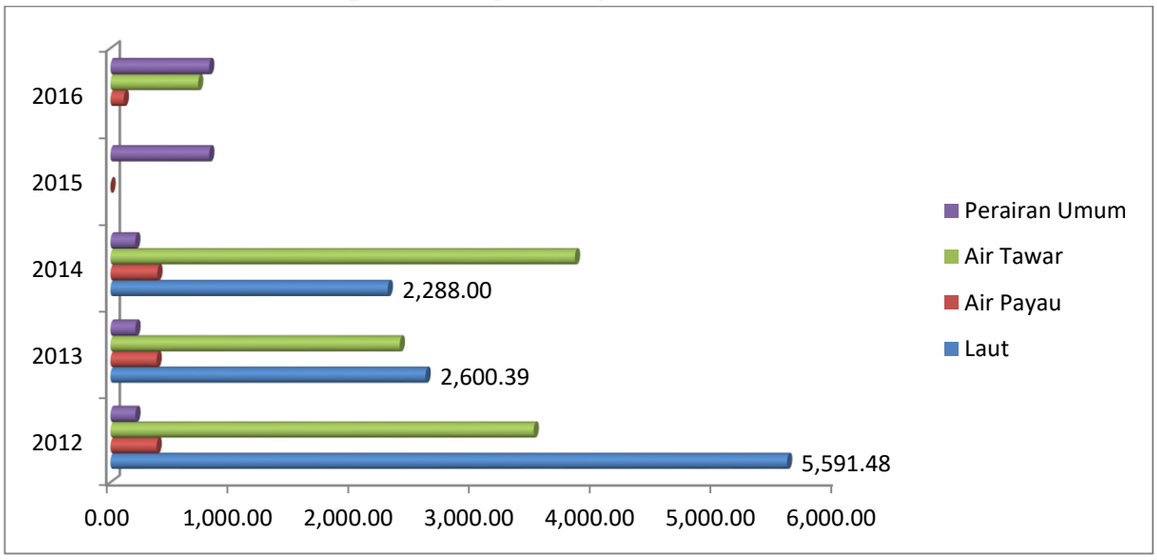

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun2017

Budidaya ikan di kolam termasuk andalan di Kabupaten Nagan Raya. Namun, produksi budidaya ikan di kolam juga masih terbatas. Jenis ikan yang dibudidayakan, meliputi ikan mas, mujair, nila, lele, dan jenis ikan lainnya. Tahun 2009, produksi ikan dari kolam mencapai 2.244,22 ton. Akhir tahun 2014, produksi ikan tersebut tidak lebih dari 477,80 ton. Secara rata-rata, produksi ikan dari kolam menurun hampir -26,61 persen/tahun. Beberapa jenis ikan dengan jumlah produksi tahun 2014 meliputi ikan mas 53,70 ton, mujair 33,80 ton, nila 40 ton, lele 29,50 ton, dan jenis ikan lainnya 20,10 ton.

Gambar 2.30
Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan
Kabupaten Nagan Raya, 2009-2014 (ton)

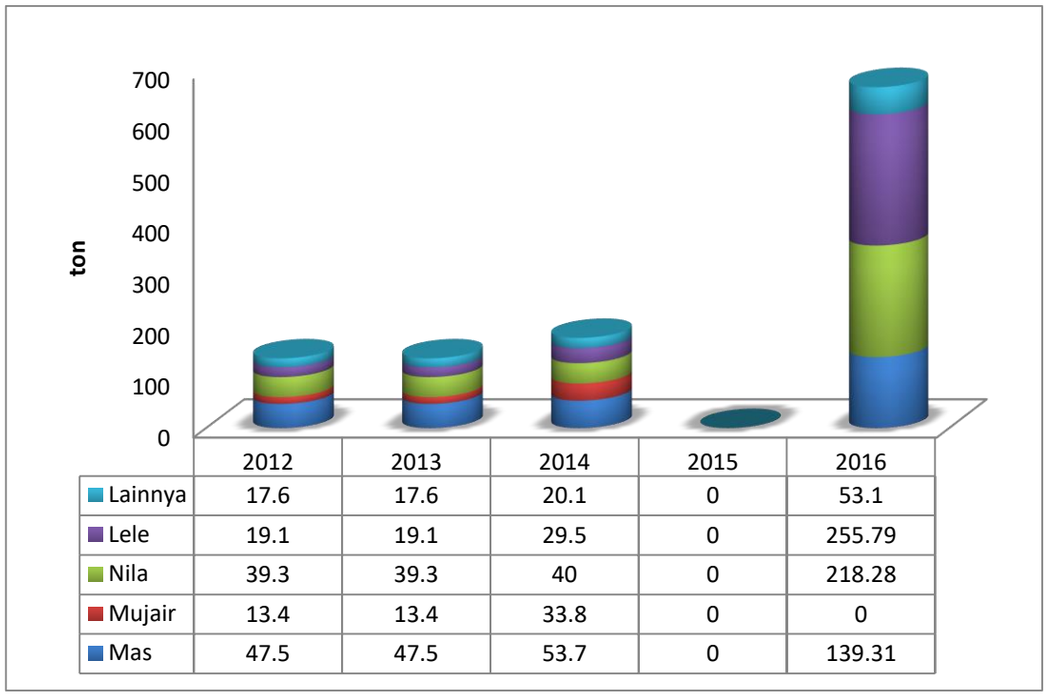

	2012	2013	2014	2015	2016
Lainnya	17.6	17.6	20.1	0	53.1
Lele	19.1	19.1	29.5	0	255.79
Nila	39.3	39.3	40	0	218.28
Mujair	13.4	13.4	33.8	0	0
Mas	47.5	47.5	53.7	0	139.31

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2016, tercatat nelayan di Kabupaten Nagan Raya mencapai 594 orang. Dibanding tahun 2012, jumlah nelayan tersebut meningkat rata-rata 89,77 persen/tahun. Tahun 2012, nelayan di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 313 orang. Selain itu, RT yang bermata pencaharian sebagai petani budidaya ikan di kolam juga meningkat, dari 600 RT tahun 2012 menjadi 663 RT tahun 2016. Demikian juga halnya dengan RT petani ikan perairan umum, meningkat menjadi 732 RT tahun 2016, dari 83 RT tahun 2012.

Dalam jangka menengah ke depan, pembinaan terhadap nelayan, petani ikan, petani tambak, dan pelaku pengolah ikan, diupayakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berlanjut. Selain itu, pelatihan teknis budidaya, pengolahan pasca panen, dan penyediaan fasilitas perikanan diupayakan terus meningkat sehingga berperan signifikan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat nelayan.

Tabel 2.82
Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Nelayan Tetap	Orang	313	537	1.052	1.032	594
Nelayan Tidak Tetap	Orang	235	-	-	110	458
Jumlah Petambak	RT	78	-	-	69	181
Jumlah Petani Ikan Kolam	RT	600	-	-	592	663
Jumlah Petani Ikan Perairan Umum	RT	83	-	294	294	732
Kelompok Nelayan	Kelompok	28	-	-	37	49
Jumlah Nelayan yang dibina	Orang	78	-	-	7	7
Jumlah Petambak yang dibina	Orang	280	-	-	287	98
Jumlah petani ikan yang dibina	Orang	761	-	-	762	761
Jumlah kelompok Budidaya Ikan	Kelompok	51	-	-	98	367
Jumlah kelompok pengolahan Ikan	Kelompok	12	-	-	12	13
Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang dibina	Kelompok	12	-	-	12	12

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya
BPS Kab. Nagan Raya, 2017

Jumlah prasarana yang tersedia di sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim bila dibandingkan dengan potensi perikanan Kabupaten Nagan Raya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nagan Raya ini belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kedepan, perlu pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti pelabuhan perikanan, pengembangan balai benih ikan, pengembangan sarana tangkap serta motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan.

Tabel 2.83
Kondisi PPI, TPI, dan Pasar
Kabupaten Nagan Raya, 2016

Kecamatan	Nama PPI	Nama TPI	Nama Pasar	Lokasi
Darul Makmur	PPI Kuala Seumayam	-	Pasar Alue Bilie Pasar Pukan	Desa Alue Bilie Desa Lamie
Tripa Makmur	-	TPI Babah Lueng		
Kuala	-	-	Pasar Simpang Peut	Desa Simpang Peut
Kuala Pesisir	-	TPI Kuala Tuha	Pasar Langkak Pasar Jembes	Desa Padang Rubek
Tadu Raya	-	TPI Kuala Tadu	Pasar Alue Bata	Desa Alue Bata
Beutong	-	-	Pasar Beutong	Ulee Jalan
Beutong Ateuh Banggalang	-	-	Pasar Jeuram	Cot Meugat
Seunagan	-	-	-	-
Suka Makmue	-	-	-	-
Seunagan Timur	-	-	Pasar Uteun Pulo	Desa Uteun Pulo

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2017

Jumlah pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah telah diberikan pada tahun 2012-2016 dengan capaian yang selalu meningkat.

Tabel 2.84
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan	40	43	52	46	22
2	Jumlah kelompok nelayan	42	45	55	47	25
3	Cakupan	95,2	95,5	94,54	97,8	88

	pembinaan kelompok nelayan (%)					

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2012-2016 masih didominasi dari hasil kelompok nelayan. Hal ini menunjukkan efektivitas kelompok nelayan dalam produksi ikan tangkap, karena adanya pengembangan kapasitas dan bantuan permodalan bagi kelompok nelayan.

Tabel 2.85
Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah produksi ikan (ton) hasil kelompok nelayan	487,07	599,94	793,53	718,53	584,41
2	Jumlah produksi ikan (ton)	854	953,4	1.070,25	1.095,5	1.863,05
3	Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan (%)	57,03	62,92	74,14	65,59	31,36

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

II.3.4. Penunjang Urusan

II.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan tugas umum ketatausahaan badan, melakukan koordinasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian, infrastruktur, pemerintahan, sumber daya manusia, keistimewaan, sosial budaya dan penelitian, evaluasi pengembangan pembangunan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dari tugas pokok dan fungsi yaitu: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK); menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK); melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Capaian indikator perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya masih dalam tahapan penyempurnaan penyelesaiaan dokumen. Seperti halnya dokumen RPJPD yang belum ditetapkan dengan Qanun dan dokumen RTRW dalam proses penyesuaian dikarenakan baru disosialisasikan setahun belakangan ini, sedangkan untuk dokumen tahunan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II.3.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sejak tahun 2012-2017 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan membaiknya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2008-2016, dicapai berkat kerja keras semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan kententuan yang berlaku.

II.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna

pengembangan *e-government* (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan *simpeg* (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkan menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

II.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan.

II.3.4.6. Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRK Nagan Raya; Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya maupun RKPK Nagan Raya; dan Terintegrasi Program-Program DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRK Nagan Raya.

II.4 Aspek Daya Saing Daerah

II.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

II.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dapat dilihat melalui perkembangan pendapatan. Pendapatan masyarakat dapat didekati dengan pengeluaran masyarakat. Pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran perkapita per bulan masyarakat Kabupaten Nagan Raya adalah Rp.450.674.

II.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Selama lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk makanan cenderung mengalami penurunan, meskipun proporsinya masih diatas 50 persen. Tahun 2012, persentase pengeluaran makanan mencapai 68,63 persen.

Adapun pengeluaran non-makanan perkapita sebulan adalah 300,889 persen pada tahun 2016. Angka pengeluaran tersebut meningkat drastis dari tahun 2012 yang sebesar 31,37 persen. Pola pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang cenderung mengalami peningkatan untuk non-makanan dipandang sangat positif dalam jangka menengah ke depan. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya mengalami perubahan kearah yang lebih baik dan diharapkan ke depan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera.

Gambar 2.31
Komposisi Konsumsi Makanan, Non Makanan,
dan Pengeluaran Per kapita per bulan Tahun 2012-2016

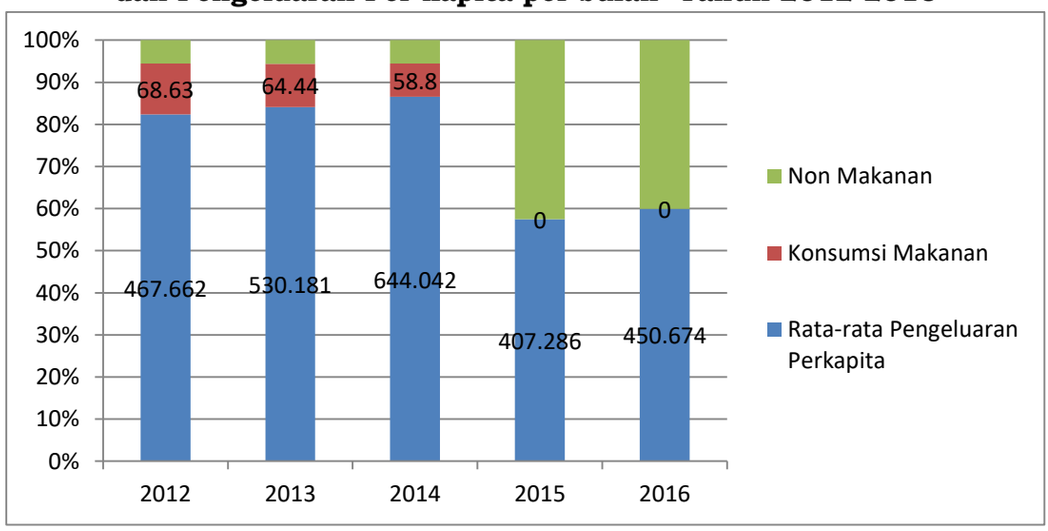

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

II.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability)* fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antardaerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi dan telekomunikasi.

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang

terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Bandar udara ini dapat disinggahi pesawat sejenis Fokker, dan diupayakan dalam jangka panjang mampu melayani pesawat berbadan besar sesuai kondisi landasan dan prasarana pendukungnya.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Gambar 2.32
Bongkar dan Muat barang
di Bandara Cut Nyak Dhien, 2012-2016

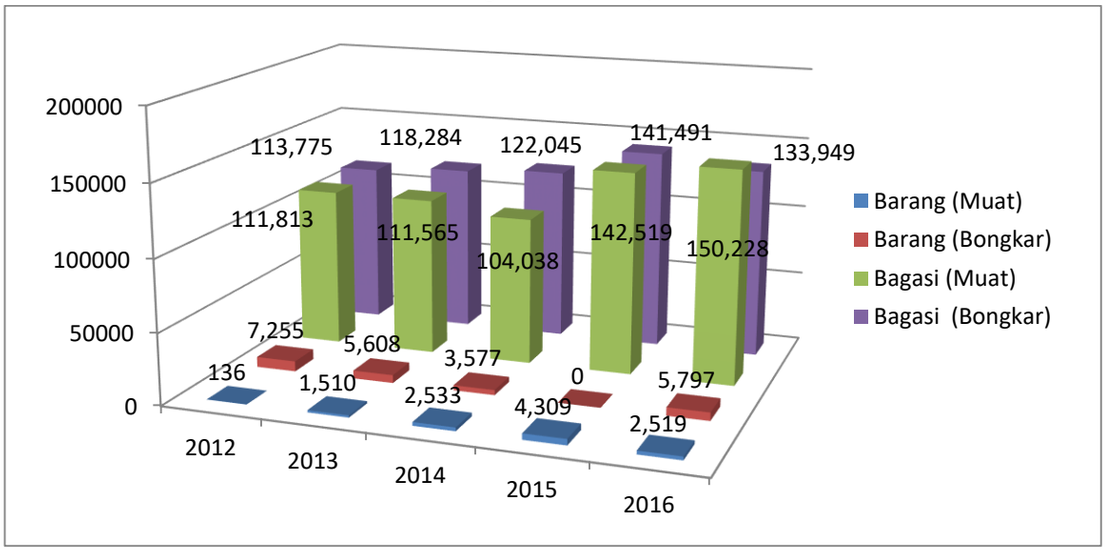

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka 2017

Aktivitas bongkar dan muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien cenderung berfluktuatif. Tercatat muat di bagasi paling kurang 150.228 kg dan bongkar 133.949 pada tahun 2016. Terbanyak muat bagasi icapai bulan Juli (14.557 kg) dan bulan April (12.484 kg). Sedangkan terendah terjadi di bulan Desember (10.027 kg). Tahun 2012, barang yang di bongkar mencapai 7.255 kg. Sementara itu, barang yang di muat menurun mencapai 2.519 kg (tahun 2016), turun di banding tahun 2012. Paling banyak muatannya di bulan Maret dan April, masing-masing 763 kg dan 592 kg. Di bulan lainnya barang yang di muat masih di bawah dari bulan tersebut, atau sangat rendah terjadi di bulan Juli (3 kg).

Data dari Bandar Udara Cut Nyak Dhien, tercatat frekuensi penerbangan yang datang di Bandar udara tersebut mencapai 16.972 trip dan berangkat 14.592 trip tahun 2012. Angka trip penerbangan tersebut meningkat pada tahun 2016. Aktivitas jasa penerbangan pada tahun 2016 tercatat frekuensi penerbangan yang datang mencapai 22.785 trip dan yang berangkat 23.784 trip.

Gambar 2.33
Jumlah Penumpang Melalui Bandara, Tahun 2012-2016

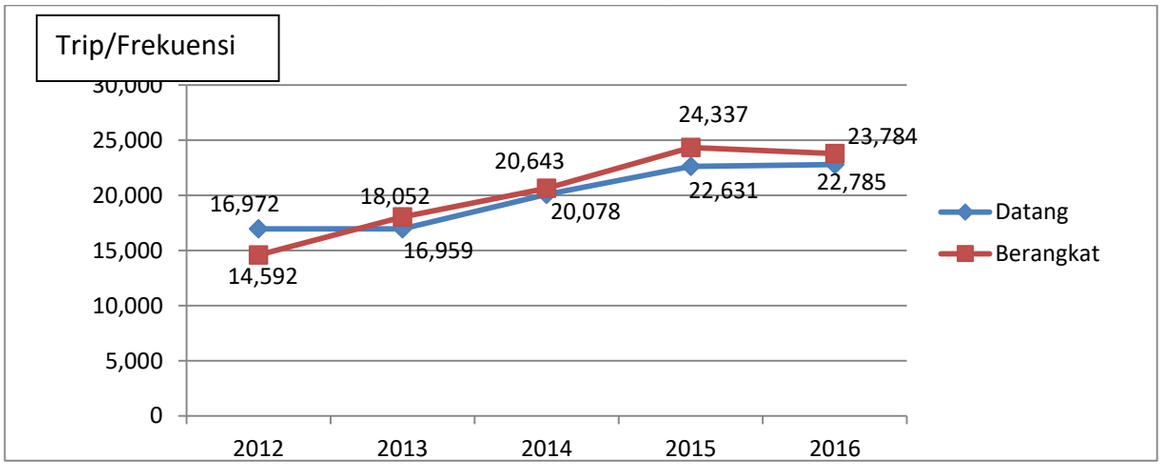

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Kab. Nagan Raya 2017

II.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.86
Data Tindak Pidana Umum Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Total Tindak Pidana (CT)	160	212	213	352	347
2	Tindak Pidana Yang Tertangani (CC)	76	206	142	254	225
Tindak Pidana Yang Tertangani (%)		**47.50**	**97.16**	**66.66**	**72.15**	**64.84**

Tabel 2.87
Rincian Data Tindak Pidana Umum
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Jenis Tindak Pidana	2012		2013		2014		2015		2016	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	THDP Tindakan Umum										
2	Pembakaran					9		9	3	5	0
3	Kebakaran	4	1	9	5						
4	Memberi Suap										
5	Pemalsuan Uang										
6	Pemalsuan Materai/Merk										
7	Pemalsuan Dokumen					4	3				
8	Pemalsuan Surat	3	1	5	3			4	4	2	
9	Melanggar Kesopanan										
10	Pemerkosaan	5	5	5	5	3	3	8	5	6	3
11	Perzinahan	3	3							1	0
12	Perjudian/Maisir	1	1							4	4
13	Penculikan										
14	Penghinaan							2	1	1	1
15	Pembunuhan			2	1						
16	Pembakaran dan pembunuhan									1	0

17	Aniaya Ringan	40	38	31	40	37	34	66	61	66	55
18	Aniaya Berat										
19	Penganiayaan anak dibawah umur									2	2
20	Pelecehan seksual terhadap anak									1	0
21	Pencurian Biasa	37	27	49	47	59	53	69	63	83	67
22	Pencurian Pemberatan										
23	Pencurian Ringan										
24	Pencurian Dengan Kekerasan									4	2
25	perbuatan curang							1	0		
26	Pemerasan dan pengancaman	2	2	6	5			2	2	4	2
27	Penggelapan	3	2	9	7	7	5	10	7	3	
28	Penipuan (Curang)	7	4	12	8	14	4	20	17	23	13
29	Pengrusakan	13	11	28	26	13	16	15	9	20	15
30	Memberi Suap										
31	Penadah			3	2					1	1
32	Pelanggaran Khup										
33	Agraria/Tanah										
34	Penyelundupan										
35	Korupsi					1	1	2	2	1	1
36	Laka Kerja	1	1							1	0
37	Obat Keras										

38	Kesehatan	1	1								
39	Mengakibatkan Orang Mati										
40	Mengakibatkan Orang Luka										
41	Hak Cipta										
42	Curi Dalam Keluarga										
43	Menerima Suap										
44	Senpi Handak										
45	Perampasan Hak	1	1			3		3	3	11	7
46	Curi Ranmor	18	3			16	4	39	6	30	7
47	Pengroyokan	1	1							1	1
48	Pengancaman	3	3			3	3	16	11	17	12
49	Pembuatan Cabul	2	2			6	6	10	7		
50	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	1			6	2	2	1	5	2
51	Melarikan Wanita										
51	Curi Kawat										
53	Curi Listrik										
54	Curi Hewan										
55	KDRT	5	5			5	5	17	16	14	10
56	Pemilu										
57	BBM	2	1								
58	Pencemaran Nama Baik	1	1			3	2	15	64	2	2
59	Khalwat/Mesum					1	1	2	2	6	4

60	Poligami/poliandri	2	2			1	1	10	7	4	2
61	Penyerobotan Tanah	2	0			12	3	25	12	8	1
62	Kekerasan Didepan Umum	1	0								
63	Kekerasan terhadap orang dan barang					1	1				
64	kekerasan terhadap anak							1	1	2	2
65	Kekerasan seksual					1	1				
66	Pemukulan					1	1	1	1		
67	Penelantaran anak					2	2	1	1	5	4
68	Penutupan akses jalan PT.SENAGAN ENERGI					3	1				
69	Penutupan akses jalan PT							1	1		
70											
71	Pencemaran lungkungan hidup							1	1		
72	kelalaian petugas medis yang menyebabkan MD							1	1		
73	Penemuan mayat							4	2	1	
74	Mitan oplosan										
75	Penutupan akses jalan									1	
76	membawa lari anak dibawah umur					2	2	3	2	1	0
77	Kejahatan Terhadap Jiwa Orang	1	0								
78	Kejahatan terhadap									1	0

	kemerdekaan seseorang										
79	Penyalahgunaan bbm bersubsidi (migas)									3	3
80	penjarahan dan perampasan									1	0
81	Kelalaian									1	0
82	pengancaman dan perampasan alat kerja									1	0
83	menyembunyikan TSK									1	0
84	Menyediakan tempat fasilitas maisir (perjudian)									1	1
85	illegal loging									1	1
86	Lain-Lain Kejahatan Tidak Termasuk Diatas										
Jumlah		**160**	**76**	**212**	**206**	**213**	**142**	**352**	**254**	**347**	**225**
Persentase Kasus Yang Ditangani		**47,5 %**		**77%**		**66%**		**72,15%**		**64%**	

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.
Jumlah demontrasi yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012-2016 relatif sedikit. Hal ini menunjukkan tersalurkannya aspirasi masyarakat terhadap program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Tabel 2.88
Jumlah Demonstrasi
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Demonstrasi	Keterangan
1	2012	Nihil	-
2	2013	Nihil	-
3	2014	4	Aksi Damai
4	2015	5	Aksi Damai
5	2016	2	Aksi Damai

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor terkait potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah serta kemudahan perijinan.
Kemudahan perijinan dalam proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis-jenis perijinan yang dilayani antara lain: a) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); c) IUI (Izin Usaha Industri); d) TDI (Tanda Daftar Industri); e) IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan e) HO (Izin Gangguan).

Saat ini pelayanan perijinan di Kabupaten Nagan Raya sudah berada pada satu atap layanan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Waktu proses pelayanan sebagaimana tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan pada peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 065/252/2015 tanggal 1 Nopember 2015.

Tabel 2.89
Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya

No.	Jenis Perizinan	Jenis Data	Keterangan
1	SIUP	Waktu proses	7
		Jumlah persyaratan	1
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
2	TDP	Waktu proses	2
		Jumlah persyaratan	4
		Biaya mengurus	Tidak dipungut biaya
3	IUI	Waktu proses	3
		Jumlah persyaratan	9
		Biaya mengurus	Tidak dipungut biaya
4	TDI	Waktu proses	12
		Jumlah persyaratan	6
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
5	IMB	Waktu proses	14
		Jumlah persyaratan	14
		Biaya mengurus persyaratan	225.000xkoefesien(sesuai Qanun)
6	HO	Waktu proses	7
		Jumlah persyaratan	7
		Biaya mengurus	Tidak dipungut biaya

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Pajak daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi pajak hotel , pajak restoran (Rumah Makan dan Katering); pajak hiburan (Pagelaran Kesenian/Musik/Tari, Pameran, Balap Kendaraan Bermotor); pajak reklame (reklame papan, kain, melekat/stiker, baliho dan billboard); pajak penerangan jalan PLN; pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum dan jasa usaha. Untuk retribusi jasa umum terdiri dari:

a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
d. Retribusi Pelayanan Pasar;
e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Sedangkan untuk retribusi jasa usaha terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
c. Retribusi penyediaan dan / atau peneyedotan Kakus;
d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
e. Retribusi Tempat Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan , Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penerbitan sertifikat Kesempurnaan dan Kebangsaan (Pas Kecil).

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Beberapa Perda yang mendukung iklim usaha adalah :

1) Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
2) Qanun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan peternakan;
3) Qanun Nomor 17 Tahun 2007 Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagan Raya antara lain adalah: 1) belum optimalnya promosi investasi; 2) lemahnya dukungan regulasi investasi dan 3) belum adanya insentif,

kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor. 4) Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan.
karena itu, Pemerintah harus melakukan beberapa hal: 1) peningkatan promosi investasi; 2) menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

II.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan.
Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi (S1, S2, S3))

Penduduk berpendidikan Sarjana atau S1/S2/S3 2016 sebesar 4,92 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S1, 0,26 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S2 dan 0,00 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S3.

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio* merupakan suatu ukuran untuk mengetahui produktivitas penduduk. Angka Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Angka Beban Tanggungan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Nagan Raya yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri,

juga menanggung paling kurang 56 orang yang tidak produktif. Kondisi ini mengalami perubahan yang sangat drastis dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 69 penduduk tidak produktif. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun) dan naiknya proporsi penduduk produktif, meskipun penduduk tua sedikit meningkat pada tahun 2016.

Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka beban tanggungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) semakin berkurang dari 30 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen.

Tabel 2.90
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (%)

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	Angka Ketergantungan
2012	30,10	63,62	6,28	57,19
2013	30,00	65,72	4,29	52,17
2014	29,95	65,61	4,44	52,42
2015	29,08	64,27	6,65	55,60
2016	29,31	66,24	4,42	50,96

Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2017

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Data realisasi keuangan daerah kabupaten Nagan Raya 2012-2016 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBK tahun 2012–2016 dan dapat dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kondisi kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Sejauh manakah kesehatan keuangan suatu daerah, dapat kita telusuri dari kondisi anggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sudah selayaknya memberikan jaminan secara keseluruhan bagi peningkatan pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan keuangan daerah akan memberikan daya dukung terhadap manajemen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, diantaranya dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan seluruh daerah telah diberikan kewenangan msing-masing sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Kabupaten Nagan Raya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan pengelolaannya.

III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penilaian kinerja

keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari kinerja pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBK. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBK, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini merupakan kinerja keuangan selama periode tahun 2012-2016 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (audited) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh.

III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan Keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya.
Secara umum kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari perkembangan APBK dari tahun ke tahun. Analisis pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBK merupakan wujud dari kesepakatan bersama dari pihak eksekutif dengan legislatif dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya melalui pengelolaan keuangannya maka analisis pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBK dan Laporan Keuangan Kabupaten Nagan Raya pada umumnya. Sebelum melakukan analisis pengelolaan keuangan, terlebih dahulu kita harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Secara umum struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

A. Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dikelompokkan atas beberapa komponen:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas dana bagi hasil pajak, dana bagihasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat, bantuan dana kontigensi, dana bagi hasil provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi.

B. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari beberapa komponen:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya serta belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung (BL) yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

C. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA).
2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,98 persen. Menurut kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya, rata-rata pertumbuhan positif terdapat pada kelompok yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 46,99 persen, Dana Perimbangan sebesar 10,34 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 93,77 persen. Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2012-2016 mencapai 18,56 persen, yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 14,87 persen dan Belanja Langsung (BL) sebesar 24,58 persen. Dengan kata lain, rata-rata pertumbuhan BTL lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan BL. Bila kita lihat rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu minus 14,90 persen. Lebih jelas mengenai realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah KabupatenNagan Raya

Tahun 2012-2016

No.	Uraian	TAHUN					Rata2 Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	**PENDAPATAN**	**527,510,787,205.44**	**639,662,970,801.99**	**889,969,621,595.67**	**1,028,697,943,281.39**	**1,149,198,637,448.16**	**18.98**
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**27,689,044,993.97**	**37,942,005,577.87**	**65,177,801,946.48**	**79,938,395,926.48**	**104,202,917,806.77**	**46.99**
1.1.1	Pajak Daerah	5,177,766,976.00	5,866,374,609.00	11,012,306,021.00	13,960,860,229.00	19,833,675,569.00	37.31
1.1.2	Retribusi daerah	13,341,075,324.00	1,574,093,193.00	10,947,824,162.00	3,278,899,609.00	2,779,862,954.58	272.01
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,185,629,805.97	1,590,826,387.67	1,802,961,121.07	2,699,949,811.00	3,028,940,638.60	27.47
1.1.4	Zakat / Infaq / Sadaqah	3,450,000,000.00	3,520,025,921.00	3,272,573,810.00	12,856,335,883.60	7,091,141,673.50	46.50
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,534,572,888.00	25,390,685,467.20	38,142,136,832.41	47,142,350,393.88	71,469,296,971.09	113.60
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**464,268,751,682.00**	**560,709,513,544.00**	**604,833,781,167.00**	**621,186,430,933.00**	**650,964,915,284.00**	**10.34**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	28,593,322,339.00	25,448,202,196.00	16,984,024,438.00	16,682,282,900.00	16,273,646,774.00	(8.69)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	11,214,078,343.00	12,088,539,348.00	12,349,175,729.00	8,841,515,033.00	3,087,452,861.00	(17.61)
1.2.1	Dana Alokasi Umum	396,983,251,000.00	464,191,402,000.00	500,941,291,000.00	503,087,763,000.00	515,602,317,000.00	9.54

1.2.1	Dana Alokasi Khusus	27,478,100,000.00	58,981,370,000.00	74,559,290,000.00	92,574,870,000.00	116,001,498,649.00	35.38
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**35,552,990,529.47**	**41,011,451,680.12**	**219,958,038,482.19**	**327,573,116,421.91**	**394,030,804,357.39**	**93.77**
1.3.1	Pendapatan Hibah	626,280,000.00	-	-	-	14,000,000,000.00	(32.23)
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	540,000,000.00	-	-	-	(20.00)
1.3.3	Bantuan Dana Kontigensi	1,072,801,000.00	-	-	-	-	(20.00)
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11,492,569,369.47	11,800,074,680.12	10,913,784,986.19	20,198,488,088.91	25,775,490,621.39	23.80
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6,525,000,000.00	28,671,377,000.00	52,910,657,000.00	141,529,354,000.00	214,154,353,000.00	110.71
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15,836,340,160.00	-	156,133,596,496.00	165,845,274,333.00	140,100,960,736.00	142.99
2	**BELANJA**	**531,512,368,687.00**	**622,353,726,698.00**	**898,786,109,306.50**	**1,050,360,419,082.00**	**1,143,289,834,222.89**	**18.56**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**285,543,921,397.00**	**294,418,975,794.00**	**332,133,985,725.50**	**383,150,360,902.00**	**533,227,707,295.00**	**14.87**
2.1.1	Belanja Pegawai	245,856,444,356.00	274,329,565,227.00	313,132,453,230.50	303,255,573,847.00	332,562,859,330.00	8.09
2.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	12,107,122,820.00	400,340,000.00	11,595,541,495.00	12,265,500,000.00	20,982,719,200.00	545.05

2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	822,400,000.00	16,146,850,000.00	1,241,920,000.00	2,156,000,000.00	2,783,400,000.00	357.44
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	120,340,086.00	-	-	-	-	(32.61)
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	26,637,614,135.00	3,542,220,567.00	5,550,000,000.00	64,283,041,255.00	175,429,068,765.00	253.00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	-	-	614,071,000.00	1,190,245,800.00	1,469,660,000.00	23.46
2.2	**Belanja Langsung**	**245,968,447,290.00**	**327,934,750,904.00**	**566,652,123,581.00**	**667,210,058,180.00**	**610,062,126,927.89**	**24.58**
2.2.1	Belanja Pegawai	62,342,794,875.00	58,829,494,754.00	68,362,227,674.00	64,863,291,334.00	71,656,661,191.00	9.44
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88,137,523,138.00	115,236,953,932.00	149,208,172,534.00	203,199,078,577.00	205,605,281,993.00	23.86
2.2.3	Belanja Modal	95,488,129,277.00	153,868,302,218.00	349,081,723,373.00	399,147,688,269.00	332,800,183,743.89	34.72
3	**PEMBIAYAAN**	**29,438,707,648.25**	**24,437,126,166.69**	**39,746,370,270.68**	**30,930,882,559.85**	**9,268,406,759.24**	**(14.90)**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**29,438,707,648.25**	**25,437,126,166.69**	**41,746,370,270.68**	**30,930,882,559.85**	**9,268,406,759.24**	**(14.67)**
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	29,438,707,648.25	25,437,126,166.69	41,746,370,270.68	30,929,882,559.85	9,268,406,759.24	(14.67)
3.1.2	Penyesuaian Saldo Awal	-	-	-	1,000,000.00	-	(20.00)

3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**1,000,000,000.00**	**2,000,000,000.00**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Dalam Gambar 3.1 dibawah ini menggambarkan tren realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan (naik), sebaliknya tren realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2012, 2014 dan 2015, dimana realisasi belanja daerah lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah.

Sementara pada tahun 2013 dan 2016 terdapat surplus anggaran, hal ini disebabkan karena realisasi belanja daerah lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan daerah. Lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan APBK periode tahun 2012-2016 dijelaskan pada sub bab berikut ini.

Gambar 3.1.
Realisasi APBK Berdasarkan Komponen Tahun 2012-2016

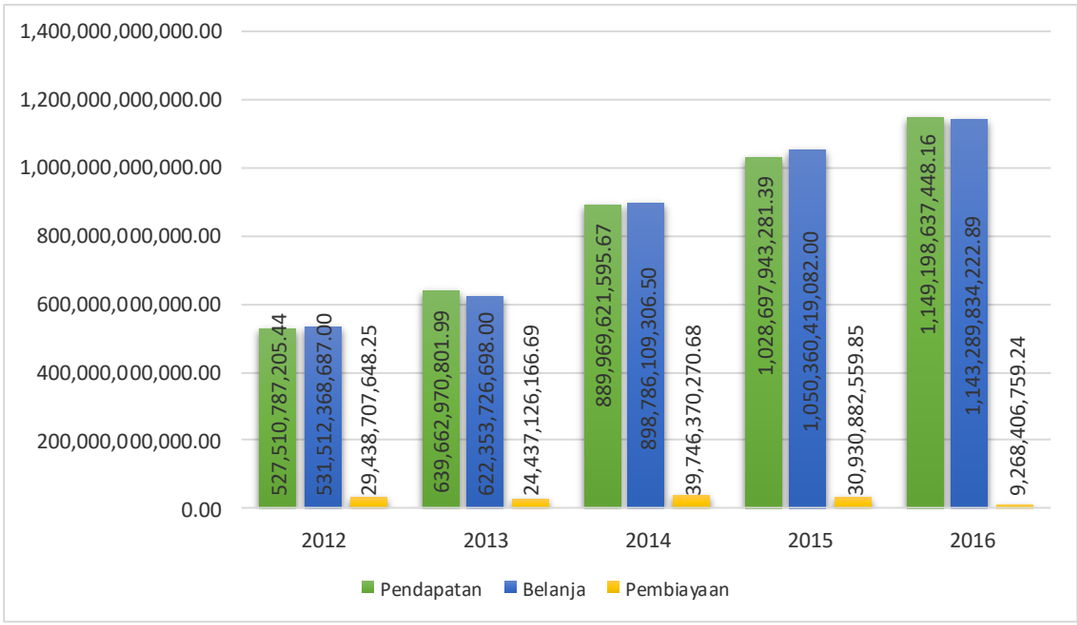

3.1.1.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Rata-rata anggaran pendapatan daerah tahun 2012-2016 berjumlah sebesar Rp.204.665.084.044,72 dengan realisasi mencapai Rp.178.337.755.757, 96 atau sebesar 87,18 persen. Pencapaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016, berada dibawah 100 persen namun secara keseluruhan, anggaran maupun realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2012-2016 cenderung naik atau bertambah (Tabel 3.2).

Table 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	562,995,736,143.00	527,510,787,205.44	93.69	7.23

2013	681,617,782,987.00	639,662,970,801.99	93.84	21.26
2014	970,462,165,939.00	889,969,621,595.67	91.70	39.13
2015	1,180,853,555,516.15	1,028,697,943,281.39	87.11	15.59
2016	1,402,483,552,532.76	1,149,198,637,448.16	81.94	11.71
Rata-Rata	959,682,558,623.58	847,007,992,066.53	88.26	18.98

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Nagan Raya Tahun 2012-2016

Dilihat dari pertumbuhan realisasi Pendapat Daerah selama periode tahun 2012-2016, pertumbuhan realisasi tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 93,84 persen,kemudian terus mengalami penurunan pertumbuhan realisasi, sampai tahun 2016 yang hanya terealisasi sebesar 81,94 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi PAD dan Dana Perimbangan , yang hampir mencapai 61,71 persen dari anggaran sebesar Rp.2.551.683.310.691,00 menjadi Rp.1.561.778.472.543,00. Pada Tahun 2016 pertumbuhan realisasi pendapatan Nagan Raya kembali mengalami peningkatan sebesar 5,86 persen (Gambar 3.2).

Gambar 3.2.
Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

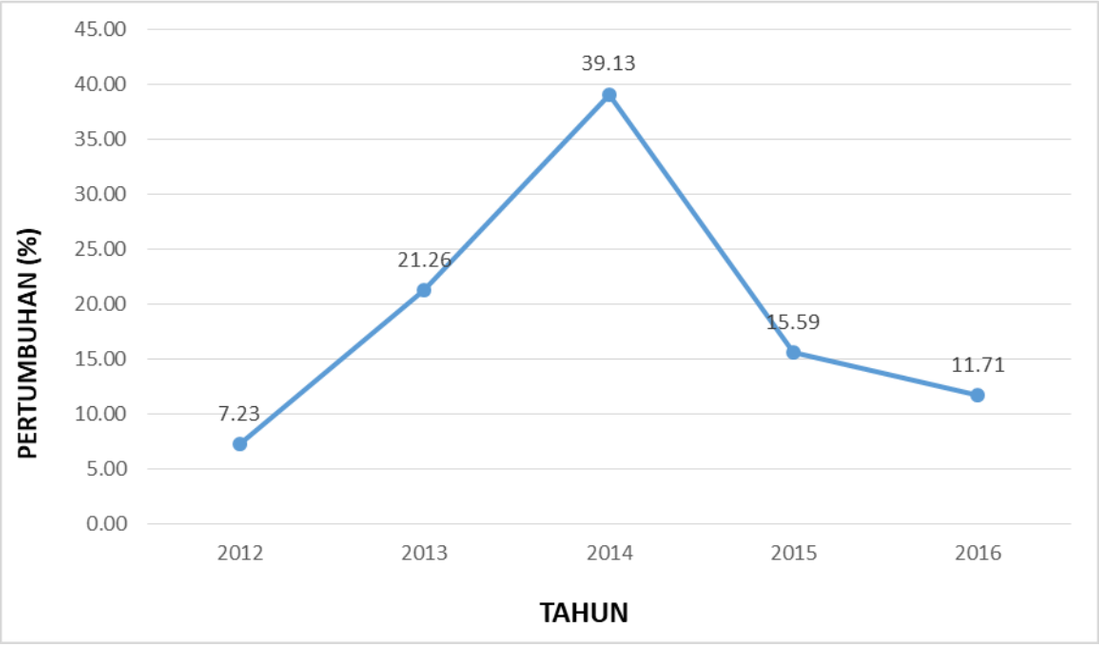

Tabel 3.3 dibawah ini, secara umum menunjukkan bahwa proporsi realisasi PAD terhadap total pendapatan Daerah selama periode tahun 2012-206 cenderung meningkat/naik. Peningkatan realisasi PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat/infaq/sadaqah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sementara untuk dana perimbangan juga cenderung mengalami peningkatan. Sebaliknya tren proporsi Dana Penyesuaian dan

OTSUS selama periode tahun 2012-2016 cenderung naik/bertambah, seiring dengan meningkatkan DAU Nasional. Jika dilihat dari tren proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2012-2016 berfluktuasi dan cenderung meningkat.

Tabel 3.3
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pendapatan Asli Daerah	5.25	5.93	7.32	7.77	9.07	7.44
Dana Perimbangan	88.01	87.66	67.96	60.39	56.64	68.52
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.74	6.41	24.72	31.84	34.29	24.04
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Dari Gambar 3.3 diketahui selama periode tahun 2012-2016 Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya yaitu sebesar 68,52 persen, sebagaimana yang tercermin dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Lain-Lain PAD yang Sah Memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 24.04 persen. Sebaliknya kontribusi PAD dalam kurun waktu yang sama masih tergolong kecil hanya mencapai 7,44 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Perimbangan dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian Daerah. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Perimbangan tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya. Masih rendahnya kontribusi PAD ini mencerminkan belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber PAD masih didominasi oleh Lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, kedepan diharapkan untuk meningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya perlu segera dicari terobosan baru dengan menggali potensi sumber pendapatan lain yang lebih prospektif untuk meningkatkan PAD Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 3.3.
Grafik Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2106

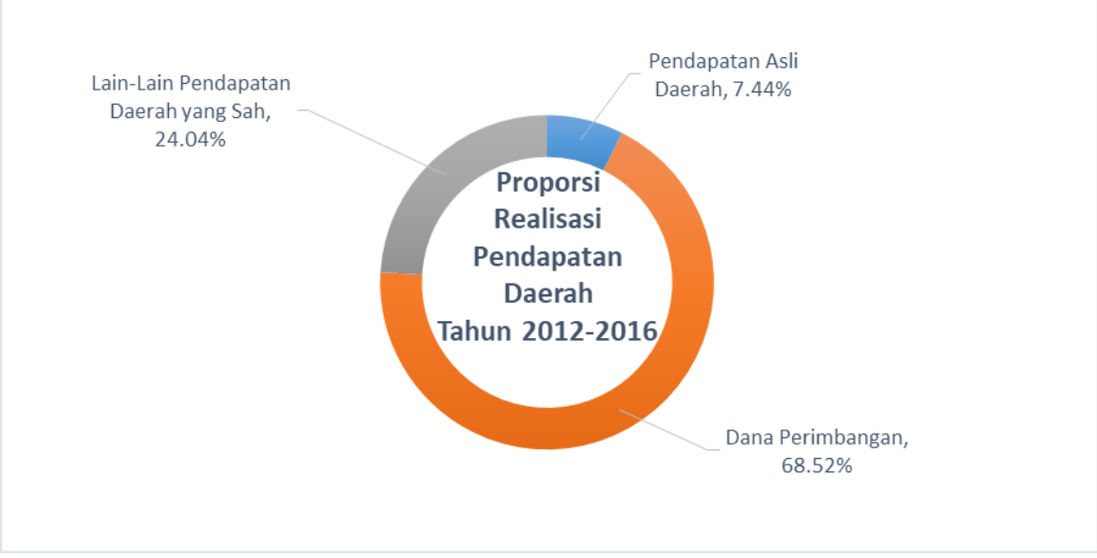

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh berdasarkan Qanun (Peraturan Daerah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan Kabupaten Nagan Raya. Rata-rata anggaran PAD dari tahun 2012-2016 berjumlah sebesar Rp. 80,326,989,688.15 dengan realisasi mencapai Rp. 62,990,033,250.31 atau setara dengan 78,42 persen. Rata-rata pencapaian realisasi PAD dan Tahun 2012-2016 berada dibawah jumlah yang telah ditetapkan (dibawah 100 persen). Secara Keseluruhan Realisasi PAD setiap tahunnya cenderung meningkat (Table 3.4).

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	34,269,608,875.00	27,689,044,993.97	80.80	73.14
2013	41,139,536,875.00	37,942,005,577.87	92.23	37.03
2014	70,884,910,145.00	65,177,801,946.48	91.95	71.78
2015	91,392,717,037.00	79,938,395,926.48	87.47	22.65
2016	163,948,175,508.76	104,202,917,806.77	63.56	30.35
Rata-Rata	80,326,989,688.15	62,990,033,250.31	78.42	46.99

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.4 di atas dapat juga dilihat rasio efektifitas kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD}\ x\ 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas keuangan suatu daerah, mengambarkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

Tabel 3.5
Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah (%)	Kriteria
Lebih dari 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60 – 80	Kurang efektif
Kurang dari 60.00	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri, 1996

Dari hasi perhitungan (Tabel 3.4) dan interpretasi skala internal efektifitas keuangan daerah (Tabel 3.5) di atas, secara keseluruhan rasio efektitfitas pengelolaan keuangan daerah selama periode Tahun 2012-2016 mencapai 78,42 persen (dibawah 100 persen) yang berarti bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya berjalan kurang efektif. Selanjutnya bila dilihat dari segi pertumbuhan, rata-rata PAD selama periode tahun 2012-2016 tumbuh sebesar 46,99 persen. Pertumbuhan PAD tertinggi adalah pada tahun 2012 yang mencapai 73,14 persen, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi dari komponen PAD yang bersumber dari retribusi daerah mencapai 88,46 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan realisasi PAD Tahun 2012-2016 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Lebih jelas disajikan dalam Gambar 3.4.

Gambar 3.4.
Pertumbuhan Realisasi PAD Tahun 2012-2016

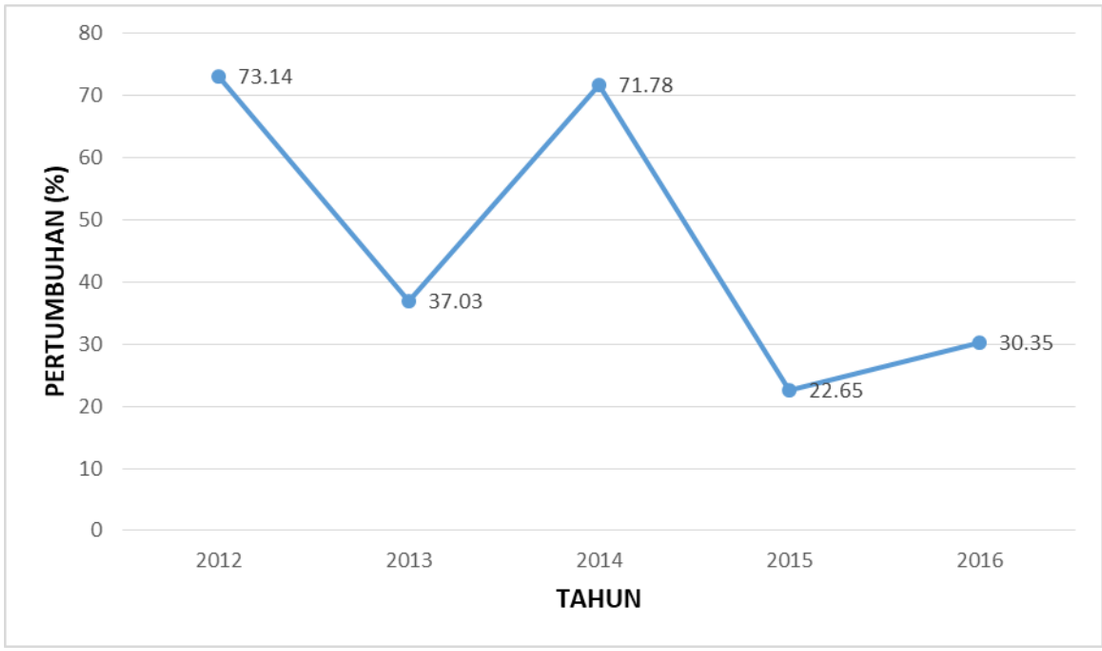

Realisasi Pajak Daerah selama periode tahun 2012-2016 tidak melebihi dari anggaran yang telah direncanakan, dimana dari rata-rata anggaran sebesar Rp.15,785,715,400.00 terealisasi sebesar Rp.11,170,196,680.80 atau setara dengan 70.76 persen. Rata-rata pertumbuhan realisasi pajak daerah adalah sebesar 37.31 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2014 yang mencapai 87.72 persen. Secara keseluruhan realisasi pajak daerah tiap tahunnya cenderung naik/bertambah. Pajak daerah bersumber dari pendapatan pajak hotel,restoran,hiburan,reklame,penerangan jalan,galian c,sarang burung walet dan BPHTB serta PBB perdesaan dan perkotaan. Lebih jelas mengenai realisasi Pajak daerah dari Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	6,474,750,000.00	5,177,766,976.00	79.97	16.70
2013	6,858,825,000.00	5,866,374,609.00	85.53	13.30
2014	10,128,000,000.00	11,012,306,021.00	108.73	87.72
2015	16,642,502.000.00	13,960,860,229.00	83.89	26.78
2016	38,824,500,000.00	19,833,675,569.00	51.09	42.07
Rata-Rata	15,785,715,400.00	11,170,196,680.80	70.76	37.31

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 angka 64 dijelaskan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Rincian PAD yang bersumber dari Retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Realisasi Retribusi Daerah tahun 2012-2016 sebagian besar tidak mencapai anggaran yang telah direncanakan. Dari rata-rata retribusi sebesar Rp.13,069,937,674.00 yang terealisasi hanya sebesar Rp.6,384,351,048.52 atau sebesar 48.85 persen.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	15,081,496,700.00	13,341,075,324.00	88.46	938.03
2013	7,638,500,000.00	1,574,093,193.00	20.61	(88.20)
2014	23,464,698,270.00	10,947,824,162.00	46.66	595.50
2015	7,844,996,700.00	3,278,899,609.00	41.80	(70.05)
2016	11,319,996,700.00	2,779,862,954.58	24.56	(15.22)
Rata-Rata	13,069,937,674.00	6,384,351,048.52	48.85	272.01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan secara keseluruhan realisasinya melebihi anggaran yang telah direncanakan, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.1,760,000,000.00 terealisasi sebesar Rp.2,061,661,552.86 atau setara dengan 117.14 persen, rata-rata pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 27.47 persen. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	1,050,000,000.00	1,185,629,805.97	112.92	27.89
2013	1,050,000,000.00	1,590,826,387.67	151.51	34.18
2014	1,700,000,000.00	1,802,961,121.07	106.06	13.33
2015	2,000,000,000.00	2,699,949,811.00	135.00	49.75
2016	3,000,000,000.00	3,028,940,638.60	100.96	12.19
Rata-Rata	1,760,000,000.00	2,061,661,552.86	117.14	27.47

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari beberapa komponen yang meliputi: penambahan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan BLUD (RSUD SIM) dan Pendapatan JKN Puskesmas. Berdasarkan Tabel 3.9 diketahui rata-rata realisasi PAD yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang sah, pada tahun 2013 dan 2014 realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 realisasi yang melebihi target dipengaruhi oleh realisasi pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp.3,668,096,849.20 atatu 146.72 persen dan realisasi pendapatan dari fasilitas sosial dan umum terealisasi sebesar Rp.4,322,022,679.00 atau 210.60 persen. Sedangkan pada tahun 2012,2015 dan 2016 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari rata-rata anggaran sebesar Rp.42,845,619,528.20 terealisasi sebesar Rp.37,335,808,510.52 atau 87.14 persen. Dari segi pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah tumbuh sebesar 113.60 persen. Secara keseluruhan tren anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah cenderung meningkat.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	7,563,362,175.00	4,534,572,888.00	59.95	(17.38)
2013	21,492,211,875.00	25,390,685,467.20	118.14	459.94
2014	31,592,211,875.00	38,142,136,832.41	120.73	50.22
2015	57,444,456,353.00	47,142,350,393.88	82.07	23.60
2016	96,135,855,363.00	71,469,296,971.09	74.34	51.60
Rata-Rata	42,845,619,528.20	37,335,808,510.52	87.14	113.60

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang disebut juga dengan dana transfer/grants adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai kebutuhan daerah. Rata-rata realisasi Dana Perimbangan tahun 2012-2016 berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dari anggaransebesar Rp. 655,526,703,126.00 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 580,392,678,522.00 atau setara dengan 88.54 persen. Lebih jelas disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	483,305,622,468.00	464,268,751,682.00	96.06	15.55
2013	590,262,951,744.00	560,709,513,544.00	94.99	20.77
2014	667,526,512,018.00	604,833,781,167.00	90.61	7.87
2015	718,674,521,400.00	621,186,430,933.00	86.44	2.70
2016	817,863,908,000.00	650,964,915,284.00	79.59	4.79
Rata-Rata	655,526,703,126.00	580,392,678,522.00	88.54	10.34

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.10 diketahui pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan tahun 2012-2016 Rata-rata sebesar 10,34 persen. Pada tahun 2013 terjadi pertumbuhan relatif besar sebesar 20.70 persen disebabkan adanya kenaikan realisasi komponen DAU dan DAK. Kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan menjadi 7.87 disebabkan adanya penurunan realisasi dana bagi hasil pajak. Secara keseluruhan pertumbuhan realisasi dana perimbangan Tahun 2012-2016 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.

Gambar 3.5 Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2016

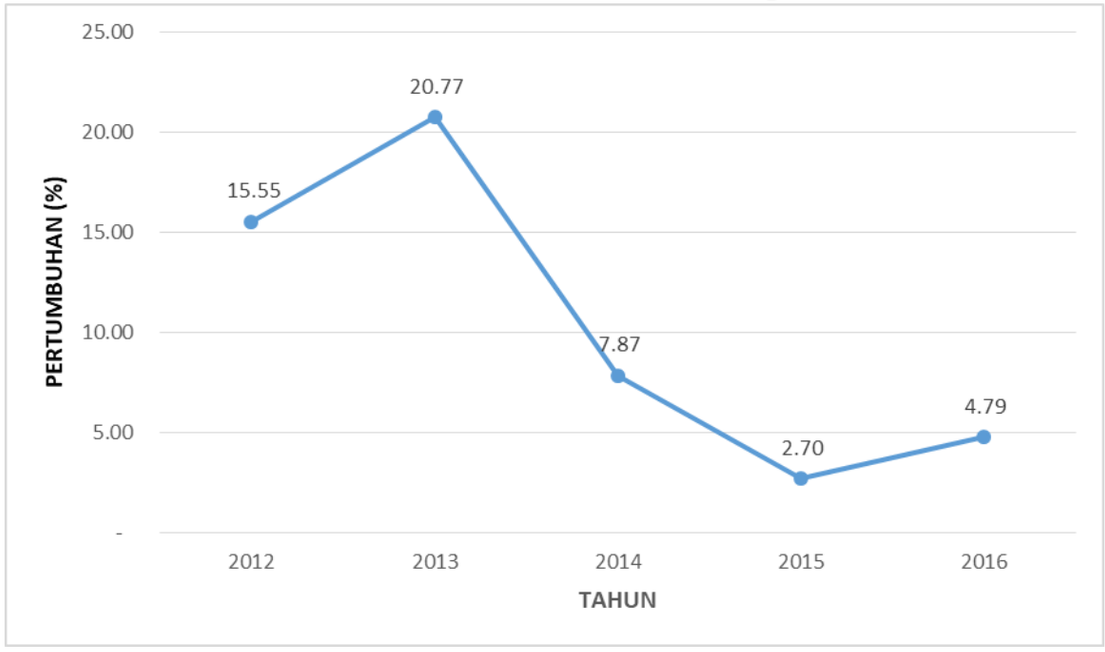

Menurut komponen Dana Perimbangan, realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2012-2016 tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Rata-rata realisasi hanya mencapai 44,31 persen, dari anggaran Rp.46,931,173,417.00 yang terealisasi hanya sebesar Rp.20,796,295,729.40. Bila ditinjau dari segi pertumbuhan realisasi, rata-rata tumbuh negatif sebesar minus 8.69 persen.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	49,505,039,501.00	28,593,322,339.00	57.76	5.03
2013	37,674,459,254.00	25,448,202,196.00	67.55	(11.00)
2014	42,391,991,561.00	16,984,024,438.00	40.06	(33.26)
2015	49,715,289,769.00	16,682,282,900.00	33.56	(1.78)
2016	55,369,087,000.00	16,273,646,774.00	29.39	(2.45)
Rata-Rata	46,931,173,417.00	20,796,295,729.40	44.31	(8.69)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran DAU Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2012-2016 rata-rata berjumlah sebesar Rp. 474,213,270,600.00 dengan realisasi rata-rata sebesar Rp.476.161.204.800,00 atau 100,41 persen. Secara keseluruhan realisasi DAU tahun 2012-2016 setiap tahun cenderung meningkat/bertambah. Lebih jelas mengenai anggaran dan realisasi DAU Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	387,243,580,000.00	396,983,251,000.00	102.52	19.94
2013	464,191,402,000.00	464,191,402,000.00	100	16.93
2014	500,941,291,000.00	500,941,291,000.00	100	7.92
2015	503,087,763,000.00	503,087,763,000.00	100	0.43
2016	515,602,317,000.00	515,602,317,000.00	100	2.49
Rata-Rata	474,213,270,600.00	476,161,204,800.00	100.41	9.54

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Selama periode tahun 2012-2016, rata-rata anggaran DAK Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.91,662,626,352.00 dengan realisasi sebesar Rp.73,919,025,729.80 atau 80,64 persen.. Realisasi mencapai 100 persen terdapat pada tahun 2012-2015, sementara tahun 2016 realisasi berada dibawah 100 persen. Selama tahun 2012-2016 rata-rata DAK tumbuh sebesar 35,38 persen, dimana pada tahun 2012 tumbuh negatif minus 13,64 persen, kemudian tahun 2013 meningkat menjadi 114,65 persen. Pada tahun 2014-2016 DAK kembali mengalami penurunan mencapai 25,31 persen. Secara keseluruhan realisasi DAK selama tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	27,478,100,000.00	27,478,100,000.00	100	(13.64)
2013	58,980,610,760.00	58,981,370,000.00	100	114.65
2014	74,559,290,000.00	74,559,290,000.00	100	26.41
2015	92,574,870,000.00	92,574,870,000.00	100	24.16
2016	204,720,261,000.00	116,001,498,649.00	56.66	25.31
Rata-Rata	91,662,626,352.00	73,919,025,729.80	80.64	35.38

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

3.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Kontigensi, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Rata-rata realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2012-2016 adalah sebesar Rp.203.625.280.274,22 atau sebesar 90,97 persen dari anggaran sebesar Rp.223.828.865.809,43. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	45,420,504,800.00	35,552,990,429.47	78.28	(52.06)
2013	50,215,294,368.00	41,011,451,680.12	81.67	15.35
2014	232,050,743,776.00	219,958,038,482.19	94.79	436.33
2015	370,786,317,079.15	327,573,116,421,91	88.35	48.93
2016	420,671469,024.00	394,030,804,357.39	93.67	20.29
Rata-Rata	223,828,865,809.43	203,625,280,274.22	90.97	93.77

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

3.1.1.2 Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya

Rata-rata realisasi belanja daerah tahun 2012-2016 mencapai 18,56 persen, dimana rata-rata pertumbuhan dari BTL adalah sebesar 14,87 persen dan BL sebesar 24,58 persen. Untuk BTL, rata-rata realisasi tertinggi terdapat pada belanja hibah yang mencapai 545,05 persen, dan terendah pada belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar minus 32,61 persen. Sementara untuk BL, realisasi tertinggi terdapat pada belanja modal sebesar 34,72 persen dan yang terendah adalah pada belanja pegawai sebesar 9,44 persen. Secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
2	**BELANJA DAERAH**	5.60	17.09	44.42	16.86	88.85	18.56
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	3.93	3.11	12.81	15.36	39.17	14.87
2.1.1	Belanja Pegawai	8.22	11.58	14.14	(3.15)	9.66	8.09
2.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	(51.33)	(96.69)	2,796.42	5.78	71.07	545.05
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	(86.58)	1,863.38	(92.31)	73.60	29.10	357.44
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	(63.06)	(100.00)	-	-	-	(32.61)
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	63.89	(86.70)	56.68	1,058.25	172.90	253.00

	Lainnya						
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	93.83	23.48	23.46
2.2	**Belanja Langsung**	7.60	33.32	72.79	17.75	(8.57)	24.58
2.2.1	Belanja Pegawai	31.28	(5.64)	16.20	(5.12)	10.47	9.44
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.71	30.75	29.48	36.18	1.18	23.86
2.2.3	Belanja Modal	(12.14)	61.14	126.87	14.34	(16.62)	34.72

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

3.1.1.2.1 Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Tabel 3.17 diketahui total anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) selama periode tahun 2012-2016 adalah berjumlah sebesar Rp. 2,194,820,663,785.68 dengan realisasi sebesar 83.31 persen atau setara dengan Rp. 1,828,474,951,113.00. Menurut jenis belanja BTL proporsi realisasi tertinggi berasal dari belanja pegawai yang menyumbang sebesar 80,35 persen, sebaliknya kontribusi terendah bersumber dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 0,01 persen, Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	(%) Total
1	Belanja Pegawai	1,777,213,651,335.68	1,469,136,895,990.00	82.67	80.35
2	Belanja Hibah	84,753,848,155.00	57,351,223,515.00	67.67	3.14
3	Belanja Bantuan Sosial	24,272,750,000.00	23,150,570,000.00	95.38	1.27
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,864,249,670.00	120,340,086.00	3.11	0.01
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	299,856,164,625.00	275,441,944,722.00	91.86	15.06
6	Belanja Tidak Terduga	4,860,000,000.00	3,273,976,800.00	67.37	0.18
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2,194,820,663,785.68	1,828,474,951,113.00	83.31	100

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Realisasi total Belanja Tidak Langsung (BTL) berdasarkan komponen belanja dapat diuraikan sebagai berikut

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPR serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Realisasi belanja pegawai tahun 2012-2016 adalah sebesar Rp.1,469,136,895,990.00. atau 82,67 persen dari total anggaran sebesar Rp.1,777,213,651,335.68. Proporsi realisasi belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung adalah sebesar 80,35 persen.

b. Belanja Hibah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana yang telah telah diubah menjadi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Realisasi belanja hibah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 mencapai Rp.57,351,223,515.00 atau sebesar 67,67 persen dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.84,753,848,155.00. Belanja hibah diberikan kepada Badan/Lembaga, Yayasan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sementara Proporsi realisasi belanja hibah terhadap total belanja tidak langsung sebesar 3,14 persen.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan social merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial selama periode tahun 2012-2016 mencapai Rp.23,150,570,000.00 atau sebesar 95,38 persen dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.24,272,750,000.00. Bantuan sosial kepada penanganan sosial dan kejadian luar biasa,anak yatim,pondok anak yatim,penyandang cacat dan lain-lain.

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Periode Tahun 2012-2016 mencapai Rp. 120,340,086.00 atau sebesar (3,11 persen) dari total anggaran sebesar

Rp.3,864,249,670.00. Proporsi realiasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terhadap total belanja tidak langsung mencapai 0,01 persen.

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Total anggaran belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa periode tahun 2012-2016 berjumlah sebesar Rp.299,856,164,625.00, dengan realisasi sebesar 91,86 persen atau sebesar Rp.275,441,944,722.00. Proporsi realiasi Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terhadap total Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah sebesar 15,06 persen.

f. Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2012-2016 mencapai Rp. 3,273,976,800.00 atau sebesar 67,37 persen dari total anggaran sebesar Rp. 4,860,000,000.00. Sementara proporsi belanja tidak terduga terhadap total realisasi belanja tidak langsung hanya sebesar 0,18 persen.

3.1.1.2.2 Belanja langsung

Realisasi Belanja Langsung selama periode tahun 2012-2016 mencapai Rp.2,417,827,506,882.89 atau setara dengan 88,44 persen dari total anggaran sebesar Rp.2,733,912,622,691.00. Belanja Modal merupakan komponen penyumbang terbesar dalam realisasi total belanja langsung yaitu sebesar 55,02 persen, jika dibandingkan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Lebih rinci disajikan dalam Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Total Belanja Langsung Tahun 2012-2016

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	(%) Total
1	Belanja Pegawai	369,777,666,118.00	326,054,469,828.00	88.18	13.49
2	Belanja Barang dan Jasa	877,366,898,246.00	761,387,010,174.00	86.78	31.49
3	Belanja Modal	1,486,768,058,327.00	1,330,386,026,880.89	89.48	55.02
	Jumlah Belanja Langsung	2,733,912,622,691.00	2,417,827,506,882.89	88.44	100.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun APBK 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Lebih rinci berikut ini dijelaskan realisasi Belanja Langsung (BL) tahun 2012-2016 yang diklasifikasikan menurut sumbernya sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam belanja langsung merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau tujuan organisasi. Realiasi belanja pegawai 2012-2016 mencapai Rp.326,054,469,828.00 atau sebesar 88,18 persen dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.369,777,666,118.00. Belanja pegawai memberikan kontribusi realisasi terhadap total belanja langsung sebesar 13,49 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2012-2016 mencapai Rp.761,387,010,174.00 atau setara dengan 86,78 persen dari total anggaran sebesar Rp. 877,366,898,246.00. Realisasi belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap total belanja langsung yakni sebesar 31,49 persen.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal periode tahun 2012-2016 mencapai 89,48 persen atau setara dengan Rp.1,330,386,026,880.89 dari total rencana anggaran sebesar Rp. 1,486,768,058,327.00. Kontribusi realisasi belanja modal terhadap belanja langsung mencapai 55,02 persen.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dan penyesuaian saldo awal. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2012-2016 sangat berfluktuasi dengan rata-rata realisasi mencapai Rp. 26,764,298,680.94 atau sebesar 102.69 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.26,064,098,680.94. Secara keseluruhan realisasi Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2012-2016 cenderung menurun. Lebih rinci mengenai realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	28,438,707,648.25	29,438,707,648.25	103.52	(27.94)
2013	23,937,126,166.69	24,437,126,166.69	102.09	(16.99)
2014	39,746,370,270.68	39,746,370,270.68	100.00	62.65
2015	29,929,882,559.85	30,930,882,559.85	103.34	(22.18)
2016	8,268,406,759.24	9,268,406,759.24	112.09	(70.04)
Rata-Rata	26,064,098,680.94	26,764,298,680.94	102.69	(14.90)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Berdasarkan komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya, rata-rata realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari penerimaan pembiayaan selama tahun 2012-2106 mencapai Rp. 27,364,298,680.94 atau sebesar 100,00 persen dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.27,364,098,680.94. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2012-2016 berfluktuasi dan cenderung menurun.

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	29,438,707,648.25	29,438,707,648.25	100.00	(27.94)
2013	25,437,126,166.69	25,437,126,166.69	100.00	(13.59
2014	41,746,370,270.68	41,746,370,270.68	100.00	64.12
2015	30,929,882,559.85	30,930,882,559.85	100.00	(25.91)
2016	9,268,406,759.24	9,268,406,759.24	100.00	(70.04)
Rata-Rata	27,364,098,680.94	27,364,298,680.94	100.00	(14.67)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Selanjutnya rata-rata realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan selama periode tahun 2012-2016 adalah sebesar 46.15 persen. Realisasi pengeluaran pembiayaan tertinggi terdapat pada tahun 2014, dengan realisasi sebesar Rp.2,000,000,000.00 atau 100.00 persen. Tingginya

realisasi ini disebabkan adanya penyertaan modal ke PT.Bank Aceh Cabang Jeuram sebesar anggaran yang ditetapkan, pada tahun 2013 merupakan tahun terendah realisasi pengeluaran Pembiayaan Daerah yang mencapai 66.67 persen, sedangkan tahun 2012 ,2015 dan 2016 tidak ada realisasi pernyetaan modal ke PT. Bank Aceh.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp	%	Pertumbuhan (%)
2012	1,000,000,000.00	-	-	-
2013	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	66.67	-
2014	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	100.00
2015	1,000,000,000.00	-	-	(100.00)
2016	1,000,000,000.00	-	-	-
Rata-Rata	1,300,000,000.00	600,000,000.00	46.15	0.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

3.1.2 Neraca Kabupaten Nagan Raya

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang pihak ketiga,utang belanja dan utang jangka pendek lainnya;
2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Selama periode tahun 2012 -2016 rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 13,08 persen, dimana rata-rata pertumbuhan dari Aset Lancar sebesar 16.70 sementara rata-rata pertumbuhan dari Aset tetap mencapai 12,32 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 268,76 persen, dan ekuitas dana mencapai 11,39 persen. Untuk lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel 3.21 di bawah ini.

Tabel 3.21
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Nagan Raya
Tahun 2012-2016

U R A I A N	2012	2013	2014	2015	2016	Rata2 Pertumbuhan (%) 2012-2016
ASSET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	25,113,696,282.69	39,883,031,376.68	25,255,169,688.85	3,734,337,760.24	11,926,274,097.60	28.42
Kas di Bendahara Pengeluaran	323,429,884.00	33,423,968.00	312,202,953.00	117,295,599.00	13,293,155.00	136.70
Kas di Bendahara Penerimaan	74,232,100.00	-	-	74,477.00	-	(40.00)
Kas di Bendahara Pengeluaran JKN			1,319,291,585.00	2,882,841,946.00	2,263,233,824.91	19.40
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	-	1,829,914,926.00	4,043,218,333.00	2,533,856,977.00	967,782,681.00	4.36
Kas Lainnya	-	-	-	538,875,000.00	6,626,226.00	(19.75)
Piutang Pajak	-	-	7,405,931,568.00	14,561,743,380.00	8,792,029,917.00	11.40
Piutang Retribusi	43,454,000.00	5,610,000.00	225,613,808.00	69,219,000.00	5,610,000.00	728.72
Piutang di BLUD	1,348,647,449.00	4,134,482,338.00				21.31
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			2,090,963,700.00	7,853,823,177.98	8,935,836,277.28	57.88
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				4,389,827,593.00	9,270,322,913.00	22.24
Piutang Pendapatan	-	-	5,843,536,194.18	11,144,871,651.38	8,955,495,556.47	14.22

Transfer Pemerintah Provinsi						
Penyisihan Piutang			(10,454,818.50)	(4,370,672,067.98)	(5,045,642,065.88)	8,344.16
Belanja Dibayar Dimuka	-	274,680,965.10	662,398,833.33	524,213,333.33	596,982,400.00	26.83
Persediaan	2,622,754,787.10	3,001,388,012.00	5,546,141,721.04	30,281,165,868.50	8,147,965,952.50	108.02
Jumlah Aktiva Lancar	**29,526,214,502.79**	**49,162,531,585.78**	**52,694,013,565.90**	**74,261,473,695.45**	**54,835,810,934.88**	**16.70**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8,750,000,000.00	9,750,000,000.00	11,750,000,000.00	11,750,000,000.00	11,750,000,000.00	6.39
Jumlah Investasi Permanen	**8,750,000,000.00**	**9,750,000,000.00**	**11,750,000,000.00**	**11,750,000,000.00**	**11,750,000,000.00**	6.39
ASET TETAP						
Tanah	104,991,021,019.00	106,095,414,019.00	88,805,049,667.00	165,282,371,422.00	152,527,406,172.00	51.06
Perlatan dan Mesin	152,242,058,680.00	178,074,672,180.00	208,796,323,715.00	224,612,033,307.00	264,598,394,933.92	14.24
Gedung dan Bangunan	510,427,755,289.00	559,919,845,648.00	625,492,490,177.00	681,709,610,072.75	803,696,694,948.48	17.75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	337,410,607,760.00	407,954,344,661.00	451,149,385,808.00	621,038,610,272.00	774,443,139,164.02	18.78
Aset Tetap Lainnya	20,043,313,400.00	17,769,740,450.00	19,171,496,959.00	26,721,159,300.00	36,778,281,791.98	22.06
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10,566,147,000.00	20,463,808,200.00	25,778,794,550.00	40,455,796,736.00	96,063,374,000.00	86.25
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(473,284,740,134.09)	(582,951,418,235.30)	4.63
JUMLAH ASET TETAP	**1,135,680,903,148.00**	**1,290,277,825,158.00**	**1,419,193,540,876.00**	**1,286,534,840,975.66**	**1,545,155,872,775.10**	**12.32**
ASET LAINNYA						

Tuntutan Ganti Rugi	190,361,577.00	190,361,577.00	184,845,786.00	184,845,786.00	184,845,786.00	(0.58)
Aset Tak Berwujud	7,453,025,600.00	7,453,025,600.00	13,813,357,350.00	12,914,939,400.00	12,874,939,400.00	15.71
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-		-	-
Aset Lain-lain	-	4,954,455,432.00	115,923,443,762.00	123,569,379,230.00	74,623,683,958.65	421.35
Dana yang Dibatasi Penggunannya	-	-	-	-	-	(20.00)
Jumlah Aset Lainnya	**7,643,387,177.00**	**12,597,842,609.00**	**129,921,646,898.00**	**136,669,164,416.00**	**87,683,469,144.65**	**190.11**
JUMLAH ASET	**1,181,600,504,827.79**	**1,361,788,199,352.78**	**1,613,559,201,339.90**	**1,509,215,479,087.11**	**1,699,425,152,854.63**	**13.08**
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Pihak Ketiga					2,675,746.00	-
Utang Belanja	-	-	-	239,073,111.00	116,795,074,947.00	9,750.66
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	6,515,079,043.00	11,207,182,973.00	10,375,374,370.00	12.92
Utang BLUD	1,885,488,707.00	6,815,487,041.00				32.29
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1,885,488,707.00	6,815,487,041.00	6,515,079,043.00	11,446,256,084.00	127,173,125,063.00	268.76
Jumlah Kewajiban	**1,885,488,707.00**	**6,815,487,041.00**	**6,515,079,043.00**	**11,446,256,084.00**	**127,173,125,063.00**	**268.76**
EKUITAS/EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan	25,437,126,166.69	41,746,370,270.68	30,929,882,559.85	-	-	(15.08)

Anggaran (SiLPA)						
Pendapatan Yang Ditangguhkan	74,232,100.00	-	-	-	-	(20.00)
Cadangan Piutang	1,392,101,449.00	4,140,092,338.00	15,555,590,451.68	-	-	504.78
Cadangan Beban Dibayar Dimuka	-	274,680,965.10	662,398,833.33	-	-	8.23
Cadangan Persediaan	2,622,754,787.10	3,001,388,012.00	5,546,141,721.04	-	-	13.44
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(1,885,488,707.00)	(6,815,487,041.00)	(6,515,079,043.00)	-	-	31.41
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**27,640,725,795.79**	**42,347,044,544.78**	**46,178,934,522.90**	**-**	**-**	**(9.75)**
				-		
EKUITAS DANA INVESTASI				-		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	8,750,000,000.00	9,750,000,000.00	11,750,000,000.00	-	-	(13.61)
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1,135,680,903,148.00	1,290,277,825,158.00	1,419,193,540,876.00	-	-	(9.83)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	7,643,387,177.00	12,597,842,609.00	129,921,646,898.00	-	-	176.24
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**1,152,074,290,325.00**	**1,312,625,667,767.00**	**1,560,865,187,774.00**	**-**	**-**	**(8.12)**
JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA	**1,179,715,016,120.79**	**1,354,972,712,311.78**	**1,607,044,122,296.90**	-	**-**	**(8.24)**
JUMLAH EKUITAS	**1,179,715,016,120.79**	**1,354,972,712,311.78**	**1,607,044,122,296.90**	1,497,769,223,003.11	**1,572,252,027,791.63**	**11.39**
				-		

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,181,600,504,827.79**	**1,361,788,199,352.78**	**1,613,559,201,339.90**	**1,509,215,479,087.11**	**1,699,425,152,854.63**	**13.08**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya

Table 3.22
Pertumbuhan Aset Tahun 2012-2016

Tahun	Total Aset	Aset Lancar	Aset Tetap
2012	25.52	(4.94)	27.24
2013	15.25	66.50	13.61
2014	18.49	7.18	9.99
2015	(6.47)	40.93	(9.35)
2016	12.60	(26.16)	20.10

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016

Gambar 3.6
Grafik Pertumbuhan Aset Tahun 2012-2016

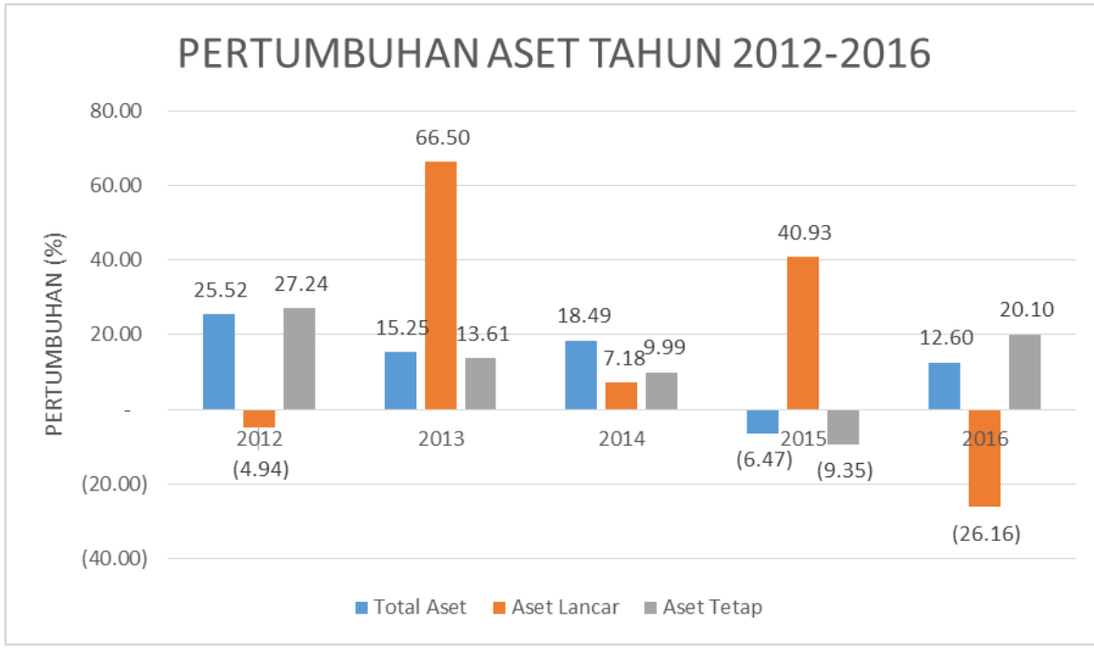

Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 3.6 di atas diketahui pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat berfluktuasi baik ditinjau dari segi aset lancar maupun aset tidak lancar. Pertumbuhan positif terhadap total aset terjadi pada tahun 2012,2013,2014 dan 2016 dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 25.52 persen Sebaliknya pada tahun 2015 Total Aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar minus 6.47 persen. Jika dilihat dari segi aset lancar, pertumbuhan positif terjadi pada Tahun 2013-2014 dan 2015, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 66.50 persen. Sementara pada tahun 2012 dan 2016 pertumbuhan aset lancar mengalami pertumbuhan yang negatif yang mencapai minus 4,94 persen dan 26,16 persen. Bila ditinjau dari segi aset tetap pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2012,2013,2014 dan 2016, dimana pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 27,24 persen. Pertumbuhan negatif aset tetap terjadi pada tahun 2015 yang mencapai minus 9,35 persen.

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa atau interprestasi terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (liquidity ratio) dan rasio solvabilitas (solvability ratio). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang liquid. Tingkat likuiditas suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (Current Ratio). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan Daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain. Cara ini lebih dikenal dengan Quick Ratio Analysis. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah total debt to equity ratio (rasio hutang terhadap ekuitas) dan total debt to total asset ratio (rasio hutang terhadap total aktiva).

Tabel 3.23 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

RASIO	RUMUS	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	29,526,214,502.00	49,162,531,585.78	52,694,013,565.90	74,261,473,695.45	54,835,810,934.88
	Kewajiban Jangka Pendek	1,885,488,707.00	6,815,487,041.00	6,515,079,043.00	11,446,256,084.00	127,173,125,063.00
	Rasio Lancar	15.66	7.21	8.09	6.49	0.43
	Aset Lancar – Persediaan	26,903,459,714.90	46,161,143,573.78	47,147,871,844.86	43,980,307,826.95	46,687,844,982.88
	Kewajiban Jangka Pendek	1,885,488,707.00	6,815,487,041.00	6,515,079,043.00	11,446,256,084.00	127,173,125,063.00
	Quick Ratio	14.27	6.77	7.24	3.84	0.37
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	1,885,488,707.00	6,815,487,041.00	6,515,079,043.00	11,446,256,084.00	127,173,125,063.00
	Total Aset	1,181,600,504,827.79	1,361,788,199,352.78	1,613,559,201,339.90	1,509,215,479,087.11	1,699,425,152,854.63
	Rasio Total Hutang / Aset	0.0016	0.0050	0.0040	0.0076	0.0748
	Total Hutang	1,885,488,707.00	6,815,487,041.00	6,515,079,043.00	11,446,256,084.00	127,173,125,063.00
	Total Ekuitas	1,179,715,016,120.79	1,354,972,712,311.78	1,607,044,122,296.90	1,497,769,223,003.11	1,572,252,027,791.63
	Rasio Hutang/ Modal	0.0016	0.0050	0.0041	0.0076	0.0809

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2012-2016, data diolah

Dari Tabel 3.23 diatas diketahui Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan mencairkan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar dari tahun 2012 s/d 2016 mengalami penurunan dari 15.66 di tahun 2012 menjadi 0.43 di tahun 2016. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan membayar hutang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak memadai.

1. Quick ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick selama periode tahun 2012- 2016 juga mengalami penurunan, dari sebesar 14,27 pada tahun 2012 menjadi sebesar 0.37 pada tahun 2016. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membayar hutang jangka pendek juga tidak memadai.
2. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selama periode tahun 2012-2016, rasio total hutang terhadap aset menunjukan tren peningkatan yaitu dari angka 0.0016 pada tahun 2012 menjadi 0.0076 pada tahun 2016 sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh hutang terhadap asset semakin meningkat. Meskipun demikian kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya relatif kuat dalam pelunasan seluruh kewajibannya.
3. Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Selama periode tahun 2012-2016, Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkisar antara 0.0016 sampai dengan 0.0809. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya, sehingga dapat diartikan kemampuan keuangan juga masih relatif kuat bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan terebih yang bersifat jangka panjang.

III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan

kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diarahkan pada:

a. Optimalisasi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan danjasa.
b. Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada dua hal yaitu belanja tidaklangsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan, namun merupakan belanja tetap pemerintah. Secara umum belanja tidak langsung adalah:

a. Belanja pegawai diarahkan untuk:
   - Pemberian gaji
   - Penyediaan anggaran tambahan penghasilan PNS;
   - Pemberian tunjangan untuk Ketua, Wakil ketua, AnggotaDPRK;
   - Penyediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru.dan tambahan peghasilan guru.

b. Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan melalui upaya yang jelas, selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

c. Pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensitas tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung upaya-upaya penanggulangan dan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan dan peningkatan SDM yang dilakukan secara jelas, selektif/tidak mengikat, rasional dan jumlahnyadibatasi.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telahditetapkan. Secara umum belanja langsung adalah:

a. Belanja pegawai, adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya/kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahdaerah.

c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatanpemerintahan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBK Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran terdapat kelebihan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1) Kebijakan PenerimaanPembiayaan
   Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
2) Kebijakan PengeluaranPembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun diarahkan untuk pengeluaran penyertaan modal pada Bank Aceh.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah kabupaten nagan raya pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan data realisasi APBK Nagan Raya tahun 2012-2016, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah berkisar antara 81,84 persen sampai dengan 89,87 persen atau rata-rata realisasi mencapai 86,15 persen dari total anggaran yang ditetapkan, kemudian rata-rata realisasi belanja pada kelompok belanja tidak langsung mencapai 83,31 persen dan pada kelompok belanja langsung mencapai 88,44 persen dari total anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3.24
Analisis Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	Rata-rata
1	**Belanja Daerah**	89.87	88.21	88.97	86.7	81.8	86.15
2.1	**Belanja Tidak**	89.94	86.83	85.13	78.5	80.7	83.31
	Belanja Pegawai	88.93	88.67	84.87	78.3	76.3	82.67
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	97.17	5.41	98.80	40.0	93.0	67.67
	Belanja Bantuan	99.05	93.99	99.35	98.5	98.5	95.38
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten	53.48	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /	97.41	75.15	83.33	96.70	90.12	91.86
	Belanja Tidak	-	-	40.14	77.7	97.	67.3
2.2	**Belanja Langsung**	89.78	89.48	91.39	92.2	81.3	88.44
	Belanja Pegawai	94.24	88.22	92.67	77.8	89.7	88.18

	Belanja Barang dan	84.88	86.38	83.76	94.0	83.6	86.78
	Belanja Modal	91.84	92.46	94.82	94.2	78.3	89.48

Berdasarkan Tabel 3.24 diketahui proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2012-2016 diketahui berkisar antara 53,05 – 57,98 persen, dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 44,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 masih ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik lebih besar. Lebih rinci mengenai persentase realisasi belanja aparatur terhadap total belanja disajikan pada Tabel 3.25

Tabel 3.25
Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2012-2016

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Persentase (%)
2012	531,521,368,687.00	308,199,239,231.00	57.98
2013	622,353,726,698.00	333,159,059,981.00	53.53
2014	898,786,109,306.50	381,494,680,904.50	42.45
2015	1,050,360,419,082.00	368,118,865,181.00	35.05
2016	1,143,289,834,222.89	404,219,520,521.00	35.36
Rata-Rata			**44.87**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2012 yang mencapai 57,98 persen, dan terus mengalami penurunan sampai Tahun 2015. Pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 35,36 persen. Lebih jelas mengenai realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 3.7

Gambar 3.7
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Periode Tahun
2012-2016

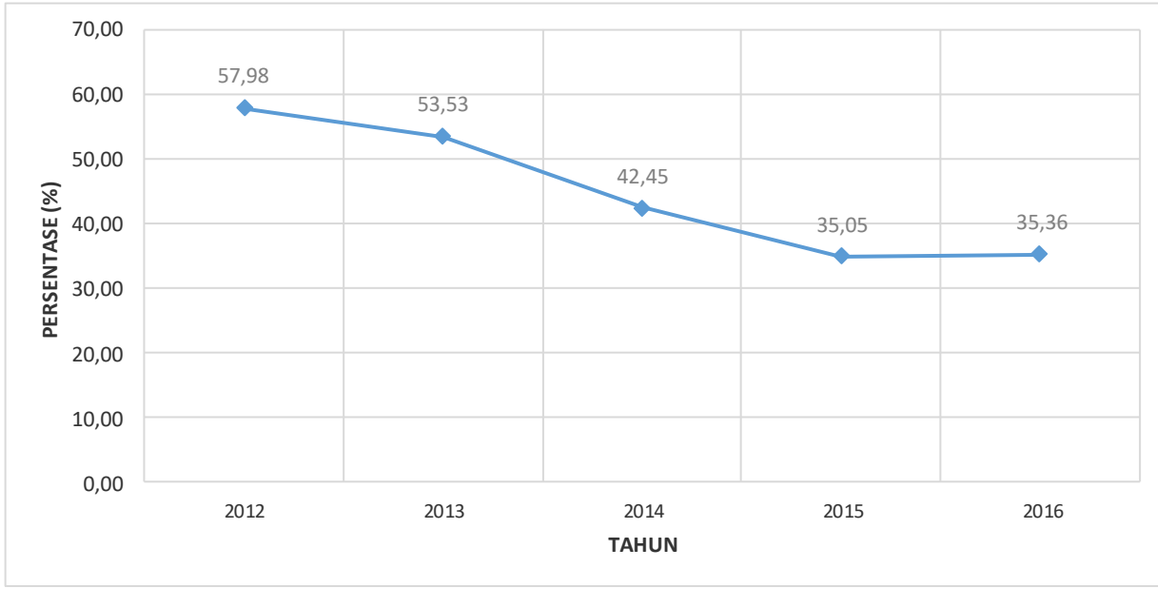

Proporsi dana pendidikan daerah terhadap total pengeluaran tahun 2012-2016 berkisar antara 5,99 persen – 34,14 persen. Proporsi terbesar terdapat Tahun 2013 yakni sebesar 34,14 persen, dan proporsi terkecil terdapat pada tahun 2016 sebesar 5.99 persen. Secara kumulatif rata-rata proporsi realisasi dana pendidikan dari tahun 2012-2016 mencapai 22,30 persen. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Analisis Realisasi Proporsi Dana Pendidikan Tahun 2012-2016

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Total Belanja Untuk Pendidikan (Rp)	Persentase (%)
2012	531,521,368,687.00	179,955,488,440.00	33.86
2013	622,353,726,698.00	212,441,119,949.00	34.14
2014	898,786,109,306.50	268,371,644,452.00	29.86
2015	1,050,360,419,082.00	80,408,060,457.00	7.66
2016	1,143,289,834,222.89	68,508,921,788.00	5.99
Rata-Rata			22.30

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Selanjunya berdasarkan proporsi dana kesehatan terhadap total pengeluaran (belanja+pembiayaan pengeluaran) tahun 2012-2016 adalah sebesar 10,02 persen. Secara keseluruhan total dana

kesehatan cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27
Analisis Realisasi Proporsi Dana Kesehatan Tahun 2012-2016

Tahun	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Total Belanja untuk Kesehatan (Rp.)	Persentase (%)
2012	531,521,368,687.00	59,640,840,259.00	11.22
2013	622,353,726,698.00	71,341,264,946.00	11.46
2014	898,786,109,306.50	104,424,144,330.00	11.62
2015	1,050,360,419,082.00	75,697,786,125.00	7.21
2016	1,143,289,834,222.89	98,428,110,209.00	8.61
Rata-Rata			10.02

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Program perlindungan sosial bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberi bantuan sosial, pelaksanaan syariat islam dan penanggulangan bencana daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan proporsi dana perlindungan sosial terhadap total pengeluaran (belanja+pembiayaan pengeluaran) tahun 2012-2016 adalah sebesar 2.62 persen. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.28

Tabel 3.28
Proporsi Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2012-2016

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Total Belanja Untuk Perlindungan Sosial (Rp.)	Persentase (%)
2012	531,521,368,687.00	14,583,538,305.00	2.74
2013	622,353,726,698.00	16,783,270,799.00	2.70
2014	898,786,109,306.50	25,481,908,715.00	2.84
2015	1,050,360,419,082.00	37,604,629,023.00	3.58
2016	1,143,289,834,222.89	14,383,707,001.00	1.26
Rata-Rata			2.62

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan anggaran untuk menutup Surplus/Defisit riil APBK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.29

Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi Pendapatan Daerah	527,510,787,205.44	639,662,970,801.99	889,969,621,595.67	1,028,697,943,281.39	1,149,198,637,448.16
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	531,512,368,687.00	622,353,726,698.00	898,786,109,306.50	1,050,360,419,082.00	1,143,289,834,222.89
3	Pengeluaran Pembiayaan	-	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-
A	Defisit Riil	(4,001,581,481.56)	16,309,244,103.99	(10,816,487,710.83)	(21,662,475,800.61)	5,908,803,225.27
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan:					
4	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	29,438,707,648.25	25,437,126,166.69	41,746,370,270.68	30,929,882,559.85	9,268,406,759.24

5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	29,438,707,648.25	25,437,126,166.69	41,746,370,270.68	30,929,882,559.85	9,268,406,759.24
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	25,437,126,166.69	41,746,370,270.68	30,929,882,559.85	9,267,406,759.24	15,177,209,984.51

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good government), diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tentang defisit yang terjadi pada anggaran pemerintah daerah. Untuk pembiayaan defisit anggaran, diperlukan adanya sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan untuk menutup defisit mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Piutang Daerah) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasadatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2012-2106, diketahui defisit terjadi pada tahun anggaran 2012, 2015 dan 2016. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Meskipun tren pendapatan dan belanja Nagan Raya menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Adanya defisit anggaran pada tahun 2012, 2015 dan 2016 menunjukkan pengelolaan APBK belum berjalan optimal, sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Zakat/Infaq/Sadaqah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebu yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dari Tabel 3.26 diketahui SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.41.746.370.270,68 sebaliknya SiLPA terendah adalah pada tahun 2015 sebesar Rp.9.267.406.759,24. Secara keseluruhan bila dilihat dari tren SiLPA selama periode tahun 2012-2016 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif merupakan sebaliknya yaitu tidak efektifnya penerimaan PAD dan tidak di barengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kabupaten Nagan Raya dapat disesuaikan. Realisasi komposisi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 3.30.

Tabel 3.30
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2016

NO.	URAIAN	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1	Jumlah SiLPA	29,438,707,648.25	100.00	25,437,126,166.69	100.00	41,746,370,270.68	100.00	30,929,882,559.85	100.00	9,268,406,759.24	100.00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(6,580,563,881.03)	(22.35)	(3,197,531,297.13)	(12.57)	(5,707,108,198.52)	(13.67)	(11,454,321,110.52)	(37.03)	(59,745,257,701.99)	(644.61)
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(19,036,870,786.00)	(64.67)	(29,553,438,200.00)	(116.18)	(62,692,730,851.00)	(150.18)	(97,488,090,467.00)	(315.19)	(166,898,992,716.00)	(1,800.73)
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(9,867,514,270.53)	(33.52)	(9,203,842,687.88)	(36.18)	(12,092,705,293.81)	(28.97)	(43,213,200,657.24)	(139.71)	(26,640,664,666.61)	(287.44)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	59,922,075,104.00	203.55	83,201,182,455.00	327.09	111,422,426,903.18	266.90	160,423,018,994.00	518.67	267,462,125,069.11	2,885.74
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan	1,885,488,707.00	6.40	6,815,487,041.00	26.79	6,515,079,043.00	15.61	11,446,256,084.00	37.01	127,173,125,063.00	1,372.11

7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan. belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. susunan/struktur masing-masing APBK. Disamping itu. Juga diperlukan data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk lima tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBK.

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu tahun 2012-2016, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mendatang. Namun sebelumnya perlu diketahui kondisi pengeluaran masing-masing komponen belanja sebagai pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat.

III.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

III.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

Asumsi target penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya untuk tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018-2022 diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4.39 persen per tahun. Proyeksi tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 46.99 persen;
b. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan melakukan upaya untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pendataan objek dan subjek pajak serta melaksanakan sosialisasi pajak daerah.
c. Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menurunnya SiLPA pada kurun waktu 5 tahun terakhir lebih dominan bersumber dari sisa penghematan belanja. Hal tersebut berimplikasi kepada menurunnya penerimaan lain-lain PAD.

Dalam penerimaan PAD, komponen penyumbang kontribusi paling besar adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 65.03 persen. Kontribusi berikutnya diberikan oleh Pajak Daerah sebesar 24.04 persen. Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 7.48

persen dan terakhir Retribusi Daerah akan memberikan kontribusi sebesar 3.44 persen.

2. Dana Perimbangan

Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun 2018-2022 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2.01 persen dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10.34 persen.
b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen yang meberikan Kontribusi terbesar terhadap penerimaan Dana Perimbangan yaitu sebesar 76.99 persen. Berdasar kan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan alokasi dasar. Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah. Kebutuhan daerah merupakan variable-variable yang ditetapkan undang-undang antara lain penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan indeks harga, perhitungan kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 8.97 persen per tahun. Kontribusi terbesar akan diperoleh dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 87.47 persen. Selanjutnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 12.38 persen. Dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 yang terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4.31 persen per tahun, yang dirincikan pada table 3.2.7:

III.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan penggunaan belanja tidak langsung kebijakan yang dilakukan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPK sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan

pemerintahan daerah.

2. Melakukan sinkronisasi kegiatan lintas sektoral sehingga tidak tumpang tindih dan keterpaduan dalam pencapaian sasaran.

Untuk belanja langsung untuk mendanai pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2018-2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pengalokasian anggaran bidang pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran untuk jenjang SD dan SMP.
3. Melakukan efisiensi anggaran dengan cara memverifikasi seluruh belanja pada SKPK agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan pencapaian hasil dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan pemahaman pejabat/aparatur pengelola keuangan pada masing-masing SKPK.

Selanjutnya belanja daerah yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Tahun					Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	%
1	**PENDAPATAN**	**1,060,066,574,381.39**	**1,107,239,417,204.39**	**1,156,512,260,027.39**	**1,205,785,102,850.39**	**1,255,057,945,673.39**	**4.31**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**103,170,804,746.00**	**108,009,629,177.00**	**112,848,453,608.00**	**117,687,278,039.00**	**122,526,102,470.00**	**4.39**
1.1.1	Pajak Daerah	23,511,324,431.00	25,350,148,862.00	27,188,973,293.00	29,027,797,724.00	30,866,622,155.00	7.04
1.1.2	Retribusi daerah	3,867,996,700.00	3,867,996,700.00	3,867,996,700.00	3,867,996,700.00	3,867,996,700.00	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,500,000,000.00	7,500,000,000.00	8,500,000,000.00	9,500,000,000.00	10,500,000,000.00	12.75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	69,291,483,615.00	71,291,483,615.00	73,291,483,615.00	75,291,483,615.00	77,291,483,615.00	2.77
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**662,073,188,014.00**	**675,776,328,028.00**	**689,479,468,042.00**	**703,182,608,056.00**	**716,885,748,070.00**	**2.01**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA)	25,469,372,365.00	28,523,508,730.00	31,577,645,095.00	34,631,781,460.00	37,685,917,825.00	10.30
1.2.1	Dana Alokasi Umum	520,602,317,000.00	525,602,317,000.00	530,602,317,000.00	535,602,317,000.00	540,602,317,000.00	0.95
1.2.1	Dana Alokasi Khusus	116,001,498,649.00	121,650,502,298.00	127,299,505,947.00	132,948,509,596.00	138,597,513,245.00	4.55
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**294,822,581,621.39**	**323,453,459,999.39**	**354,184,338,377.39**	**384,915,216,755.39**	**415,646,095,133.39**	**8.97**
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,100,000,000.00	-	-	-	-	(25.00)
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bantuan Dana Kontigensi	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30,775,490,621.39	37,609,999,999.39	44,444,509,377.39	51,279,018,755.39	58,113,528,133.39	17.27

1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	261,947,091,000.00	285,843,460,000.00	309,739,829,000.00	333,636,198,000.00	357,532,567,000.00	8.09
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	**BELANJA**	**1,070,070,000,000.00**	**1,117,240,000,000.00**	**1,166,510,000,000.00**	**1,215,790,000,000.00**	**1,265,060,000,000.00**	**4.27**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**533,780,000,000.00**	**555,610,000,000.00**	**580,110,000,000.00**	**604,830,000,000.00**	**629,520,000,000.00**	**4.21**
2.1.1	Belanja Pegawai	330,503,795,231.86	344,020,408,536.80	359,190,221,911.56	374,496,254,018.67	389,783,710,844.09	4.21
2.1.2	Belanja Subsidi	1,235,300,528.73	1,285,820,612.92	1,342,519,745.44	1,399,728,013.02	1,456,866,853.09	4.21
2.1.3	Belanja Hibah	2,629,997,457.94	2,737,556,460.73	2,858,270,870.63	2,980,069,246.67	3,101,719,809.14	4.21
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1,951,474,383.96	2,031,283,829.43	2,120,854,668.36	2,211,229,816.87	2,301,495,286.81	4.21
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	194,081,443,382.00	202,018,791,932.02	210,926,947,656.96	219,915,094,984.33	228,892,334,365.91	4.21
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	3,020,505,694.11	3,144,035,311.74	3,282,673,682.43	3,422,556,969.10	3,562,270,494.50	4.21
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	357,483,321.41	372,103,316.36	388,511,464.62	405,066,951.34	421,602,346.46	4.21
2.2	**Belanja Langsung**	**536,290,000,000.00**	**561,630,000,000.00**	**586,400,000,000.00**	**610,960,000,000.00**	**635,540,000,000.00**	**4.34**
2.2.1	Belanja Pegawai	74,007,460,559.75	77,504,354,125.89	80,922,588,286.63	84,311,842,666.44	87,703,857,025.38	4.34
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216,045,053,439.12	226,253,302,062.34	236,231,925,519.22	246,125,950,230.60	256,028,031,965.35	4.34
2.2.3	Belanja Modal	246,237,486,001.13	257,872,343,811.77	269,245,486,194.15	280,522,207,102.97	291,808,111,009.26	4.34
	Surplus/Defisit	**(10,003,425,618.61)**	**(10,000,582,795.61)**	**(9,997,739,972.61)**	**(10,004,897,149.61)**	**(10,002,054,326.61)**	**(0.00)**
3	**PEMBIAYAAN**	**10,003,425,618.61**	**10,000,582,795.61**	**9,997,739,972.61**	**10,004,897,149.61**	**10,002,054,326.61**	**(0.00)**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10,003,425,618.61**	**10,000,582,795.61**	**9,997,739,972.61**	**10,004,897,149.61**	**10,002,054,326.61**	**(0.00)**
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	10,003,425,618.61	10,000,582,795.61	9,997,739,972.61	10,004,897,149.61	10,002,054,326.61	(0.00)

3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Tabel 3.32
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	1,060,066,574,381.39	1,107,239,417,204.39	1,156,512,260,027.39	1,205,785,102,850.39	1,255,057,945,673.39
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10,003,425,618.61	10,000,582,795.61	9,997,739,972.61	10,004,897,149.61	10,002,054,326.61
	Total Penerimaan	1,070,070,000,000.00	1,117,240,000,000.00	1,166,510,000,000.00	1,215,790,000,000.00	1,265,060,000,000.00
	Dikurangi:					

4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,070,070,000,000.00	1,117,240,000,000.00	1,166,510,000,000.00	1,215,790,000,000.00	1,265,060,000,000.00

Sumber: Hasil olahan data LRA Tahun 2012-2016 (audited). Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya

Gambar 3.8
Grafik Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022



Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia tersebut (Tabel 3.32) dipergunakan untuk membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Pengalokasian dana pada prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prioritas I, yaitu berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti belanja pengawai, tambahan penghasilan Pegawan Negeri Sipil (PNS), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga.
b. Prioritas II, yaitu berkaitan berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMA dan amanat/kebijakan Nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 (dua puluh) persen dan kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen. Prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari belanja pagawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.

c. Prioritas III, yaitu. dengan program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi SKPK, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program pendukung lainnya untuk peningkatakan pelayanan SKPK.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Nagan Raya Tahun 2017-2022 berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.33

Tabel 3.33

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022

PRIORITAS	Tahun									
	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Kapasitas Riil	1,070,070,000,000.00	100.00	1,117,240,000,000.00	100.00	1,166,510,000,000.00	100.00	1,215,790,000,000.00	100.00	1,265,060,000,000.00	100.00
Prioritas 1	533,780,000,000.00	49.88	555,610,000,000.00	49.73	580,110,000,000.00	49.73	604,830,000,000.00	49.75	629,520,000,000.00	49.76
Prioritas 2	301,783,938,512.00	28.20	316,043,397,017.00	28.29	329,982,102,115.00	28.29	343,802,634,905.00	28.28	357,634,422,200.00	28.27
Prioritas 3	234,506,061,488.00	21.92	245,586,602,983.00	21.98	256,417,897,885.00	21.98	267,157,365,095.00	21.97	277,905,577,800.00	21.97

Sumber: Hasil olahan data dari laporan keuangan pemkab nagan raya Tahun 2012-2016. Badan Pengelolaan keuangan daerah Keuangan Kabupaten Nagan Raya

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

IV.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini sudah berumur 15 Tahun, situasi dan kondisi semakin kondusif dan banyak perkembangan yang telah dicapai sejak pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Keberadaannya yang sangat strategis untuk lintasan jalur Barat Selatan yang memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Meskipun Kabupaten Nagan Raya masih tergolong muda, namun secara perlahan Kabupaten Nagan Raya telah mampu berdiri sejajar dengan Kabupaten/kota lain di Aceh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih, diantaranya pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 kali berturut turut dari BPK RI Perwakilan Aceh sejak tahun 2008-2016 atas pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dan semua itu merupakan bukti nyata kerja keras dan keseriusan dalam membangun Kabupaten Nagan Raya yang lebih baik.

Meskipun laju pembangunan dan kehidupan masyarakat semakin dinamis, banyak tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Nagan Raya seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menimbulkan dampak pada permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Secara umum, adanya permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan

interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala daerah, Nasional dan Internasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan gambaran umum tentang perekonomian dan keuangan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, permasalahan Kabupaten Nagan Raya diindentifikasikan sebagai berikut;

IV.1.1 Permasalahan Pembangunan

IV.1.1.1 Penerapan dan Pengamalan Syariat Islam;

Kabupaten Nagan Raya dalam sejarahnya merupakan kabupaten yang sangat komitmen dalam menjalankan syariat islam dan menerapkan nilai-nilai islam dalam semua tatanan masyarakat secara kaffah yang menjadi landasan pembangunan untuk melahirkan generasi dan masyarakat cerdas, beragama dan memiliki nilai budaya dengankarakter moral yang baik, maka penerapan syariat islam menjadi sangat penting dan isu strategis utama yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan masih banyak terjadi dan menjadi tantangan dalam melaksanakan penerapan nilai-nilai islam secara kaffah di Kabupaten Nagan Raya. Diantara permasalahan sebagai berikut;

1. Masih tingginya angka pelanggaran terhadap Syariat Islam
2. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan (MUQ, TPA, Majelis Taklim) yang mampu membentuk karakter dan berkepribadian islam
3. Masih rendahnya mutu pendidikan dayah
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) ke Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
6. Masih kurangnya masyarakat yang memahami tata cara Tajhiz Mayat (Pemandian Mayat)

IV.1.1.2 Reformasi birokrasi, pemerintahan, partisipasi masyarakat dan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Permasalahan dalam pembangunan sistem pemerintahan yang masih terjadi di Nagan Raya adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bebas KKN, pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang mendukung Sistem manajemen pemerintahan dan belum optimalkan kinerja birokrasi
3. Belum tersedianya sistem *data base* yang terpadu dan terintegrasi
4. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dan penerapan PPRG dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.

IV.1.1.3 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal, Industri dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Permasalahan dalam perberdayaan ekonomi masyarakat sebagai berikut;

1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Masih rendahnya kemampuan/ keterampilan masyarakat dalam mata pencaharian.
3. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
5. Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah
6. Terbatasnya akses lapangan kerja
7. Masih rendahnya investasi sektor swasta.

IV.1.1.4 Sumberdaya manusia, pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Nagan Raya dibidang pendidikan, budaya, pemuda sebagai berikut;

1. Masih kurangnya aksesibilitas Pendidikan.
2. Masih rendahnya mutu pendidikan.
3. Belum terwujudnya lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing
4. Rendahnya tingkat literasi masyarakat
5. Masih rendahnya peran dan fungsi lembaga adat
6. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan
7. Masih rendahnya prestasi olah raga
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga

IV.1.1.5 Kesejahteraan sosial masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang sosial masyarakat dan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut;

1. Penerima subsidi listrik dan subsidi beras belum tepat sasaran
2. Belum adanya program asuransi kematian bagi masyarakat
3. Rendahnya ketrampilan dan terbatasnya modal usaha masyarakat miskin
4. Belum optimalnya penaggulangan masyarakat miskin dan rentan miskin
5. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan dan diversifikasi pangan
6. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok perempuan
7. Belum optimalnya pemberdayaan kombatan dan korban konflik
8. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
9. Belum tersedianya Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
10. Masih tingginya angka pengangguran;
11. Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK)

IV.1.1.5 Kesehatan;

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif. Tanpa kondisi kesehatan prima, masyarakat Kabupaten Nagan Raya tidak akan produktif dan tidak akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal.

Saat ini angka kesakitan masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih berkisar 1-10 hari dalam sebulan. Dalam kerangka pembangunan kesehatan, Kabupaten Nagan Raya menghadapi berbagai permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Rendahnya usia harapan hidup;
2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
3. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kesehatan dan para medis;
4. Masih minimnya tenaga kesehatan (dokter spesialis);
5. Masih terdapat kasus gangguan gizi (mal nutrisi);
6. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak;
7. Belum optimalnya pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda;
8. Belum terakreditasinya Puskesmas dan RSUD Sultan Iskandar Muda;

IV.1.1.6 Pembangunan infrastruktur, Pemukiman, Tata ruang, Komunikasi dan informasi, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Transmigrasi

Ketersediaan dan kemapaman infrastruktur wilayah menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut;

1. Belum meratanya infrastruktur, sarana dan prasarana antar wilayah.
2. Belum maksimalnya pengembangan kawasan strategis
3. Belum mememadainya sarana dan prasarana irigasi
4. Masih minimnya penanganan infrastruktur kebencanaan
5. Masih rendahnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat
6. Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni
7. Belum optimalnya pengelolaan Ruang terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik
8. Masih banyak rumah yang tidak layak huni
9. Akses jalan usahatani belum memadai
10. Saluran irigasi tersier belum memadai
11. Pembangunan destinasi wisata tidak merata
12. Belum berfungsi laboratorium daerah utnuk analisis limbah industri dan limbah rumah tangga
13. Pencemaran lingkungan kawasan pelabuhan khusus batubara, juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar
14. Pencemaran Air dari kegiatan rumah tangga dan home industri
15. Limbah padat dan cair mengganggu lingkungan pasar
16. Pencemaran dan Polusi udara oleh kegiatan industri (PLTU) dan tambang
17. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran
18. Tingginya penggunaan pestisida
19. Pembuangan sampah tidak selektif menurut sifat sampah
20. Pengelolaan sampah belum optimal
21. Sumber makanan tercemar
22. Pencemaran lingkungan dan air oleh PKS
23. Antisipasi ancaman bahaya keberadaan PLTA
24. Pembinaan kelompok masyarakat perkebunan sedikit
25. Peningkatan suhu udara akibat pengelolaan rawa gambut
26. Terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi penggunaan lahan lainnya terutama perkebunan kelapa sawit
27. Pemanfaatan area sempadan sungai untuk permukiman dan perkebunan
28. Kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan dan Perkebunan
29. Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut)
30. Konservasi lahan gambut (Rawa Tripa) yang terintegrasi.
31. Kebakaran hutan dan lahan

IV.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan secara internal sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya serta kondisi eksternal yang terjadi, maka beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun mendatang, yaitu:

Isu Strategis Nasional meliputi:

1. Kesenjangan / gap / disparitas antara daerah – daerah perbatasan dan terluar
2. Peningkatan kesejahteran petani dan program kedaulatan pangan
3. Kesenjangan pembangunan infrastruktur kota dan desa
4. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita
5. Pembagian wilayah – wilayah strategis dan cepat tumbuh
6. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan

Isu Strategis Provinsi Aceh meliputi:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik.
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan.
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan.
5. Pengembangan pertanian dan perikanan.
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan pariwisata.
8. Ketenagakerjaan.
9. Ketersediaan dan ketahanan energi.
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi.
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni.
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan.
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga.
15. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan.
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

Isu – isu Strategis Kabupaten Nagan Raya

1) Penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam
Isu strategis penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat Islam, meningkatkan kemakmuran mesjid, meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam seperti; MUQ, TPA, Majelis Taklim yang mampu membentuk karakter dan kepribadian yang islami. Selanjutnya peningkatan mutu pendidikan dayah juga menjadi skala prioritas disamping peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam.

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur
Isu strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur difokuskan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang sederhana, berkualitas dan transparan. Disamping itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dibutuhkan sumberdaya aparatur yang handal, cerdas, tangkas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, oleh karenanya kemampuan sumber daya aparatur perlu terus ditingkatkan sesuai tupoksi.

3) Pengembangan sistem data base terintegrasi
Isu strategis pengembangan sistem data base terintegrasi diharapkan dapat menyediakan data dan informasi satu pintu yang mudah di akses sesuai kebutuhan, hal ini menjadi penting karena data dan informasi yang terpusat pada satu sumber dapat dijadikan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan.

4) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Isu strategis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ditujukan kepada upaya peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berbasis gender, karena disadari bahwa saat ini masih terdapat ketimpangan penerima manfaat pembangunan dalam berbagai hal antara laki-laki dengan perempuan termasuk dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan akses pekerjaan.

5) Pemberdayaan Ekonomi, Pengembangan Industri dan UMKM
Isu strategis pemberdayaan ekonomi Pengembangan Industri dan UMKM dititikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri, penguatan UKM,

pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, kerjasama dunia usaha, perluasan lapangan kerja, dan pengembangan potensi pariwisata seperti wisata pantai, danau, sungai, juga pengembangan wisata edukasi dan religi serta wisata kuliner. Di sisi lain peningkatan PAD dan investasi juga perlu terus didorong kearah pengalian dan optimalisasi sumber-sumber PAD yang potensial, selanjutnya menciptakan iklim investasi kondusif, kemudahan berbisnis dan promosi daerah juga menjadi langkah penting dalam mendokrak perekonomian daerah.

6) Penanggulangan Kemiskinan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada upaya menurunkan angka kemiskinan secara terukur. Selanjutnya upaya penanggulangan kemiskinan di arahkan kepada peningkatan keahlian dan pengembangan sarana pendukung usaha serta akses permodalan untuk mendukung mata pencaharian bagi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga hal ini dapat mendorong masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

7) Pelayanan pendidikan yang berkualitas

Isu pelayanan pendidikan yang berkualitas di tujukan untuk meningkatkan aksesibilitas sektor pendidikan dasar dan menengah keseluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas sektor pendidikan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf. Disamping itu dalam rangka mencapai pelayanan pendidikan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompentensi, sertifikasi, dan kualifikasi tenaga pendidikan. Isu ini juga diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasional yang unggul dan berdaya saing.

Berkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat, dapat dilakukan dengan optimalisasi fasilitas dan pelayanan pustaka daerah maupun gampong. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

8) Pelestarian kebudayaan

Isu pelestarian kebudayaan merupakan bagian penting dari pengejawantahan dari slogan *"Agama Ta Peukoeng Budaya Ta Jaga"* di fokuskan pada upaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan lokal yang mengakar dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Pelestarian kebudayaan juga diarahkan kepada penggalian situs-situs sejarah

yang ada di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya peran dan fungsi lembaga adat perlu di perkuat untuk menjaga eksistensi budaya lokal.

9) Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga
Isu peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga difokuskan pada upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan yang kreatif, inovatif dan positif. Disamping itu juga perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi olah raga pada even-even daerah dan nasional.

10) Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
Isu Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat dititikberatkan pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan penyaluran berbagai bantuan sosial yang lebih tepat sasaran seperti subsidi listrik dan subsidi beras. Selanjutnya mengenai prioritas pemerintah daerah dalam rangka pelaksaaan jaminan sosial kematian bagi masyarakat, dapat dilaksanakan dengan adanya pemberian santunan kematian bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan yang berlaku.

11) Optimalisasi Potensi Lahan
Isu Optimalisasi Potensi Lahan difokuskan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang ada termasuk lahan pekarangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung diversifikasi pangan di Kabupaten Nagan Raya.

12) Pemberdayaan Perempuan, Kombatan dan Korban Konflik serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Isu Pemberdayaan Perempuan, Kombatan dan Korban Konflik serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) difokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan, penanganan Kombatan dan Korban Konflik serta mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

13) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Isu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

14) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas

Isu Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas difokuskan pada Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan hingga ke wilayah terisolir sekaligus menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan transmigrasi. Selain itu, perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur dasar (Irigasi, Air Baku dan Infrastruktur Permukiman) dalam rangka peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

15) Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Isu Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas terutama industri perkebunan dan pertambangan.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJMK, maka isu-isu strategis yang terkait dengan KLHS RPJMK adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan Sosial;
2. Belum meratanya Pelayanan Kesehatan;
3. Belum meratanya infrastruktur daerah;
4. Rendahnya Daya Saing Daerah;
5. Pencemaran Lingkungan;
6. Alih Fungsi Lahan;
7. Belum tertatanya sistem pengelolaan lingkungan hidup;
8. Degradasi lahan; dan
9. Bencana Alam

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V.1 VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai tindakan sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menguraikan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

V.1.1. VISI

Secara harfiah, visi merupakan pengkondisian masa depan daerah yang ingin di capai berdasarkan batasan tempat dan waktu. Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang diselesaikan atas kondisi aktual dan sejalan dengan kebijakan yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan arah pembangunan tahun ketiga jangka panjang daerah, kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah di tetapkan visi Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM"

Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya untuk Tahapan Pembangunan ke-3 tahun 2017-2022 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan tehnologi yang terus meningkat.

Dalam visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 terdapat 4 (empat) kata kunci yakni **Sejahtera, Mandiri**, **Maju,** dan **Berlandaskan Syariat Islam,** dan serta 3 (tiga) kata pendukung yaitu **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,** dan **Berdaya Saing"**

Setidaknya ada 4 (empat) kata yang patut digaris bawahi dan perlu penjabaran lebih lanjut agar tidak terjadi multi tafsir terhadap visi yang ditetapkan. Berikut dijelaskan penjebaran sebagaimana dimaksud.

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM"	**Berlandaskan Syariat Islam**	Menjadikan Masyarakat bersama pemerintah daerah dapat mewujudkan masyarakat yang religius. Menerapkan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan dan tatanan kehidupan bermasyarkat, social dan budaya. Dan Agama harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan bersama
	Berdaya Saing	Menciptakan Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memiliki daya saing melalui peningkatan sumber daya manusia, mengingat tantangan global yang semakin tinggi dan cepat yang mengharuskan setiap generasi mampu berkompetisi dalam setiap bidang dengan segala tantangannya
	Sejahtera	Pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara periodik. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Memberi stimulus dan pemberdayaan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat yang memberi dampak positif bagi perkembangan etos kerja dan ekonomi masyarakat
	Mandiri	Kabupaten Nagan Raya dan Masyarakatnya harus lebih mandiri, mampu menciptakan PAD dalam kapasitas besar, sehingga mampu melakukan pembiayaan belanja daerah

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		dengan jangkauan pembangunan yang luas. Selain itu, masyarakat diharapkan harus mampu menjadi lebih mandiri, meningkatkan produktifitas tanpa harus terus menerus diberikan stimulus oleh pemerintah, sehingga pemerataan pemberdayaan akan tercapai dengan jangka waktu yang relative lebih cepat

V.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. **Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah;** Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Dinul dan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan pemerintahan dan bermasyarakat dengan gerakan 'meramaikan mesjid'. Sehingga dapat berkurangnya kasus pelanggaran syariat islam, melalui Majelis Taklim yang aktif, serta meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi Lembaga Pendidikan Dayah melalui standarisasi Pendidikan Dayah, dan mendukung fungsi-fungsi Lembaga Bazis dan sejenisnya.

2. **Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan;** Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan Tata Kelola dan Tata Laksana pemerintahan daerah yang terbuka dan bersih (*open and clean governance*) dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, APBK yang tepat waktu, Opini BPK yang baik dan meningkat setiap tahunnya, tingkat akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas dalam kinerja Pemerintah Daerah yang tinggi dengan didasari pada basis data yang terpadu dengan melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan di Nagan Raya.

3. **Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian**

daerah; Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sektor pertanian, perkebunan dan kelautan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri, membangun pasar sentra di kecamatan agar hasil pertanian dan perkebunan dapat dipusatkan pada pasar kecamatan hingga membentuk harga pasar lokal.Selain itu bidang mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang Mitigasi Bencana di salah satu ORGANISASI PERANGKAT DAERAH seperti BPBD atau Dinsos melalui kerja sama dengan kampus-kampus khususnya dangan Pusat Kajian Kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, membangun kerja sama dengan Akademisi khususnya dengan Pusat Kajian Kebencanaan, membangun sistem koordinasi mengenai kebencanaan yang terinterrasi dengan semua ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Disamping itu, upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pemberian ketrampilan dan permodalan masyarakat melalui perkreditan gampong dengan sistem simpan pinjam melalui BKG (Bank Kredit Gampong).

4. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;** Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Umum, Agama dengan memerankan guru sebagai sentra pendidikan melalui penyusun kurikulum muatan lokal, pentingnya pendidikan agama bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan akhlak dan normal bangsa, mamacu lembaga-lembaga pendidikan keagamaam untuk lebih siap bersaing dalam hal pengembangan mutu dan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, peningkatan taraf kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Selain itu, dengan penyelenggaraan festival Seni dan Budaya dalam rangka menjaga nilai-nilai dan kearifan local yang menjadi salah satu identitas masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya. Dan juga melakukan pembinaan kepada induk-induk oranisasi olahraga dan kepemudaan dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Pemuda di Kabupaten Nagan Raya.

5. **Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;** Hal ini dimaksudkan untuk memastikan jaminan social bagi seluruh masyarakat Nagan Raya dengan fokus pada menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat

Nagan Raya. Secara khusus dalam rangka menanamkan pemahaman mantan kombatan mengenai kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik, berpengetahuan tentang perdamaian, ekonomi, pembangunan, lingkungan, bahaya narkoba dan terorisme melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan baik lokal maupun nasional dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan Mantan Kombatan dan para korban konflik dengan partisipasi aktif dan positif dalam pembangunan Nagan Raya.

6. **Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat;** Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan melalui pembukaan akses akses maupun pembangunan infrastruktur, pengendalian penyebaran penyakit, gizi buruk dan krisis kesehatan akibat bencana, memperbaiki kualitas pelayanan dasar institusi kesehatan (standarisasi Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, dan Pustu) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan ceria dan Menggalakkan masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat.

7. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah;** Hal ini dimaksudkan untuk penyedian infrastruktur dasar dan pendukung dalam rangka mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan dengan mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan yang berpotensi terkait peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan PAD daerah dengan membuka akses ke desa-desa terpencil. Selain itu dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan sehingga integrasi dan keterhubungan antar wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang lestari.

V.2 Tujuan Dan Sasaran

Selanjutnya, dalam dataran operasional, jabaran visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan tersebut bisa saja dicapai dalam masa 5 (lima) tahun atau kurang dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kabupaten Nagan Raya. Sehingga dalam menetapkan tujuan dan sasaran tersebut harus realistis dan terukur (kualitatif maupun

kuantitatif) untuk dilihat perkembangan pembangunannya selama Tahun 2017-2022. Lebih rinci terhadap hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Standar (satuan)	Kondisi Awal	Target Tahun ke -					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Visi :	***Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi***									
	Misi 1 : Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah										
1.1		**Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman**									
1.1.1		Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	50	50	60	70	80	90	90
			Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan	orang	155	155	170	180	200	222	222
1.1.2		Berkembangnya lembaga pendidikan islami	Jumlah Lembaga Pendidikan Islam	Lembaga	5	1	1	2	2	2	13
1.1.3		Meningkatnya mutu pendidikan dayah	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	N/A	N/A	2	3	4	5	5
1.1.4		Meningkatnya Kemakmuran Masjid	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Mesjid	47	60	85	120	150	180	180
1.1.5		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	7.545	9.000	9.500	10.000	10.500	11.500	11.500
1.1.6		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat	Jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong	Orang	444	444	444	444	444	444	444
1.1.7		Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	23	23	40	60	80	100	100

	Misi 2 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan									
2.1	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment)									
2.1.1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.1.2	Meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3	3	4	4
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor			80	85	90	100	100
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC-	CC	CC+	B	BB	BB
2.1.3	Tersedianya sistem *data base* yang terpadu dan terintegrasi	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	20	20	30	45	70	85	85
2.1.4	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana /Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
2.1.5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	55	60	70	80	90	97	97
2.1.6	Terwujudnya pelaksanaan Musrena	Terlaksananya Musrena	Terlaksana /Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
2.1.7	Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan PPRG	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	%	N/A	5	10	25	50	75	75

	Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah									
3.1	**Menurunkan Tingkat Kemiskinan**									
3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Angka Kemiskinan	%	19,17	18,21	17,30	16,44	15,61	14,83	14,83
		Persentase Masyarakat Miskin yang Dilatih	%	46,56	51,22	55,88	60,54	65,20	69,86	70
3.1.2	Menurunnya angka pengangguran	Angka Pengangguran	%	3,79	3,60	3,42	3,25	3,09	2,93	2,93
3.2	**Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**									
3.2.1	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal	Jumlah usaha ekonomi berbasis kearifan lokal yang dibina	Usaha	N/A	N/A	10	14	16	18	18
3.2.2	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	10,06	10,56	11,06	11,56	12,06	12,56	12,56
3.2.3	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Produksi TBS	Ton	316.164	#######	#######	#######	#######	#######	#######
		Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170.151	178.505	187.591	196.971	206.819	217.160	217.160
		Jumlah Produksi Ikan	Ton	2.532,77	2.659,41	2.792,38	2.932,00	3.078,60	3.232,53	3.232,53
3.2.4	Terwujudnya ketahanan pangan	Kecukupan pangan utama	Cukup/ tidak cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
	Misi 4 . Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga									
4.1	**Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata**									
4.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata	Angka Melek Huruf	%	93,41	94,34	95,29	96,24	97,20	98,17	98,17
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,32	8,41	8,49	8,57	8,66	8,66
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,37	13,37

4.1.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	37,51	45,01	54,01	64,82	77,78	93,34	93,34
		Persentase Distribusi Guru	%	N/A	N/A	60	70	80	90	90
		Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	53,16	58,48	64,32	70,76	77,83	85,61	85,61
		Persentase Distribusi Tenaga Kependidikan	%	N/A	N/A	60	70	80	90	90
4.1.3	Meningkatnya ketersedian dan kualitas pendidikan anak usia dini									
4.1.4	Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing	Persentase Lulusan Vokasional yang Bersertifikat	%	N/A	40	60	70	80	90	90
		Jumlah Lembaga Pendidikan yang unggul	Lembaga	N/A	9	12	14	16	18	18
4.1.5	Meningkatnya minat dan kemampuan masyarakat dalam literasi	Persentase Tingkat Literasi Masyarakat	%	N/A	50	55	60	65	70	70
4.2	**Melestarikan Adat Istiadat dan Budaya**									
4.2.1	Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang Dibina	Lembaga	N/A	10	12	14	16	18	18
		Even pentas seni dan budaya yang terselenggara	Kegiatan	2	3	4	5	6	6	6
4.2.2	Terwujudnya simbol adat dan budaya Nagan	Tersedianya simbol dan budaya Nagan	Kegiatan	N/A	N/A	1	1	1	1	4
4.3	**Meningkatkan Peran Kepemudaan**									
4.3.1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	10	14	18	20	22	23	23
4.3.2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional	Medali	5	5	7	10	13	15	15

	Misi 5 . Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat									
5.1	**Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat**									
5.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	46,56	51,22	55,88	60,54	65,20	69,86	69,86
5.1.2	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.1.3	Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan	Jumlah kelompok perempuan diberdayakan	%	23,74	28,49	34,19	41,02	49,23	59,07	59,07
5.1.4	Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik	Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang mendapat pemberdayaan	%	N/A	50	60	70	80	90	90
5.1.5	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat	%	N/A	70	75	80	85	90	90
5.2	**Mewujudkan perlindungan sosial masyarakat**									
5.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Misi 6 . Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat									
6.1.	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**									
6.1.1	Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,70	68,80	68,94	68,98	69,03	69,24	69,24
6.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase kinerja pelayanan Rumah Sakit								
		- BOR	%	75%	75%	75%	80%	80%	85%	85%
		- TOI	Hari	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari
		- ALOS	Hari	3 hari	3 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
		- NDR	/1000 Pasien	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
		- GDR	/1000 Pasien	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
		Angka kematian ibu	/100000 KH	99,63	98,93	98,72	97,70	96,37	96,01	96,01
		Angka kematian neonatus	/1000 KH	14,28	14,11	13,68	13,02	12,42	12,24	12,24

		Angka kematian bayi	/1000 KH	5,65	5,46	5,39	4,92	4,20	4,09	4,09
		Angka kematian balita	/1000 KH	37,20	37,07	36,76	36,68	36,43	36,28	36,28
		Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
6.1.3	Meningkatnya status RSU Nagan Raya	Akreditasi RSU Nagan Raya	Akreditasi	Belum Akreditasi	Perdana	Dasar	Madya	Utama	Paripurna	Paripurna
Misi 7 . Meningkatkan pembangunan infrastrukturberdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah										
7.1	**Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat**									
7.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	243,54	280,07	322,08	370,39	425,95	489,85	489,85
7.1.2	Terwujudnya pengembangan kawasan strategis	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	3	5	5	7	7	8	8
7.1.3	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17.597	17.917	18.096	18.277	18.460	18.645	18.645
7.1.4	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan	Panjang Jalan evakuasi	Km	N/A	1	2	4	6	8	8
		Jumlah pos pemadam kebakaran	Unit	3	4	5	6	7	8	8
		Jumlah bangunan evakuasi	Unit	2	2	3	4	5	6	6
7.1.5	Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat	Persentase akses sanitasi	%	42	46,2	50,82	55,90	61,49	67,64	67,64
		Persentase akses air minum Perpipaan	%	0	0	10	20	30	35	35
		Persentase akses air minum non Perpipaan	%	58,15	63,97	70,36	77,40	85,14	93,65	93,65

7.1.6	Tersedianya rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	852	1070	1270	1470	1670	1670
		Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	35	50	60	70	80	80
7.1.7	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik	Persentase ruang terbuka hijau	%	7,8	7,8	12	17	25	30	30
		Persentase ruang terbuka non hijau	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.8	Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan kabupaten Nagan raya, 2017-2022 sebagaimana telah diuraikan pada Bab V, maka selanjutnya disusun tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana disajikan pada tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022.

Arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Nagan Raya yang memuat tema pembangunan untuk setiap tahunnya yaitu untuk tahun 2018-2022 disajikan pada tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2018-2022.

Sedangkan keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas dapat dilihat pada tabel 6.3. Program Prioritas Kabupaten Nagan Raya yang disertai Pagu Indikatif.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 :	**Mengimplementasikan Nilai-nilai keislaman dan syariat islam secara kaffah**					
	1.1	Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman	1.1.1	Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam	1.1.1.1	Penguatan peran dan fungsi Wilayatul Hisbah
					1.1.1.2	Peningkatan peran ulama dan masyarakat dalam pengawasan
			1.1.2	Berkembangnya lembaga pendidikan islami	1.1.2.1	Pembinaan dan pembangunan lembaga pendidikan islami
			1.1.3	Meningkatnya mutu pendidikan dayah	1.1.3.1	Pembangunan dayah terpadu
					1.1.3.2	Peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia dan penyediaan biaya operasional dayah
			1.1.4	Meningkatnya Kemakmuran Masjid	1.1.4.1	Peningkatan peran Badan Kemakmuran Masjid dalam memakmurkan Masjid
			1.1.5	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS	1.1.5.1	Penguatan fungsi dan peran Baitul Mal
			1.1.6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat	1.1.6.1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Tajhiz Mayat
			1.1.7	Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist	1.1.7.1	Peningkatan pengamalan Alquran dan hadist dalam kehidupan masyarakat
Misi 2 :	**Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan**					
	2.1	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment)	2.1.1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2.1.1.1	Peningkatan profesionalisme SDM ASN, dan penempatan pejabat melalui analisis dan lelang jabatan
			2.1.2	Meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas	2.1.2.1	Pelaksanaan mekanisme pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
			2.1.3	Tersedianya sistem *data base* yang terpadu dan terintegrasi	2.1.3.1	Peningkatan ketersediaan dan pengintegrasian data secara terpadu
			2.1.4	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	2.1.4.1	Pengembangan aplikasi e-planning terintegrasi e-butgeting
			2.1.5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	2.1.5.1	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
			2.1.6	Terwujudnya pelaksanaan Musrena	2.1.6.1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan
			2.1.7	Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan PPRG	2.1.7.1	Peningkatan Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG
Misi 3 :	**Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah**					
	3.1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	3.1.1.1	Penyediaan akses permodalan bagi masyarakat miskin
			3.1.2	Menurunnya angka pengangguran	3.1.2.1	Penciptaan akses lapangan kerja
					3.1.2.2	revitalisasi BLK
	3.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (P	3.2.1	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal	3.2.1.1	Pemberian kemudahan akses permodalan, peningkatan daya saing dan SDM
			3.2.2	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	3.2.2.1	Optimalisasi pungutan PAD dan penggalian sumber-sumber PAD yang baru
					3.2.2.1	Peningkatan jumlah investasi dalam dan luar negeri
			3.2.3	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah	3.2.3.1	Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan
			3.24	Meningkatnya ketahanan pangan	3.2.4.1	Optimalisasi pemanfaatan teknologi
					3.2.4.2	peningkatan produksi dan

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 4 :	**Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga**					
	4.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	4.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata	4.1.1.1	Peningkatan akses pendidikan menengah dan vokasional
			4.1.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	4.1.2.1	Peningkatan kompetensi tenaga
					4.1.2.2	Pemerataan penempatan tenaga
					4.1.2.3	Peningkatan peran dan fungsi MPD
			4.1.3	Meningkatnya ketersedian dan kualitas pendidikan anak usia dini	4.1.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
					4.1.3.2	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik anak usia dini
			4.1.4	Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing	4.1.4.1	Pengembangan pendidikan inklusif dan sekolah unggul
					4.1.4.2	
			4.1.5	Meningkatnya minat dan kemampuan masyarakat dalam literasi	4.1.5.1	Penguatan gerakan literasi dalam masyarakat
	4.2	Melestarikan adat istiadat dan budaya	4.2.1	Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	4.2.1.1	Penguatan peran dan fungsi lembaga adat
					4.2.1.2	Peningkatan pergelaran piasan seni dan budaya
			4.2.2	Terwujudnya simbol adat dan budaya Nagan	4.2.2.1	Penciptaan simbol adat dan budaya Nagan Raya
	4.3	Meningkatkan peran kepemudaan dan ol	4.3.1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	4.2.3.1	Penguatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan
			4.3.2	Meningkatnya prestasi olahraga	4.2.4.1	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
					4.2.4.2	Peningkatan kapasitas olah ragawan
					4.2.4.3	Penigkatan Pelaksanaan event olah raga

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 5 :	**Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat**					
	5.1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	5.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	5.1.1.1	Menyediakan subsidi dan bantuan modal kepada masyarakat miskin
			5.1.2	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	5.1.2.1	Peningkatan kesejahteraan PMKS
			5.1.3	Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan		Peningkatan Kapasitas kelompok perempuan, mantan kombatan dan korban konflik
			5.1.4	Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik		
			5.1.5	Meningkatnya ketahanan keluarga	5.1.5.1	Perkuatan peran keluarga dalam upaya preventif terkait penanganan persoalan sosial, kasus kekerasan, narkoba dll.
	5.2	Mewujudkan perlindungan sosial masyarakat	5.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat	5.1.1.2	Menyediakan santunan kematian dan melahirkan bagi masyarakat kurang sejahtera
Misi 6 :	**Meningkatkan pelayanan yang berkualitas mewujudkan masyarakat yang sehat**					
	6.1	Meningkatkan derajat kesehatan masyar	6.1.1	Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup	6.1.1.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
			6.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	6.1.2.1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
					6.1.3.1	Peningkatan fasilitas rawat inap di puskesmas
					6.1.4.1	Pemantapan pola hidup bersih dan sehat
			6.1.3	Meningkatnya status RSU Nagan Raya	6.1.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan RSU Sulthan Iskandar Muda
					6.1.2.2	Pemenuhan Persyaratan Akreditasi RSU

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 7 :	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah**					
	7.1	Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat	7.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	7.1.1.1	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah
			7.1.2	Terwujudnya pengembangan kawasan strategis	7.1.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan strategis
			7.1.3	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	7.1.3.1	Peningkatan dan pembangunan kualitas infrastruktur pertanian
			7.1.4	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana	7.1.4.1	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan resiko bencana
			7.1.5	Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat	7.1.5.1	Peningkatan akses sanitasi dan air minum
			7.1.6	Tersedianya rumah layak huni	7.1.6.1	Penyediaan rumah layak huni
			7.1.7	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.	7.1.7.1	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
					7.1.7.2	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau
			7.1.8	Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif	7.1.8.1	Penyediaan infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2018-2022

Tahun	Arah Kebijakan (Tahun)
2018	Arah kebijakan pembangunan tahun 2018 difokuskan pada peningkatan SDM dan reformasi birokrasi untuk mendukung good and clean governance. kebijakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur dasar meliputi rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, sanitasi dan air bersih yang memadai dan infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar wilayah. percepatan dan pemerataan ekonomi lokal dilakukan melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan.. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan standarisasi institusi dan lembaga pelayanan kesehatan masyarakat. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dicapai dengan pemerataan akses pendidikan, re-distribusi dan pemerataan guru. Pelaksanaan bidang reformasi birokrasi dicapai melalui pembenahan regulasi, pelaksanaan dan pengembangan system e-planning, e-budgetting, e-procurement serta peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan lainnya melalui pakta integritas dan janji layanan kinerja kinerja terkait dengan prinsip good governance dan clean governance. Pengarusutamaan Syariat Islam menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan aqidah, akhlak dan syariat agar menjadi masyarakat yang berkarakter Islami. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan Aceh 2018-2022.

	Tema pembangunan tahun 2018 adalah: "**memantapkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, lestari, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan peningkatan SDM serta pelayanan masyarakat**" Unggulan Nagan Raya yang terkait dengan tema pembangunan tahun 2018 adalah Nagan Seumeugot, Nagan Seujahtera, Nagan Meusaneut dan Nagan Meu Agama.
2019	Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Pengembangan dan pemantapan beberapa kawasan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Kawasan strategis meliputi : 1. Kawasan strategis pariwisata (a. pariwisata religi dan budaya di Kecamatan Suka Makmue, Seunagan Timur dan Kecamatan Seunagan; b. Pariwisata alam dan ilmu di Kecamatan Suka Makmue, Tripa Makmur, Beutong dan Kecamatan Kuala Pesisir) ; 2. kawasan indusri kecil dan menengah; 3. Kawasan pertanian dan perkebunan; 4. Kawasan hasil perikanan. Dengan demikian penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan perikanan Langkak, peningkatan kapasitas bandara Cut Nyak Dhien dan sarana transportasi lainnya, sebagai pendukung untuk kebutuhan beberapa kawasan strategis tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dilakukan dengan mencetak SDM yang handal dan berdaya saing dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan, sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan dayah/pesantren, sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, untuk mencapai kualitas SDM yang handal keterlibatan pemuda juga sangat diharapkan. Oleh karena itu, penguatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan juga sangat penting. Peningkatan derajat kesehatan

	masyarakat dicapai melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan sesuai standar. Peningkatan jumlah dan standarisasi sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah (terakreditasi), puskesmas /pustu. Untuk tercapainya masyarakat Nagan Raya yang sehat juga dengan optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal. Syariat Islam perlu dilanjutkan sebagai fokus pembangunan masyarakat Nagan Raya yang berkarakter islami. Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah "**memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, strategis, berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal**". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2019 adalah Nagan Carong, Nagan Seujahtera, Nagan Seumeugot, Nagan Sihat dan Nagan Meu Agama.
2020	Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 difokuskan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, menuju masyarakat yang produktif dan mandiri. Peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan didukung oleh sarana dan prasarana, SDM yang handal untuk tercapainya kedaulatan pangan dan akselerasi pertumbuhan agriindustri dan ekonomi kreatif/produktif. Penurunan angka kemiskinan dapat dicapai dengan peningkatan keterampilan SDM dan lembaga. Hal ini dapat dicapai seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Mutu kesehatan menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan mandiri. Mutu kesehatan semakin meningkat dengan menurunnya angka kematian ibu, bayi dan

	balita dan meningkatnya angka harapan hidup. Revitalisasi lembaga adat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kreatif. Masyarakat yang berkarakter islami dan nilai-nilai budaya keacehan terus dipertahankan menjadi penting untuk keberlanjutan pembangunan. Tema pembangunan pada tahun 2020 adalah "**memacu peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan yang terintegrasi, berkelanjutan menuju masyarakat yang produktif dan mandiri**". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2020 adalah Nagan carong, Nagan Meu Agama, Nagan Sihat dan Nagan Seujahtera dan Nagan Seumeugot.
2021	Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi produktif dan kreatif menuju penurunan angka pengangguran. Untuk mencapai ketahanan pangan dapat dicapai dengan peningkatan keterampilan SDM dan lembaga, pendampingan masyarakat petani dan nelayan, kemudahan dalam akses modal untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru, sehingga tercapainya penurunan angka pengangguran. Mutu kesehatan menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan mandiri. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dengan meningkatnya akreditasi rumah sakit (minimal tipe B). Dengan angka harapan hidup semakin meningkat dan angka kematian ibu, bayi dan balita sudah mencapai target *SDG's*. Masyarakat yang berkarakter islami dan nilai-nilai budaya keacehan terus dipertahankan menjadi penting untuk keberlanjutan pembangunan.

	Tema pembangunan pada tahun 2021 adalah "**memacu ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan dengan memperkuat ekonomi produktif dan kreatif menuju penurunan angka pengangguran**". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2020 adalah Nagan Carong, Nagan Meu Agama, Nagan Sihat, Nagan Seujahtera dan Nagan Seumeugot.
2022	Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya, arah kebijakan pembangunan pada tahun ini difokuskan pada membangun SDM dan kemandirian ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan menjadi prioritas utama. Peningkatan daya saing pendidikan dengan indikator APM, APK dan Angka Harapan Lama Sekolah sudah memenuhi target *SDG's*. Peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda dan puskesmas untuk mengantisipasi berobat ke luar daerah sebagai rujukan. Kemandirian ekonomi yang produktif, kreatif dan strategis dapat diwujudkan sejalan dengan berkembangnya kawasan-kawasan strategis. Berkembangnya industri kecil dan menengah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan. Masyarakat yang berkualitas dan bermatabat yang memiliki karakter budaya dan agama semakin kuat. Tema pembangunan pada tahun 2022 adalah "**membangun SDM dan kemandirian ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".** Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2022 adalah Nagan Carong, Nagan Sihat, Nagan Beu Jroh dan Nagan Seujahtera.

Tabel 6.3
Program Prioritas Kabupaten Nagan Raya yang disertai Pagu Indikatif
Tahun 2017-2022

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMK (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
								2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Misi 1.Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah			-		25.602.696.732		28.990.150.667		30.553.832.080		30.992.769.682		31.530.625.075		147.670.074.235	
				Tujuan : Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman			-		25.602.696.732		28.990.150.667		30.553.832.080		30.992.769.682		31.530.625.075		147.670.074.235	
				Sasaran 1.1 Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam			-		11.701.846.732		11.935.883.667		12.222.479.740		12.478.790.295		12.728.366.101		61.067.366.534	
	1	20	14	Program Pelayanan Keagamaan	Menurunnya pelanggaran syariat islam	%	-		10.333.844.000	100%	10.540.520.880	100%	10.751.331.298	100%	10.966.357.924	100%	11.185.685.082	100%	53.777.739.183	Satpol PP dan WH, Syariat Islam, MPU,Baitul Mal, Kecamatan dan
	1	20	15	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam	Menurunnya pelanggaran syariat islam	%	-	100%	844.002.732	100%	860.882.787	100%	878.100.442	100%	895.662.451	100%	913.575.700	100%	4.392.224.112	Dinas Syariat Islam
	1	20	24	Program Pengembangan Penguatan Sayariat Islam	Menurunnya pelanggaran terhadap syariat islam	%	-	100%	524.000.000	10000%	534.480.000	10000%	593.048.000	10000%	616.769.920	10000%	629.105.318	10000%	2.897.403.238	Kecamatan
				Sasaran 1.2 Berkembangnya lembaga pendidikan islami			-		552.650.000		596.103.000		608.025.060		620.185.561		632.589.272		3.009.552.894	
	1	20	17	Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan Yang di Bina	%	-	100%	281.150.000	100%	286.773.000	100%	292.508.460	100%	298.358.629	100%	304.325.802	100%	1.463.115.891	Dinas Syariat Islam
	1	20	20	Program Peningkatan pengkaderan Ulama	Peran Ulama dalam pelaksanaan syariat islam dan kehidupan masyarakat	%	-	100%	160.000.000	100%	163.200.000	100%	166.464.000	100%	169.793.280	100%	173.189.146	100%	832.646.426	MPU
	1	20	21	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas pendidikan	%	-		-	100%	32.400.000	100%	33.048.000	100%	33.708.960	100%	34.383.139	100%	133.540.099	MPU
	1	20	22	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam	Meningkatnya kualitas tenaga tajhid mayat dan kader islam lainnya	%	-	100%	111.500.000	100%	113.730.000	100%	116.004.600	100%	118.324.692	100%	120.691.186	100%	580.250.478	Kecamatan
				Sasaran 1.3 Meningkatnya mutu pendidikan dayah			-		350.000.000		1.700.000.000		2.200.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		8.450.000.000	
	1	20	26	Program Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah	Tersedianya silabus dan kurikulum dayah				50.000.000		200.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000	100%	650.000.000	Dinas Syariat Islam, MPU dan MPD
	1	20	27	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santri-Dayah Terpadu)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santriDayah Terpadu)			5%	300.000.000	10%	1.500.000.000	10%	2.000.000.000	15%	2.000.000.000	15%	2.000.000.000	100%	7.800.000.000	**Dinas Syariat Islam**
				Sasaran 1.4 Meningkatnya Kemakmuran Masjid			-		-		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		7.500.000.000	
	1	04	4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Persentase bangunan sarana dan prasarana peribadatan yang baik	40%	-	20%	-	10%	1.500.000.000	10%	2.000.000.000	10%	2.000.000.000	10%	2.000.000.000	100%	7.500.000.000	**Perkim**
				Sasaran 1.5 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS			-		10.000.000.000		10.200.000.000		10.404.000.000		10.612.080.000		10.824.321.600		52.040.401.600	
	1	20	4	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan		-	100%	10.000.000.000	100%	10.200.000.000	100%	10.404.000.000	100%	10.612.080.000	100%	10.824.321.600	100%	52.040.401.600	Baitul Mall
				Sasaran 1.6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat			-		111.500.000		113.730.000		116.004.600		118.324.692		120.691.186		580.250.478	

	1	20	22	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam	Meningkatnya kualitas tenaga tajhid mayat dan kader islam lainnya	%	-	100%	111.500.000	100%	113.730.000	100%	116.004.600	100%	118.324.692	100%	120.691.186	100%	580.250.478	Kecamatan
				Sasaran 1.7 Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist			-		**2.886.700.000**		**2.944.434.000**		**3.003.322.680**		**3.063.389.134**		**3.124.656.916**		**15.022.502.730**	
	1	20	16	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Mutu sumber Daya manusia dan Peningkat Kualitas pelayanan Dalam Kehidupan Beragama	%	-	100%	2.886.700.000	100%	2.944.434.000	100%	3.003.322.680	100%	3.063.389.134	100%	3.124.656.916	100%	15.022.502.730	Dinas Syariat Islam
				Misi 2. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan			-		**223.476.995.744**		**225.954.365.942**		**232.198.133.655**		**234.728.349.809**		**240.398.931.869**		**1.156.716.211.432**	
				Tujuan 2.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment)			-		**223.476.995.744**		**225.954.365.942**		**232.198.133.655**		**234.728.349.809**		**240.398.931.869**		**1.156.716.211.432**	
				Sasaran 2.1.1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel			-		**22.712.142.024**		**22.878.123.576**		**24.232.347.299**		**24.181.807.084**		**25.722.034.669**		**119.726.454.651**	
	1	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinam Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	-	100%	901.866.577	100%	631.200.000	100%	1.389.600.000	100%	725.196.577	100%	1.633.270.000	100%	5.281.133.154	**Seluruh SKPK**
	1	01	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	%		100%	5.711.415.447	100%	5.815.486.376	100%	6.048.105.831	100%	6.290.030.064	100%	6.541.631.267	1	30.406.668.985	**Seluruh SKPK**
	1	01	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengelolaan Pelaporan Keuangan yang Sistematis dan Tepat Waktu	1%		100%	1.630.810.000	100%	1.674.026.200	100%	1.742.082.248	100%	1.812.970.038	100%	1.886.450.789	100%	8.746.339.275	Seluruh SKPK
	1	21	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	%		100%	1.600.000.000	100%	1.632.000.000	100%	1.664.640.000	100%	1.697.932.800	100%	1.731.891.456	100%	8.326.464.256	BKPSDM & Setdakab
	1	20	5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Prosedur Pengelolaan keuangan daerah yang Baik	%	-	100%	1.200.000.000	100%	1.224.000.000	100%	1.248.480.000	100%	1.273.449.600	100%	1.298.918.592	100%	6.244.848.192	BPKD
	1	20	6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kab. NaganRaya	%	-		4.150.000.000	100%	4.233.000.000	100%	4.317.660.000	100%	4.404.013.200	100%	4.492.093.464	100%	21.596.766.664	Inspektorat
	1	20	7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Profesionalismae Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur	%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.020.000.000	100%	1.040.400.000	100%	1.061.208.000	100%	1.082.432.160	100%	5.204.040.160	Inspektorat
	1	20	8	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan prosedur pengawasan	%	-	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	26.010.000	100%	26.530.200	100%	27.060.804	100%	130.101.004	Inspektorat
	1	20	9	Program Pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase Layanan yang baik kepada masyarakat	%	-	100%	65.000.000	100%	66.300.000	100%	67.626.000	100%	68.978.520	100%	70.358.090	100%	338.262.610	Setdakab
	1	20	11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya qanun dan peraturan lainnya	%	-	100%	600.000.000	100%	612.000.000	100%	624.240.000	100%	636.724.800	100%	649.459.296	100%	3.122.424.096	Setdakab
	1	20	13	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan pelaporan keuangan yang dan aset yang tepat	%	-	100%	1.500.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.560.600.000	100%	1.591.812.000	100%	1.623.648.240	100%	7.806.060.240	BPKD
	1	22	3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%		100%	50.000.000	100%	51.000.000	100%	52.020.000	100%	53.060.400	100%	54.121.608	100%	260.202.008	MAA
	1	25	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyediaan Informasi Bagi Masyarakat	%		100%	1.245.450.000		1.270.359.000		1.295.766.180		1.321.681.504		1.348.115.134	100%	6.481.371.817	Diskominfo & Setdakab
	1	25	2	Program Layanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	1.177.750.000		1.201.305.000		1.225.331.100		1.249.837.722		1.274.834.476	100%	6.129.058.298	Diskominfo
	1	25	3	Program Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	69.850.000	100%	71.247.000	100%	72.671.940	100%	74.125.379	100%	75.607.886	100%	363.502.205	Setdakab
	1	25	4	Program Optimaliasasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	1.720.000.000		1.754.400.000		1.789.488.000		1.825.277.760		1.861.783.315		8.950.949.075	Setdakab/DPMTSP

	1	25	5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	65.000.000		66.300.000		67.626.000		68.978.520		70.358.090		338.262.610	Arsip dan Pustaka
				Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas			-		**179.265.988.464**		**179.576.862.464**		**184.954.282.208**		**186.843.715.708**		**190.260.652.742**		**920.901.501.585**	
	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%		100%	89.218.163.727	100%	89.218.163.727	100%	91.002.527.002	100%	92.822.577.542	100%	94.679.029.092	100%	456.940.461.090	Seluruh SKPK
	1	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%		100%	89.004.124.737	100%	89.004.124.737	100%	92.564.289.726	100%	92.599.891.376	100%	94.451.889.204	100%	457.624.319.781	Seluruh SKPK
	1	19	5	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Meningkatnya Kapasitas aparatur Linmas	%	-		-	100%	290.000.000	100%	301.600.000	100%	313.664.000	100%	-	100%	905.264.000	Satpol PP dan WH
	1	20	2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	-	100%	900.000.000	100%	918.000.000	100%	936.360.000	100%	955.087.200	100%	974.188.944	100%	4.683.636.144	Setdakab
	1	20	3	Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH	Meningkatnya kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	-	100%	80.000.000		81.600.000		83.232.000		84.896.640		86.594.573		416.323.213	Setdakab
	1	20	10	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah	%	-	100%	15.900.000	100%	16.218.000	100%	16.542.360	100%	16.873.207	100%	17.210.671	100%	82.744.239	Setdakab
	1	20	19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Peran Legislasi dan Pengawasan	%	-	100%	47.800.000	100%	48.756.000	100%	49.731.120	100%	50.725.742	100%	51.740.257	100%	248.753.120	SEKWAN
				Sasaran 2.1.3 Tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi			-		**1.978.505.000**		**2.245.570.050**		**2.365.392.852**		**2.454.428.566**		**2.520.205.709**		**11.563.536.591**	
	1	23	1	Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektoral	Persentase tersedianya data yang akurat	%		100%	28.000.000		28.560.000		29.702.400		30.890.496		32.126.116	100%	149.279.012	Diskominfo
	1	06	1	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya	%	-	92%	0	94%	0	96%	0	98%	0	100%	0	100%	-	Bappeda & Satpol PP dan WH
	1	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penduduk yang memiliki KTP, KK, AKTA	%		88,17	761.505.000	88,54	769.120.050	100%	799.884.852	100%	831.880.246	100%	865.155.456	100%	4.026.980.018	Disdukcapil/Kec.
	1	10	2	Program Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penduduk yang memiliki KTP, KK, AKTA	%			889.000.000		897.890.000		933.805.600		971.157.824		1.010.004.137		4.701.857.561	Discapil
	2	05	6	Program pengembangan data statistik perikanan	Tersedianya data/informasi statistik perikanan daerah (dokumen)	%			-	1 Dok	50.000.000	dokume	52.000.000	dokume	60.500.000	dokume	62.920.000	dokume	225.420.000	Kelautan dan Perikanan
	1	03	8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi dan data base untuk mendukung perencanaan yang baik	%	-		-		200.000.000		250.000.000		260.000.000		250.000.000		960.000.000	PUPR
	1	04	11	Program Pengembangan Pusat Komando Penanggulangan Bencana,	Tersedianya sistem informasi dalam penanggulangan bencana				300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.500.000.000	BPBD
				Sasaran 2.1.4 Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi					**12.376.420.900**		**13.990.285.609**		**13.833.023.461**		**13.432.426.340**		**13.829.855.118**		**67.422.011.429**	
	1	05	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-		2.652.600.000	20%	2.679.126.000	20%	2.786.291.040	10%	2.321.117.396	10%	2.413.962.091	100%	12.813.096.527	Forkim, PUPR, Bappeda
	1	06	2	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Cakupan Wilayah Terlayani Sarana dan Prasarana Perkotaan	%	-	80%	-	85%	900.000.000	87%	904.500.000	90%	909.022.500	92%	945.383.400	92%	3.658.905.900	Bappeda
	1	06	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi	%	-	92%	3.133.770.900	94%	3.165.108.609	96%	3.260.776.401	98%	3.182.697.944	100%	3.310.005.862	100%	16.052.359.717	Bappeda/ Setdakab & Kecamatan
	2	08	3	Program Pengembangan Transmigrasi dan perencanaan RTSP	Terwujudnya rencana tataruang satuan permukiman kawasan transmigrasi	%		-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	Disnakertrans

	1	16	3	Program Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	Tertibnya pener-bitan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	%	-	100%	-	100%	24.200.000	100%	25.168.000	100%	26.174.720	100%	27.221.709	100%	102.764.429	DPMPTSP
	1	20	4	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	%	-	100%	5.850.000.000	0%	5.967.000.000	0%	6.086.340.000	0%	6.208.066.800	0%	6.332.228.136	0%	30.443.634.936	Setdakab/BPKD /Baitul Mall dan Sekwan
	1	20	12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase daerah otonomi baru yang tertata	%	-	100%	740.050.000	100%	754.851.000	100%	769.948.020	100%	785.346.980	100%	801.053.920	100%	3.851.249.920	Setdakab/Kecamatan
				Sasaran 2.1.5 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik			-		**3.505.939.356**		**3.545.644.243**		**3.017.495.635**		**3.937.341.450**		**4.084.101.224**		**18.090.521.908**	
	1	06	5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	%	-	92%	262.300.000	94%	264.923.000	96%	275.519.920	98%	286.540.717	100%	298.002.345	100%	1.387.285.982	Bappeda
	1	06	6	Program Perencanaan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Dapat Terlaksana Dengan Baik	%	-	92%	1.562.350.000	94%	1.577.973.500	96%	1.641.092.440	98%	2.509.745.119	100%	2.610.134.924	100%	9.901.295.983	Bappeda
	1	06	7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pengurangan Resiko Bencana	%	-	92%	256.800.000	94%	259.368.000	96%						100%	516.168.000	Bappeda
	1	06	8	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah	%	-	92%	959.940.000	94%	969.539.400	96%	581.116.725	98%	604.361.394	100%	628.535.850	100%	3.743.493.369	Bappeda
	1	20	23	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	100%	185.649.356	100%	189.362.343	100%	193.149.590	100%	197.012.582	100%	200.952.833	100%	966.126.704	Kecamatan
	1	20	25	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Gampong	Terbinanya Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan keuangan Gampong	%		100%	278.900.000	100%	284.478.000	100%	326.616.960	100%	339.681.638	100%	346.475.271	100%	1.576.151.870	Kecamatan
				Sasaran 2.1.6 Terwujudnya pelaksanaan Musrena			-		**150.000.000**		**165.000.000**		**181.500.000**		**199.650.000**		**219.615.000**		**915.765.000**	
	1	11	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender	%	-		150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000		915.765.000	DPMGP4
				Sasaran 2.1.7 Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan PPRG			-		**3.488.000.000**		**3.552.880.000**		**3.614.092.200**		**3.678.980.661**		**3.762.467.407**		**18.096.420.268**	
	1	06	3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	85%	488.000.000	90%	492.880.000	94%	492.892.200	96%	495.356.661	100%	515.170.927	100%	2.484.299.788	Bappeda
	1	20	1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya Kapasitas Anggota Legislatif dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	%	-	100%	3.000.000.000	100%	3.060.000.000	100%	3.121.200.000	100%	3.183.624.000	100%	3.247.296.480	100%	15.612.120.480	Sekwan
				Misi 3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;			-		**20.676.637.500**		**21.866.293.775**		**24.167.256.362**		**25.421.728.178**		**28.650.110.444**		**120.782.026.259**	
				Tujuan 3.1 Menurunkan Tingkat Kemiskinan			-		8.113.847.500		8.915.525.475		9.718.981.330		10.337.820.916		10.971.710.892		48.057.886.113	
				Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin			-		8.028.847.500		8.166.725.475		8.484.069.330		8.814.712.436		9.159.278.073		42.653.632.814	
	1	12	1	Program Keluarga Berencana	Terlaksannya Program Keluarga Harapan Bagi Masyarakat	%	-		150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000		915.765.000	DPMGP4
	1	12	2	Program Keluarga Sejahtera	Menurunnya angka kemiskinan	%	-		3.466.540.000		3.535.870.800		3.677.305.632		3.824.397.857		3.977.373.772		18.481.488.061	DPMGP4
	1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Komunitas Adat Terpencil yang Mendapat bantuan.Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan KUBE .Jumlah Rehab Rumah Tidak Layak Huni	%	-		3.469.897.500	100%	3.504.596.475	100%	3.644.780.334	100%	3.790.571.547	100%	3.942.194.409	100%	18.352.040.266	DINAS SOSIAL & SETDAKAB

	1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terbedayanya Masyarakat Pedesaan	%		100%	177.500.000	100%	181.050.000	100%	184.671.000	100%	188.364.420	100%	192.131.708	100%	923.717.128	DPMGP4
	1	22	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	%		100%	764.910.000	100%	780.208.200	100%	795.812.364	100%	811.728.611	100%	827.963.184	100%	3.980.622.359	DPMGP4 & Kec.
				Sasaran 3.1.2 Menurunnya angka pengangguran			-		85.000.000		748.800.000		1.234.912.000		1.523.108.480		1.812.432.819		5.404.253.299	
	1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Menurunnya angka pengangguran	%	-	-	50.000.000	-	51.000.000	-	500.000.000	-	750.000.000	-	1.000.000.000	-	2.351.000.000	Disnakertrans
	1	14	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terlaksananya infomasi dan bimbingan bagi pencari kerja	%	-	-	-	-	85.000.000	-	88.400.000	-	91.936.000	-	95.613.440	-	360.949.440	Disnakertrans
	1	14	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	-	-	20.000.000	-	20.400.000	-	21.216.000	-	22.064.640	-	22.947.226	-	106.627.866	Disnakertrans
	1	14	4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Menurunnya angka pengangguran	%	-		15.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		155.000.000	Disnakertrans
	1	18	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapan Hidup Pemuda	Tercapainya Penurunan pengangguran di Tingkat pemuda	%	-		-	100%	572.400.000	100%	595.296.000	100%	619.107.840	100%	643.872.154	100%	2.430.675.994	Disbudparpora
				Tujuan 3.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)			-		**12.562.790.000**		**12.950.768.300**		**14.448.275.032**		**15.083.907.262**		**17.678.399.552**		**72.724.140.146**	
				Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal			-		**4.343.740.000**		**3.385.447.300**		**3.520.865.192**		**3.646.218.628**		**5.667.203.373**		**20.563.474.493**	
	1	17	1	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Terjalinnya Kerja Sama pengelolaan kekayaan Budaya	%	-	100%	2.500.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.040.000.000	100%	1.081.600.000	100%	3.000.000.000	100%	8.621.600.000	Disbudparpora
	2	01	8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya Produktifitas Peternakan	%		100%	40.000.000	100%	40.800.000	100%	42.432.000	100%	44.129.280	100%	45.894.451	100%	213.255.731	Distanak
	2	01	9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Produktifitas Peternakan	%		100%	700.000.000	100%	714.000.000	100%	742.560.000	100%	772.262.400	100%	803.152.896	100%	3.731.975.296	Distanak
	2	07	1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pembinaan kepada industri kecil dan menengah	%		100%	650.240.000	100%	663.244.800	100%	689.774.592	100%	717.365.576	100%	746.060.199	100%	3.466.685.166	Disperindagkop dan UKM
	2	07	2	Pogram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan SDM yang berkualitas	%		100%	-	100%	144.301.500	100%	150.073.560	100%	156.076.502	100%	162.319.562	100%	612.771.125	Disperindagkop dan UKM
	2	07	3	Pogram Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Meningkatkan desain dan mutu produk serta mempromosikan hasil industri yang potensial	%		100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	265.200.000	100%	275.808.000	100%	286.840.320	100%	1.332.848.320	Disperindagkop dan UKM
	1	16	2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Tertatausahaan Data dan Informasi investasi di Kab. Nagan Raya	%	-	100%	-	100%	98.780.000	100%	102.731.200	100%	106.840.448	100%	111.114.066	100%	419.465.714	DPMPTSP
	2	05	1	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Berkurangnya kasus IUU fishing (%)	%		-	-		100.000.000		104.000.000		108.160.000		112.486.400		424.646.400	Kelautan dan Perikanan
	2	05	4	Program pengembangan Penyuluhan perikanan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan yang mengalami kenaikan produksi pasca pendampingan dan pembinaan (kelompok)	%		-	-		161.751.000		168.221.040		159.468.710		165.847.458		655.288.208	Kelautan dan Perikanan
	2	03	2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terbinanya bidang energi dan listrik	%			203.500.000	100%	207.570.000	100%	215.872.800	100%	224.507.712	100%	233.488.020		1.084.938.532	Setdakab
				Sasaran 3.2.2 Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah			-		**2.423.000.000**		**2.713.350.000**		**2.697.308.000**		**2.808.382.720**		**2.920.718.029**		**13.562.758.749**	

	1	09	1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah pemda yang terkelola dengan baik	%	-		736.000.000	100%	743.360.000	100%	648.518.400	100%	674.459.136	100%	701.437.501		3.503.775.037	Setdakab/Kec. Seunagan Timur
	1	09	2	Program Pendataan Tanah-Tanah Asset Milik Pemerintah Daerah	Persentase tanah pemda yang terkelola dengan baik	%	-		75.000.000	100%	75.750.000	100%	78.780.000	100%	81.931.200	100%	85.208.448		396.669.648	Setdakab
	1	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Investasi di Kab. Nagan Raya dapat lebih meningkat	%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.400.000	100%	281.216.000	100%	1.061.616.000	DPMPTSP
	2	05	5	Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya nilai hasil produksi perikanan (Rp)	%			50.000.000		51.000.000		53.040.000		58.344.000		60.677.760		273.061.760	Kelautan dan Perikanan
	2	04	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata	%			1.500.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.591.200.000	100%	1.654.848.000	100%	1.721.041.920		7.997.089.920	Disbudparpora
	2	03	1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan pertambangan	%			62.000.000	100%	63.240.000	100%	65.769.600	100%	68.400.384	100%	71.136.399		330.546.383	Setdakab
				Sasaran 3.2.3 Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah			**-**		**2.379.550.000**		**3.017.141.000**		**3.211.826.640**		**3.410.299.706**		**3.662.711.694**		**15.681.529.039**	
	1	08	4	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Adanya Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	%	-		500.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	1.000.000.000	100%	3.750.000.000	DLH
	1	15	1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.400.000	100%	281.216.000	100%	1.061.616.000	Disperindagkop dan UKM
	1	15	2	Pogram Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pembinaan untuk pengrajin IKM	%	-	100%	350.000.000	100%	357.000.000	100%	371.280.000	100%	386.131.200	100%	401.576.448	100%	1.865.987.648	Disperindagkop dan UKM
	1	15	3	Pogram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tersenggaranya bimtek koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas koperasi.	%	-	100%	204.550.000	100%	208.641.000	100%	216.986.640	100%	225.666.106	100%	234.692.750	100%	1.090.536.495	Disperindagkop dan UKM
	2	05	2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	%		762,28	650.000.000		663.000.000		689.520.000		717.100.800		745.784.832		3.465.405.632	Kelautan dan Perikanan
	2	05	3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap(ton)	%		2262,74	600.000.000		612.000.000		636.480.000		661.939.200		688.416.768		3.198.835.968	Kelautan dan Perikanan
	2	04	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata	%			75.000.000	100%	76.500.000	100%	79.560.000	100%	82.742.400	100%	86.052.096		399.854.496	Disbudparpora
	2	01	3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pemasaran produk hasil pertanian dengan baik	%		100%	-	100%	200.000.000	100%	208.000.000	100%	216.320.000	100%	224.972.800	100%	849.292.800	Distanak
				Sasaran 3.2.4 Meningkatnya ketahanan pangan			**-**		**3.416.500.000**		**3.834.830.000**		**5.018.275.200**		**5.219.006.208**		**5.427.766.456**		**22.916.377.864**	
	2	01	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan pangan utama (%)	%		100%	185.000.000	100%	188.700.000	100%	196.248.000	100%	204.097.920	100%	212.261.837	100%	986.307.757	Distanak/ Disbun & DKP
	2	01	5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produktifitas Pertanian/Pekerbunan	%		100%	3.100.000.000	100%	3.162.000.000	100%	3.288.480.000	100%	3.420.019.200	100%	3.556.819.968	100%	16.527.319.168	Distanak & Disbun
	2	01	4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produktifitas Pertanian/Pekerbunan	%		100%	11.500.000	100%	11.730.000	100%	12.199.200	100%	12.687.168	100%	13.194.655	100%	61.311.023	Distanak
	2	01	11	Program Pemberdayaan SDM Pertanian/Perkebunan	Peningkatan SDM tenaga teknis dan tenaga penyuluh dengan baik	%		100%	50.000.000	1 Keg	51.000.000	2 Keg	53.040.000	2 Keg	55.161.600	2 Keg	57.368.064	2 Keg	266.569.664	Disbun
	2	01	10	Program Peningkatan Kelembagaan RDK/RDKK Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk yang baik	%		100%	10.000.000	100%	10.200.000	100%	10.608.000	100%	11.032.320	100%	11.473.613	100%	53.313.933	Distanak & Disbun

	2	01	7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan SDM tenaga teknis dan tenaga penyuluh dengan baik	%		100%	60.000.000	100%	61.200.000	100%	937.700.000	100%	975.208.000	100%	1.014.216.320	100%	3.048.324.320	Distanak
	2	01	12	Program Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian	Peningkatan SDM tenaga teknis dan tenaga penyuluh dengan baik	%		100%	-	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	108.160.000	100%	112.486.400	100%	424.646.400	Distanak
	2	01	15	Program Penguatan Kelembagaan Pertanian/Perkebunan	Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan	%		0%	-	0%	-	3 Keg	156.000.000	4 Keg	162.240.000	5 Keg	168.729.600	6 Keg	486.969.600	Disbun
	2	01	16	Program Rehabilitasi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas Tanaman Pertanian dan Perkebunan	%		N/A	-	20%	250.000.000	20%	260.000.000	20%	270.400.000	20%	281.216.000	80%	1.061.616.000	Distannak/Disbun
				Misi 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;			**24.901.630.000**		**30.978.545.000**		**39.857.119.900**		**41.794.806.716**		**43.500.801.525**		**45.394.576.585**		**201.525.849.726**	
				Tujuan 4.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata			24.901.630.000		25.852.245.000		31.499.493.900		32.946.675.676		34.129.245.243		35.443.948.052		159.871.607.872	
				Sasaran 4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata			106.630.000		252.000.000		2.562.040.000		2.664.521.600		2.771.102.464		2.881.946.563		11.131.610.627	
	1	01	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	%	-	75,00		80,00	805.000.000	85	837.200.000	90	870.688.000	95	905.515.520	95	3.418.403.520	Disdik
	1	01	6	Program Peningkatan Mutu Ruang Sekolah	Meningkatnya Mutu Sarana Pendidikan (Ruang Belajar)	%	-	91,59	-	92,49	1.500.000.000	93,88	1.560.000.000	94,81	1.622.400.000	95,58	1.687.296.000	95,58	6.369.696.000	Disdik
	1	01	8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka kelulusan tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTsN	%	106.630.000	N/A	92.000.000	N/A	93.840.000	N/A	97.593.600	N/A	101.497.344	N/A	105.557.238	N/A	490.488.182	UPTD Seunagan
	1	01	9	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek huruf	%	-	91,59	160.000.000	92,49	163.200.000	93,88	169.728.000	94,81	176.517.120	95,58	183.577.805	95,58	853.022.925	UPTD SKB Disdik
				Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik			21.191.600.000		20.500.000.000		20.910.000.000		21.746.400.000		22.616.256.000		23.520.906.240		109.293.562.240	
	1	01	3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Kualitas Tenaga pendidik	%	21.191.600.000	45,01	20.500.000.000	54,01	20.910.000.000	64,82	21.746.400.000	77,78	22.616.256.000	93,34	23.520.906.240	93,34	109.293.562.240	Disdik
				Sasaran 4.1.3 Meningkatnya ketersedian dan kualitas pendidikan anak usia dini			-		30.000.000		2.530.600.000		2.631.824.000		2.737.096.960		2.846.580.838		10.776.101.798	
	1	01	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	%	-	24,19	30.000.000	24,63	30.600.000	25,00	31.824.000	25,62	33.096.960	26,08	34.420.838	26,08	159.941.798	Disdik
	1	01	2	Program Peningkatan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	%	-	24,19	-	24,63	2.500.000.000	25,00	2.600.000.000	25,62	2.704.000.000	26,08	2.812.160.000	26,08	10.616.160.000	Disdik
				Sasaran 4.1.4 Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing			3.603.400.000		4.756.245.000		4.851.369.900		5.045.424.696		5.247.241.684		5.457.131.351		25.357.412.631	
	1	01	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase koordinasi dan sikronisasi pelayanan program pendidikan	%	3.603.400.000	75,00	4.756.245.000	80,00	4.851.369.900	85	5.045.424.696	90	5.247.241.684	95	5.457.131.351	95	25.357.412.631	Disdik
				Sasaran 4.1.5 Meningkatnya minat dan kemampuan masyarakat dalam literasi			-		314.000.000		645.484.000		858.505.380		757.548.136		737.383.060		3.312.920.576	
	1	01	7	Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Persentase Angka Melek Huruf, Persentase Tingkat Pendidikan Laki & Perempuan	%	-	94,34	-	95,29	237.060.000	96,24	246.542.400	97,20	256.404.096	98,17	266.660.260	98,17	1.006.666.756	UPTD SKB Disdik
	1	24	1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tertatanya Sistem Administrasi Kearsipan	%			-	100%	137.349.000	100%	140.095.980	100%	142.897.900	100%	145.755.858	100%	566.098.737	Perpustakaan & Arsip
	1	24	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Arsip Daerah yang tertata dengan baik	%		100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	31.212.000	100%	31.836.240	100%	32.472.965	100%	156.121.205	Perpustakaan & Arsip
	1	24	3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi terkait literasi	%		100%	109.000.000	100%	61.975.000	100%	258.585.000	100%	140.698.500	100%	103.068.350	100%	673.326.850	Perpustakaan & Arsip
	1	24	3	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	%		100%	175.000.000	100%	178.500.000	100%	182.070.000	100%	185.711.400	100%	189.425.628	100%	910.707.028	Perpustakaan & Arsip

				Tujuan 4.2 Melestarikan adat istiadat dan budaya			**-**		**-**		**2.470.000.000**		**2.725.000.000**		**3.003.500.000**		**3.327.850.000**		**11.526.350.000**	
				Sasaran 4.2.1 Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat			-		-		470.000.000		525.000.000		583.500.000		665.850.000		2.244.350.000	
	1	18		Program penguatan lembaga adat dan budaya	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga adat & budaya dalam pembangunan daerah	%		50%	-	60%	120.000.000	70%	140.000.000	80%	160.000.000	90%	200.000.000	100%	620.000.000	MPU, MAA, Disbudparpora
	1	18		Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai adat dan Budaya	meningkatnya Jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina dan dikembangkan	%		0%	-	60%	200.000.000	70%	220.000.000	80%	242.000.000	90%	266.200.000	100%	928.200.000	MPU, MAA, Disbudparpora
	1	18		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Budaya	meningkatnya Jumlah situs adat dan budaya yang dikelola dengan baik	%		0%	-	40%	150.000.000	50%	165.000.000	60%	181.500.000	70%	199.650.000	80%	696.150.000	MPU, MAA, Disbudparpora
				Sasaran 4.2.2 Terwujudnya simbol adat dan budaya Nagan			-		-		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		9.282.000.000	
	1	18		Program Pagelaran Seni dan Budaya Daerah (Nagan Festival)	Terselenggaranya Pekan Kebudayaan Nagan Raya/Nagan Festival	%		0%	-	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.662.000.000	100%	9.282.000.000	MPU, MAA, Disbudparpora
				Tujuan 4.3 Meningkatkan peran kepemudaan dan olahraga			**-**		**5.126.300.000**		**5.887.626.000**		**6.123.131.040**		**6.368.056.282**		**6.622.778.533**		**30.127.891.854**	
				Sasaran 4.3.1 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan			-		1.626.300.000		1.658.826.000		1.725.179.040		1.794.186.202		1.865.953.650		8.670.444.891	
	1	18	1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terakomodirnya keserasian Kebijakan Pemuda	%	-	100%	800.700.000	100%	816.714.000	100%	849.382.560	100%	883.357.862	100%	918.692.177	100%	4.268.846.599	Disbudparpora
	1	18	2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	-	100%	750.600.000	100%	765.612.000	100%	796.236.480	100%	828.085.939	100%	861.209.377	100%	4.001.743.796	Disbudparpora
	1	18	4	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Menurunnya Angka Penyalah Gunaan Narkoba	%	-	100%	75.000.000	100%	76.500.000	100%	79.560.000	100%	82.742.400	100%	86.052.096	100%	399.854.496	Disbudparpora
				Sasaran 4.3.2 Meningkatnya prestasi olahraga			**-**		**3.500.000.000**		**4.228.800.000**		**4.397.952.000**		**4.573.870.080**		**4.756.824.883**		**21.457.446.963**	
	1	18	5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Terbinanya Olah Raga bagi Olah Ragawan dan Pelatih	%	-		-	100%	658.800.000	100%	685.152.000	100%	712.558.080	100%	741.060.403	100%	2.797.570.483	Disbudparpora
	1	18	6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya dan Olah Raga bagi Masyarakat Nagan Raya	%	-	100%	1.500.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.591.200.000	100%	1.654.848.000	100%	1.721.041.920	100%	7.997.089.920	Disbudparpora
	1	18	7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	%	-	100%	2.000.000.000	100%	2.040.000.000	100%	2.121.600.000	100%	2.206.464.000	100%	2.294.722.560	100%	10.662.786.560	Disbudparpora
				Misi 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; ;			**-**		**37.719.142.069**		**40.349.154.901**		**43.645.528.439**		**46.071.409.830**		**47.649.090.494**		**200.551.125.733**	
				Tujuan 5.1 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat			-		**25.719.142.069**		**25.949.154.901**		**26.765.528.439**		**27.615.409.830**		**28.501.890.494**		**134.551.125.733**	
				Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin			-		**5.740.456.464**		**5.742.946.464**		**5.748.026.064**		**5.753.308.848**		**5.758.802.943**		**28.743.540.783**	
	2	06	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terselenggaranya pengawasan untuk konsumen pedagang untuk menciptakan dunia usaha yang tertib sesuai dengan aturan yang berlaku	%		100%	124.500.000	100%	126.990.000	100%	132.069.600	100%	137.352.384	100%	142.846.479	100%	663.758.463	Disperindagkop dan UKM
	2	06	2	Pogram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terselenggaranya kegiatan pasar murah bagi masyarakat ekonomi lemah	%		100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	28.079.782.320	Disperindagkop dan UKM
				Sasaran 5.1.2 Meningkatnya kesejahteraan PMKS			-		**8.940.140.500**		**9.029.541.905**		**9.390.723.581**		**9.766.352.524**		**10.157.006.625**		**47.283.765.136**	
	1	13	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Sosial Yang terlayani	%	-		614.330.500	100%	620.473.805	100%	645.292.757	100%	671.104.467	100%	697.948.646	100%	3.249.150.176	DINAS SOSIAL
	1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	-		5.995.050.000	100%	6.055.000.500	100%	6.297.200.520	100%	6.549.088.541	100%	6.811.052.082	100%	31.707.391.643	Dinsos/Setdakab
	1	13	3	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase Pembinaan Panti Jompo	%	-		1.830.760.000	100%	1.849.067.600	100%	1.923.030.304	100%	1.999.951.516	100%	2.079.949.577	100%	9.682.758.997	DINAS SOSIAL
	1	13	4	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anaknya Terlantar Dalam Kaab.Nagan Raya	%	-		200.000.000	100%	202.000.000	100%	210.080.000	100%	218.483.200	100%	227.222.528	100%	1.057.785.728	
	1	13	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Terbantu	%	-		150.000.000	100%	151.500.000	100%	157.560.000	100%	163.862.400	100%	170.416.896	100%	793.339.296	

	1	13	6	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapina, PSK , Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Sosial yang di bina	%	-		150.000.000	100%	151.500.000	100%	157.560.000	100%	163.862.400	100%	170.416.896	100%	793.339.296	
				Sasaran 5.1.3 Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan			**-**		**150.000.000**		**165.000.000**		**181.500.000**		**199.650.000**		**219.615.000**		**915.765.000**	
	1	11	2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengarustamaan gender	%	-		150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000		915.765.000	DPMGP4
				Sasaran 5.1.4 Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik			**-**		**9.464.947.500**		**9.559.596.975**		**9.941.980.854**		**10.339.660.088**		**10.753.246.492**		**50.059.431.909**	
	1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Komunitas Adat Terpencil yang Mendapat bantuan.Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan KUBE .Jumlah Rehab Rumah Tidak Layak Huni	%	-		3.469.897.500	100%	3.504.596.475	100%	3.644.780.334	100%	3.790.571.547	100%	3.942.194.409	100%	18.352.040.266	DINAS SOSIAL & SETDAKAB
	1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	-		5.995.050.000	100%	6.055.000.500	100%	6.297.200.520	100%	6.549.088.541	100%	6.811.052.082	100%	31.707.391.643	Dinsos/Setdakab
				Sasaran 5.1.5 Meningkatnya ketahanan keluarga			**-**		**1.423.597.605**		**1.452.069.557**		**1.503.297.939**		**1.556.438.369**		**1.613.219.434**		**7.548.622.904**	
	2	01	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	%			202.097.605		206.139.557		214.385.139		222.960.545		231.878.967		1.077.461.813	Distanak & Disbun
	1	19	1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	-	100%	225.500.000	100%	230.010.000	100%	239.210.400	100%	248.778.816	100%	258.729.969	100%	1.202.229.185	Kesbangpol
	1	19	2	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan	Terjalinnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	-	100%	85.000.000	100%	86.700.000	100%	90.168.000	100%	93.774.720	100%	97.525.709	100%	453.168.429	Kesbangpol
	1	19	3	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Persentase Pemahaman Politik Bagi Masyarakat	%	-	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	106.080.000	100%	110.323.200	100%	114.736.128	100%	533.139.328	Kesbangpol
	1	19	4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	%	-	100%	450.000.000	100%	459.000.000	100%	477.360.000	100%	496.454.400	100%	516.312.576	100%	2.399.126.976	Satpol PP dan WH
	1	19	6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	-	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	26.520.000	100%	27.580.800	100%	30.338.880	100%	134.939.680	MPD
	1	20	18	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	Persentase Advokasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat	%	-	100%	336.000.000	100%	342.720.000	100%	349.574.400	100%	356.565.888	100%	363.697.206	100%	1.748.557.494	Setdakab/Sekwan
				Tujuan 5.2 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat			**-**		**12.000.000.000**		**14.400.000.000**		**16.880.000.000**		**18.456.000.000**		**19.147.200.000**		**66.000.000.000**	
				Sasaran 5.2.1 Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat			**-**		**12.000.000.000**		**14.400.000.000**		**16.880.000.000**		**18.456.000.000**		**19.147.200.000**		**66.000.000.000**	
				Program Jaminan Sosial Santunan Kematian	Menurunnya angka Kemiskinan			18,21	10.000.000.000	17,30	12.000.000.000	16,44	14.000.000.000	15,61	15.000.000.000	14,83	15.000.000.000	14,83	66.000.000.000	
				Program Keluarga Harapan Plus	Menurunnya angka Kemiskinan			18,21	2.000.000.000	17,30	2.400.000.000	16,44	2.880.000.000	15,61	3.456.000.000	14,83	4.147.200.000	14,83	14.883.200.000	
				Misi 6. Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat ;			**64.481.581.154**		**77.605.220.801**		**93.615.505.699**		**99.167.930.790**		**85.468.516.244**		**87.107.285.198**		**442.964.458.732**	
				Tujuan 6.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			**64.481.581.154**		**77.605.220.801**		**93.615.505.699**		**99.167.930.790**		**85.468.516.244**		**87.107.285.198**		**442.964.458.732**	
				Sasaran 6.1.1 Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup			12.375.396.768		14.003.151.000		14.386.502.200		14.961.962.288		15.560.440.780		16.182.858.411		75.094.914.678	
	1	02	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	4.074.877.768		2.430.200.000		2.454.502.000		2.552.682.080		2.654.789.363		2.760.980.938		12.853.154.381	Dinkes
	1	02	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Stunting dan Balita Gizi Buruk	%	100.000.000		-		100.000.000		104.000.000		108.160.000		112.486.400		424.646.400	Dinkes
	1	02	6	Program Penyehatan Lingkungan	Terciptanya Kualitas Lingkungan Yang Sehat	%	89.535.000		-		128.535.000		133.676.400		139.023.456		144.584.394		545.819.250	Dinkes

	1	02	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Pederita Penyakit Menular Seperti TBC, KUSTA, DIFTERI	%	418.866.000		1.175.516.000		1.187.271.160		1.234.762.006		1.284.152.487		1.335.518.586		6.217.220.239	Dinkes
	1	02	11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan Kepesertaan Asuransi Kesehatan	%	267.570.000		80.038.000		80.838.380		84.071.915		87.434.792		90.932.183		423.315.270	Dinkes
	1	02	12	Program Pengembangan Kesehatan	Cakupan Persentase Kesehatan Masyarakat	%	7.276.038.000		8.838.928.000		8.927.317.280		9.284.409.971		9.655.786.370		10.042.017.825		46.748.459.446	Dinkes
	1	02	21	Pogram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	persentase penurunan angka kematian ibu dan bayi	%	-		1.416.139.000		1.444.461.780		1.502.240.251		1.562.329.861		1.624.823.056		7.549.993.948	Dinkes
	1	02	22	Program Kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (PDTK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)	Persentase daerah terpencil yang tertangani	%	148.510.000		62.330.000		63.576.600		66.119.664		68.764.451		71.515.029		332.305.743	Dinkes
				Sasaran 6.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat			**46.972.184.386**		**49.069.199.801**		**50.235.078.799**		**51.614.241.951**		**53.035.966.829**		**54.501.703.806**		**258.456.191.186**	
	1	02	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%			-		-		-		-		-		-	Dinkes & BLUD
	1	02	3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terawasinya Peredaran Obat Makanan	%	5.000.000		26.272.000		26.534.720		27.596.109		28.699.953		29.847.951		138.950.733	Dinkes
	1	02	4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%	84.500.000		-		75.000.000		78.000.000		81.120.000		84.364.800		318.484.800	Dinkes
	1	02	9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya Persentase Kelengkapan sarana dan Prasarana Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas pelayanan	%	22.657.044.386		16.193.227.801		16.355.160.079		17.009.366.482		17.689.741.141		18.397.330.787		85.644.826.291	Dinkes
	1	02	13	Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	%	1.225.640.000		1.631.000.000		1.647.310.000		1.713.202.400		1.781.730.496		1.852.999.716		8.626.242.612	Dinkes
	1	02	17	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Puskesmas	Meningkatnya Persentase sarana dan Prasarana Puskesmas yang Fungsional	%	-		-		450.000.000		468.000.000		486.720.000		506.188.800		1.910.908.800	Dinkes
	1	02	18	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga kesehatan yang Memenuhi Standar Kualitas dan profesionalisme Tenaga Kesehatan	%	-		-		150.000.000		156.000.000		162.240.000		168.729.600		636.969.600	Dinkes
	1	02	19	Program Pelaksanaan Operasional BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Secara Optimal	%	23.000.000.000		31.200.000.000		31.512.000.000		32.142.240.000		32.785.084.800		33.440.786.496		161.080.111.296	BLUD
	1	02	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%	-		18.700.000		19.074.000		19.836.960		20.630.438		21.455.656		99.697.054	Dinkes
				Sasaran 6.1.3 Meningkatnya status RSU Nagan Raya			**5.134.000.000**		**14.532.870.000**		**28.993.924.700**		**32.591.726.551**		**16.872.108.636**		**16.422.722.981**		**109.413.352.867**	
	1	02	8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	%	574.000.000	100%	540.270.000	100%	545.672.700	100%	567.499.608	100%	590.199.592	100%	613.807.576	100%	2.857.449.476	BLUD
	1	02	10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Meningkatnya Persentase Kelengkapan sarana dan Prasarana Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas pelayanan	%	4.300.000.000	100%	11.000.000.000	100%	11.110.000.000	100%	11.554.400.000	100%	12.016.576.000	100%	12.497.239.040	100%	58.178.215.040	BLUD
	1	02	15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Meningkatnya Persentase Ketersedian Sarana dan Prasarana Kesehatan	%		40%	2.710.000.000	55%	17.050.000.000	70%	20.185.852.863	85%	3.970.000.000	100%	3.004.530.000	100%	46.920.382.863	RSUD

	1	02	23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase layanan kepada masyarakat yang terlayani dengan baik	%	-	100%	22.600.000	100%	23.052.000	100%	23.974.080	100%	24.933.043	100%	25.930.365	100%	120.489.488	Dinkes
	1	02	24	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit juwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana rumah saki yang baik	%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	265.200.000	100%	260.000.000	100%	270.400.000	100%	281.216.000	100%	1.336.816.000	BLUD
				Misi 7. Meningkatkan pembangunan infrastrukturberdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah;			**93.771.356.354**		**139.157.502.720**		**152.338.136.547**		**174.790.979.565**		**183.564.084.719**		**193.853.769.468**		**842.896.473.020**	
				Tujuan 7.1 Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat			**93.771.356.354**		**139.157.502.720**		**152.338.136.547**		**174.790.979.565**		**183.564.084.719**		**193.853.769.468**		**842.896.473.020**	
				Sasaran 7.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.			**73.709.723.504**		**71.562.072.720**		**74.782.193.447**		**77.773.481.185**		**82.258.592.004**		**85.511.476.484**		**391.887.815.841**	
	1	03	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Akses jalan dan jembatan berfungsi dengan baik dan lancar	%	72.609.723.504		60.061.822.720		60.662.440.947		63.088.938.585		66.874.274.900		69.549.245.896		320.236.723.049	PUPR
	1	03	2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	persentase jumlah saluran drainase/ gorong-gorong yang terbangun	%	-	15%	5.350.000.000	17%	5.403.500.000	17%	5.619.640.000	17%	5.956.818.400	17%	6.195.091.136	100%	28.525.049.536	Perkim
	1	03	3	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Tebing jalan dan abutmen jembatan kuat dan aman dari bencana	%	-		-		1.000.000.000		1.040.000.000		1.081.600.000		1.124.864.000		4.246.464.000	PUPR
	1	03	4	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Akses jalan dan jembatan kembali berfungsi dengan baik	%	1.000.000.000		5.100.250.000		5.151.252.500		5.357.302.600		5.571.594.704		5.794.458.492		26.974.858.296	PUPR
	1	03	5	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Talud/Bronjong	Struktur jalan dan jembatan aman dari kerusakan	%			200.000.000		200.000.000		208.000.000		216.320.000		200.000.000		1.024.320.000	PUPR
	1	03	6	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Terdatanya kondisi jalan dan jembatan sebagai data dukung perencanaan teknis	%	100.000.000		100.000.000		100.000.000		104.000.000		108.160.000		100.000.000		512.160.000	PUPR
	1	03	14	program pembangunan/rehabilitasi gedung/tempat	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana umum	%	-	10%	750.000.000	10%	765.000.000	20%	795.600.000	20%	827.424.000	10%	860.520.960	100%	3.998.544.960	Perkim
	1	03	15	program peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan	tercapainya jalan dan lingkungan dalam kondisi baik	%	-	0%	-	10%	1.500.000.000	20%	1.560.000.000	10%	1.622.400.000	10%	1.687.296.000	100%	6.369.696.000	Perkim
				Sasaran 7.1.2 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis			**1.392.088.000**		**1.073.700.000**		**2.493.737.000**		**4.034.878.480**		**5.346.273.619**		**7.393.804.564**		**19.534.393.663**	
	1	03	9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja di bidang kebinamargaan	%	1.192.088.000		200.000.000		204.000.000		212.160.000		220.646.400		229.472.256		1.066.278.656	PUPR
	1	03	12	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Terpenuhinya Sarana prasarana Infratruktur Perdesaan	%	200.000.000	15%	200.000.000	15%	200.000.000	15%	200.000.000	15%	208.000.000	15%	200.000.000	100%	200.000.000	PUPR
	1	03	13	Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar	Cakupan Wilayah Terlayani sarana dan prasarana perkotaan	%	-	0%	-	20%	1.000.000.000	20%	1.000.000.000	10%	2.000.000.000	10%	4.000.000.000	100%	8.000.000.000	Perkim
	1	07	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Palayanan angkutan	%	-		463.700.000		468.337.000		487.070.480		506.553.299		526.815.431		2.452.476.210	Dishub
	1	07	2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Adanya Pengendalian Pengamanan lalu Lintas	%	-		200.000.000		202.000.000		210.080.000		218.483.200		227.222.528		1.057.785.728	Dishub
	2	08	1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan	%		-	10.000.000	-	10.200.000	-	1.500.000.000	-	1.750.000.000	-	1.750.000.000	-	5.020.200.000	Disnakertrans
	2	08	2	Program Transmigrasi Lokal	Terbangunnya kawasan transmigrasi lokal	%		-	-	-	409.200.000	-	425.568.000	-	442.590.720	-	460.294.349	-	1.737.653.069	Disnakertrans
				Sasaran 7.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian			**17.036.243.850**		**53.143.500.000**		**53.301.235.000**		**55.833.284.400**		**58.066.615.776**		**60.889.280.407**		**281.233.915.583**	
	1	03	10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Adanya pembangunan, peningkatan saluran irigasi dan galian saluran pembuang	%	17.036.243.850		52.773.500.000		53.301.235.000		55.433.284.400		57.650.615.776		59.956.640.407		279.115.275.583	PUPR

	2	01	6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Produktifitas Pertanian/Pekerbunan	%			370.000.000		-		-		-		500.000.000		870.000.000	Disbun
	2	01	13	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	%		100%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.400.000	100%	780.400.000	Distanak
	2	01	14	Program Peningkatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	%		100%	-	100%	-	100%	150.000.000	100%	156.000.000	100%	162.240.000	100%	468.240.000	Distanak & Disbun
				Sasaran 7.1.4 Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana			**1.571.151.000**		**6.543.025.000**		**7.603.549.250**		**7.958.866.500**		**8.237.221.160**		**8.526.710.006**		**38.869.371.916**	
	1	03	7	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana dapat berfungsi segera	%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	5.000.000.000	PUPR
	1	03	11	Program pengendalian banjir	Adanya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai	%	1.571.151.000		5.033.625.000		5.083.961.250		5.287.319.700		5.498.812.488		5.718.764.988		26.622.483.426	PUPR
	1	04	5	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	Adanya Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	%	-		509.400.000		519.588.000		571.546.800		594.408.672		618.185.019		2.813.128.491	BPBD /Kecamatan
	1	04	6	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Adanya Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	-		-		1.000.000.000		1.100.000.000		1.144.000.000		1.189.760.000		4.433.760.000	BPBD
				Sasaran 7.1.5 Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat			**-**		**3.224.330.000**		**6.288.816.600**		**20.117.698.260**		**20.262.406.190**		**20.912.902.438**		**70.806.153.488**	
	1	04	2	program pembangunan saluran Limbah Rumah Tangga	drainase dalam kondisi baik	%	-	5%	-	10%	1.000.000.000	20%	1.500.000.000	12%	1.500.000.000	10%	2.000.000.000	100%	6.000.000.000	Perkim
	1	04	3	Program Pembinaan dan Pengembangan Insfratruktur Permukiman	Persentase penggunaan Air Bersih bagi masyarakat	%	-	10%	3.224.330.000	20%	3.288.816.600	20%	3.617.698.260	10%	3.762.406.190	10%	3.912.902.438	100%	17.806.153.488	Perkim
	1	04	8	program penyusunan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)	Tersususnya RISPAM	%	-		-	100%	1.500.000.000							100%	1.500.000.000	Perkim
	1	04	9	program penyusunan Raqan BUMD PDAM	Tersusunya Qanun BUMD PDAM	%	-		-	100%	500.000.000							100%	500.000.000	Perkim
	1	04	10	program Pembangunan Infrastruktur Air Bersih (PDAM)	Persentase penggunaan Air Bersih bagi masyarakat	%	-		-			33%	15.000.000.000	33%	15.000.000.000	33%	15.000.000.000	100%	45.000.000.000	Perkim
				Sasaran 7.1.6 Tersedianya rumah layak huni			**62.150.000**		**62.150.000**		**3.063.393.000**		**4.062.150.000**		**4.064.636.000**		**5.062.150.000**		**16.314.479.000**	
	1	04	1	Program Pengembangan Perumahan	persentase rumah layak huni	%	-	15%	-	15%	3.000.000.000	10%	4.000.000.000	10%	4.000.000.000	13%	5.000.000.000	100%	16.000.000.000	Perkim
	1	04	7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan perumahan yang sehat	%	62.150.000		62.150.000		63.393.000		62.150.000		64.636.000		62.150.000		314.479.000	Perkim
				Sasaran 7.1.7 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.			**-**		**3.248.725.000**		**3.299.212.250**		**3.444.380.740**		**3.596.675.970**		**3.756.515.008**		**17.345.508.968**	
	1	08	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kinerja Perngelolaan Persampahan	%	-		437.555.000		441.930.550		459.607.772		477.992.083		497.111.766	100%	2.314.197.171	DLH
	1	08	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Adanya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	%	-		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	100%	610.510.000	DLH
	1	08	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Adanya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	-		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	100%	610.510.000	DLH
	1	08	5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Adanya Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	%	-		2.611.170.000		2.637.281.700		2.742.772.968		2.852.483.887		2.966.583.242	100%	13.810.291.797	DLH
				Sasaran 7.1.8 Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif					**300.000.000**		**1.506.000.000**		**1.566.240.000**		**1.731.664.000**		**1.800.930.560**		**6.904.834.560**	

	2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kawasan yang dilakukan rehabilitasi dan konservasi (ha)	%			-	2 Kwsn	200.000.000	3 kawasan	208.000.000	3 kawasan	300.000.000	3 kawasan	312.000.000	11 kawasan	1.020.000.000	Kelautan dan Perikanan
	2	05	8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya	%			300.000.000		306.000.000		318.240.000		350.064.000		364.066.560		1.638.370.560	Kelautan dan Perikanan
	2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kawasan Wisata Rawa Tripa	Meningkatnya kawasan yang dilakukan rehabilitasi dan konservasi (ha)					1 Kwsn	1.000.000.000	1 kawasan	1.040.000.000	1 kawasan	1.081.600.000	1 kawasan	1.124.864.000	4 kawasan	4.246.464.000	**Kelautan dan Perikanan, KLH, Disbutparpora**
				TOTAL (MISI 1 s/d MISI 7)			**183.154.567.508**		**555.216.740.566**		**602.970.727.431**		**646.318.467.606**		**649.747.659.986**		**674.584.389.133**		**3.113.106.219.137**	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah kabupaten Nagan Raya menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPK di lingkungan Pemerintah kabupaten Nagan Raya. Untuk lebih jelasnya di uraikan pada table 7.1 dibawah ini. Dan Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan pemerintah kabupaten Nagan Raya tahun 2018-2022 diuraikan dalam tabel 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022

Uraian Belanja	Proyeksi (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
KAPASITAS RIIL					
BELANJA	**1.070.070.000.000**	**1.117.240.000.000**	**1.166.510.000.000**	**1.215.790.000.000**	**1.265.060.000.000**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**533.780.000.000**	**555.610.000.000**	**580.110.000.000**	**604.830.000.000**	**629.520.000.000**
Belanja Pegawai	330.503.795.232	344.020.408.537	359.190.221.912	374.496.254.019	389.783.710.844
Belanja Hibah	1.235.300.529	1.285.820.613	1.342.519.745	1.399.728.013	1.456.866.854
Belanja Bantuan Sosial	2.629.997.458	2.737.556.461	2.858.270.871	2.980.069.247	3.101.719.809
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.951.474.384	2.031.283.829	2.120.854.668	2.211.229.817	2.301.495.287
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	194.081.443.382	202.018.791.932	210.926.947.657	219.915.094.984	228.892.334.366
Belanja Tidak Terduga	3.020.505.694	3.144.035.312	3.282.673.682	3.422.556.969	3.562.270.494
Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat	357.483.321	372.103.316	388.511.465	405.066.951	421.602.346
BELANJA LANGSUNG	**536.290.000.000**	**561.630.000.000**	**586.400.000.000**	**610.960.000.000**	**635.540.000.000**
Belanja Pegawai	74.007.460.560	77.504.354.126	80.922.588.287	84.311.842.666	87.703.857.025
Belanja Barang dan Jasa	216.045.053.439	226.253.302.062	236.231.925.519	246.125.950.231	256.028.031.965
Belanja Modal	246.237.486.001	257.872.343.812	269.245.486.194	280.522.207.103	291.808.111.010

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD		**21.729.575.900**		**229.571.533.678**		**280.825.234.222**		**286.895.453.912**		**307.010.489.253**		**310.186.010.178**		**1.414.488.721.243**	
XX XX 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor	14.141.776.500	12 Bln	97.040.236.704	12 Bln	111.737.984.779	12 Bln	119.205.647.449	12 Bln	128.422.237.919	12 Bln	131.746.280.223	60 Bln	588.152.387.074	SELURUH SKPK
				12 Bln	8.027.448.000	12 Bln	8.669.643.840	12 Bln	9.363.215.347	12 Bln	10.112.272.575	12 Bln	10.112.641.575	60 Bln	46.285.221.337	DINAS PENDIDIKAN
				12 Bln	83.277.000	12 Bln	89.939.160	12 Bln	97.134.293	12 Bln	104.905.036	12 Bln	113.297.439	60 Bln	488.552.928	UPTD PENDIDIKAN
				12 Bln	147.173.800	12 Bln	158.947.704	12 Bln	171.663.520	12 Bln	185.396.602	12 Bln	200.228.330	60 Bln	863.409.956	UPTD PENDIDIKAN
				12 Bln	124.439.000	12 Bln	134.394.120	12 Bln	145.145.650	12 Bln	156.757.302	12 Bln	169.297.886	60 Bln	730.033.957	UPTD PENDIDIKAN
				12 Bln	301.786.000	12 Bln	325.928.880	12 Bln	352.003.190	12 Bln	380.163.446	12 Bln	410.576.521	60 Bln	1.770.458.037	UPTD SKB DINAS
				12 Bln	2.499.866.070	12 Bln	2.699.855.356	12 Bln	2.915.843.784	12 Bln	3.149.111.287	12 Bln	3.401.040.190	60 Bln	14.665.716.686	DINAS KESEHATAN
				12 Bln	9.078.142.356	12 Bln	9.804.393.744	12 Bln	10.588.745.244	12 Bln	11.435.844.864	12 Bln	12.350.712.453	60 Bln	53.257.838.661	BLUD
				12 Bln	1.490.736.000	12 Bln	1.639.809.000	12 Bln	1.803.790.000	12 Bln	1.984.169.000	12 Bln	2.182.586.000	60 Bln	9.101.090.000	PUPR
				12 Bln	1.393.059.000	12 Bln	1.741.323.750	12 Bln	1.741.323.750	12 Bln	1.741.323.750	12 Bln	1.921.000.567	60 Bln	8.538.030.817	PERKIM
				12 Bln	716.563.911	12 Bln	2.341.000.000	12 Bln	2.341.000.000	12 Bln	2.341.000.000	12 Bln	2.341.000.000	60 Bln	10.080.563.911	SATPOL PP DAN WH
				12 Bln	357.158.784	12 Bln	385.731.487	12 Bln	416.590.006	12 Bln	449.917.206	12 Bln	485.910.583	60 Bln	2.095.308.065	KESBANGPOL
				12 Bln	771.904.000	12 Bln	833.656.320	12 Bln	900.348.826	12 Bln	972.376.732	12 Bln	1.050.166.870	60 Bln	4.528.452.747	DINAS SOSIAL
				12 Bln	511.811.000	12 Bln	552.755.880	12 Bln	596.976.350	12 Bln	644.734.458	12 Bln	696.313.215	60 Bln	3.002.590.904	DINAS SYARIAT
				12 Bln	10.758.235.000	12 Bln	16.631.530.477	12 Bln	17.097.139.274	12 Bln	18.712.946.401	12 Bln	16.013.356.370	60 Bln	79.213.207.521	BPBD
			360.250.000	12 Bln	421.970.000	12 Bln	464.167.000	12 Bln	510.583.700	12 Bln	561.642.070	12 Bln	617.806.277	60 Bln	2.576.169.047	Disnakertrans
				12 Bln	596.511.500	12 Bln	686.162.650	12 Bln	721.778.915	12 Bln	823.956.807	12 Bln	873.352.487	60 Bln	3.701.762.359	DPMPTSP
				12 Bln	4.685.664.000	12 Bln	4.785.664.000	12 Bln	5.264.230.400	12 Bln	5.790.653.440	12 Bln	4.785.664.000	60 Bln	25.311.875.840	DLH
				12 Bln	811.246.459	12 Bln	876.146.176	12 Bln	946.237.870	12 Bln	1.021.936.899	12 Bln	1.103.691.851	60 Bln	4.759.259.255	DISDUKCAPIL
				12 Bln	1.032.286.077	12 Bln	1.114.868.963	12 Bln	1.204.058.480	12 Bln	1.300.383.159	12 Bln	1.404.413.811	60 Bln	6.056.010.490	DPMGP4

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				12 Bln	1.078.100.353	12 Bln	1.132.005.371	12 Bln	1.188.605.639	12 Bln	1.248.035.921	12 Bln	1.310.437.717	60 Bln	5.957.185.001	DISHUB
				12 Bln	455.892.800	12 Bln	1.035.942.800	12 Bln	1.139.537.080	12 Bln	1.253.490.788	12 Bln	1.378.839.867	60 Bln	5.263.703.335	Diskominfo
			557.832.500	12 Bln	910.585.000	12 Bln	957.164.250	12 Bln	1.005.022.463	12 Bln	1.055.223.586	12 Bln	1.108.037.265	60 Bln	5.036.032.564	Disperindagkop dan UKM
				12 Bln	596.511.500	12 Bln	686.162.650	12 Bln	721.778.915	12 Bln	823.956.807	12 Bln	873.352.487	60 Bln	3.701.762.359	DPMPTSP
				12 Bln	1.463.046.000	12 Bln	1.580.089.680	12 Bln	1.706.496.854	12 Bln	1.843.016.603	12 Bln	1.990.457.931	60 Bln	8.583.107.068	DISBUDPARPORA
				12 Bln	551.154.100	12 Bln	595.246.428	12 Bln	642.866.142	12 Bln	694.295.434	12 Bln	749.839.068	60 Bln	3.233.401.172	PERPUSTAKAAN DAN
				12 Bln	1.346.534.591	12 Bln	1.481.188.050	12 Bln	1.629.306.855	12 Bln	1.792.237.541	12 Bln	1.971.461.295	60 Bln	8.220.728.332	Kelautan dan Perikanan
				12 Bln	949.025.000	12 Bln	1.040.517.500	12 Bln	1.173.869.250	12 Bln	1.291.256.175	12 Bln	1.452.694.792	60 Bln	5.907.362.717	DINAS PERTANIAN
			606.974.000	12 Bln	566.863.400	12 Bln	700.000.000	12 Bln	750.000.000	12 Bln	800.000.000	12 Bln	850.000.000	60 Bln	3.666.863.400	Disbun
				12 Bln	12.415.731.800	12 Bln	13.408.990.344	12 Bln	14.481.709.572	12 Bln	15.640.246.337	12 Bln	16.891.466.044	60 Bln	72.838.144.097	SETDAKAB
				12 Bln	8.881.214.994	12 Bln	9.591.712.194	12 Bln	10.359.049.169	12 Bln	11.187.773.103	12 Bln	12.082.794.951	60 Bln	52.102.544.410	SEKRETARIAT DEWAN
				12 Bln	684.933.750	12 Bln	739.728.450	12 Bln	798.906.726	12 Bln	862.819.264	12 Bln	931.844.805	60 Bln	4.018.232.995	MPU
				12 Bln	711.460.750	12 Bln	768.377.610	12 Bln	829.847.819	12 Bln	896.235.644	12 Bln	967.934.496	60 Bln	4.173.856.319	MAA
				12 Bln	310.085.668	12 Bln	334.892.521	12 Bln	361.683.923	12 Bln	390.618.637	12 Bln	421.868.128	60 Bln	1.819.148.878	MPD
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORA			12 Bln	850.000.000	12 Bln	1.062.500.000	12 Bln	1.275.000.000	12 Bln	1.530.000.000	12 Bln	1.836.000.000	60 Bln	6.553.500.000	BAITUL MALL
				12 Bln	645.419.750	12 Bln	700.000.000	12 Bln	724.000.000	12 Bln	645.419.750	12 Bln	645.419.750	60 Bln	3.360.259.250	KECAMATAN BEUTONG
				12 Bln	533.266.000	12 Bln	560.929.300	12 Bln	590.075.765	12 Bln	620.789.553	12 Bln	653.160.031	60 Bln	2.958.220.649	KECAMATAN SEUNAGAN
				12 Bln	648.435.750	12 Bln	700.310.610	12 Bln	756.335.459	12 Bln	816.842.296	12 Bln	882.189.679	60 Bln	3.804.113.793	KECAMATAN SEUNGAN
				12 Bln	510.545.618	12 Bln	551.389.267	12 Bln	595.500.409	12 Bln	643.140.442	12 Bln	694.591.677	60 Bln	2.995.167.413	KECAMATAN SUKA
				12 Bln	535.585.050	12 Bln	589.143.555	12 Bln	648.057.911	12 Bln	712.863.702	12 Bln	784.150.072	60 Bln	3.269.800.289	KECAMATAN KUALA
				12 Bln	479.210.000	12 Bln	517.546.800	12 Bln	558.950.544	12 Bln	603.666.588	12 Bln	651.959.915	60 Bln	2.811.333.846	KECAMATAN KUALA
				12 Bln	1.250.782.000	12 Bln	1.375.860.200	12 Bln	1.513.446.220	12 Bln	1.664.790.842	12 Bln	1.831.269.926	60 Bln	7.636.149.188	KECAMATAN DARUL
				12 Bln	653.590.000	12 Bln	705.877.200	12 Bln	762.347.376	12 Bln	823.335.166	12 Bln	889.201.979	60 Bln	3.834.351.721	KECAMATAN TADU RAYA
				12 Bln	644.905.000	12 Bln	709.395.500	12 Bln	780.335.050	12 Bln	858.368.555	12 Bln	944.205.411	60 Bln	3.937.209.516	KECAMATAN TRIPA
				12 Bln	532.011.800	12 Bln	574.572.744	12 Bln	620.538.564	12 Bln	670.181.649	12 Bln	723.796.180	60 Bln	3.121.100.937	KECAMATAN BEUTONG
				12 Bln	482.939.000	12 Bln	521.574.120	12 Bln	563.300.050	12 Bln	608.364.054	12 Bln	657.033.178	60 Bln	2.833.210.401	SEKRETARIAT KORPRI
				12 Bln	472.528.073	12 Bln	510.330.319	12 Bln	551.156.744	12 Bln	595.249.284	12 Bln	642.869.227	60 Bln	2.772.133.647	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.697.870.000	12 Bln	2.300.272.000	12 Bln	2.311.773.360	12 Bln	2.323.332.227	12 Bln	2.334.948.888	12 Bln	2.346.623.632	60 Bln	11.616.950.107	BAPPEDA
			10.918.850.000	12 Bln	9.907.250.000	12 Bln	10.402.612.500	12 Bln	10.922.743.125	12 Bln	11.468.880.281	12 Bln	12.042.324.295	60 Bln	54.743.810.202	BPKD
				12 Bln	1.863.079.000	12 Bln	1.956.232.950	12 Bln	2.054.039.000	12 Bln	2.176.700.000	12 Bln	2.307.400.000	60 Bln	10.357.450.950	BKPSDM
XX XX 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Kinerja Aparatur	6.235.988.000	12 Bln	80.218.531.950	12 Bln	98.324.107.429	12 Bln	95.262.281.983	12 Bln	101.597.655.476	12 Bln	105.477.876.152	60 Bln	480.880.452.990	SELURUH SKPK
				12 Bln	17.373.341.000	12 Bln	18.763.208.280	12 Bln	20.264.264.942	12 Bln	21.885.406.138	12 Bln	21.885.966.138	60 Bln	100.172.186.498	DINAS PENDIDIKAN
				12 Bln	10.818.150.000	12 Bln	11.683.602.000	12 Bln	12.618.290.160	12 Bln	13.627.753.373	12 Bln	14.717.973.643	60 Bln	63.465.769.175	DINAS KESEHATAN
				12 Bln	84.680.000	12 Bln	91.454.400	12 Bln	98.770.752	12 Bln	106.672.412	12 Bln	115.206.205	60 Bln	496.783.769	UPTD PENDIDIKAN
				12 Bln	201.000.000	12 Bln	217.080.000	12 Bln	234.446.400	12 Bln	253.202.112	12 Bln	273.458.281	60 Bln	1.179.186.793	UPTD PENDIDIKAN
				12 Bln	116.740.000	12 Bln	126.079.200	12 Bln	136.165.536	12 Bln	147.058.779	12 Bln	158.823.481	60 Bln	684.866.996	UPTD PENDIDIKAN
				12 Bln	8.500.000	12 Bln	9.180.000	12 Bln	9.914.400	12 Bln	10.707.552	12 Bln	11.564.156	60 Bln	49.866.108	UPTD SKB DINAS
				12 Bln	5.914.023.650	12 Bln	6.387.145.542	12 Bln	6.898.117.185	12 Bln	7.449.966.560	12 Bln	8.045.963.885	60 Bln	34.695.216.823	BLUD
				12 Bln	574.754.000	12 Bln	632.229.000	12 Bln	695.452.000	12 Bln	764.997.000	12 Bln	841.497.000	60 Bln	3.508.929.000	PUPR
				12 Bln	6.846.225.000	12 Bln	6.846.225.000	12 Bln	3.423.112.500	12 Bln	3.423.112.500	12 Bln	3.423.112.500	60 Bln	23.961.787.500	Perkim
				12 Bln	70.000.000	12 Bln	1.110.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	61.000.000	12 Bln	150.000.000	60 Bln	1.541.000.000	SATPOL PP DAN WH
				12 Bln	53.310.000	12 Bln	57.574.800	12 Bln	62.180.784	12 Bln	67.155.247	12 Bln	72.527.666	60 Bln	312.748.497	KESBANGPOL
				12 Bln	140.750.000	12 Bln	152.010.000	12 Bln	164.170.800	12 Bln	177.304.464	12 Bln	191.488.821	60 Bln	825.724.085	DINAS SOSIAL
				12 Bln	1.073.080.000	12 Bln	1.158.926.400	12 Bln	1.251.640.512	12 Bln	1.351.771.753	12 Bln	1.459.913.493	60 Bln	6.295.332.158	DINAS SYARIAT
				12 Bln	13.381.355.000	12 Bln	23.517.370.953	12 Bln	22.040.477.798	12 Bln	22.799.211.977	12 Bln	20.194.499.692	60 Bln	101.932.915.420	BPBD
			215.900.000	12 Bln	203.150.000	12 Bln	223.465.000	12 Bln	245.811.500	12 Bln	270.392.650	12 Bln	297.431.915	60 Bln	1.240.251.065	Disnakertrans
				12 Bln	139.900.000	12 Bln	203.390.000	12 Bln	223.729.000	12 Bln	246.101.900	12 Bln	270.712.090	60 Bln	1.083.832.990	DPMPTSP
				12 Bln	2.037.556.000	12 Bln	2.117.556.000	12 Bln	2.329.311.600	12 Bln	2.562.242.760	12 Bln	2.117.556.000	60 Bln	11.164.222.360	DLH
				12 Bln	85.050.000	12 Bln	91.854.000	12 Bln	99.202.320	12 Bln	107.138.506	12 Bln	115.709.586	60 Bln	498.954.412	DISDUKCAPIL
				12 Bln	1.741.792.000	12 Bln	1.881.135.360	12 Bln	2.031.626.189	12 Bln	2.194.156.284	12 Bln	2.369.688.787	60 Bln	10.218.398.619	DPMGP4
				12 Bln	1.409.905.000	12 Bln	1.480.400.250	12 Bln	1.554.420.263	12 Bln	1.632.141.276	12 Bln	1.709.862.289	60 Bln	7.786.729.077	DISHUB
				12 Bln	90.130.000	12 Bln	156.330.000	12 Bln	171.963.000	12 Bln	189.159.300	12 Bln	208.075.230	60 Bln	815.657.530	Diskominfo
			50.000.000	12 Bln	434.820.000	12 Bln	406.561.000	12 Bln	479.389.050	12 Bln	503.358.503	12 Bln	528.526.428	60 Bln	2.352.654.981	Disperindagkop dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				12 Bln	139.900.000	12 Bln	203.390.000	12 Bln	223.729.000	12 Bln	246.101.900	12 Bln	270.712.090	60 Bln	1.083.832.990	DPMPTSP
				12 Bln	216.750.000	12 Bln	234.090.000	12 Bln	252.817.200	12 Bln	273.042.576	12 Bln	294.885.982	60 Bln	1.271.585.758	DISBUDPARPORA
				12 Bln	502.646.800	12 Bln	542.858.544	12 Bln	586.287.228	12 Bln	633.190.206	12 Bln	683.845.422	60 Bln	2.948.828.199	PERPUSTAKAAN DAN
				12 Bln	216.920.000	12 Bln	238.612.000	12 Bln	262.473.200	12 Bln	288.720.520	12 Bln	317.592.572	60 Bln	1.324.318.292	Kelautan dan Perikanan
				12 Bln	1.500.000.000	12 Bln	1.301.000.000	12 Bln	1.550.250.000	12 Bln	1.284.150.000	12 Bln	1.946.542.000	60 Bln	7.581.942.000	DINAS PERTANIAN
			44.918.000	12 Bln	316.447.000	12 Bln	450.000.000	12 Bln	500.000.000	12 Bln	550.000.000	12 Bln	600.000.000	60 Bln	2.416.447.000	Disbun
				12 Bln	8.449.776.000	12 Bln	9.125.758.080	12 Bln	9.855.818.726	12 Bln	10.644.284.225	12 Bln	11.495.826.962	60 Bln	49.571.463.993	SETDAKAB
				12 Bln	1.304.150.000	12 Bln	1.408.482.000	12 Bln	1.521.160.560	12 Bln	1.642.853.405	12 Bln	1.774.281.677	60 Bln	7.650.927.642	SEKRETARIAT DEWAN
				12 Bln	22.000.000	12 Bln	23.760.000	12 Bln	25.660.800	12 Bln	27.713.664	12 Bln	29.930.757	60 Bln	129.065.221	MPU
				12 Bln	4.000.000	12 Bln	4.320.000	12 Bln	4.665.600	12 Bln	5.038.848	12 Bln	5.441.956	60 Bln	23.466.404	MAA
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			12 Bln	250.000.000	12 Bln	312.500.000	12 Bln	390.625.000	12 Bln	488.281.250	12 Bln	610.351.563	60 Bln	2.051.757.813	BAITUL MALL
				12 Bln	77.950.000	12 Bln	85.000.000	12 Bln	95.000.000	12 Bln	115.000.000	12 Bln	115.000.000	60 Bln	487.950.000	KECAMATAN BEUTONG
				12 Bln	144.750.000	12 Bln	277.425.000	12 Bln	302.857.500	12 Bln	330.717.750	12 Bln	361.242.750	60 Bln	1.416.993.000	KECAMATAN SEUNAGAN
				12 Bln	67.021.500	12 Bln	72.383.220	12 Bln	78.173.878	12 Bln	84.427.788	12 Bln	91.182.011	60 Bln	393.188.396	KECAMATAN SUKA
				12 Bln	72.500.000	12 Bln	245.750.000	12 Bln	270.325.000	12 Bln	297.357.500	12 Bln	327.093.250	60 Bln	1.213.025.750	KECAMATAN KUALA
				12 Bln	197.000.000	12 Bln	212.760.000	12 Bln	229.780.800	12 Bln	248.163.264	12 Bln	268.016.325	60 Bln	1.155.720.389	KECAMATAN KUALA
				12 Bln	72.000.000	12 Bln	79.200.000	12 Bln	87.120.000	12 Bln	95.832.000	12 Bln	105.415.200	60 Bln	439.567.200	KECAMATAN DARUL
				12 Bln	96.510.000	12 Bln	104.230.800	12 Bln	112.569.264	12 Bln	121.574.805	12 Bln	131.300.790	60 Bln	566.185.659	KECAMATAN TADU RAYA
				12 Bln	160.181.500	12 Bln	176.199.650	12 Bln	193.819.615	12 Bln	213.201.577	12 Bln	234.521.734	60 Bln	977.924.076	KECAMATAN TRIPA
				12 Bln	344.484.000	12 Bln	372.042.720	12 Bln	401.806.138	12 Bln	433.950.629	12 Bln	468.666.679	60 Bln	2.020.950.165	KECAMATAN BEUTONG
				12 Bln	22.500.000	12 Bln	24.300.000	12 Bln	26.244.000	12 Bln	28.343.520	12 Bln	30.611.002	60 Bln	131.998.522	SEKRETARIAT KORPRI
				12 Bln	113.743.500	12 Bln	122.842.980	12 Bln	132.670.418	12 Bln	143.284.052	12 Bln	154.746.776	60 Bln	667.287.726	INSPEKTORAT
			660.900.000	12 Bln	505.150.000	12 Bln	570.488.250	12 Bln	573.340.691	12 Bln	576.207.395	12 Bln	579.088.432	60 Bln	2.804.274.768	BAPPEDA
			5.264.270.000	12 Bln	2.464.270.000	12 Bln	4.656.283.500	12 Bln	2.226.597.675	12 Bln	2.809.827.559	12 Bln	5.224.568.937	60 Bln	17.381.547.670	BPKD
				12 Bln	159.670.000	12 Bln	167.653.500	12 Bln	176.033.000	12 Bln	186.380.000	12 Bln	197.454.000	60 Bln	887.190.500	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
XX XX 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinam Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	20.000.000	12 Bln	18.275.207.577	12 Bln	19.691.991.983	12 Bln	21.524.335.242	12 Bln	22.981.490.671	12 Bln	23.228.401.377	60 Bln	105.701.426.850	SELURUH SKPK
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinam Aparatur Dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut pegawai		12 Bln	17.373.341.000	12 Bln	18.763.208.280	12 Bln	20.264.264.942	12 Bln	21.885.406.138	12 Bln	21.885.406.138	60 Bln	100.171.626.498	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah		12 Bln	60.000.000	12 Bln		12 Bln	60.000.000	12 Bln		12 Bln	60.000.000	60 Bln	180.000.000	PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinam Aparatur Dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut pegawai		12 Bln	98.000.000	12 Bln	-	12 Bln	178.000.000	12 Bln	-	12 Bln	198.000.000	60 Bln	474.000.000	SATPOL PP DAN WH
	Program Peningktan Disiplin Aparatur	Meningkatnya sistem pelaporan (bulan)	-	12 Bln	10.250.000	12 Bln	11.275.000	12 Bln	12.402.500	12 Bln	13.642.750	12 Bln	15.007.025	60 Bln	62.577.275	Disnakertrans
	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		12 Bln	300.840.000	12 Bln	393.840.000	12 Bln	433.224.000	12 Bln	476.546.400	12 Bln	393.840.000	60 Bln	1.998.290.400	DLH
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	25.000.000	12 Bln	-	12 Bln	35.000.000	60 Bln	60.000.000	Diskominfo
	Program peningktan disiplin aparatur	Meningkatnya disipklin aparatur (%)		12 Bln	0	12 Bln	25000000	12 Bln	27000000	12 Bln	30000000	12 Bln	32000000	60 Bln	114.000.000	Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR		12 Bln	-	12 Bln	55.000	12 Bln	76.000	12 Bln	-	12 Bln	82.000	60 Bln	213.000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	28.500.000	12 Bln	30.780.000	12 Bln	33.242.400	12 Bln	35.901.792	12 Bln	38.773.935	60 Bln	167.198.127	SEKRETARIAT DEWAN
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	7.000.000	12 Bln	7.560.000	12 Bln	8.164.800	12 Bln	8.817.984	12 Bln	9.523.423	60 Bln	41.066.207	MPU
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinam Aparatur Dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut pegawai		12 Bln	259.356.577	12 Bln	280.105.103	12 Bln	302.513.511	12 Bln	326.714.592	12 Bln	352.851.760	60 Bln	1.521.541.544	MAA
	PROGRAM DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	70.000.000	12 Bln	84.000.000	12 Bln	100.800.000	12 Bln	120.960.000	12 Bln	145.152.000	60 Bln	520.912.000	BAITUL MALL
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bln	22.400.000	12 Bln	24.192.000	12 Bln	26.127.360	12 Bln	28.217.549	12 Bln	30.474.953	60 Bln	131.411.862	KECAMATAN SEUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	6.020.000	12 Bln	6.501.600	12 Bln	7.021.728	12 Bln	7.583.466	12 Bln	8.190.144	60 Bln	35.316.938	SEKRETARIAT KORPRI
	Program Peningkatan Dispilin Aparatur	Meningkatnya tingkat kedispilan pegawai	20.000.000	12 Bln	20.000.000	12 Bln	45.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	0	100%	115.000.000	BPKD
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinam Aparatur Dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut pegawai		12 Bln	19.500.000	12 Bln	20.475.000	12 Bln	21.498.000	12 Bln	22.700.000	12 Bln	24.100.000	60 Bln	108.273.000	BKPSDM
XX XX 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	961.761.400	12 Bln	8.274.657.447	12 Bln	9.134.410.301	12 Bln	9.834.687.653	12 Bln	10.446.898.154	12 Bln	11.318.644.801	60 Bln	49.009.298.356	SELURUH SKPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memenuhi standar		12 Bln	2.753.242.000	12 Bln	2.973.501.360	12 Bln	3.211.381.469	12 Bln	3.468.291.986	12 Bln	3.491.701.986	60 Bln	15.898.118.801	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	29.000.000	12 Bln	31.320.000	12 Bln	33.825.600	12 Bln	36.531.648	12 Bln	39.454.180	60 Bln	170.131.428	UPTD SKB DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	220.938.000	12 Bln	238.613.040	12 Bln	257.702.083	12 Bln	278.318.250	12 Bln	300.583.710	60 Bln	1.296.155.083	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah		12 Bln	50.000.000	12 Bln	55.000.000	12 Bln	60.500.000	12 Bln	66.550.000	12 Bln	73.205.000	60 Bln	305.255.000	PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	-	12 Bln	150.000.000	12 Bln	160.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	60 Bln	510.000.000	SATPOL PP DAN WH
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan		12 Bln	525.800.000	12 Bln	567.864.000	12 Bln	613.293.120	12 Bln	662.356.570	12 Bln	715.345.095	60 Bln	3.084.658.785	DPMGP4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	50.000.000	12 Bln	52.500.000	12 Bln	55.125.000	12 Bln	57.881.250	12 Bln	60.775.313	60 Bln	276.281.563	DISHUB
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12 Bln	-	12 Bln	65.000.000	12 Bln	71.500.000	12 Bln	78.650.000	12 Bln	86.515.000	60 Bln	301.665.000	Diskominfo
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur (%)	0	12 Bln	-	12 Bln	50.000.000	12 Bln	55.000.000	12 Bln	60.000.000	12 Bln	65.000.000	60 Bln	230.000.000	Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KKAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	220.000	12 Bln	-	12 Bln	245.000.000	60 Bln	245.220.000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12 Bln	1.650.800.000	12 Bln	1.782.864.000	12 Bln	1.925.493.120	12 Bln	2.079.532.570	12 Bln	2.245.895.175	60 Bln	9.684.584.865	SETDAKAB
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	1.000.000.000	12 Bln	1.080.000.000	12 Bln	1.166.400.000	12 Bln	1.259.712.000	12 Bln	1.360.488.960	60 Bln	5.866.600.960	SEKRETARIAT DEWAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya aparatur		12 Bln	20.000.000	12 Bln	21.600.000	12 Bln	23.328.000	12 Bln	25.194.240	12 Bln	27.209.779	60 Bln	117.332.019	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	234.400.000	12 Bln	230.900.000	12 Bln	232.054.500	12 Bln	233.214.773	12 Bln	234.380.846	12 Bln	235.552.751	60 Bln	1.166.102.869	BAPPEDA
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur			65.161.047	100%	70.373.931	100%	76.003.845	100%	82.084.153	100%	88.650.885	100%	382.273.861	MPU
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur			35.500.000	100%	38.340.000	100%	41.407.200	100%	44.719.776	100%	48.297.358	100%	208.264.334	MPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	727.361.400	12 Bln	692.361.400	12 Bln	726.979.470	12 Bln	801.828.444	12 Bln	801.494.866	12 Bln	841.569.609	60 Bln	3.864.233.788	BPKD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	950.955.000	12 Bln	998.400.000	12 Bln	1.048.465.000	12 Bln	1.111.200.000	12 Bln	1.293.400.000	60 Bln	5.402.420.000	BKPSDM
XX XX 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengelolaan Pelaporan Keuangan yang Sistematis dan Tepat Waktu	370.050.000	12 Bln	25.762.900.000	12 Bln	41.936.739.730	12 Bln	41.068.501.585	12 Bln	43.562.207.032	12 Bln	38.414.807.625	60 Bln	190.745.155.972	SELURUH SKPK
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	122.500.000	12 Bln	132.300.000	12 Bln	142.884.000	12 Bln	154.314.720	12 Bln	192.842.720	60 Bln	744.841.440	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	56.500.000	12 Bln	61.020.000	12 Bln	65.901.600	12 Bln	71.173.728	12 Bln	76.867.626	60 Bln	331.462.954	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	60.000.000	12 Bln	64.800.000	12 Bln	69.984.000	12 Bln	75.582.720	12 Bln	81.629.338	60 Bln	351.996.058	BLUD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan kegiatan		12 Bln	22.000.000	12 Bln	22.000.000	12 Bln	22.000.000	12 Bln	22.000.000	12 Bln	22.000.000	60 Bln	110.000.000	PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	2.200.000	12 Bln	3.800.000	12 Bln	3.800.000	12 Bln	3.800.000	12 Bln	3.800.000	60 Bln	17.400.000	SATPOL PP DAN WH
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	53.310.000	12 Bln	57.574.800	12 Bln	62.180.784	12 Bln	67.155.247	12 Bln	72.527.666	60 Bln	312.748.497	KESBANGPOL
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.240.000	12 Bln	3.499.200	12 Bln	3.779.136	12 Bln	4.081.467	60 Bln	17.599.803	DINAS SOSIAL
	'PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	12.000.000	12 Bln	12.960.000	12 Bln	13.996.800	12 Bln	15.116.544	12 Bln	16.325.868	60 Bln	70.399.212	DINAS SYARIAT ISLAM
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		12 Bln	24.139.590.000	12 Bln	40.148.901.430	12 Bln	39.137.617.071	12 Bln	41.512.158.378	12 Bln	36.207.856.061	60 Bln	181.146.122.941	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan (bulan)	-	12 Bln	21.500.000	12 Bln	48.650.000	12 Bln	53.515.000	12 Bln	58.866.500	12 Bln	64.753.150	60 Bln	247.284.650	Disnakertrans
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	4.950.000	12 Bln	5.346.000	12 Bln	5.773.680	12 Bln	6.235.574	12 Bln	6.734.420	60 Bln	29.039.675	DISDUKCAPIL
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	15.500.000	12 Bln	16.740.000	12 Bln	18.079.200	12 Bln	19.525.536	12 Bln	21.087.579	60 Bln	90.932.315	DPMGP4
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Adanya Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan		12 Bln	19.800.000	12 Bln	20.790.000	12 Bln	21.829.500	12 Bln	22.920.975	12 Bln	24.067.024	60 Bln	109.407.499	DISHUB
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	27.500.000	12 Bln	30.250.000	12 Bln	33.275.000	60 Bln	91.025.000	Diskominfo
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya tingkat kedispilan pegawai	-	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.750.000	12 Bln	16.537.500	12 Bln	17.364.375	12 Bln	18.232.594	60 Bln	82.884.469	Disperindagkop dan UKM
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.400.000	12 Bln	5.832.000	12 Bln	6.298.560	12 Bln	6.802.445	60 Bln	29.333.005	DISBUDPARPORA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan (bulan)	12 bulan	12 Bln	-	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	60 Bln	100.000.000	Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	MENINGKATNYA KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS DENGAN REALISASI KEGIATAN BIDANG-BIDANG		12 Bln	12.300.000	12 Bln	13.530.000	12 Bln	23.883.000	12 Bln	26.271.300	12 Bln	28.898.430	60 Bln	104.882.730	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi capaian SKPD	a. Tersusunya PK		12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	60 Bln	-	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPK Dinas Perkebunan tepat waktu	0	12 Bln	33.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	60 Bln	233.000.000	Disbun
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			12 Bln	100.800.000	12 Bln	108.864.000	12 Bln	117.573.120	12 Bln	126.978.970	12 Bln	137.137.287	60 Bln	591.353.377	SETDAKAB
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	1.500.000	12 Bln	1.620.000	12 Bln	1.749.600	12 Bln	1.889.568	12 Bln	2.040.733	60 Bln	8.799.901	MPU
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.240.000	12 Bln	3.499.200	12 Bln	3.779.136	12 Bln	4.081.467	60 Bln	17.599.803	MPD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	75.000.000	12 Bln	90.000.000	12 Bln	108.000.000	12 Bln	129.600.000	12 Bln	155.520.000	60 Bln	558.120.000	BAITUL MALL
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	6.000.000	12 Bln	6.480.000	12 Bln	6.998.400	12 Bln	7.558.272	12 Bln	8.162.934	60 Bln	35.199.606	BAITUL MALL
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	60 Bln	25.000.000	KECAMATAN BEUTONG
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.250.000	12 Bln	5.512.500	12 Bln	5.788.125	12 Bln	6.077.531	60 Bln	27.628.156	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.800.000	12 Bln	11.664.000	12 Bln	12.597.120	12 Bln	13.604.890	60 Bln	58.666.010	KECAMATAN SEUNGAN
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN			12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.240.000	12 Bln	3.499.200	12 Bln	3.779.136	12 Bln	4.081.467	60 Bln	17.599.803	KECAMATAN SUKA MAKMUE
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.240.000	12 Bln	3.499.200	12 Bln	3.779.136	12 Bln	4.081.467	60 Bln	17.599.803	KECAMATAN KUALA PESISIR
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			12 Bln	2.500.000	12 Bln	2.750.000	12 Bln	3.250.000	12 Bln	3.327.500	12 Bln	3.660.250	60 Bln	15.487.750	KECAMATAN DARUL MAKMUR
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.240.000	12 Bln	3.499.200	12 Bln	3.779.136	12 Bln	4.081.467	60 Bln	17.599.803	KECAMATAN TADU RAYA
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.500.000	12 Bln	6.050.000	12 Bln	6.655.000	12 Bln	7.320.500	60 Bln	30.525.500	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.240.000	12 Bln	3.499.200	12 Bln	3.779.136	12 Bln	4.081.467	60 Bln	17.599.803	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	2.500.000	12 Bln	2.700.000	12 Bln	2.916.000	12 Bln	3.149.280	12 Bln	3.401.222	60 Bln	14.666.502	SEKRETARIAT KORPRI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan Pelaporan Keuangan yang Sistematis dan Tepat Waktu	41.800.000	12 Bln	220.200.000	12 Bln	221.301.000	12 Bln	222.407.505	12 Bln	223.519.543	12 Bln	224.637.140	60 Bln	1.112.065.188	BAPPEDA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan pelaporan keuangan yang sistematis dan tepat waktu	328.250.000	12 Bln	710.450.000	12 Bln	745.972.500	12 Bln	783.271.125	12 Bln	822.434.681	12 Bln	863.556.415	60 Bln	3.925.684.722	BPKD
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersususn Tepat waktu(LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI)		12 Bln	5.800.000	12 Bln	6.500.000	12 Bln	6.800.000	12 Bln	7.000.000	12 Bln	7.500.000	60 Bln	33.600.000	BKPSDM

				URUSAN WAJIB					**351.317.540.909**		**388.176.351.219**		**405.470.306.337**		**404.925.646.037**		**423.130.645.343**		**1.967.454.555.122**	
	1	**01**		**Pendidikan**					**25.667.245.000**		**31.222.649.900**		**32.471.555.896**		**33.770.418.132**		**35.121.234.857**		**157.565.354.052**	
	1	01	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	%	-	24,19	30.000.000	24,63	30.600.000	25,00	31.824.000	25,62	33.096.960	26,08	34.420.838	26,08	159.941.798	Disdik
	1	01	2	Program Peningkatan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	%	-	24,19	-	24,63	2.500.000.000	25,00	2.600.000.000	25,62	2.704.000.000	26,08	2.812.160.000	26,08	10.616.160.000	Disdik
	1	01	3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Kualitas Tenaga pendidik	%	21.191.600.000	45,01	20.500.000.000	54,01	20.910.000.000	64,82	21.746.400.000	77,78	22.616.256.000	93,34	23.520.906.240	93,34	109.293.562.240	Disdik
	1	01	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase koordinasi dan sikronisasi pelayanan program pendidikan	%	3.603.400.000	75,00	4.756.245.000	80,00	4.851.369.900	85	5.045.424.696	90	5.247.241.684	95	5.457.131.351	95	25.357.412.631	Disdik
							84.000.000		84.000.000		85.680.000		89.107.200		92.671.488		96.378.348		447.837.036	UPTD Darul Makmur
							N/A		45.000.000	80,00	45.900.000	85	47.736.000	90	49.645.440	95	51.631.258	95	239.912.698	MPD
	1	01	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	%	-	75,00		80,00	805.000.000	85	837.200.000	90	870.688.000	95	905.515.520	95	3.418.403.520	Disdik
	1	01	6	Program Peningkatan Mutu Ruang Sekolah	Meningkatnya Mutu Sarana Pendidikan (Ruang Belajar)	%	-	91,59	-	92,49	1.500.000.000	93,88	1.560.000.000	94,81	1.622.400.000	95,58	1.687.296.000	95,58	6.369.696.000	Disdik
	1	01	7	Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Persentase Angka Melek Huruf, Persentase Tingkat Pendidikan Laki dan Perempuan	%	-	94,34	-	95,29	237.060.000	96,24	246.542.400	97,20	256.404.096	98,17	266.660.260	98,17	1.006.666.756	UPTD SKB Disdik

	1	01	8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka kelulusan tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTsN	%	106.630.000	N/A	92.000.000	N/A	93.840.000	N/A	97.593.600	N/A	101.497.344	N/A	105.557.238	N/A	490.488.182	UPTD Seunagan
	1	01	9	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek huruf	%	-	94,34	160.000.000	95,29	163.200.000	96,24	169.728.000	97,20	176.517.120	98,17	183.577.805	98,17	853.022.925	UPTD SKB Disdik
	1	**02**		**Kesehatan**			**64.481.581.154**		**81.894.224.801**		**97.947.399.739**		**103.673.100.592**		**90.153.892.838**		**91.980.076.855**		**465.648.694.825**	
	1	02	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	4.074.877.768		2.430.200.000		2.454.502.000		2.552.682.080		2.654.789.363		2.760.980.938		12.853.154.381	Dinkes
	1	02	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%			4.289.004.000		4.331.894.040		4.505.169.802		4.685.376.594		4.872.791.657		22.684.236.093	Dinkes & BLUD
					Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%	2.503.885.000		3.977.504.000		4.017.279.040		4.177.970.202		4.345.089.010		4.518.892.570		21.036.734.821	Dinkes
					Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%	81.264.594		311.500.000		314.615.000		327.199.600		340.287.584		353.899.087		1.647.501.271	BLUD
	1	02	3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terawasinya Peredaran Obat Makanan	%	5.000.000		26.272.000		26.534.720		27.596.109		28.699.953		29.847.951		138.950.733	Dinkes
	1	02	4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%	84.500.000		-		75.000.000		78.000.000		81.120.000		84.364.800		318.484.800	Dinkes
	1	02	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Stunting dan Balita Gizi Buruk	%	100.000.000		-		100.000.000		104.000.000		108.160.000		112.486.400		424.646.400	Dinkes
	1	02	6	Program Penyehatan Lingkungan	Terciptanya Kualitas Lingkungan Yang Sehat	%	89.535.000		-		128.535.000		133.676.400		139.023.456		144.584.394		545.819.250	Dinkes
	1	02	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Pederita Penyakit Menular Seperti TBC, KUSTA, DIFTERI	%	418.866.000		1.175.516.000		1.187.271.160		1.234.762.006		1.284.152.487		1.335.518.586		6.217.220.239	Dinkes
	1	02	8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	%	574.000.000		540.270.000		545.672.700		567.499.608		590.199.592		613.807.576		2.857.449.476	BLUD
	1	02	9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya Persentase Kelengkapan sarana dan Prasarana Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas pelayanan	%	22.657.044.386		16.193.227.801		16.355.160.079		17.009.366.482		17.689.741.141		18.397.330.787		85.644.826.291	Dinkes
	1	02	10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Meningkatnya Persentase Kelengkapan sarana dan Prasarana Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas pelayanan	%	4.300.000.000		11.000.000.000		11.110.000.000		11.554.400.000		12.016.576.000		12.497.239.040		58.178.215.040	BLUD
	1	02	11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan Kepesertaan Asuransi Kesehatan	%	267.570.000		80.038.000		80.838.380		84.071.915		87.434.792		90.932.183		423.315.270	Dinkes
	1	02	12	Program Pengembangan Kesehatan	Cakupan Persentase Kesehatan Masyarakat	%	7.276.038.000		8.838.928.000		8.927.317.280		9.284.409.971		9.655.786.370		10.042.017.825		46.748.459.446	Dinkes
	1	02	13	Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	%	1.225.640.000		1.631.000.000		1.647.310.000		1.713.202.400		1.781.730.496		1.852.999.716		8.626.242.612	Dinkes
	1	02	15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Meningkatnya Persentase Ketersedian Sarana dan Prasarana Kesehatan dan akreditasi RSUD	%	-	40%	2.710.000.000	55%	17.050.000.000	70%	20.185.852.863	85%	3.970.000.000	100%	3.004.530.000	100%	46.920.382.863	RSUD
	1	02	17	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Puskesmas	Meningkatnya Persentase sarana dan Prasarana Puskesmas yang Fungsional	%	-		-		450.000.000		468.000.000		486.720.000		506.188.800		1.910.908.800	Dinkes

	1	02	18	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga kesehatan yang Memenuhi Standar Kualitas dan profesionalisme Tenaga Kesehatan	%	-		-		150.000.000		156.000.000		162.240.000		168.729.600		636.969.600	Dinkes
	1	02	19	Program Pelaksanaan Operasional BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Secara Optimal	%	23.000.000.000		31.200.000.000		31.512.000.000		32.142.240.000		32.785.084.800		33.440.786.496		161.080.111.296	BLUD
	1	02	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%	-		18.700.000		19.074.000		19.836.960		20.630.438		21.455.656		99.697.054	Dinkes
	1	02	21	Pogram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	persentase penurunan angka kematian ibu dan bayi	%	-		1.416.139.000		1.444.461.780		1.502.240.251		1.562.329.861		1.624.823.056		7.549.993.948	Dinkes
	1	02	22	Program Kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (PDTK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)	Persentase daerah terpencil yang tertangani	%	148.510.000		62.330.000		63.576.600		66.119.664		68.764.451		71.515.029		332.305.743	Dinkes
	1	02	23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase layanan kepada masyarakat yang terlayani dengan baik	%	-		22.600.000		23.052.000		23.974.080		24.933.043		25.930.365		120.489.488	Dinkes
	1	02	24	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit juwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana rumah saki yang baik	%	260.000.000		260.000.000		265.200.000		260.000.000		270.400.000		281.216.000		1.336.816.000	BLUD
	1	**03**		**Pekerjaan Umum**					**130.769.197.720**		**135.771.389.697**		**141.156.245.285**		**149.096.666.668**		**156.866.354.135**		**713.051.853.505**	
	1	03	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Akses jalan dan jembatan berfungsi dengan baik dan lancar	%	72.609.723.504		60.061.822.720		60.662.440.947		63.088.938.585		66.874.274.900		69.549.245.896		320.236.723.049	PUPR
	1	03	2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	persentase jumlah saluran drainase/ gorong-gorong yang terbangun	%	-	15%	5.350.000.000	17%	5.403.500.000	17%	5.619.640.000	17%	5.956.818.400	17%	6.195.091.136	100%	28.525.049.536	Perkim
	1	03	3	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Tebing jalan dan abutmen jembatan kuat dan aman dari bencana	%	-		-		1.000.000.000		1.040.000.000		1.081.600.000		1.124.864.000		4.246.464.000	PUPR
	1	03	4	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Akses jalan dan jembatan kembali berfungsi dengan baik	%	1.000.000.000		5.100.250.000		5.151.252.500		5.357.302.600		5.571.594.704		5.794.458.492		26.974.858.296	PUPR
	1	03	5	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Talud/Bronjong	Struktur jalan dan jembatan aman dari kerusakan	%			200.000.000		200.000.000		208.000.000		216.320.000		200.000.000		1.024.320.000	PUPR
	1	03	6	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Terdatanya kondisi jalan dan jembatan sebagai data dukung perencanaan teknis	%	100.000.000		100.000.000		100.000.000		104.000.000		108.160.000		100.000.000		512.160.000	PUPR
	1	03	7	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana dapat berfungsi segera	%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	5.000.000.000	PUPR
	1	03	8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi dan data base untuk mendukung perencanaan yang baik	%	-		-		200.000.000		250.000.000		260.000.000		250.000.000		960.000.000	PUPR
	1	03	9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja di bidang kebinamargaan	%	1.192.088.000		200.000.000		204.000.000		212.160.000		220.646.400		229.472.256		1.066.278.656	PUPR

	1	03	10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Adanya pembangunan, peningkatan saluran irigasi dan galian saluran pembuang	%	17.036.243.850		52.773.500.000		53.301.235.000		55.433.284.400		57.650.615.776		59.956.640.407		279.115.275.583	PUPR
															-					Perkim
	1	03	11	Program pengendalian banjir	Adanya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai	%	1.571.151.000		5.033.625.000		5.083.961.250		5.287.319.700		5.498.812.488		5.718.764.988		26.622.483.426	PUPR
	1	03	12	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Terpenuhinya Sarana prasarana Infratruktur Perdesaan	%	200.000.000	15%	200.000.000	15%	200.000.000	15%	200.000.000	15%	208.000.000	15%	200.000.000	100%	200.000.000	PUPR
							200.000.000		-		-		-		-		-		200.000.000	Perkim
	1	03	13	Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar	Cakupan Wilayah Terlayani sarana dan prasarana perkotaan	%	-	0%	-	20%	1.000.000.000	20%	1.000.000.000	10%	2.000.000.000	10%	4.000.000.000	100%	8.000.000.000	Perkim
	1	03	14	program pembangunan/rehabilitasi gedung/tempat	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana umum	%	-	10%	750.000.000	10%	765.000.000	20%	795.600.000	20%	827.424.000	10%	860.520.960	100%	3.998.544.960	Perkim
	1	03	15	program peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan	tercapainya jalan dan lingkungan dalam kondisi baik	%	-	0%	-	10%	1.500.000.000	20%	1.560.000.000	10%	1.622.400.000	10%	1.687.296.000	100%	6.369.696.000	Perkim
	1	**04**		**Perumahan**			**-**		**3.733.730.000**		**10.308.404.600**		**12.789.245.060**		**13.000.814.862**		**14.720.847.457**		**54.553.041.979**	
	1	04	1	Program Pengembangan Perumahan	persentase rumah layak huni	%	-	15%	-	15%	3.000.000.000	10%	4.000.000.000	10%	4.000.000.000	13%	5.000.000.000	100%	16.000.000.000	Perkim
	1	04	2	program pembangunan saluran Limbah Rumah Tangga	drainase dalam kondisi baik	%	-	5%	-	10%	1.000.000.000	20%	1.500.000.000	12%	1.500.000.000	10%	2.000.000.000	100%	6.000.000.000	Perkim
	1	04	3	Program Pembinaan dan Pengembangan Insfratruktur Permukiman	Persentase penggunaan Air Bersih bagi masyarakat	%	-	10%	3.224.330.000	20%	3.288.816.600	20%	3.617.698.260	10%	3.762.406.190	10%	3.912.902.438	100%	17.806.153.488	Perkim
	1	04	4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Persentase bangunan sarana dan prasarana peribadatan yang baik	%	-	20%	-	10%	1.500.000.000	10%	2.000.000.000	10%	2.000.000.000	10%	2.000.000.000	100%	7.500.000.000	Perkim
	1	04	5	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	Adanya Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	%	-		509.400.000		519.588.000		571.546.800		594.408.672		618.185.019		2.813.128.491	BPBD /Kecamata
	1	04	6	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Adanya Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	-		-		1.000.000.000		1.100.000.000		1.144.000.000		1.189.760.000		4.433.760.000	BPBD
	1	04	7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan perumahan yang sehat	%	62.150.000		62.150.000		63.393.000		62.150.000		64.636.000		62.150.000		314.479.000	Perkim
	1	04	8	program penyusunan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)	Tersususnya RISPAM	%	-		-	100%	1.500.000.000							100%	1.500.000.000	Perkim
	1	04	9	program penyusunan Raqan BUMD PDAM	Tersusunya Qanun BUMD PDAM	%	-		-	100%	500.000.000							100%	500.000.000	Perkim
	1	04	10	program Pembangunan Infrastruktur Air Bersih (PDAM)	Persentase penggunaan Air Bersih bagi masyarakat	%	-		-			33%	15.000.000.000	33%	15.000.000.000	33%	15.000.000.000	100%	45.000.000.000	Perkim
	1	04	11	Program Pengembangan Pusat Komando Penanggulangan Bencana,	Tersedianya sistem informasi dalam penanggulangan bencana				300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.500.000.000	BPBD
	1	**05**		**Penataan Ruang**					**2.652.600.000**		**2.679.126.000**		**2.786.291.040**		**2.321.117.396**		**2.413.962.091**		**12.813.096.527**	
	1	05	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-		2.652.600.000	20%	2.679.126.000	20%	2.786.291.040	10%	2.321.117.396	10%	2.413.962.091	100%	12.813.096.527	Forkim, PUPR, Bappeda
					Adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan sanitasi pemukiman	%	619.500.000	10%	888.600.000	20%	897.486.000	20%	933.385.440	10%	545.600.000	10%	567.424.000	100%	3.832.495.440	Perkim

					Adanya Penataan Ruang	Ada	-		1.000.000.000		1.010.000.000		1.050.400.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.060.400.000	PUPR
					Ketaatan Terhadap RTRW	Dok	-	2 Dok	764.000.000	Dokume	771.640.000	Dokume	802.505.600	Dokume	775.517.396	Dokume	806.538.091	Dokume	3.920.201.087	BAPPEDA
	1	**06**		**Perencanaan Pembangunan**					**12.885.831.800**		**13.944.690.118**		**12.786.459.337**		**13.633.798.940**		**14.177.950.897**		**67.428.731.092**	
	1	06	1	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya	%	-	92%	1.544.450.000	94%	1.574.894.500	96%	1.184.892.625	98%	1.231.688.330	100%	1.280.355.863	100%	6.816.281.318	Bappeda & Satpol PP dan WH
					Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya	%	-	92%	1.544.450.000	94%	1.559.894.500	96%	1.169.892.625	98%	1.216.688.330	100%	1.265.355.863	100%	6.756.281.318	Bappeda
					Jumlah / Jenis Data dan Informasi Penegakan peraturan daerah yang Tersedia	%	-		-	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000	Satpol PP & WH
	1	06	2	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Cakupan Wilayah Terlayani Sarana dan Prasarana Perkotaan	%	-	80%	-	85%	900.000.000	87%	904.500.000	90%	909.022.500	92%	945.383.400	92%	3.658.905.900	Bappeda
	1	06	3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	85%	488.000.000	90%	492.880.000	94%	492.892.200	96%	495.356.661	100%	515.170.927	100%	2.484.299.788	Bappeda
	1	06	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi	%	-	92%	3.133.770.900	94%	3.165.108.609	96%	3.260.776.401	98%	3.182.697.944	100%	3.310.005.862	100%	16.052.359.717	Bappeda/ Setdakab & Kecamatan
							-	92%	1.531.512.500	94%	1.546.827.625	96%	1.577.764.178	98%	1.423.291.173	100%	1.480.222.820	100%	7.559.618.295	Bappeda
							-		1.439.558.400	100%	1.453.953.984	100%	1.512.112.143	100%	1.572.596.629	100%	1.635.500.494	100%	7.613.721.651	Setdakab
							-		14.000.000	100%	14.140.000	100%	14.705.600	100%	17.635.968	100%	18.341.407	100%	78.822.975	Kec. Seunagan
							-		5.700.000	100%	5.757.000	100%	5.987.280	100%	7.180.358	100%	7.467.573		32.092.211	Kec. Suka Makmue
							-		13.000.000	100%	13.130.000	100%	13.655.200	100%	17.303.000	100%	17.995.120		75.083.320	Kec. Kuala
							-		16.000.000	100%	16.160.000	100%	16.806.400	100%	20.155.392	100%	20.961.608		90.083.400	Kec. Kuala Pesisir
							-		40.000.000	100%	40.400.000	100%	42.016.000	100%	43.696.640	100%	45.444.506		211.557.146	Kec. Beutong
							-		20.000.000	100%	20.200.000	100%	21.008.000	100%	21.848.320	100%	22.722.253		105.778.573	KEC. Beutong Ateuh B
							-		12.000.000	100%	12.120.000	100%	12.604.800	100%	13.108.992	100%	13.633.352		63.467.144	Kec. Tadu Raya
							-		22.000.000	100%	22.220.000	100%	23.108.800	100%	24.033.152	100%	24.994.478		116.356.430	Kec. Tadu Raya
							-		20.000.000	100%	20.200.000	100%	21.008.000	100%	21.848.320	100%	22.722.253	100%	105.778.573	Kec. Seunagan
	1	06	5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	%	-	92%	262.300.000	94%	264.923.000	96%	275.519.920	98%	286.540.717	100%	298.002.345	100%	1.387.285.982	Bappeda
	1	06	6	Program Perencanaan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Dapat Terlaksana Dengan Baik	%	-	92%	1.562.350.000	94%	1.577.973.500	96%	1.641.092.440	98%	2.509.745.119	100%	2.610.134.924	100%	9.901.295.983	Bappeda
	1	06	7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pengurangan Resiko Bencana	%	-	92%	256.800.000	94%	259.368.000	96%						100%	516.168.000	Bappeda
	1	06	8	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Terkoordinasinya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah	%	-	92%	959.940.000	94%	969.539.400	96%	581.116.725	98%	604.361.394	100%	628.535.850	100%	3.743.493.369	Bappeda
	1	**07**		**Perhubungan**					**663.700.000**		**670.337.000**		**697.150.480**		**725.036.499**		**754.037.959**		**3.510.261.938**	

	1	07	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Palayanan angkutan	%	-		463.700.000		468.337.000		487.070.480		506.553.299		526.815.431		2.452.476.210	Dishub
	1	07	2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Adanya Pengendalian Pengamanan lalu Lintas	%	-		200.000.000		202.000.000		210.080.000		218.483.200		227.222.528		1.057.785.728	Dishub
	1	**08**		**Lingkungan Hidup**					**3.748.725.000**		**3.949.212.250**		**4.194.380.740**		**4.446.675.970**		**4.756.515.008**		**21.095.508.968**	
	1	08	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kinerja Perngelolaan Persampahan	%	-		437.555.000		441.930.550		459.607.772		477.992.083		497.111.766	100%	2.314.197.171	DLH
	1	08	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Adanya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	%	-		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	100%	610.510.000	DLH
	1	08	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Adanya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	-		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	100%	610.510.000	DLH
	1	08	4	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Adanya Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	%	-		500.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	1.000.000.000	100%	3.750.000.000	DLH
	1	08	5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Adanya Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	%	-		2.611.170.000		2.637.281.700		2.742.772.968		2.852.483.887		2.966.583.242	100%	13.810.291.797	DLH
	1	**09**		**Pertanahan**					**811.000.000**		**819.110.000**		**727.298.400**		**756.390.336**		**786.645.949**		**3.900.444.685**	
	1	09	1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah pemda yang terkelola dengan baik	%	-		736.000.000	100%	743.360.000	100%	648.518.400	100%	674.459.136	100%	701.437.501		3.503.775.037	Setdakab/Kec. Seunagan Timur
	1	09	2	Program Pendataan Tanah-Tanah Asset Milik Pemerintah Daerah	Persentase tanah pemda yang terkelola dengan baik	%	-		75.000.000	100%	75.750.000	100%	78.780.000	100%	81.931.200	100%	85.208.448		396.669.648	Setdakab
	1	**10**		**Kependudukan dan Catatan Sipil**					**1.650.505.000**		**1.667.010.050**		**1.733.690.452**		**1.803.038.070**		**1.875.159.593**		**8.728.837.579**	
	1	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penduduk yang memiliki KTP, KK, AKTA	%		88,17	761.505.000	88,54	769.120.050	100%	799.884.852	100%	831.880.246	100%	865.155.456	100%	4.026.980.018	Disdukcapil/Kec.
									687.005.000		693.875.050	100%	721.630.052	100%	750.495.254	100%	780.515.064	100%	3.633.520.420	Disdukcapil
									3.000.000		3.030.000	100%	3.151.200	100%	3.000.000	100%	3.120.000		15.301.200	Kec. Beutong
									16.000.000		16.160.000	100%	16.806.400	100%	17.478.656	100%	18.177.802		84.622.858	Kec. Seunagan
									5.000.000		5.050.000	100%	5.252.000	100%	5.462.080	100%	5.680.563		26.444.643	Kec. Suka Makmue
									18.500.000		18.685.000	100%	19.432.400	100%	20.209.696	100%	21.018.084		97.845.180	Kec. Kuala
									20.000.000		20.200.000	100%	21.008.000	100%	21.848.320	100%	22.722.253		105.778.573	Kec. Darul Makmur
									12.000.000		12.120.000	100%	12.604.800	100%	13.108.992	100%	13.633.352		63.467.144	Kec. Tadu Raya
	1	10	2	Program Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penduduk yang memiliki KTP, KK, AKTA	%			889.000.000		897.890.000		933.805.600		971.157.824		1.010.004.137		4.701.857.561	Discapil
	1	**11**		**Pemberdayaan Perempuan**					**300.000.000**		**330.000.000**		**363.000.000**		**399.300.000**		**439.230.000**		**1.831.530.000**	
	1	11	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender	%	-		150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000		915.765.000	DPMGP4
	1	11	2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengarustamaan gender	%	-		150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000		915.765.000	DPMGP4

	1	**12**		**keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**					**3.616.540.000**		**3.700.870.800**		**3.858.805.632**		**4.024.047.857**		**4.196.988.772**		**19.397.253.061**	
	1	12	1	Program Keluarga Berencana	Terlaksannya Program Keluarga Harapan Bagi Masyarakat	%	-		150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000		915.765.000	DPMGP4
	1	12	2	Program Keluarga Sejahtera	Menurunnya angka kemiskinan	%	-		3.466.540.000		3.535.870.800		3.677.305.632		3.824.397.857		3.977.373.772		18.481.488.061	DPMGP4
	1	**13**		**Sosial**					**21.629.935.500**		**21.846.234.855**		**22.720.084.249**		**23.628.887.619**		**24.574.043.124**		**111.754.721.027**	
	1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Komunitas Adat Terpencil yang Mendapat bantuan.Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan KUBE .Jumlah Rehab Rumah Tidak Layak Huni	%	-		6.939.795.000	100%	7.009.192.950	100%	7.289.560.668	100%	7.581.143.095	100%	7.884.388.819	100%	36.704.080.531	DINAS SOSIAL & SETDAKAB
									339.000.000	100%	342.390.000	100%	356.085.600	100%	370.329.024	100%	385.142.185	100%	1.792.946.809	DINAS SOSIAL
									6.600.795.000	100%	6.666.802.950	100%	6.933.475.068	100%	7.210.814.071	100%	7.499.246.634	100%	34.911.133.722	SETDAKAB
	1	13	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Sosial Yang terlayani	%	-		614.330.500	100%	620.473.805	100%	645.292.757	100%	671.104.467	100%	697.948.646	100%	3.249.150.176	DINAS SOSIAL
	1	13	3	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase Pembinaan Panti Jompo	%	-		1.830.760.000	100%	1.849.067.600	100%	1.923.030.304	100%	1.999.951.516	100%	2.079.949.577	100%	9.682.758.997	DINAS SOSIAL
	1	13	4	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anaknya Terlantar Dalam Kaab.Nagan Raya	%	-		200.000.000	100%	202.000.000	100%	210.080.000	100%	218.483.200	100%	227.222.528	100%	1.057.785.728	
	1	13	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Terbantu	%	-		150.000.000	100%	151.500.000	100%	157.560.000	100%	163.862.400	100%	170.416.896	100%	793.339.296	
	1	13	6	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapina, PSK , Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Sosial yang di bina	%	-		150.000.000	100%	151.500.000	100%	157.560.000	100%	163.862.400	100%	170.416.896	100%	793.339.296	
	1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	-		11.745.050.000	100%	11.862.500.500	100%	12.337.000.520	100%	12.830.480.541	100%	13.343.699.762	100%	62.118.731.323	Dinsos/Setdakab
	1	**14**		**Tenaga Kerja**					**70.000.000**		**156.400.000**		**609.616.000**		**864.000.640**		**1.118.560.666**		**2.973.577.306**	
	1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Menurunnya angka pengangguran	%	-	-	50.000.000	-	51.000.000	-	500.000.000	-	750.000.000	-	1.000.000.000	-	2.351.000.000	Disnakertrans
	1	14	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terlaksananya infomasi dan bimbingan bagi pencari kerja	%	-	-	-	-	85.000.000	-	88.400.000	-	91.936.000	-	95.613.440	-	360.949.440	Disnakertrans
	1	14	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	-	-	20.000.000	-	20.400.000	-	21.216.000	-	22.064.640	-	22.947.226	-	106.627.866	Disnakertrans
	1	14	4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Menurunnya angka pengangguran	%	-		15.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		155.000.000	Disnakertrans
	1	**15**		**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**					**554.550.000**		**815.641.000**		**848.266.640**		**882.197.306**		**917.485.198**		**4.018.140.143**	
	1	15	1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.400.000	100%	281.216.000	100%	1.061.616.000	Disperindagkop dan UKM
	1	15	2	Pogram Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pembinaan untuk pengrajin IKM	%	-	100%	350.000.000	100%	357.000.000	100%	371.280.000	100%	386.131.200	100%	401.576.448	100%	1.865.987.648	Disperindagkop dan UKM

	1	15	3	Pogram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tersenggaranya bimtek koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas koperasi.	%	-	100%	204.550.000	100%	208.641.000	100%	216.986.640	100%	225.666.106	100%	234.692.750	100%	1.090.536.495	Disperindagkop dan UKM
	1	**16**		**Penanaman Modal Daerah**					**-**		**372.980.000**		**387.899.200**		**403.415.168**		**419.551.775**		**1.583.846.143**	
	1	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Investasi di Kab. Nagan Raya dapat lebih meningkat	%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.400.000	100%	281.216.000	100%	1.061.616.000	DPMPTSP
	1	16	2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Tertatausahaan Data dan Informasi investasi di Kab. Nagan Raya	%	-	100%	-	100%	98.780.000	100%	102.731.200	100%	106.840.448	100%	111.114.066	100%	419.465.714	DPMPTSP
	1	16	3	Program Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	Tertibnya pener-bitan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	%	-	100%	-	100%	24.200.000	100%	25.168.000	100%	26.174.720	100%	27.221.709	100%	102.764.429	DPMPTSP
	1	**17**		**Kebudayaan**					**2.500.000.000**		**1.000.000.000**		**1.040.000.000**		**1.081.600.000**		**3.000.000.000**		**8.621.600.000**	
	1	17	1	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Terjalinnya Kerja Sama pengelolaan kekayaan Budaya	%	-	100%	2.500.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.040.000.000	100%	1.081.600.000	100%	3.000.000.000	100%	8.621.600.000	Disbudparpora
	1	**18**		**Pemuda dan Olah Raga**					**5.126.300.000**		**6.460.026.000**		**6.718.427.040**		**6.987.164.122**		**7.266.650.686**		**32.558.567.848**	
	1	18	1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terakomodirnya keserasian Kebijakan Pemuda	%	-	100%	800.700.000	100%	816.714.000	100%	849.382.560	100%	883.357.862	100%	918.692.177	100%	4.268.846.599	Disbudparpora
	1	18	2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	-	100%	750.600.000	100%	765.612.000	100%	796.236.480	100%	828.085.939	100%	861.209.377	100%	4.001.743.796	Disbudparpora
	1	18	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapan Hidup Pemuda	Tercapainya Penurunan pengangguran di Tingkat pemuda	%	-		-	100%	572.400.000	100%	595.296.000	100%	619.107.840	100%	643.872.154	100%	2.430.675.994	Disbudparpora
	1	18	4	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Menurunnya Angka Penyalah Gunaan Narkoba	%	-	100%	75.000.000	100%	76.500.000	100%	79.560.000	100%	82.742.400	100%	86.052.096	100%	399.854.496	Disbudparpora
	1	18	5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Terbinanya Olah Raga bagi Olah Ragawan dan Pelatih	%	-		-	100%	658.800.000	100%	685.152.000	100%	712.558.080	100%	741.060.403	100%	2.797.570.483	Disbudparpora
	1	18	6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya dan Olah Raga bagi Masyarakat Nagan Raya	%	-	100%	1.500.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.591.200.000	100%	1.654.848.000	100%	1.721.041.920	100%	7.997.089.920	Disbudparpora
	1	18	7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	%	-	100%	2.000.000.000	100%	2.040.000.000	100%	2.121.600.000	100%	2.206.464.000	100%	2.294.722.560	100%	10.662.786.560	Disbudparpora
	1	**19**		**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**					**860.500.000**		**1.167.710.000**		**1.214.418.400**		**1.262.995.136**		**987.304.381**		**5.492.927.917**	
	1	19	1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	-	100%	225.500.000	100%	230.010.000	100%	239.210.400	100%	248.778.816	100%	258.729.969	100%	1.202.229.185	Kesbangpol
	1	19	2	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan	Terjalinnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	-	100%	85.000.000	100%	86.700.000	100%	90.168.000	100%	93.774.720	100%	97.525.709	100%	453.168.429	Kesbangpol
	1	19	3	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Persentase Pemahaman Politik Bagi Masyarakat	%	-	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	106.080.000	100%	110.323.200	100%	114.736.128	100%	533.139.328	Kesbangpol
	1	19	4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	%	-	100%	450.000.000	100%	459.000.000	100%	477.360.000	100%	496.454.400	100%	516.312.576	100%	2.399.126.976	Satpol PP dan WH
	1	19	5	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Meningkatnya Kapasitas aparatur Linmas	%	-		-	100%	290.000.000	100%	301.600.000	100%	313.664.000	100%	-	100%	905.264.000	Satpol PP dan WH

	1	19	6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	-	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	26.520.000	100%	27.580.800	100%	30.338.880	100%	134.939.680	MPD
	1	**20**		**Pemerintahan Umum**					**44.970.496.088**	**0%**	**45.902.306.010**	**0%**	**46.904.679.930**	**0%**	**47.861.166.828**	**0%**	**48.818.390.164**	**-**	**234.457.039.020**	
	1	20	1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya Kapasitas Anggota Legislatif dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	%	-	100%	3.000.000.000	100%	3.060.000.000	100%	3.121.200.000	100%	3.183.624.000	100%	3.247.296.480	100%	15.612.120.480	Sekwan
	1	20	2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	-	100%	900.000.000	100%	918.000.000	100%	936.360.000	100%	955.087.200	100%	974.188.944	100%	4.683.636.144	Setdakab
	1	20	3	Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH	Meningkatnya kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	-	100%	80.000.000		81.600.000		83.232.000		84.896.640		86.594.573		416.323.213	Setdakab
	1	20	4	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	%	-	100%	15.850.000.000	100%	16.167.000.000	100%	16.490.340.000	100%	16.820.146.800	100%	17.156.549.736	100%	82.484.036.536	Setdakab/BPKD/Baitul Mall dan Sekwan
							-	100%	220.000.000	100%	224.400.000	100%	228.888.000	100%	233.465.760	100%	238.135.075	100%	1.144.888.835	Setdakab
							-	100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	31.212.000	100%	31.836.240	100%	32.472.965	100%	156.121.205	Sekwan
							-	100%	5.600.000.000	100%	5.712.000.000	100%	5.826.240.000	100%	5.942.764.800	100%	6.061.620.096	100%	29.142.624.896	BPKD
							-	100%	10.000.000.000	100%	10.200.000.000	100%	10.404.000.000	100%	10.612.080.000	100%	10.824.321.600	100%	52.040.401.600	Baitul Mall
	1	20	5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Prosedur Pengelolaan keuangan daerah yang Baik	%	-	100%	1.200.000.000	100%	1.224.000.000	100%	1.248.480.000	100%	1.273.449.600	100%	1.298.918.592	100%	6.244.848.192	BPKD
	1	20	6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kab. NaganRaya	%	-		4.150.000.000	100%	4.233.000.000	100%	4.317.660.000	100%	4.404.013.200	100%	4.492.093.464	100%	21.596.766.664	Inspektorat
							-	100%	1.750.000.000	100%	1.785.000.000	100%	1.820.700.000	100%	1.857.114.000	100%	1.894.256.280	100%	9.107.070.280	Setdakab
							-	100%	2.400.000.000	100%	2.448.000.000	100%	2.496.960.000	100%	2.546.899.200	100%	2.597.837.184	100%	12.489.696.384	Inspektorat
	1	20	7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Profesionalismae Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur	%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.020.000.000	100%	1.040.400.000	100%	1.061.208.000	100%	1.082.432.160	100%	5.204.040.160	Inspektorat
	1	20	8	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan prosedur pengawasan	%	-	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	26.010.000	100%	26.530.200	100%	27.060.804	100%	130.101.004	Inspektorat
	1	20	9	Program Pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase Layanan yang baik kepada masyarakat	%	-	100%	65.000.000	100%	66.300.000	100%	67.626.000	100%	68.978.520	100%	70.358.090	100%	338.262.610	Setdakab
	1	20	10	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah	%	-	100%	15.900.000	100%	16.218.000	100%	16.542.360	100%	16.873.207	100%	17.210.671	100%	82.744.239	Setdakab
	1	20	11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya qanun dan peraturan lainnya	%	-	100%	600.000.000	100%	612.000.000	100%	624.240.000	100%	636.724.800	100%	649.459.296	100%	3.122.424.096	Setdakab
	1	20	12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase daerah otonomi baru yang tertata	%	-	100%	740.050.000	100%	754.851.000	100%	769.948.020	100%	785.346.980	100%	801.053.920	100%	3.851.249.920	Setdakab/Kecamatan
	1	20	13	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan pelaporan keuangan yang dan aset yang tepat	%	-	100%	1.500.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.560.600.000	100%	1.591.812.000	100%	1.623.648.240	100%	7.806.060.240	BPKD
	1	20	14	Program Pelayanan Keagamaan	Menurunnya pelanggaran syariat islam	%	-		10.333.844.000	100%	10.540.520.880	100%	10.751.331.298	100%	10.966.357.924	100%	11.185.685.082	100%	53.777.739.183	Satpol PP dan WH, Syariat Islam, MPU,Baitul Mal, Kecamatan dan Setdakab

							-	100%	191.000.000	100%	194.820.000	100%	198.716.400	100%	202.690.728	100%	206.744.543	100%	993.971.671	Satpol PP & WH
							-	100%	900.000.000	100%	918.000.000	100%	936.360.000	100%	955.087.200	100%	974.188.944	100%	4.683.636.144	Setdakab
							-	100%	20.000.000	100%	20.400.000	100%	20.808.000	100%	21.224.160	100%	21.648.643	100%	104.080.803	MPU
							-	100%	15.000.000	100%	15.300.000	100%	15.606.000	100%	15.918.120	100%	16.236.482		78.060.602	Kec. Tadu Raya
							-	100%	220.000.000	100%	224.400.000	100%	228.888.000	100%	233.465.760	100%	238.135.075		1.144.888.835	Kec. Tripa Makmur
							-	100%	15.000.000	100%	15.300.000	100%	15.606.000	100%	15.918.120	100%	16.236.482		78.060.602	Kec. Beutong
							-	100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	104.040.000	100%	106.120.800	100%	108.243.216		520.404.016	Kec. Darul Makmur
							-	100%	8.872.844.000	100%	9.050.300.880	100%	9.231.306.898	100%	9.415.933.036	100%	9.604.251.696	100%	46.174.636.509	Dinas Syariat Islam
	1	20	15	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam	Menurunnya pelanggaran syariat islam	%	-	100%	844.002.732	100%	860.882.787	100%	878.100.442	100%	895.662.451	100%	913.575.700	100%	4.392.224.112	Dinas Syariat Islam
	1	20	16	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Mutu sumber Daya manusia dan Peningkat Kualitas pelayanan Dalam Kehidupan Beragama	%	-	100%	2.886.700.000	100%	2.944.434.000	100%	3.003.322.680	100%	3.063.389.134	100%	3.124.656.916	100%	15.022.502.730	Dinas Syariat Islam
	1	20	17	Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan Yang di Bina	%	-	100%	281.150.000	100%	286.773.000	100%	292.508.460	100%	298.358.629	100%	304.325.802	100%	1.463.115.891	Dinas Syariat Islam
	1	20	18	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	Persentase Advokasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat	%	-	100%	336.000.000	100%	342.720.000	100%	349.574.400	100%	356.565.888	100%	363.697.206	100%	1.748.557.494	Setdakab/Sekwan
							-	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000	100%	318.362.400	100%	324.729.648	100%	1.561.212.048	Setdakab
							-	100%	36.000.000	100%	36.720.000	100%	37.454.400	100%	38.203.488	100%	38.967.558	100%	187.345.446	Sekwan
	1	20	19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Peran Legislasi dan Pengawasan	%	-	100%	47.800.000	100%	48.756.000	100%	49.731.120	100%	50.725.742	100%	51.740.257	100%	248.753.120	SEKWAN
	1	20	20	Program Peningkatan pengkaderan Ulama	Peran Ulama dalam pelaksanaan syariat islam dan kehidupan masyarakat	%	-	100%	160.000.000	100%	163.200.000	100%	166.464.000	100%	169.793.280	100%	173.189.146	100%	832.646.426	MPU
	1	20	21	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas pendidikan	%	-		-	100%	32.400.000	100%	33.048.000	100%	33.708.960	100%	34.383.139	100%	133.540.099	MPU
	1	20	22	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam	Meningkatnya kualitas tenaga tajhid mayat dan kader islam lainnya	%	-	100%	111.500.000	100%	113.730.000	100%	116.004.600	100%	118.324.692	100%	120.691.186	100%	580.250.478	Kecamatan
	1	20	23	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	100%	185.649.356	100%	189.362.343	100%	193.149.590	100%	197.012.582	100%	200.952.833	100%	966.126.704	Kecamatan
							-	100%	22.000.000	100%	22.440.000	100%	22.888.800	100%	23.346.576	100%	23.813.508	100%	114.488.884	Kec. Beutong
							-	100%	56.450.000	100%	57.579.000	100%	58.730.580	100%	59.905.192	100%	61.103.295	100%	293.768.067	Kec. Seunagan Timur
							-	100%	7.000.000	100%	7.140.000	100%	7.282.800	100%	7.428.456	100%	7.577.025	100%	36.428.281	Kec. Tadu Raya
							-	100%	21.500.000	100%	21.930.000	100%	22.368.600	100%	22.815.972	100%	23.272.291	100%	111.886.863	Kec. Tadu Raya
							-	100%	17.000.000	100%	17.340.000	100%	17.686.800	100%	18.040.536	100%	18.401.347	100%	88.468.683	Kec. Tripa Makmur
							-	100%	8.949.356	100%	9.128.343	100%	9.310.910	100%	9.497.128	100%	9.687.071	100%	46.572.808	Kec. Beutong Ateuh B
							-	100%	52.750.000	100%	53.805.000	100%	54.881.100	100%	55.978.722	100%	57.098.296	100%	274.513.118	Kec. Suka Makmue
	1	20	24	Program Pengembangan Penguatan Sayariat Islam	Menurunnya pelanggaran terhadap syariat islam	%	-	100%	524.000.000	100	534.480.000	100	593.048.000	100	616.769.920	100	629.105.318	100	2.897.403.238	Kecamatan

									100%	60.000.000	100%	61.200.000	100%	67.320.000	100%	70.012.800	100%	71.413.056	100%	329.945.856	Kec. Seunagan
				100					100%	40.000.000	100%	40.800.000	100%	50.000.000	100%	52.000.000	100%	53.040.000	100%	235.840.000	S. Timur
									100%	100.000.000	100%	102.000.000	100%	112.200.000	100%	116.688.000	100%	119.021.760	100%	549.909.760	Kec. Suka Makmue
									100%	50.000.000	100%	51.000.000	100%	56.100.000	100%	58.344.000	100%	59.510.880	100%	274.954.880	Kec. Kuala
									100%	10.000.000	100%	10.200.000	100%	11.220.000	100%	11.668.800	100%	11.902.176	100%	54.990.976	Kec. Beutong
									100%	59.000.000	100%	60.180.000	100%	66.198.000	100%	68.845.920	100%	70.222.838	100%	324.446.758	Kec. Seunagan
									100%	30.000.000		30.600.000		33.660.000		35.006.400		35.706.528		164.972.928	Kuala Pesisir
									100%	110.000.000		112.200.000		123.420.000		128.356.800		130.923.936		604.900.736	Darul Makmur
									100%	15.000.000		15.300.000		16.830.000		17.503.200		17.853.264		82.486.464	Tadu Raya
									100%	50.000.000		51.000.000		56.100.000		58.344.000		59.510.880		274.954.880	
	1	20	25	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Gampong	Terbinanya Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan keuangan Gampong	%			100%	278.900.000	100%	284.478.000	100%	326.616.960	100%	339.681.638	100%	346.475.271	100%	1.576.151.870	Kecamatan
									100%	180.000.000	100%	183.600.000	100%	209.952.000	100%	218.350.080	100%	222.717.082	100%	1.014.619.162	Kec. Seunagan
									100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	29.160.000	100%	30.326.400	100%	30.932.928	100%	140.919.328	Kec. Tadu Raya
									100%	23.900.000	100%	24.378.000	100%	27.876.960	100%	28.992.038	100%	29.571.879	100%	134.718.878	Kec. Kuala Pesisir
									100%	15.000.000	100%	15.300.000	100%	18.150.000	100%	18.876.000	100%	19.253.520		86.579.520	Kec. Darul Makmur
									100%	15.000.000	100%	15.300.000	100%	18.150.000	100%	18.876.000	100%	19.253.520		86.579.520	Kec. Tripa Makmur
									100%	20.000.000	100%	20.400.000	100%	23.328.000	100%	24.261.120	100%	24.746.342		112.735.462	Kec. Tadu Raya
	1	20	26	Program Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah	Tersedianya silabus dan kurikulum dayah					50.000.000		200.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000	100%	650.000.000	Dinas Syariat Islam, MPU dan MPD
	1	20	27	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santri-Dayah Terpadu)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santriDayah Terpadu)				5%	300.000.000	10%	1.500.000.000	10%	2.000.000.000	15%	2.000.000.000	15%	2.000.000.000	100%	7.800.000.000	**Dinas Syariat Islam**
	1	**21**		**Kepegawaian**						**1.600.000.000**		**1.632.000.000**		**1.664.640.000**		**1.697.932.800**		**1.731.891.456**		**8.326.464.256**	
	1	21	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	%			100%	1.600.000.000	100%	1.632.000.000	100%	1.664.640.000	100%	1.697.932.800	100%	1.731.891.456	100%	8.326.464.256	BKPSDM & Setdakab
									100%	1.000.000.000	100%	1.020.000.000	100%	1.040.400.000	100%	1.061.208.000	100%	1.082.432.160	100%	5.204.040.160	BKPSDM
									100%	600.000.000	100%	612.000.000	100%	624.240.000	100%	636.724.800	100%	649.459.296	100%	3.122.424.096	Setdakab
	1	**22**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						**992.410.000**		**1.012.258.200**		**1.032.503.364**		**1.053.153.431**		**1.074.216.500**		**5.164.541.495**	
	1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terbedayanya Masyarakat Pedesaan	%			100%	177.500.000	100%	181.050.000	100%	184.671.000	100%	188.364.420	100%	192.131.708	100%	923.717.128	DPMGP4
	1	22	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	%			100%	764.910.000	100%	780.208.200	100%	795.812.364	100%	811.728.611	100%	827.963.184	100%	3.980.622.359	DPMGP4 & Kec.
									100%	751.410.000	100%	766.438.200	100%	781.766.964	100%	797.402.303	100%	813.350.349		3.910.367.817	DPMGP4
									100%	13.500.000	100%	13.770.000	100%	14.045.400	100%	14.326.308	100%	14.612.834		70.254.542	Kec. Kuala Pesisir
	1	22	3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%			100%	50.000.000	100%	51.000.000	100%	52.020.000	100%	53.060.400	100%	54.121.608	100%	260.202.008	MAA
	1	**23**		**Statistik**						**28.000.000**		**28.560.000**		**29.702.400**		**30.890.496**		**32.126.116**		**149.279.012**	
	1	23	1	Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektoral	Persentase tersedianya data yang akurat	%			100%	28.000.000		28.560.000		29.702.400		30.890.496		32.126.116	100%	149.279.012	Diskominfo

	1	**24**		**Kearsipan**					**314.000.000**		**408.424.000**		**611.962.980**		**501.144.040**		**470.722.800**		**566.098.737**	
	1	24	1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tertatanya Sistem Administrasi Kearsipan	%			-	100%	137.349.000	100%	140.095.980	100%	142.897.900	100%	145.755.858	100%	566.098.737	Perpustakaan & Arsip
	1	24	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Arsip Daerah yang tertata dengan baik	%		100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	31.212.000	100%	31.836.240	100%	32.472.965	100%	156.121.205	Perpustakaan & Arsip
	1	24	3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				100%	109.000.000	100%	61.975.000	100%	258.585.000	100%	140.698.500	100%	103.068.350	100%	673.326.850	Perpustakaan & Arsip
	1	24	3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan					-		-		-		-		-		-	
	1	24	3	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	%		100%	175.000.000	100%	178.500.000	100%	182.070.000	100%	185.711.400	100%	189.425.628	100%	910.707.028	Perpustakaan & Arsip
	1	**25**		**Komunikasi dan Informatika**					**4.278.050.000**		**4.363.611.000**		**4.450.883.220**		**4.539.900.884**		**4.630.698.902**		**22.263.144.006**	
	1	25	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyediaan Informasi Bagi Masyarakat	%		100%	1.245.450.000		1.270.359.000		1.295.766.180		1.321.681.504		1.348.115.134	100%	6.481.371.817	Diskominfo & Setdakab
								100%	496.500.000		506.430.000		516.558.600		526.889.772		537.427.567	100%	2.583.805.939	Diskominfo
								100%	748.950.000	100%	763.929.000	100%	779.207.580	100%	794.791.732	100%	810.687.566	100%	3.897.565.878	Setdakab
	1	25	2	Program Layanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	1.177.750.000		1.201.305.000		1.225.331.100		1.249.837.722		1.274.834.476	100%	6.129.058.298	Diskominfo
	1	25	3	Program Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	69.850.000	100%	71.247.000	100%	72.671.940	100%	74.125.379	100%	75.607.886	100%	363.502.205	Setdakab
	1	25	4	Program Optimaliasasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	1.720.000.000		1.754.400.000		1.789.488.000		1.825.277.760		1.861.783.315		8.950.949.075	Setdakab/DPM TSP
	1	25	5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%		100%	65.000.000		66.300.000		67.626.000		68.978.520		70.358.090		338.262.610	Arsip dan Pustaka
	2			**Urusan Pilihan**					**14.399.794.069**		**16.690.723.321**		**19.533.157.995**		**20.376.741.685**		**20.897.173.094**		**91.897.590.164**	
	2	**01**		**Pertanian**					**4.308.597.605**		**4.944.769.557**		**6.572.612.339**		**6.835.516.833**		**7.108.937.506**		**29.770.433.841**	
	2	01	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	%			202.097.605		206.139.557		214.385.139		222.960.545		231.878.967		1.077.461.813	Distanak & Disbun
								100%	7.097.605	100%	7.239.557	100%	7.529.139	100%	7.830.305	100%	8.143.517	100%	37.840.124	Distanak
								1 Keg	150.000.000	1 Keg	153.000.000	1 Keg	159.120.000	1 Keg	165.484.800	1 Keg	172.104.192	1 Keg	799.708.992	Disbun
									45.000.000		45.900.000		47.736.000		49.645.440		51.631.258		239.912.698	DKP
	2	01	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		%		100%	185.000.000	100%	188.700.000	100%	196.248.000	100%	204.097.920	100%	212.261.837	100%	986.307.757	Distanak/ Disbun & DKP
					Meningkatnya Ketahanan Pangan	%		100%	35.000.000	100%	35.700.000	100%	37.128.000	100%	38.613.120	100%	40.157.645	100%	186.598.765	Distannak
					Meningkatnya Ketersediaan pangan utama (%)	%		80%	150.000.000	85%	153.000.000	90%	159.120.000	95%	165.484.800	100%	172.104.192	100%	799.708.992	Kelautan dan Perikanan
	2	01	3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pemasaran produk hasil pertanian dengan baik	%		100%	-	100%	200.000.000	100%	208.000.000	100%	216.320.000	100%	224.972.800	100%	849.292.800	Distanak
	2	01	4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produktifitas Pertanian/Pekerbunan	%		100%	11.500.000	100%	11.730.000	100%	12.199.200	100%	12.687.168	100%	13.194.655	100%	61.311.023	Distanak
	2	01	5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		%		100%	3.100.000.000	100%	3.162.000.000	100%	3.288.480.000	100%	3.420.019.200	100%	3.556.819.968	100%	16.527.319.168	Distanak & Disbun
					Meningkatnya Produktifitas Pertanian/Pekerbunan	%		100%	900.000.000	100%	918.000.000	100%	954.720.000	100%	992.908.800	100%	1.032.625.152	100%	4.798.253.952	Distannak

					Meningkatnya Produktifitas Pertanian/Pekerbunan	%		9 Keg	2.200.000.000	9 Keg	2.244.000.000	9 Keg	2.333.760.000	9 Keg	2.427.110.400	9 Keg	2.524.194.816	9 Keg	11.729.065.216	Disbun
	2	01	6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Produktifitas Pertanian/Pekerbunan	%			370.000.000		-		-		-		500.000.000		870.000.000	Disbun
	2	01	7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan SDM tenaga teknis dan tenaga penyuluh dengan baik	%		100%	60.000.000	100%	61.200.000	100%	937.700.000	100%	975.208.000	100%	1.014.216.320	100%	3.048.324.320	Distanak
	2	01	8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya Produktifitas Peternakan	%		100%	40.000.000	100%	40.800.000	100%	42.432.000	100%	44.129.280	100%	45.894.451	100%	213.255.731	Distanak
	2	01	9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Produktifitas Peternakan	%		100%	700.000.000	100%	714.000.000	100%	742.560.000	100%	772.262.400	100%	803.152.896	100%	3.731.975.296	Distanak
	2	01	10	Program Peningkatan Kelembagaan RDK/RDKK Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk yang baik	%		100%	10.000.000	100%	10.200.000	100%	10.608.000	100%	11.032.320	100%	11.473.613	100%	53.313.933	Distanak & Disbun
	2	01	11	Program Pemberdayaan SDM Pertanian/Perkebunan	Peningkatan SDM tenaga teknis dan tenaga penyuluh dengan baik	%		100%	50.000.000	1 Keg	51.000.000	2 Keg	53.040.000	2 Keg	55.161.600	2 Keg	57.368.064	2 Keg	266.569.664	Disbun
	2	01	12	Program Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian	Peningkatan SDM tenaga teknis dan tenaga penyuluh dengan baik	%		100%	-	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	108.160.000	100%	112.486.400	100%	424.646.400	Distanak
	2	01	13	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	%		100%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.400.000	100%	780.400.000	Distanak
	2	01	14	Program Peningkatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	%		100%	-	100%	-	100%	150.000.000	100%	156.000.000	100%	162.240.000	100%	468.240.000	Distanak & Disbun
	2	01	15	Program Penguatan Kelembagaan Pertanian/Perkebunan	Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan	%		0%	-	0%	-	3 Keg	156.000.000	4 Keg	162.240.000	5 Keg	168.729.600	6 Keg	486.969.600	Disbun
	2	01	16	Program Rehabilitasi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas Tanaman Pertanian dan Perkebunan	%		N/A	-	20%	250.000.000	20%	260.000.000	20%	270.400.000	20%	281.216.000	80%	1.061.616.000	Distannak/Disbun
	2	**03**		**Energi dan Sumberdaya Mineral**					**265.500.000**		**270.810.000**		**281.642.400**		**292.908.096**		**304.624.420**		**1.415.484.916**	
	2	03	1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan pertambangan	%			62.000.000	100%	63.240.000	100%	65.769.600	100%	68.400.384	100%	71.136.399		330.546.383	Setdakab
	2	03	2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terbinanya bidang energi dan listrik	%			203.500.000	100%	207.570.000	100%	215.872.800	100%	224.507.712	100%	233.488.020		1.084.938.532	Setdakab
	2	**04**		**Pariwisata**					**1.575.000.000**		**1.606.500.000**		**1.670.760.000**		**1.737.590.400**		**1.807.094.016**		**8.396.944.416**	
	2	04	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata	%			75.000.000	100%	76.500.000	100%	79.560.000	100%	82.742.400	100%	86.052.096		399.854.496	Disbudparpora
	2	04	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata	%			1.500.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.591.200.000	100%	1.654.848.000	100%	1.721.041.920		7.997.089.920	Disbudparpora
	2	**05**		**Kelautan dan Perikanan**					**1.600.000.000**	**-**	**2.143.751.000**	**-**	**2.229.501.040**	**-**	**2.415.576.710**	**-**	**2.512.199.778**	**-**	**10.901.028.528**	
	2	05	1	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Berkurangnya kasus IUU fishing (%)	%		-	-		100.000.000		104.000.000		108.160.000		112.486.400		424.646.400	Kelautan dan Perikanan
	2	05	2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	%		762,28	650.000.000		663.000.000		689.520.000		717.100.800		745.784.832		3.465.405.632	Kelautan dan Perikanan
	2	05	3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap(ton)	%		2262,74	600.000.000		612.000.000		636.480.000		661.939.200		688.416.768		3.198.835.968	Kelautan dan Perikanan

	2	05	4	Program pengembangan Penyuluhan perikanan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan yang mengalami kenaikan produksi pasca pendampingan dan pembinaan (kelompok)	%		-	-		161.751.000		168.221.040		159.468.710		165.847.458		655.288.208	Kelautan dan Perikanan
	2	05	5	Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya nilai hasil produksi perikanan (Rp)	%			50.000.000		51.000.000		53.040.000		58.344.000		60.677.760		273.061.760	Kelautan dan Perikanan
	2	05	6	Program pengembangan data statistik perikanan	Tersedianya data/informasi statistik perikanan daerah (dokumen)	%			-	1 Dok	50.000.000	dokume	52.000.000	dokume	60.500.000	dokume	62.920.000	dokume	225.420.000	Kelautan dan Perikanan
	2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kawasan yang dilakukan rehabilitasi dan konservasi (ha)	%			-	2 Kwsn	200.000.000	3 kawasar	208.000.000	3 kawasar	300.000.000	3 kawasar	312.000.000	1 kawasa	1.020.000.000	Kelautan dan Perikanan
	2	05	8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya	%			300.000.000		306.000.000		318.240.000		350.064.000		364.066.560		1.638.370.560	Kelautan dan Perikanan
	2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kawasan Wisata Rawa Tripa	Meningkatnya kawasan yang dilakukan rehabilitasi dan konservasi (ha)					1 Kwsn	1.000.000.000	1 kawasan	1.040.000.000	1 kawasa n	1.081.600.000	1 kawasa n	1.124.864.000	4 kawasa n	4.246.464.000	Kelautan dan Perikanan
	2	**06**		**Perdagangan**					**5.740.456.464**		**5.742.946.464**		**5.748.026.064**		**5.753.308.848**		**5.758.802.943**		**28.743.540.783**	
	2	06	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terselenggaranya pengawasan untuk konsumen pedagang untuk menciptakan dunia usaha yang tertib sesuai dengan aturan yang berlaku	%		100%	124.500.000	100%	126.990.000	100%	132.069.600	100%	137.352.384	100%	142.846.479	100%	663.758.463	Disperindagko p dan UKM
	2	06	2	Pogram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terselenggaranya kegiatan pasar murah bagi masyarakat ekonomi lemah	%		100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	5.615.956.464	100%	28.079.782.320	Disperindagko p dan UKM
	2	**07**		**Perindustrian**					**900.240.000**		**1.062.546.300**		**1.105.048.152**		**1.149.250.078**		**1.195.220.081**		**5.412.304.611**	
	2	07	1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pembinaan kepada industri kecil dan menengah	%		100%	650.240.000	100%	663.244.800	100%	689.774.592	100%	717.365.576	100%	746.060.199	100%	3.466.685.166	Disperindagko p dan UKM
	2	07	2	Pogram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan SDM yang berkualitas	%		100%	-	100%	144.301.500	100%	150.073.560	100%	156.076.502	100%	162.319.562	100%	612.771.125	Disperindagko p dan UKM
	2	07	3	Pogram Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Meningkatkan desain dan mutu produk serta mempromosikan hasil industri yang potensial	%		100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	265.200.000	100%	275.808.000	100%	286.840.320	100%	1.332.848.320	Disperindagko p dan UKM
	2	**08**		**Transmigrasi**					**10.000.000**		**919.400.000**		**1.925.568.000**		**2.192.590.720**		**2.210.294.349**		**7.257.853.069**	
	2	08	1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	%		-	10.000.000	-	10.200.000	-	1.500.000.000	-	1.750.000.000	-	1.750.000.000	-	5.020.200.000	Disnakertrans
	2	08	2	Program Transmigrasi Lokal	Terbangunnya kawasan transmigrasi lokal	%		-	-	-	409.200.000	-	425.568.000	-	442.590.720	-	460.294.349	-	1.737.653.069	Disnakertrans
	2	08	3	Program Pengembangan Transmigrasi dan perencanaan RTSP	Terwujudnya rencana tataruang satuan permukiman kawasan transmigrasi	%		-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	Disnakertrans
	TOTAL								**552.183.715.466**		**591.210.075.580**		**617.750.069.139**		**619.553.053.319**		**643.220.088.789**		**3.016.552.985.077**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nagan raya untuk Tahun 2017-2022. Secara rinci dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

No	Indikator	Kinerja Standar (satuan)	Kondisi Awal	Target Tahun ke -					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor							
4	Nilai LAKIP	Nilai	C	CC-	CC	CC+	B	BB	BB
5	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	7.545	9.000	9.500	10.000	10.500	11.500	11.500
6	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	23	23	40	60	80	100	100
7	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	50	50	60	70	80	90	90
8	Angka Melek Huruf	%	93,41	94,34	95,29	96,24	97,20	98,17	98,17
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,32	8,41	8,49	8,57	8,66	8,66
10	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	37,51	45,01	54,01	64,82	77,78	93,34	93,34

No	Indikator	Kinerja Standar (satuan)	Kondisi Awal	Target Tahun ke -					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	53,16	58,48	64,32	70,76	77,83	85,61	85,61
12	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,70	68,80	68,94	68,98	69,03	69,24	69,24
13	Angka kematian ibu	/100000 KH	99,63	98,93	98,72	97,70	96,37	96,01	96,01
14	Angka kematian bayi	/1000 KH	5,65	5,46	5,39	4,92	4,20	4,09	4,09
15	Angka kematian balita	/1000 KH	37,20	37,07	36,76	36,68	36,43	36,28	36,28
16	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
17	Angka Kemiskinan	%	19,17	18,21	17,30	16,44	15,61	14,83	14,83
18	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29,00	35,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
19	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	46,56	51,22	55,88	60,54	65,20	69,86	69,86
20	Angka Pengangguran	%	3,79	3,60	3,42	3,25	3,09	2,93	2,93
21	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	10,06	10,56	11,06	11,56	12,06	12,56	12,56

No	Indikator	Kinerja Standar (satuan)	Kondisi Awal	Target Tahun ke -					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170.151,00	178.504,59	187.591,00	196.971,00	206.819,00	217.160,00	217.160,00
24	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	243,54	280,07	322,08	370,39	425,95	489,85	489,85
25	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	3,00	5,00	5,00	7,00	7,00	8,00	8,00
26	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17.597,00	17.917,00	18.096,17	18.277,13	18.459,90	18.644,50	18.644,50
27	Persentase akses sanitasi	%	42,00	46,20	50,82	55,90	61,49	67,64	67,64
28	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan	%	20,00	20,00	30,00	45,00	70,00	85,00	85,00
29	Persentase ruang terbuka hijau	%	7,80	7,80	12,00	17,00	25,00	30,00	30,00

Tabel. 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,40	4,71	4,99	5,29	5,61	5,94	5,94
2	PDRB per kapita ADHB	Rp (Juta)	39,07	39,67	40,27	40,87	41,47	42,07	42,07
3	Jumlah Penduduk Miskin	%	19,17	18,02	16,94	15,92	14,97	14,07	14,07
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	67,66	67,93	68,47	68,95	69,57	70,20	70,20
5	Angka melek huruf	%	93,41	94,34	95,29	96,24	97,20	98,17	98,17
6	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,24	8,32	8,41	8,49	8,57	8,66	8,66
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	14,23	14,37	14,52	14,66	14,81	14,81
8	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,70	68,81	68,95	68,98	69,03	69,24	69,24
9	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
10	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	37,34	36,54	35,85	34,74	35,05	33,93	33,93

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00
12	Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	orang	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00
13	Perusahaan peserta jamsostek	orang	89,00	102,00	109,00	113,00	116,00	117,00	117,00
14	kasus kecelakaan kerja	%	16,00	12,00	8,00	4,00	2,00	0,00	0,00
15	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10,06	10,56	11,06	11,56	12,06	12,56	12,56
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
18	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
19	Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB	%	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
20	Kontribusi sektor konstruksii terhadap PDRB	%	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
21	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
22	Kontribusi sektor Transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
23	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB	%	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
25	Kontribusi sektor jasa keuangan dan informasi terhadap PDRB	%	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
26	Kontribusi sektor Real Estat terhadap PDRB	%	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
27	Kontribusi sektor jasa perusahaan terhadap PDRB	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
28	Kontribusi sektor adminirtrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial terhadap PDRB	%	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
29	Kontribusi sektor pendidikan terhadap PDRB	%	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
30	Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB	%	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
31	Kontribusi sektor jasa lainnya terhadap PDRB	%	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
32	Produksi sektor pertanian padi dan palawija	ton	190.543	199.043	207.543	216.043	224.543	233.043	233.043
33	Produksi pertanian padi	ton	170.151	178.505	187.591	196.971	206.819	217.160	217.160
34	Produksi sektor perkebunan	Ton	128.064	143.064	158.064	173.064	188.064	203.064	203.064
35	Produksi perkebunan sawit	ton	316.164	363.589	418.127	480.846	552.973	635.919	635.919

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tindak pidana yang tertangani	%	64,84	66,14	67,46	68,81	70,18	71,59	71,59
2	Rasio ketergantungan	Indeks	50,96	49,94	48,94	47,96	47,00	46,06	46,06
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1.	**Pendidikan**								
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	23,83	24,19	24,63	25,00	25,62	26,08	26,08
1.2.	Angka partisipasi kasar	%							
	APK SD/MI/Paket A	%	109,47	109,03	108,28	107,34	106,19	103,75	103,75
	APK SMP/MTs/Paket B	%	106,90	106,46	106,31	105,86	105,12	104,67	104,67
	APK SMA/SMK/	%	86,02	86,57	86,81	87,35	89,20	89,74	89,74
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%							
	Tamat SD Sederajat	%	26,70	27,22	28,43	28,94	30,46	30,97	30,97
	Tamat SLTP sederajat	%	16,87	17,38	19,19	21,70	23,71	24,22	24,22

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Diploma I/II/III	%	3,33	3,43	3,63	4,13	4,43	4,93	4,93
	Diploma IV/S1	%	3,72	4,22	5,42	5,92	7,43	7,93	7,93
	S2/S3	%	0,59	0,74	0,89	1,09	1,39	1,59	1,59
1.4.	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,73	98,78	98,83	98,88	98,93	99,08	99,08
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,83	88,88	88,92	88,97	89,01	89,15	89,15
1.5.	Angka partisipasi sekolah								
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,36	99,37	99,40	99,41	99,43	99,48	99,48
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,11	99,12	99,15	99,16	99,18	99,23	99,23
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):								
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	91,15	91,33	91,79	93,16	93,63	93,77	93,77
1.9.	Fasilitas Pendidikan:								
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	85,70	94,27	94,74	96,16	96,64	96,79	96,79

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	87,60	88,91	90,25	91,60	92,98	94,37	94,37
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	69,82	69,96	70,31	72,07	73,15	74,73	74,73
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	33,71	33,78	33,94	34,79	35,31	36,07	36,07
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	75,66	74,82	73,19	65,02	58,00	54,24	54,24
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	81,63	80,79	79,19	71,17	64,24	60,62	60,62
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	71,18	70,32	68,67	60,39	53,30	49,44	49,44
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio Index	69,96	69,10	67,45	59,13	52,02	48,14	48,14
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	37,51	45,01	54,01	64,82	77,78	93,34	93,34
2.	**Kesehatan**								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	5,18	4,99	4,91	4,44	3,70	3,58	3,58
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran	4,85	4,66	4,58	4,09	3,36	3,23	3,23
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	36,90	36,78	36,46	36,37	36,12	35,97	35,97
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	13,86	13,69	13,26	12,59	11,98	11,79	11,79

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	99,68	98,98	98,78	97,76	96,42	96,07	96,07
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	19,76	19,79	19,90	20,05	20,30	20,33	20,33
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk							
	Puskesmas	/1000 Penduduk	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Poliklinik	/1000 Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pustu	/1000 Penduduk	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Dokter Umum	/100.000 Penduduk	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
	Dokter Spesialis	/100.000 Penduduk	0,03	0,03	0,09	0,28	0,83	0,84	0,84
	Dokter Gigi	/100.000 Penduduk	0,02	0,02	0,06	0,18	0,53	0,54	0,54
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3,31	3,31	3,33	3,36	3,40	3,41	3,41
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	52,25	52,33	52,62	53,01	53,68	53,76	53,76
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,11	93,25	93,77	94,47	95,65	95,79	95,79

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	77,33	77,45	77,87	78,46	79,44	79,56	79,56
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	91,62	91,76	92,26	92,95	94,12	94,26	94,26
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	18,76	18,79	18,89	19,03	19,27	19,30	19,30
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	49,03	49,10	49,37	49,74	50,36	50,44	50,44
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	102,19	101,89	95,30	91,08	86,65	85,96	85,96
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	2,56	2,37	2,28	2,25	2,20	2,04	2,04
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,38	63,47	63,82	64,30	65,10	65,20	65,20
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	68,33	68,43	68,81	69,32	70,19	70,29	70,29
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2.26.	Angka kejadian Malaria	/100.000 penduduk	2,39	2,29	2,23	1,98	1,81	1,33	1,33
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	84,73	85,71	86,18	86,82	87,91	88,04	88,04
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,50	94,58	95,10	95,81	97,01	97,15	97,15

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	92,12	93,18	93,69	94,39	95,57	95,71	95,71
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	71,27	72,09	73,93	76,71	78,43	78,55	78,55
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	81,68	82,62	84,73	87,91	89,89	90,02	90,02
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	91,13	91,27	92,68	95,23	96,42	96,56	96,56
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100,00
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1.	**Pekerjaan Umum:**								
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		243,54	280,07	322,08	370,39	425,95	489,85	489,85
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	1,54	1,73	1,95	2,19	2,46	2,75	2,75
3.1.3.	Persentase akses air minum Perpipaan	%	42	46,2	50,82	55,90	61,49	67,64	67,64
3.1.4.	Persentase akses air minum non Perpipaan	%	0	0	10	20	30	35	35
3.1.5.	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17.597	17.917	18.096	18.277	18.460	18.645	18.645
3.1.6.	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	852	1070	1270	1470	1670	1670
3.1.7.	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	35	50	60	70	80	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	**Penataan Ruang:**								
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	7,8	7,8	12	17	25	30	30
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	0,07	0,074	0,077	0,081	0,085	0,089	0,089
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
3.1.6.	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	852	1070	1270	1470	1670	1670
3.1.7.	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	35	50	60	70	80	80
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98,75	98,80	98,85	99,10	99,44	99,49	99,49
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	**Sosial**								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	24,83	24,95	25,07	25,20	25,33	25,45	25,45
	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang	97,12	97,17	97,22	97,46	97,80	97,85	97,85
	Penyandang Disabalitas (Alat Bantu)	Orang	11,20	11,21	17,37	24,36	39,06	54,70	54,70
	Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	Anak	4	4	4	4	4	4	4,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit	15,57	18,68	22,41	26,90	32,28	38,73	38,73
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,74	28,49	34,19	41,02	49,23	59,07	59,07
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	23,74	28,49	34,18	41,02	49,22	59,07	59,07
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1.	**Tenaga Kerja**								
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	/ 10.000 Penduduk	332,33	398,79	478,55	574,26	689,11	826,93	826,93
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,27	52,37	52,48	52,58	52,69	52,79	52,79
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16,00	16,00	16,80	17,64	18,52	19,45	19,45
2.4.	Rasio KDRT	%	N/A	0,30	0,29	0,27	0,26	0,24	0,24
3.	**Pangan**								
3.1.	Ketersediaan pangan utama	kg	110,598	116,128	120,128	124,128	128,128	132,128	132,128

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**Lingkungan Hidup**								
	Kabupaten/Kota								
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/ tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	73,80	88,56	89,62	90,69	91,78	92,88	92,88
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	88,51	88,95	90,29	92,54	94,40	95,34	95,34
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	85,28	86,99	88,73	90,32	92,58	94,43	94,43
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%							
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok							
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4.	Persentase LSM aktif	%							
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%							
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%							
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%							
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%							
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,05	2,15	2,26	2,37	2,49	2,62	
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)								
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak							
8.9.	Rasio Akseptor KB	%							
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	81,91	82,6	83,2	83,9	84,6	85,2	85,2
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	/1.000 perempuan							
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	**Perhubungan**								
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Trayek/Frek							
	Angkutan Darat	Trayek							
	Angkutan Udara	Frek							
9.2.	Rasio ijin trayek	Indeks	2,0	2	3	3	3	3	
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit							
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit							
	Jumlah Bandar Udara	Unit	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	4	4	4	4	4	4	
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%							
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%							
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%							
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	6,25	6,38	6,50	6,63	6,77	6,90	6,90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang							
	Angkutan Udara	Orang	26.640	26.693	26.707	26.747	26.792	26.846	26.846
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang							
	Bandara	Kg	159.840	160.160	160.240	160.480	160.753	161.074	161.074
10.	**Komunikasi dan Informatika**								
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,40	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,51
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	80	80	85	90	95	95
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	74	#REF!	#REF!	75	80	85	85
11.	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	43,68	50,68	57,68	64,68	71,68	78,68	78,68
	Persentase koperasi tidak aktif	%	59,47	49,32	42,32	35,32	28,32	21,32	21,32
12.	**Penanaman Modal**								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5,33	6	6	6	6	7	7
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	500,00	600	700	800	900	1.000	1.000

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	557,54	758	958	1.158	1.358	1.558	1.558
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	148,52	178,52	208,52	238,52	268,52	298,52	298,52
13.	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
13.1.	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	10	14	18	20	22	23	23
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	84,00	88,20	89,96	90,86	92,68	94,53	94,53
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	30,45	31,97	43,16	50,93	53,22	55,99	55,99
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	2	3	8	10	12	15	15
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	5	5	7	8	10	10	10
14.	**Statistik**								
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3.	Buku ”PDRB”	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	**Persandian**								
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.	**Kebudayaan**								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festifal	2	3	4	5	6	6	6
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	3	4	4	5	5	5
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		0	0	0	1	2	3	3
17.	**Perpustakaan**								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,781	1,798	1,816	1,835	1,85	1,87	1,87
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah								
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk							
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	1.597	1.601	1.606	1.614	1.627	1.631	1.631
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.877	2.884	2.894	2.907	2.932	2.940	2.940
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	1	1	2	2	2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	**Kearsipan**								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2,22	4,44	6,67	8,89	11,11	11,11	11,11
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1	1	2	2	3	3	3
Layanan Urusan Pilihan									
1.	**Pariwisata**								
1.1.	Kunjungan wisata	%	90,05	90,50	92,76	96,00	97,44	97,93	97,93
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	15,00	15,08	15,45	16,30	16,55	16,63	16,63
2.	**Pertanian**								
2.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	6.858	7.108	7.358	7.608	7.858	8.858	8.858
2.2.	Cakupan bina kelompok petani	%	93,63	94,63	95,63	96,63	97,63	98,63	98,63
3.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
3.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%							
3.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks							
3.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**Perdagangan**								
4.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
4.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
5.	**Perindustrian**								
5.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%							
6.	**Transmigrasi**								
6.1.	Jumlah transmigran lokal	Lokasi	4	5	5	5	6	6	6
6..2.	Jumlah transmigrasi	UPT	16	16	16	16	16	16	16
7.	**Kelautan dan Perikanan**								
7.1.	Produksi perikanan (Ton Produksi Persentase Terhadap Target Produksi Aceh)	%							
	Produksi perikanan ikan	Ton	2.532,77	2.916,77	3.300,77	3.684,77	4.068,77	4.452,77	4.452,77
	- Perikanan Tangkap	Ton	1.863,05	2.115	2.367	2.619	2.871	3.123	3.123
	- Perikanan Budidaya	Ton	669,7	802	934	1.066	1.198	1.330	1.330
7.2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	90	92	94	96	98	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	**Peternakan**								
8.1.	Pupulasi ternak besar (sapi dan kerbau**)**	ekor	20.824	21.377	21.930	22.483	23.036	23.589	23.589
8.2	Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	12.169	12.649	13.129	13.609	14.089	14.569	14.569
Penunjang Urusan									
1.	**Perencanaan Pembangunan**								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	%							
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK	%							
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%							
2.	**Keuangan**	**Kab/Kot**							
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Persentase SILPA	%							
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%							
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	22,46	11,23	5,62	2,81	1,40	0,70	0,70
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20	20	20	20	20	20
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10	10	10	10	10	10
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%							
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10	10	10	10	10	10	10
2.9.	Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan								
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	16,79	16,87	17,30	18,25	18,52	18,61	18,61
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	40,20	40,40	41,41	43,69	44,34	44,57	44,57
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		526	529	542	572	581	583	583

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		35	35	36	38	38	38	38
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3.152	3.168	3.247	3.425	3.477	3.494	3.494
4.	**Penelitian dan pengembangan**								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	25	30	36	43	52	62	62
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	N/A	N/A	15	20	25	30	30
	Penerapan SIDa:	Sudah/Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	N/A	N/A	N/A	10	15	20	20
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	N/A	N/A	N/A	10	15	20	20
5.	**Pengawasan**								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%							
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%							
5.3.	Jumlah temuan BPK	Temuan							
6.	**Sekretariat Dewan**								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda,	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1.	**Pendidikan**								
1.1.	Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	23	23	40	60	80	100	100
1.2.	Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%	82	83	85	90	91	91	91
1.3.	Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%	79	80	82	86	87	88	88
1.4.	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	10	10	11	11	11	11	11
2.	**Kebudayaan**								
2.3.	Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	6	6	6	7	7	7	7
2.4.	Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	73	75	76	81	82	82	82
2.5.	Persentase keputusan, seruan, himbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah dan	%	82	83	85	90	91	91	91
2.8.	Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni , Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	34	34	35	37	37	38	38

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Keagamaan**								
3.2.	Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	454	454	454	454	454	454	454
3.3.	Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	204	207	212	224	227	228	228
3.4.	Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	32	32	33	35	35	35	35
3.5.	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	48	49	50	53	53	54	54
3.6.	Pembinaan Dinul Islam	Orang	267	271	278	293	298	299	299
3.7.	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	51	52	53	56	57	57	57
3.11.	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	158	160	164	174	176	177	177
3.11.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	7.545	9.000	9.500	10.000	10.500	11.500	11.500
3.11.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	7.545	9.000	9.500	10.000	10.500	11.500	11.500
4.	**Kesatuan dan Perdamaian**								
4.1.	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	N/A						
4.2.	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	N/A						
4.4.	Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	N/A						

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5.	Jumlah Rumah Korban Konflik Yang di Bangun	Unit	N/A						
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan							
1.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan							
	Jumlah LSM	LSM	2	2	3	4	5	5	

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan RayaTahun 2017 – 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ini dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 kemudian menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan RKPK setelah berakhirnya dokumen RPJM ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi dan misi dari Bupati dan wakil Bupati terpilih selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nagan Raya untuk tahun 2018 hingga tahun 2022.

Pada masa berakhirnya periode Bupati Nagan Raya (2017-2022) dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka RPJM Kabupaten Nagan Raya (2017-2022) dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk penyusunan program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya periode berikutnya terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban menyesuaikan Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Nagan Raya. Renstra tersebut harus mendapat persetujuan Bappeda sebelum

ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2. Dalam hal pelaksanaan, RPJM Kabupaten Nagan Raya (2017-2022) akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya yang telah disesuaikan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan kembali Renstra yang telah disusun dan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akan disusun.
3. RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 akan menjadi dasar penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah selama pemerintahannya. Hasil evaluasi kinerja Kepala Daerah menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan.

Dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka keberhasilan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu **"MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM".**

BUPATI NAGAN RAYA,

H.M. JAMIN IDHAM, SE